



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR

Dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. Untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah antara pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. Visi Pembangunan;
- b. Misi Pembangunan;
- c. Arah Kebijakan Pembangunan; dan
- d. Sasaran Pokok Pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

- (1) RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
- BAB VI : Penutup

- (2) RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.23.A/2025)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kesultanan Siak yang telah ada semenjak abad ke-18. Secara historis, Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah yang terdiri dari tiga kenegerian yaitu Negeri Kubu, Negeri Bangko, dan Negeri Tanah Putih yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Sejarah Rokan Hilir kemudian berkembag ketika pada tahun 1901, Belanda mulai membangun pusat pemerintah di Kota Bagansiapiapi dan diberi nama dengan Kewedanaan Bagansiapiapi yang kemudian menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis. Dinamika sejarah ini menjadi sebab kayanya Kabupaten Rokan Hilir dengan tradisi, suku, dan juga warisan kebudayaan.

Berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera, membuat Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi kekayaan alam. Selain dihiasi oleh pulau-pulau dengan nilai keindahan yang tinggi, Kabupaten Rokan Hilir juga dikenal dengan nama negeri seribu kubah yang menjadi identitas kebudayaan fisik dari Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, Kabupaten Rokan Hilir selalu menyedot perhatian wisatawan internasional maupun lokal melalui acara Bakar Tongkang yang diadakan setiap tahun. Selain itu, Kabupaten Rokan Hilir juga dikenal dengan kekayaan suku bangsa yang hidup secara rukun berdampingan. Dengan kata lain, Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang berhasil hadir disebabkan nilai-nilai keunikan dan kelebihannya sebagai suatu wilayah.

Dengan potensi, sumber daya dan prestasi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Pembuatan kebijakan pembangunan yang memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan ini menjadi panduan dalam mengarahkan dan menekankan strategi pembangunan daerah secara baik agar membentuk landasan perkembangan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, peran signifikan dari perencanaan pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah.

Atas kebutuhan perencanaan ini, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah suatu proses perencanaan pembangunan bersifat menyeluruh dengan tujuan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana pembangunan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemantauan dan evaluasi adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan nasional. PP No. 39 Tahun 2006 menegaskan bahwa untuk mendukung pengendalian pembangunan, perlu dilakukan monitoring guna memantau perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dan mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pencapaian kegiatan (*output/outcome*) dari rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir ini telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18, yang menetapkan bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD sebelumnya. RPJPD diarahkan sebagai langkah untuk mendukung ketercapaian tujuan pembangunan nasional dengan fokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan, dengan manusia sebagai pusat objek dan sekaligus subjek pembangunan. RPJPD Kabupaten Rokan Hilir pada dasarnya merupakan upaya untuk merincikan dan menggambarkan visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah dalam jangka panjang 20 tahun yang mengacu pada RPJPN dan RTRW. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan prinsip transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Terkait hal tersebut, disusunlah dokumen acuan perencanaan untuk Kabupaten Rokan Hilir. Perencanaan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dengan memperhitungkan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kabupaten Rokan Hilir untuk dua puluh tahun mendatang dapat direalisasikan melalui penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
6. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
16. Peraturan Daerah) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

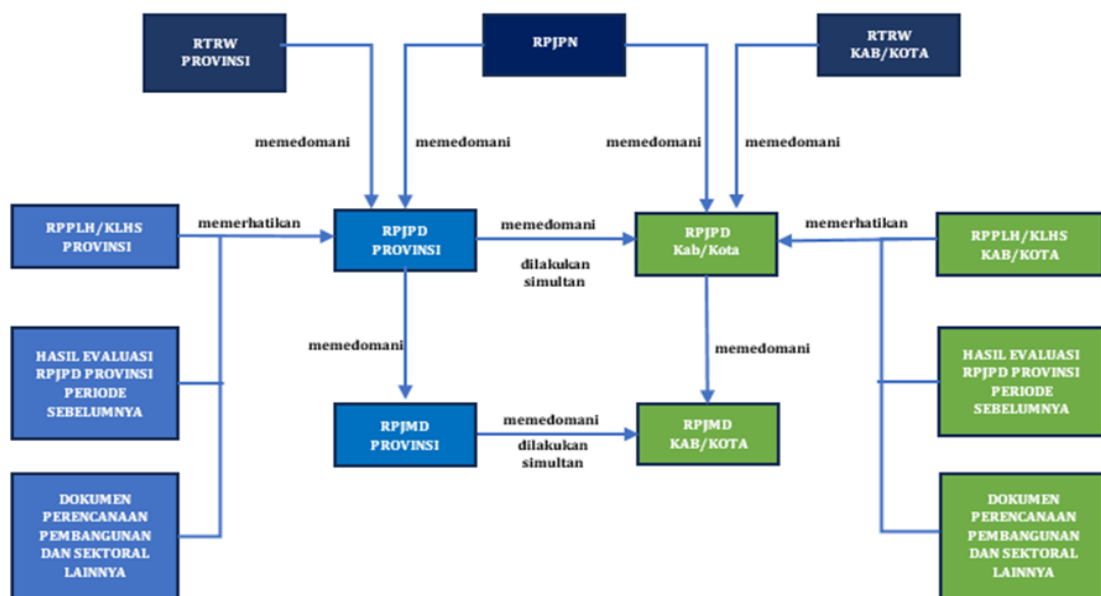
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPPLH berfungsi memastikan pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sedangkan KLHS menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi RPJPD dengan dokumen lainnya diwujudkan melalui mekanisme yang terstruktur. RPJPD menjadi dokumen induk yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahun. RPJMD kemudian diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Keterkaitan ini memastikan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan secara terpadu, strategis, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga mendukung visi pembangunan jangka panjang yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Gambar I.1

Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



a. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Rokan Hilir dan RPJPN

RPJPD Kabupaten Rokan Hilir perlu mengacu pada RPJPN untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang langsung terkait dengan wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan harus didasarkan pada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Rokan Hilir dan RPJPD Provinsi Riau

RPJPD Kabupaten Rokan Hilir perlu mengikuti dan menyelaraskan dengan RPJPD Provinsi Riau untuk menciptakan sinergi dan keselarasan dalam kebijakan dan prioritas pembangunan, sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam Surat Edaran Gubernur terkait penyelarasan dokumen RPJPD Provinsi Riau dengan RPJPD Kabupaten/Kota. Prioritas pembangunan daerah harus mempertimbangkan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Riau agar tercipta sinkronisasi kebijakan yang efektif. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Riau dan pembangunan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Rokan Hilir

Penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir harus mempertimbangkan RTRW Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RTRW. RTRW berfungsi sebagai panduan dalam menentukan lokasi pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Pendekatan ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan, di mana perhatian khusus diberikan pada pembangunan di kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan pada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu, mempertimbangkan kondisi dan potensi wilayah, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Rokan Hilir dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir

Dokumen RPJPD memberikan arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD. Visi, misi, dan program prioritas kepala daerah harus memedomani RPJPD, dengan demikian tetap terjaga kesinambungan pembangunan daerah selama 20 tahun walaupun terdapat perbedaan kepala daerah. RPJMD akan menjadi pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah dimuat dalam RPJPD, sehingga visi RPJPD dapat diwujudkan di akhir masa pembangunan jangka panjang. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan kepada pemangku kepentingan dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen ini memiliki peran penting dalam membimbing upaya pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati secara bersama. Melalui inisiatif ini, diharapkan tercipta sinergi, koordinasi, dan saling melengkapi di antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, RPJPD diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilukada;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Rokan Hilir, analisis isu-isu strategis, visi dan misi nasional, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir;
5. Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
6. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati setiap 5 tahun;
7. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta mencantumkan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025.

BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB IV VISI DAN MISI

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan dengan masing-masing menegaskan prioritas.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan yang perlu menjadi fokus setiap penanggung jawab dari unit pelaksana terkait serta menghimpun saran agar implementasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir dapat terlaksana dengan baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rokan Hilir menjadi sebuah upaya yang tidak hanya kompleks, tetapi juga krusial dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Proses perencanaan ini memiliki tujuan mendasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi sebuah panduan strategis, melainkan juga instrumen untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Analisis kebijakan pembangunan yang mendalam menjadi landasan utama, memungkinkan penentuan arah kebijakan yang tepat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan.

Pengalaman perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya menjadi cermin bagi penyusunan RPJPD Rokan Hilir ke depannya. Dengan meninjau capaian pembangunan, terutama dalam perencanaan jangka panjang 20 tahun, akan dapat ditemukan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Dokumen RPJPD bukan hanya sekadar rencana, melainkan menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Sehingga, relevansi dan ketepatan arah kebijakan dalam RPJPD Rokan Hilir menjadi kunci dalam memastikan pembangunan yang berdampak positif hingga tahun 2045.

Analisis kebijakan pembangunan menjadi landasan penting dalam menyajikan gambaran umum kondisi daerah. Dalam analisis tersebut, terdapat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, dan potensi pengembangan wilayah. Pemahaman mendalam terhadap capaian pembangunan selama 20 tahun terakhir menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, RPJPD Rokan Hilir diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat mengakomodasi dinamika dan aspirasi masyarakat di masa depan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi serta demografi memiliki relevansi yang kuat. Di mana kondisi geografi menjabarkan dasar fisik suatu wilayah atau daerah, sedangkan untuk kondisi demografi mendeskripsikan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah atau daerah tersebut. Kedua hal tersebut sangatlah penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2.1.1 Geografi

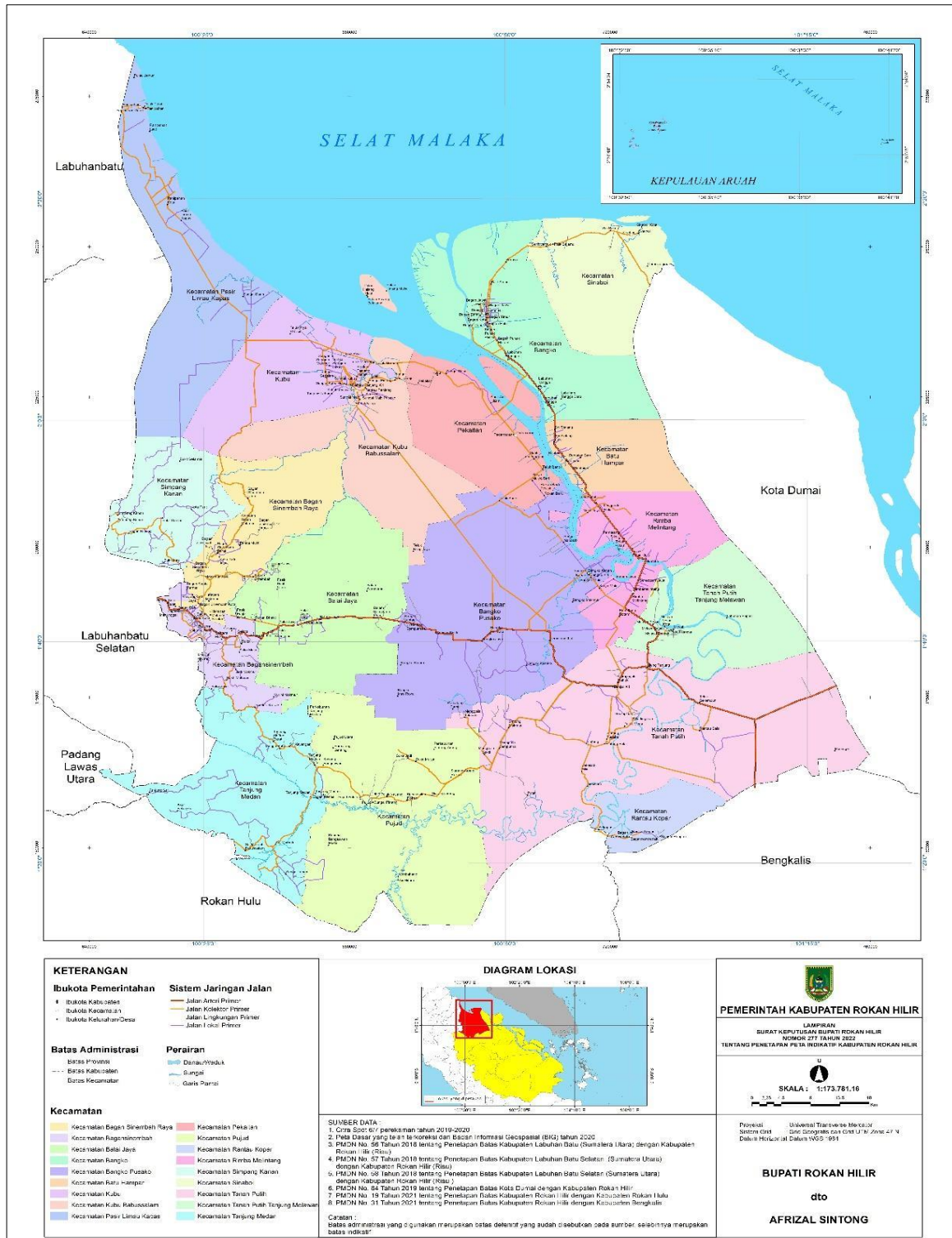
Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Rokan Hilir baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak dan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, penggunaan lahan Kabupaten Rokan Hilir, wilayah rawan bencana di daerah Rokan Hilir hingga daya dukung dan daya tampung wilayah.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten/kota dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, dengan luas 8.881,59 Km².

Kemudian didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024-2044 menetapkan lingkup wilayah Kabupaten meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, dengan luas kurang lebih 906.863 (Sembilan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar, yang terletak diantara koordinat 1° 3' 47,34" Lintang Utara - 2° 55' 16,15" Lintang Utara dan 100° 16' 18,64" Bujur Timur - 101° 20' 7,41" Bujur Timur.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: SK Bupati Rokan Hilir No. 277 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kabupaten Rokan Hilir

Secara geografis Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

Untuk batas administrasi kabupaten, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki batas administrasi definitif dengan Kota Dumai, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, sedangkan batas administrasi dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis masih indikatif.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi menjadi 159 Kepenghuluan dan 25 kelurahan. Tiap desa dan kelurahan tersusun atas dusun, rukun warga dan rukun tetangga. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Jumlah Kepenghuluan dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa		
		Kelurahan	Kepenghuluan	Total
1	Bagan Sinembah	2	11	13
2	Bagansinembah Raya	1	9	10
3	Balai Jaya	2	9	11
4	Bangko	5	10	15
5	Bangko Pusako	2	14	16
6	Batu Hampar	1	4	5
7	Kubu	1	9	10
8	Kubu Babussalam	0	12	12
9	Pasir Limau Kapas	1	7	8
10	Pekaitan	0	10	10
11	Pujud	1	10	11

No	Kecamatan	Jumlah Desa		
		Kelurahan	Kepenghuluan	Total
12	Rantau Kopar	2	2	4
13	Rimba Melintang	1	11	12
14	Simpang Kanan	1	5	6
15	Sinaboi	1	5	6
16	Tanah Putih	3	14	17
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	1	5	6
18	Tanjung Medan	0	12	12
	Jumlah	25	159	184

Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir, 2024

Jumlah luas wilayah administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Jumlah Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
Bagan Sinembah Raya	365,726	4,03%
Bagansinembah	170,29	1,88%
Balai Jaya	611,10	6,74%
Bangko	572,74	6,32%
Bangko Pusako	970,39	10,70%
Batu Hampar	225,67	2,49%
Kubu	392,22	4,33%
Kubu Babussalam	488,97	5,39%
Pasir Limau Kapas	585,52	6,46%
Pekaitan	414,27	4,57%
Pujud	889,12	9,80%
Rantau Kopar	150,14	1,66%
Rimba Melintang	349,39	3,85%
Simpang Kanan	305,11	3,36%

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase
Sinaboi	357,19	3,94%
Tanah Putih	1.284,24	14,16%
Tanah Putih Tanjung Melawan	391,41	4,32%
Tanjung Medan	545,13	6,01%
Total Luas	9.068,63	

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dari Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir No. 277 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 9.068,63 Km². Kecamatan dengan luas terbesar berada pada Kecamatan Tanah Putih dengan luas 1.284,24 Km² atau 14,16 persen dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan luas wilayah yang terkecil berada pada Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas Wilayah 391,41 km² atau 4,32 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka. Posisi ini menjadi strategis dalam perdagangan lintas batas antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia, karena Kabupaten Rokan Hilir memiliki banyak pelabuhan rakyat, seperti Pelabuhan Bagan Siapiapi, Pulau Halang, Sinaboi, Panipahan dan Tanjung Lumba-lumba. Pelabuhan-pelabuhan ini pada umumnya memiliki tujuan ke Malaysia dengan orientasi utama pelayanan adalah Port Klang, yang terletak di negara bagian Selangor. Pada wilayah daratan, Kabupaten Rokan Hilir berada di wilayah timur pulau Sumatera, sehingga memiliki posisi strategis sebagai lintas transportasi darat Sumatera. Posisi Kabupaten Rokan Hilir yang berada di sebelah Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadikan posisi Rokan Hilir semakin strategis dalam lintas perdagangan antar daerah di Pulau Sumatera.

Keberadaan Kabupaten Rokan Hilir menggambarkan Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi geostrategik yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah. Posisi geostrategis Kabupaten Rokan Hilir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, dapat berimplikasi secara langsung pada kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pengamanan dan menjaga keutuhan serta kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman dari luar negeri. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir juga dapat menentukan geoeconom daerah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan ekonomi daerah untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

3. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar bertopografi datar dari dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, terdapat 80 persen dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0-5 persen sampai 8-15 persen dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya adalah daerah pasang surut air laut mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang.

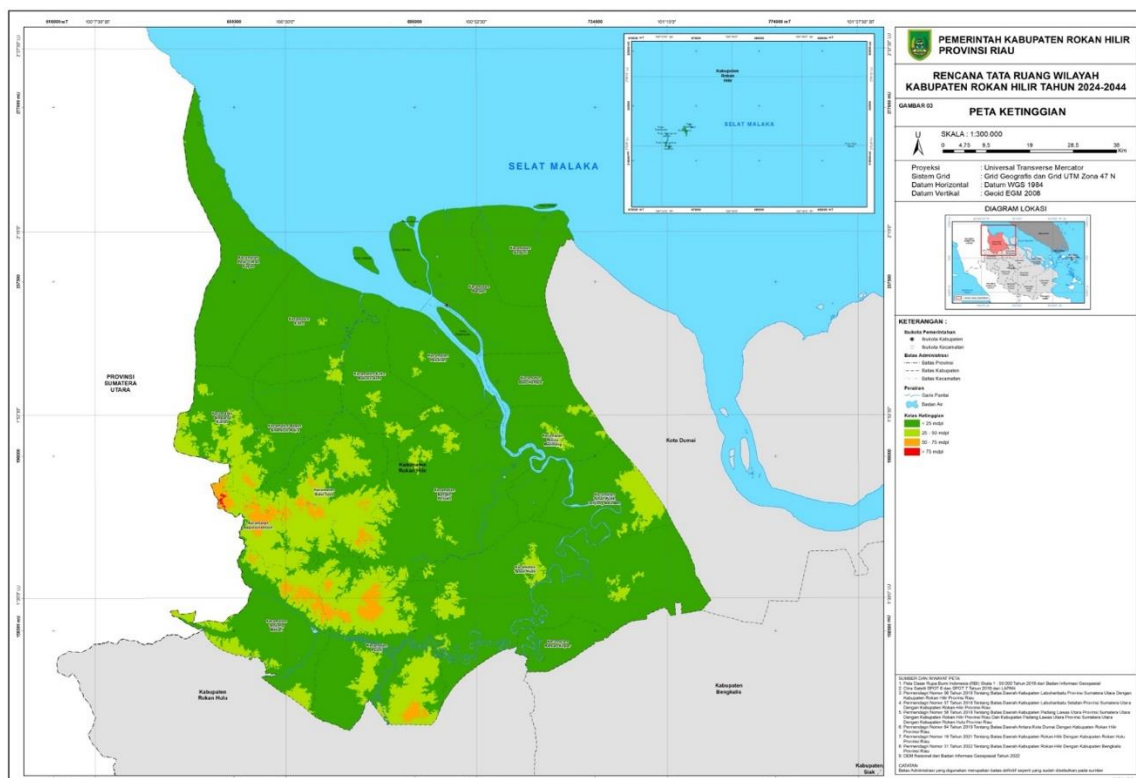
Sisi Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0-5 persen sampai 8-15 persen dengan ketinggian antara 5-100 mdpl.

Tabel II.3 Data Luas Kecamatan Berdasarkan Ketinggian

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN (HA)				LUAS (HA)
		<25	25-50	50-75	>75	
1	Tanah Putih	120.984,15	7.440,09			128.424,24
2	Pujud	48.707,27	34.190,14	6.015,03		88.912,44
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	31.725,29	7.415,29			39.140,58
4	Rantau Kopar	15.014,27				15.014,27
5	Tanjung Medan	36.884,75	14.879,53	2.748,93		54.513,21
6	Bagan Sinembah	773,36	11.494,38	4.570,63	190,27	17.028,65
7	Simpang Kanan	20.931,15	9.579,45			30.510,61
8	Bagan Sinembah Raya	29.112,82	6.923,63	536,19		36.572,64
9	Balai Jaya	26.693,02	31.830,03	2.587,09		61.110,14
10	Kubu	39.031,93	190,26			39.222,19

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN (HA)				LUAS (HA)
		<25	25-50	50-75	>75	
11	Pasir Limau Kapas	58.539,82	12,56			58.552,38
12	Kubu Babusalam	46.381,22	2.515,81			48.897,03
13	Bangko	57.273,74				57.273,74
14	Sinaboi	35.719,07				35.719,07
15	Batu Hampar	22.500,25	67,15			22.567,39
16	Pekaitan	41.005,76	420,93			41.426,69
17	Rimba Melintang	32.628,83	2.309,93			34.938,76
18	Bangko Pusako	86.393,93	10.437,72	206,96		97.038,61
JUMLAH		750.300,62	139.706,90	16.664,84	190,27	906.862,63

Gambar II.2 Peta Ketinggian



4. Kondisi Kelerengan

Kemiringan lereng merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh terhadap daya dukung lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi kemiringan lereng akan berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15 %. Sedangkan

lahan dengan kemiringan diatas 40 % akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Untuk lebih jelasnya karakteristik tiap kemiringan lereng dapat dilihat sebagai berikut :

- Kelerengan 0% - 15% dapat digunakan secara intensif untuk kegiatan perkotaan.
- Kelerengan 15% - 25% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
- Kelerengan 25% - 40% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang. Daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
- Kelerengan >40% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan interpretasi data DEM nasional tahun 2024 diketahui bahwa kelas lereng yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0% sampai dengan diatas 25%. Kelas kelerengan yang mendominasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah kelas kelerengan 2-15% dengan kategori landai, yaitu seluas 707.626,36 ha, dengan kelas kelerengan terbesar terdapat di Kecamatan Tanah Putih (95.009,88 ha) dan kelas lereng terkecil terdapat di Kecamatan Rantau Kopar (13.348,46 ha). Sedangkan kelas kelerengan dengan luasan masing-masing 0,29 ha yaitu kelas kelerengan 15-25% dengan kategori cukup curam, yaitu yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan kecamatan Bangko. Untuk lebih jelasnya mengenai kelas kelerengan di Kabupaten Rokan Hilir.

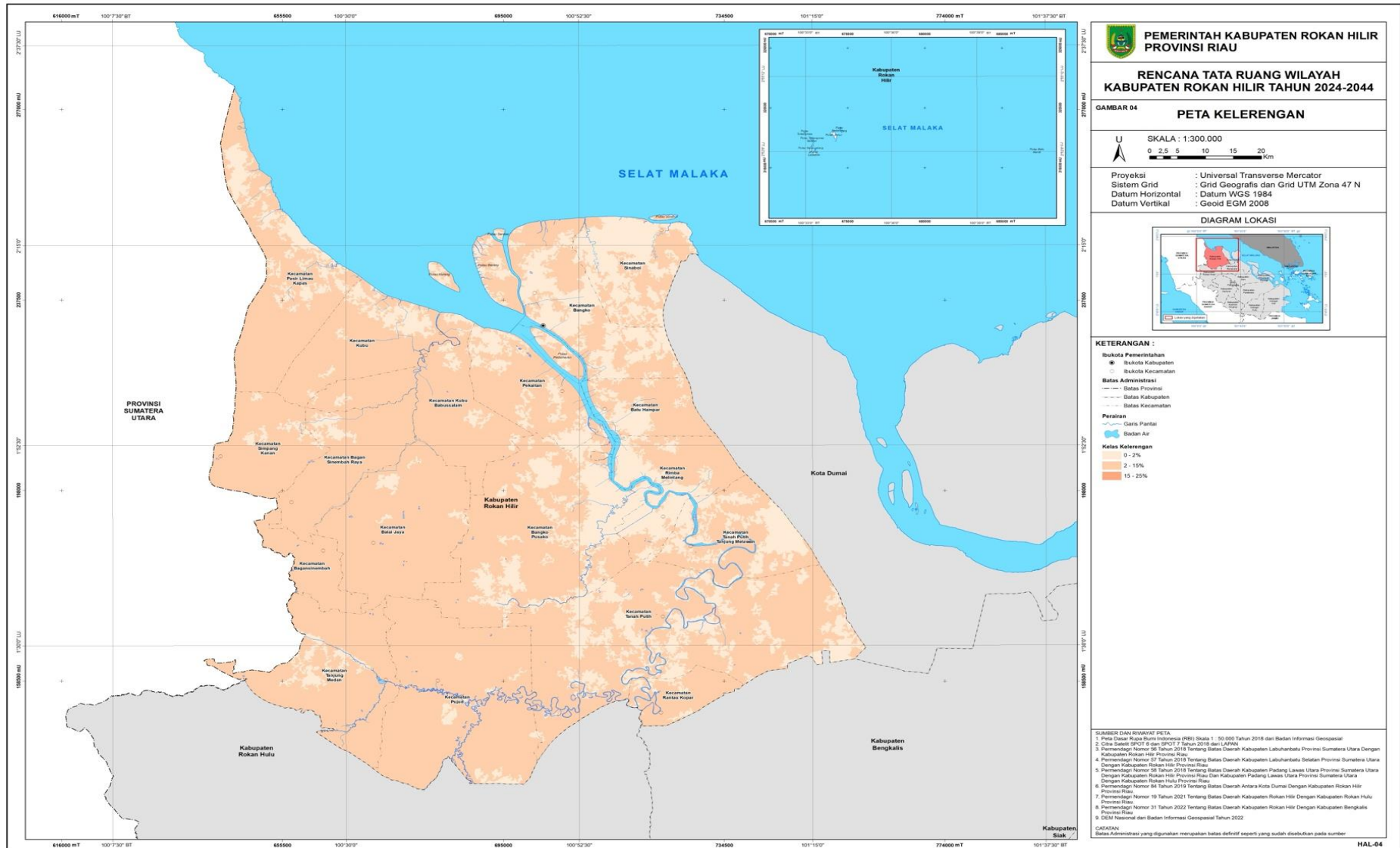
Tabel II.4 Kelas Kelerengan Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	KELERENGAN (%)			LUAS (HA)
		0-2	2-15	15-25	
1	Tanah Putih	33.414,06	95.009,88	0,29	128.424,23
2	Pujud	3.082,29	85.830,16		88.912,45
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	15.970,31	23.170,28		39.140,58
4	Rantau Kopar	1.665,81	13.348,46		15.014,27
5	Tanjung Medan	4.162,40	50.350,81		54.513,21
6	Bagan Sinembah		17.028,65		17.028,65

NO	KECAMATAN	KELERENGAN (%)			LUAS (HA)
		0-2	2-15	15-25	
7	Simpang Kanan	1.822,77	28.687,83		30.510,61
8	Bagan Sinembah Raya	2.315,88	34.256,76		36.572,64
9	Balai Jaya	1.794,21	59.315,93		61.110,14
10	Kubu	6.237,82	32.984,38		39.222,19
11	Pasir Limau Kapas	12.290,20	46.262,18		58.552,38
12	Kubu Babusalam	4.219,43	44.677,60		48.897,03
13	Bangko	25.910,63	31.362,67	0,29	57.273,59
14	Sinaboi	21.799,01	13.920,06		35.719,07
15	Batu Hampar	6.757,43	15.810,11		22.567,54
16	Pekaitan	11.527,57	29.899,12		41.426,68
17	Rimba Melintang	15.764,41	19.174,34		34.938,75
18	Bangko Pusako	30.501,47	66.537,14		97.038,61
JUMLAH		199.235,70	707.626,36	0,58	906.862,63

Sumber : Diolah Dari Data DEM Nasional Tahun 2024 dari BIG

Gambar II.3
Peta Kelerengan



5. Kondisi Geologi

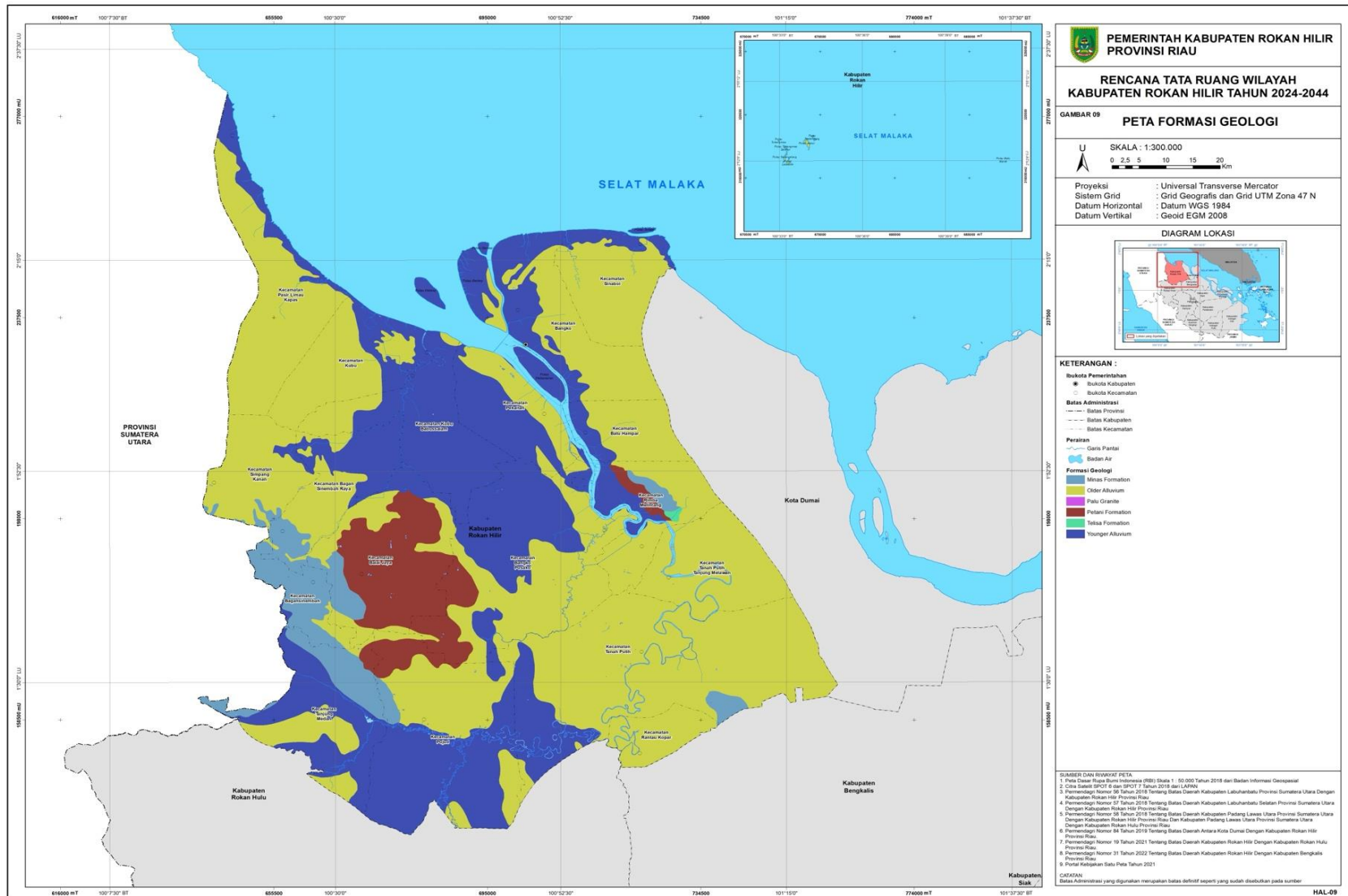
Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terbentuk dari batuan berumur tersier dan bahan endapan berumur kuartar. Berdasarkan jenis batuan yang ada, maka dijumpai potensi bahan tambang yang meliputi bahan galian golongan A (strategis), dan bahan galian golongan C (bahan bangunan, industri, mistrates, strategis dan nirvital). Bahan galian golongan A (strategis) berupa minyak bumi dan gas yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan Rimba Melintang. Minyak bumi dan gas ini telah dieksploitasi oleh PT. Pertamina Hulu Rokan. Sebaran geologi di kabupaten Rokan Hilir terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah Formasi Minas, Alluvium Tua, Palu Granite, Formasi Petani, Formasi Telisa yang dimana tersebar di hampir seluruh kecamatan yang berada pada kabupaten Rokan Hilir.

Untuk jenis batuan yang paling mendominasi yaitu jenis batuan older Alluvium dengan total luasan 509.903,63 Ha yang terbesar terdapat pada semua kecamatan. Jenis batuan older Alluvium terbesar terdapat pada kecamatan Pasir Limau Kapas dengan luas 49.531,24 Ha dan jenis batuan Older Alluvium terkecil terdapat pada kecamatan Bagan Sinembah dengan luas 2.317,10 Ha. Secara rinci sebaran jenis geologi dan luasannya untuk tiap wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II.5 Geologi Berdasarkan Kecamatan

N O	KECAMATAN	GEOLOGI						LUAS (HA)
		MINAS FORMATION	OLDER ALLUVIUM	PALU GRANIE	PETANI FORMATION	FORMASI TELISA	YOUNGER ALLUVIUM	
1	Tanah Putih	2.791,56	107.543,39				18.089,29	128.424,24
2	Pujud	2.075,95	32.235,42		6.037,11		48.563,97	88.912,45
3	Tanah Putih Tanjung Melawan		39.140,58					39.140,58
4	Rantau Kopar	30,61	14.983,67					15.014,27
5	Tanjung Medan	12.187,23	13.097,23		1.400,33		27.828,42	54.513,21
6	Bagan Sinembah	14.409,00	2.317,10				302,55	17.028,65
7	Simpang Kanan	1.504,22	27.798,13				1.208,25	30.510,61
8	Bagan Sinembah Raya	5.441,07	15.673,26				15.458,32	36.572,64
9	Balai Jaya	5.736,44	13.073,96		37.982,85		4.316,90	61.110,14
10	Kubu		28.619,02				10.603,17	39.222,19
11	Pasir Limau Kapas		49.531,24	0,01			9.021,14	58.552,38
12	Kubu Babusalam		7.256,70				41.640,33	48.897,03
13	Bangko		31.488,24				25.785,50	57.273,73
14	Sinaboi		29.909,11				5.809,96	35.719,07
15	Batu Hampar		17.442,33				5.125,07	22.567,40
16	Pekaitan		13.298,14				28.128,55	41.426,69
17	Rimba Melintang	2.514,42	20.730,06		2.895,42	516,59	8.282,27	34.938,75
18	Bangko Pusako		45.766,07		11.016,48		40.256,05	97.038,60
JUMLAH		46.690,50	509.903,65	0,01	59.332,19	516,59	290.419,74	906.862,63

Gambar II.4 Peta Geologi



6. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas) aliran sungai yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan yang letaknya pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat ini banyak anak sungai yang berada di hulu yang mengalami kekeringan dan tertutup oleh areal perkebunan.

Tabel II.6 Sungai di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Nama Sungai
1	Tanah Putih	Sungai Rokan
2	Kubu	Sungai Kubu, Sungai Ular, Sungai Tengah, Sungai Siandun, Sungai Subang, Sungai Agas, Sungai Lilin
3	Pasir Limau Kapas	Sungai Daun
4	Bangko	Sungai Rokan Sungai Besar, Sungai Serusa, Sungai Bangko
5	Sinaboi	Sungai Raja Bejamu, Sungai Sinaboi, Sungai Bakau
6	Rimba Melintang	Sungai Rokan
7	Bangko Pusako	Sungai Bangko

Sumber: LKPJ Bupati Rohil Tahun 2023

7. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh masih tingginya curah hujan bahkan di saat musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.100–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten ini bervariasi antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan relatif berkisar antara 80%–84%.

8. Daya Dukung dan Daya Tampung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (ecosystem services) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

a. Satuan Ekoregion Kabupaten Rokan Hilir

Identifikasi bentuk lahan wilayah perencanaan menggunakan data dan informasi Peta Satuan Ekoregion Skala 1 : 250.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2015. Berdasarkan identifikasi dari Peta satuan ekoregion tersebut, selanjutnya dilakukan pendetilan satuan ecoregion hingga skala 1 : 50.000. Bentuk lahan Kabupaten Rokan Hilir secara morfogenesis sebagian besar terbentuk akibat proses aktivitas fluvial yaitu proses yang berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan (sedimentasi) seperti lembah-lembah sungai besar dan dataran aluvial. Pada dasarnya bentuklahan ini disebabkan karena proses aktivitas sungai akibat proses air yang mengalir baik yang memusat (sungai) maupun aliran

permukaan bebas (overlandflow) yang pada akhirnya membentuk konfigurasi permukaan bumi Kabupaten Rokan Hilir seperti yang ada saat ini. Sebaran satuan Ekoregion di wilayah perencanaan merupakan hasil tumpang susun antara Peta Satuan Ekoregion dengan Peta Administrasi, sehingga kita dapat melihat sebaran satuan ekoregion berdasarkan wilayah administrasinya. Hal ini menjadi sangat penting didalam mengambil langkah kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir didalam mengimplementasikan D3TLH berbasis jasa lingkungan dengan memperhatikan karakteristik fisik dari masing-masing ekoregion yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

b. Tutupan Lahan Kabupaten Rokan Hilir

Penutup Lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalisasinya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 7645-1-2014, dimana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau proxy jasa lingkungan (*landcover/landused based proxy*).

Sebaran Penutup Lahan di Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil tumpang susun antara Peta Penutup Lahan dengan Peta Administrasi, sehingga kita dapat melihat sebaran penutup lahan berdasarkan wilayah administrasinya. Hal ini menjadi sangat penting didalam mengambil langkah kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir didalam mengimplementasikan D3TLH berbasis jasa lingkungan dengan memperhatikan karakteristik fisik dari masing-masing penutup lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Secara rinci luas tiap-tiap penutup lahan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.7 Luas (Ha) Jenis Penutup Lahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Penutup Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan Industri	17,69	0,002
2	Hampanan Pasir/Batuan	3,82	0,00042
3	Hutan Kota	10,44	0,001
4	Hutan Lahan Rendah Sekunder	9.985,60	1,10
5	Hutan Mangrove Primer	9.040,97	1,00
6	Hutan Mangrove Sekunder	12.684,65	1,40
7	Hutan Rawa/Gambut	42.640,03	4,71
8	Hutan Tanaman	19.553,91	2,16
9	Kolam	707,91	0,08
10	Ladang/Tegalan	21.343,27	2,36
11	Lahan Terbuka	479,32	0,05
12	Padang rumput	1,29	0,00014
13	Perkebunan/Kebun	685.777,83	75,70
14	Permukiman	18.328,57	2,02
15	Pertambangan	6.008,43	0,66
16	Rawa	7.740,85	0,85
17	Sawah	2.509,15	0,28
18	Semak Belukar	55.894,69	6,17
19	Sungai	13.223,18	1,46
Total Luas		905.951,62	100,00

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

c. Tipe Vegetasi Kabupaten Rokan Hilir

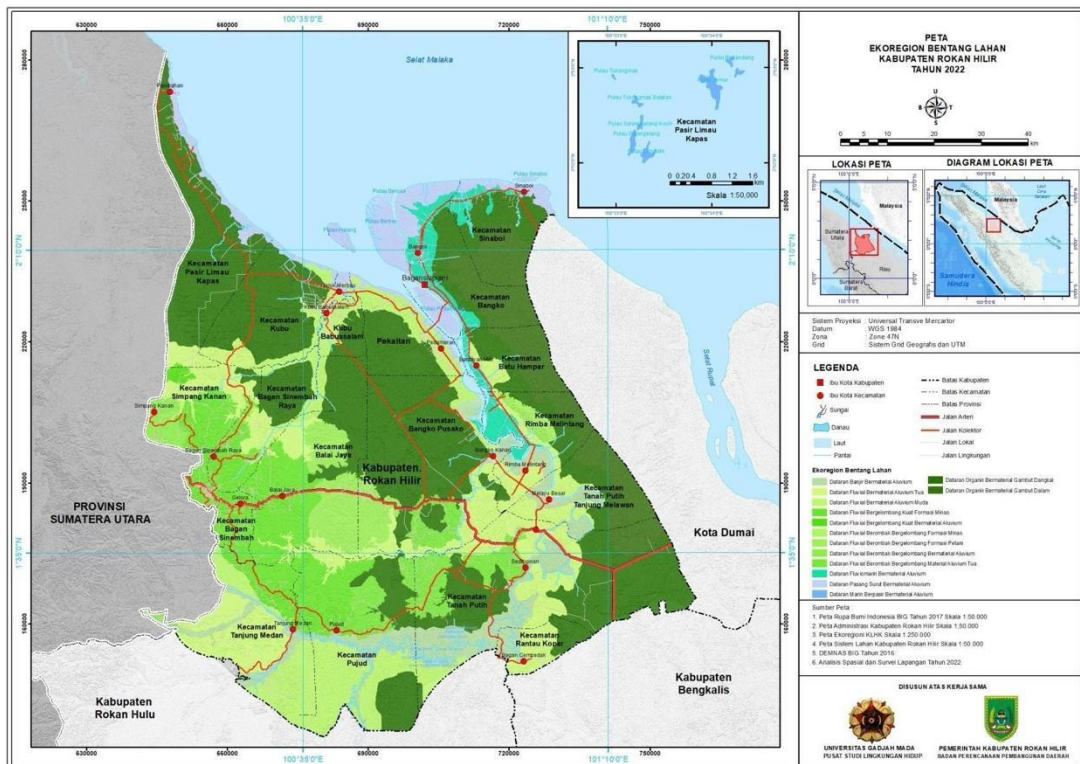
Tipe vegetasi dan struktur keanekaragaman hayati dianggap sebagai prosesor biotik yang menggambarkan proses kehidupan yang aktif, sedangkan prosesor abiotik seperti tanah, geomorfologi, ataupun iklim menciptakan kondisi kehidupan bagi biota, yang keduanya saling terhubung oleh serangkaian proses ekosistemik dinamis yang melibatkan arus energi, karbon, air an nutrisi. Berdasarkan hasil pengolahan data Peta Sistem Lahan Skala 1 : 50.000 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Peta Vegetasi Ekoregion Sumatera Skala 1 : 250.000, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, KLHK. Tipe Vegetasi Alami di Kabupaten Rokan Hilir memiliki 11 tipe atau jenis dengan tipe vegetasi alami terbesar berupa Vegetasi Hutan Gambut dengan luas lahan 370.245,91 ha atau sebesar 40,87 % dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan tipe vegetasi alami yang memiliki luas terkecil adalah Vegetasi Hutan Pantai dengan luas lahan 31,22 ha atau 0,003 %. Secara rinci distribusi luas lahan tipe vegetasi alami di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dan gambar diagram berikut ini.

Tabel II.8 Luas (Ha) Tipe Vegetasi di Kabupaten Rokan Hilir

No	Ekoregion	Luas	
		Ha	%
1	Air Tawar Tergenang	13.712,89	1,51
2	Vegetasi Air Masin	148,82	0,02
3	Vegetasi Air Tawar	281,38	0,03
4	Vegetasi Hutan Dipterokarpa Pamah	233.233,93	25,74
5	Vegetasi Hutan Gambut	370.245,91	40,87
6	Vegetasi Hutan Pantai	31,22	0,003
7	Vegetasi Mangrove	41.914,58	4,63
8	Vegetasi Terna Rawa Air Tawar	57.062,24	6,30
9	Vegetasi Terna Rawa Gambut	81.951,47	9,05
10	Vegetasi Terna Tepian Sungai	71.862,73	7,93
11	Vegetasi Terna Tepian Sungai Payau	35.506,44	3,92
Total Luas		905.951,62	100,00

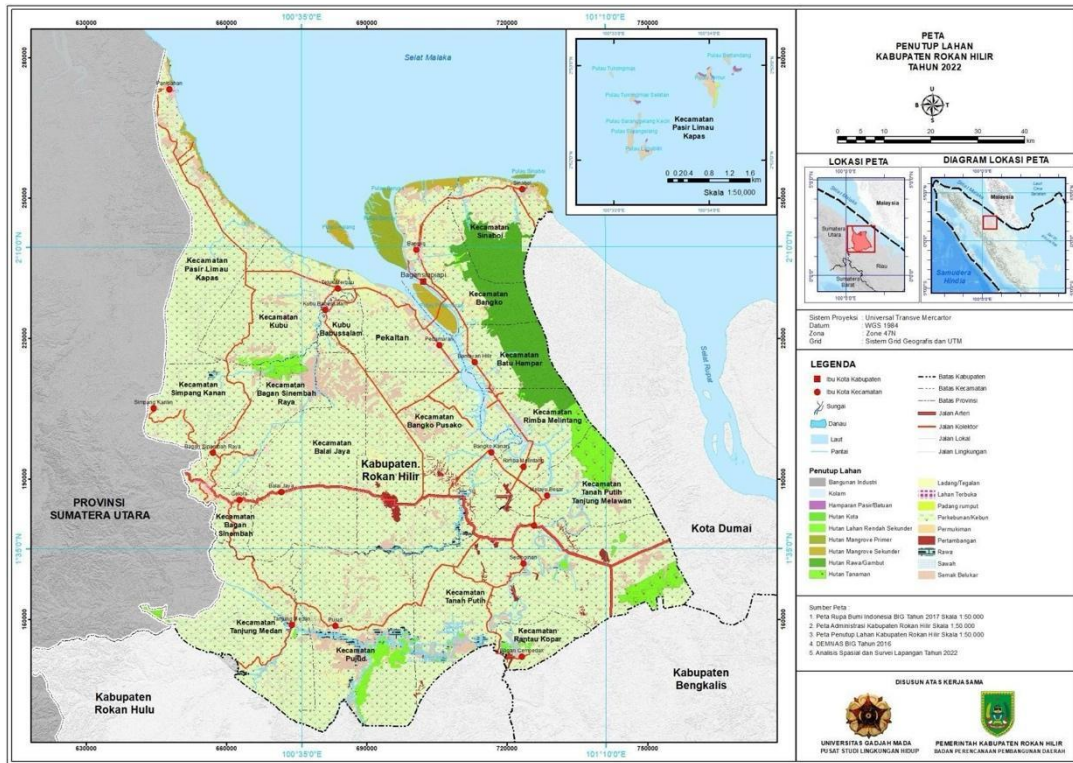
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.5 Peta Satuan Ekoregion Kabupaten Rokan Hilir



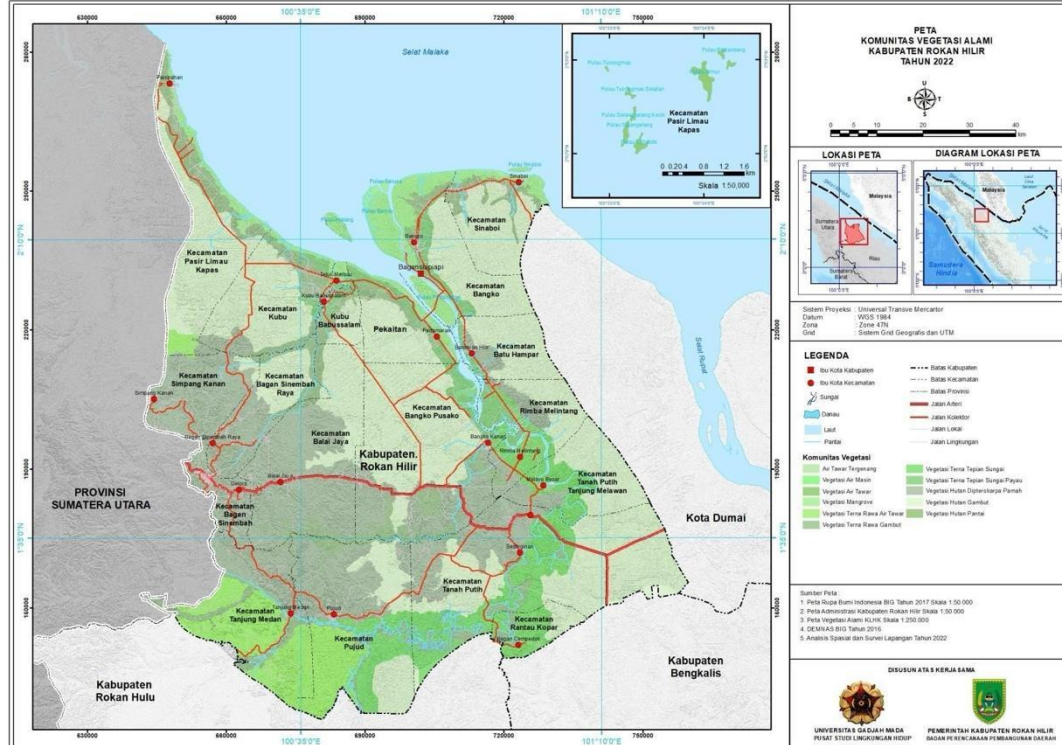
Sumber: DDDDTLH Kabupaten Rokan Hilir, 2022

Gambar II.7 Peta Penutup Lahan Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: DDDDTLH Kabupaten Rokan Hilir, 2022

Gambar II.8 Peta Vegetasi Alami Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: DDDDTLH Kabupaten Rokan Hilir, 2022

d. DDDTLH Berbasis Jasa Lingkungan

Deskripsi D3TLH berbasis Jasa Lingkungan dimaksudkan untuk melihat secara rinci mengenai distribusi luas lahan yang masuk kedalam kelas Jasa Lingkungan Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah, selain luas lahan pada masing- masing kelas Jasa Lingkungan yang dinyatakan dalam satuan Ha dan % (prosentase), deskripsi juga dibuat dengan memberikan informasi sebaran lokasi pada masing-masing kelas Jasa Lingkungan yang dinyatakan oleh wilayah administrasi kecamatan yang sesuai dengan kelas Jasa Lingkungan nya. Diagram batang ataupun diagram pie dibuat untuk melihat perbandingan luasan antar masing-masing kelas Jasa Lingkungan. Selain berupa data tabulasi yang mendeskripsikan Jasa Lingkungan secara statistik, peta D3TLH Jasa Lingkungan juga menjadi bagian terpenting didalam informasi D3TLH sehingga dengan peta tersebut dapat dilihat distribusi ataupun sebaran spasial lokasi pada masing-masing kelas Jasa Lingkungan. Distribusi luas lahan DDDTLH Jasa Lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.9 Distribusi Luas Lahan (Ha) D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Jasa Lingkungan	Kode	Luas Kelas Jasa Lingkungan									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat rendah	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
A. Jasa Penyedia												
1	Peyedia Pangan	P1	303,03	0,03	9.334,16	1,03	277.808,12	30,66	489.369,38	54,02	129.136,97	14,25
2	Penyedia Air Bersih	P2	13.754,59	1,52	7.857,76	0,87	54.806,64	6,05	440.317,54	48,60	389.215,13	42,96
3	Penyedia Serat/Fiber	P3	9.381,45	1,04	30.305,81	3,35	293.442,45	32,39	563.947,60	62,25	8.874,35	0,98
4	Penyedia Bahan Bakar	P4	356.913,51	39,40	334.715,40	36,95	77.475,06	8,55	114.462,92	12,63	22.384,77	2,47
5	Penyedia Sumberdaya Genetik	P5	9.036,94	1,00	13.841,94	1,53	119.372,42	13,18	737.454,54	81,40	26.245,83	2,90
B. Jasa Pengaturan												
6	Pengaturan Iklim	R1	-	-	51.680,96	5,70	249.714,03	27,56	589.976,31	65,12	14.580,36	1,61
7	Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	R2	47,95	0,01	32.038,62	3,54	80.152,33	8,85	440.201,44	48,59	353.511,32	39,02
8	Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	R3	9.036,94	1,00	57.374,52	6,33	42.117,41	4,65	493.486,26	54,47	303.936,54	33,55
9	Pengaturan Pemurnian Air	R4	12.477,48	1,38	7.832,24	0,86	30.548,84	3,37	104.615,86	11,55	750.477,25	82,84
10	Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	R5	4,04	0,00	52.131,89	5,75	357.272,16	39,44	143.826,51	15,88	352.717,07	38,93
11	Pemeliharaan Kualitas Udara	R6	-	-	51.680,96	5,70	246.766,01	27,24	518.629,38	57,25	88.875,31	9,81
12	Pengaturan Penyerbukan Alami	R7	9.036,94	1,00	-	-	630.013,99	69,54	249.646,95	27,56	17.253,79	1,90
13	Pengendalian Hama dan Penyakit	R8	3.405,29	0,38	49.184,39	5,43	86.878,30	9,59	731.536,69	80,75	34.946,99	3,86

No	Jasa Lingkungan	Kode	Luas Kelas Jasa Lingkungan									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat rendah	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
A. Jasa Penyedia												
C. Jasa Budaya												
14	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	C1	4.321,66	0,48	11.776,22	1,30	287.713,07	31,76	166.948,32	18,43	435.192,40	48,04
15	Rekreasi and Ecotourism	C2	4,04	0,0004	21.498,05	2,37	1.911,69	0,21	87.622,98	9,67	794.914,89	87,74
16	Estetika	C3	359,51	0,04	21.142,33	2,33	1.601,25	0,18	61.578,95	6,80	821.269,63	90,65
D. Jasa Pendukung												
17	Pembentukan Lapisan Tanah dan PemeliharaanKesuburan	D1	8.835,85	0,98	56.050,58	6,19	424.127,39	46,82	87.395,29	9,65	329.542,56	36,38
18	Pendukung Siklus Hara	D2	-	-	398.509,59	43,99	139.732,33	15,42	341.701,79	37,72	26.007,96	2,87
19	Pendukung Produksi Primer	D3	3.405,29	0,38	21.417,67	2,36	428.735,95	47,32	415.312,60	45,84	37.080,15	4,09
20	Pendukung Biodiversitas	D4	9.299,89	1,03	52.814,06	5,83	26.891,02	2,97	217.825,77	24,04	599.120,91	66,13

Sumber: DDDDTLH Kabupaten Rokan Hilir, 2022

e. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Dengan melihat sebaran dari kelas fungsi Jasa Lingkungan terkait dengan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diketahui potensi sumberdaya lahan yang memiliki nilai jasa yang sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir didalam menentukan kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya lahan dalam upaya mendukung kelestarian lahan pangan berkelanjutan. Sebaran jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.10 Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah			275,89	15.260,85	
2	Bagan Sinembah Raya		166,98	6.219,08	19.375,52	1.417,20
3	Balai Jaya		77,75	29.009,42	34.714,40	28,29
4	Bangko			2.422,74	31.517,07	22.780,75
5	Bangko Pusako		55,63	32.456,26	49.209,46	5.598,26
6	Batu Hampar		91,49	3.039,54	7.833,66	11.612,31
7	Kubu		1.111,32	3.638,53	31.227,28	2.367,39
8	Kubu Babussalam		1.393,58	11.657,66	30.595,81	12.661,50
9	Pasir Limau Kapas		0,06	3.970,99	50.728,38	7.417,81
10	Pekaitan		2.737,31	7.592,18	26.335,64	4.704,79
11	Pujud		2.779,75	41.762,53	51.061,61	377,92
12	Rantau Kopar			7.993,39	7.001,93	25,94
13	Rimba Melintang	303,03	427,25	10.283,56	17.744,37	7.692,65
14	Simpang Kanan		3,07	18.898,10	14.237,14	226,44
15	Sinaboi			302,99	15.639,26	19.573,68
16	Tanah Putih		76,02	51.765,26	58.922,64	16.103,18
17	Tanah Putih Tanjung Melawan		167,72	13.766,17	6.462,44	16.544,70
18	Tanjung Medan		246,22	32.753,83	21.501,92	4,17
Total		303,03	9.334,16	277.808,12	489.369,38	129.136,97
Total Luas						905.951,66

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

f. Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

Jasa Lingkungan penyedia air bersih dimaksudkan untuk mengetahui secara spasial daerah mana yang memiliki potensi penyediaan air bersih sesuai dengan nilai kelas Jasa Lingkungannya apakah masuk kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi ataupun sangat tinggi.

Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap penutup lahan, vegetasi alami dan satuan ekoregion wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sebaran spasial untuk kelas Jasa Lingkungan penyedia air bersih sangat rendah sebesar 42,96 %, kelas rendah 48,60 %, kelas sedang sebesar 6,05 %, kelas tinggi sebesar 0,87 % dan lahan dengan kelas sangat tinggi sebesar 1,52 %. Berdasarkan nilai prosentase luas lahan tersebut, maka untuk jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Rokan Hilir secara umum masuk kelas rendah dan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Rokan Hilir Sebagian besar berupa ecoregion ekosistem lahan gambut yang memiliki kecenderungan proses evaporasi yang tinggi. Sebaran jasa lingkungan penyedia air bersih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.11 Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah	17,05		83,66	15.436,02	
2	Bagan Sinembah Raya			1.053,31	17.377,70	8.747,78
3	Balai Jaya	67,39	0,98	508,99	56.096,70	7.155,81
4	Bangko	732,66	19,51	2.597,13	28.757,42	24.613,84
5	Bangko Pusako	1.458,35	356,69	3.401,07	33.390,79	48.712,72
6	Batu Hampar	1.087,24	21,48	546,94	14.213,45	6.707,89
7	Kubu	102,71	6,50	1.415,69	3.950,93	32.868,68
8	Kubu Babussalam	140,32	256,48	6.056,63	10.631,44	39.223,68
9	Pasir Limau Kapas	19,34	9,02	76,30	5.266,89	56.745,68
10	Pekaitan	3.606,78	183,30	4.276,09	8.499,82	24.803,93
11	Pujud	877,71	5.476,33	16.053,27	53.976,09	19.598,40
12	Rantau Kopar	344,11	418,55	1.655,82	8.443,29	4.159,49
13	Rimba Melintang	2.028,94	70,50	1.434,82	18.303,71	14.612,89
14	Simpang Kanan	20,49	325,83	284,79	31.284,15	1.449,49
15	Sinaboi	35,07	10,72	7,50	16.413,65	19.049,01
16	Tanah Putih	1.838,06	671,92	10.722,45	52.242,28	61.392,39
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	1.038,56		2.472,83	14.056,17	19.373,46
18	Tanjung Medan	339,80	29,96	2.159,35	51.977,03	
Total		13.754,59	7.857,76	54.806,64	440.317,54	389.215,13
Total Luas		905.951,66				

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

g. Jasa Lingkungan Penyedia Serat

Jasa Lingkungan penyedia serat merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh suatu ekosistem kepada manusia berupa hasil, baik hasil pertanian, perikanan (laut dan air tawar) serta hasil perkebunan. Berdasarkan hasil analisis spasial dan melihat nilai kelas Jasa Lingkungan untuk penyedia serat melalui pendekatan satuan ecoregion, vegetasi alami dan penutup lahan, maka untuk Jasa Lingkungan penyedia serat

didominasi oleh kelas rendah yaitu sebesar 62,25 % atau 563.947,60 ha. Sebaran spasial baik lokasi maupun luas lahan dari Jasa Lingkungan penyedia serat (P3) di Kabupaten Rokan Hilir tersebar di beberapa wilayah Kecamatan dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel II.12 Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Serat

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah		47,37	13.728,00	1.761,36	
2	Bagan Sinembah Raya		440,82	15.862,09	10.875,87	
3	Balai Jaya			51.788,96	12.040,90	
4	Bangko	8.563,04	280,16	22.240,42	24.432,09	1.204,85
5	Bangko Pusako		71,99	20.896,61	65.441,73	909,28
6	Batu Hampar			14.752,75	7.566,77	257,47
7	Kubu			2.708,55	34.809,46	826,51
8	Kubu Babussalam	68,11	3.821,29	5.072,75	46.895,95	450,46
9	Pasir Limau Kapas		79,54	5.936,18	53.716,58	2.384,93
10	Pekaitan			7.097,04	32.813,33	1.459,55
11	Pujud		4.045,93	27.080,17	64.837,37	18,33
12	Rantau Kopar		262,18	416,19	14.321,35	21,55
13	Rimba Melintang		3.365,45	11.031,64	21.361,15	692,61
14	Simpang Kanan		58,01	30.699,49	2.607,25	
15	Sinaboi	405,79	1,56	17.882,77	16.878,36	347,46
16	Tanah Putih		9.611,97	24.893,37	92.173,33	188,44
17	Tanah Putih Tanjung Melawan		7.452,02	5.595,64	23.795,59	97,78
18	Tanjung Medan	344,51	767,53	15.759,83	37.619,15	15,13
Total		9.381,45	30.305,81	293.442,45	563.947,60	8.874,35
Total Luas		905.951,66				

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

h. Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar

Secara umum, Jasa Lingkungan yang dapat dirasakan oleh manusia terkait dengan penyedia bahan bakar di Kabupaten Rokan Hilir secara umum masuk pada kelas Jasa Lingkungan Sangat Tinggi dan Tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan luasan sebesar 76,34 % atau sebesar 691.628,91 Ha yang lebih mendominasi wilayah Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan kelas lainnya. Kelas sedang memiliki luasan yaitu 77.475,06 ha atau 8,55 %. Kelas sangat rendah terhadap penyedia bahan bakar di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 2,47 % atau sebesar 22.384,77 ha. Jasa lingkungan penyedia bahan bakar di Kabupaten Rokan Hilir secara dominan masuk kelas sangat tinggi dan tinggi salah satu parameter yang berpengaruh adalah penutup lahan yang banyak didominasi oleh lahan perkebunan kelapa sawit, dimana hasil komoditas kelapa sawit ini menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Informasi

II-26

luasan Jasa Lingkungan penyedia bahan bakar di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.13 Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah	13.683,50	47,37	25,88	1.779,98	
2	Bagan Sinembah Raya	16.754,50	7.319,65	1.258,01	1.800,49	46,13
3	Balai Jaya	54.808,85	7.058,83	358,36	1.507,62	96,21
4	Bangko		15.615,93	14.628,75	19.175,90	7.299,97
5	Bangko Pusako	31.280,69	44.659,03	1.569,99	7.408,55	2.401,36
6	Batu Hampar	2.916,06	6.979,59	441,80	11.836,72	402,82
7	Kubu	3.354,53	28.953,71	192,43	3.172,54	2.671,30
8	Kubu Babussalam	8.898,73	27.796,70	4.645,70	13.023,51	1.943,92
9	Pasir Limau Kapas	3.953,55	50.286,75	82,32	6.409,93	1.384,67
10	Pekaitan	6.890,59	24.212,72	1.349,55	8.134,03	783,03
11	Pujud	52.884,11	25.536,92	9.883,29	7.461,08	216,41
12	Rantau Kopar	8.268,99	5.183,50	1.111,68	453,27	3,82
13	Rimba Melintang	10.334,35	15.437,57	4.090,13	5.197,52	1.391,29
14	Simpang Kanan	30.500,02	1.279,30	247,66	1.337,78	
15	Sinaboi		14.265,32	1.939,99	17.624,19	1.686,44
16	Tanah Putih	50.062,34	51.984,20	18.673,23	5.394,42	752,91
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	12.384,72	6.600,98	15.933,66	725,16	1.296,50
18	Tanjung Medan	49.938,00	1.497,30	1.042,63	2.020,23	7,97
Tota 1		356.913,51	334.715,40	77.475,06	114.462,92	22.384,77
Total Luas		905.951,66				

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045

II-27

i. Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik

Berdasarkan hasil analisis D3TLH, luas lahan yang mampu menyediakan sumberdaya genetik di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 2,53 % atau seluas 22.878,88 ha yaitu lahan dengan kelas Jasa Lingkungan tinggi dan sangat tinggi. Untuk lahan yang Jasa Lingkungan penyediaan sumberdaya genetik yang rendah merupakan kelas yang paling dominan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 81,40 % atau 737.454,54 ha dan kelas sangat sedang sebesar 13,18 % atau 119.372,42 ha. Distribusi luas lahan dan nilai range Jasa Lingkungan penyediaan sumberdaya genetik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.14 Sebaran Jasa Lingkungan Penyediaan Sumberdaya Genetik

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah			100,71	15.436,02	
2	Bagan Sinembah Raya			1.103,33	26.075,46	
3	Balai Jaya		4,51	571,87	63.253,49	
4	Bangko	8.563,04	2.147,97	19.493,73	20.805,73	5.710,09
5	Bangko Pusako		216,38	4.712,64	78.590,61	3.799,98
6	Batu Hampar			12.790,06	8.228,27	1.558,66
7	Kubu		488,90	465,34	34.909,85	2.480,42
8	Kubu Babussalam	68,11	2.001,27	6.381,88	44.705,72	3.151,58
9	Pasir Limau Kapas		2.550,41	1.236,19	58.330,63	
10	Pekaitan		3.917,74	6.630,87	26.149,00	4.672,31
11	Pujud		59,20	22.333,43	73.589,17	
12	Rantau Kopar			2.397,79	12.623,47	
13	Rimba Melintang		8,51	6.350,53	25.273,92	4.817,89
14	Simpang Kanan		325,83	307,04	32.731,88	
15	Sinaboi	405,79	2.055,92	14.684,16	18.370,07	
16	Tanah Putih		63,75	12.997,94	113.805,42	
17	Tanah Putih Tanjung Melawan			3.436,73	33.473,02	31,27
18	Tanjung Medan		1,54	3.378,19	51.102,80	23,62
Total		9.036,94	13.841,94	119.372,42	737.454,54	26.245,83
Total Luas						905.951,66

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

j. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara umum, Jasa Lingkungan yang dapat dirasakan oleh manusia adalah kemampuan suatu ekosistem untuk pengaturan suhu, kelembaban, pengendalian gas rumah kaca & karbon. Kabupaten Rokan Hilir secara umum terkait Jasa Lingkungan pengaturan iklim masuk kategori rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan luasan kelas rendah yang lebih mendominasi wilayah Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan kelas lainnya. Kelas rendah tersebut memiliki luasan yaitu 589.976,31 ha atau 65,12 %. Informasi luasan Jasa Lingkungan pengaturan iklim dapat dilihat pada tabel berikut ini.

II-28

Tabel II.15 Sebaran Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah				73,26	15.463,48
2	Bagan Sinembah Raya		82,35	0,32	2.969,57	24.126,54
3	Balai Jaya			4,79	3.673,24	60.151,84
4	Bangko	8.563,04	13.929,92	4.129,88	20.910,01	9.187,71
5	Bangko Pusako		98,89	3.400,76	10.535,30	73.284,67
6	Batu Hampar		11.616,55	1.209,95	1.877,80	7.872,70

7	Kubu			107,13	3.126,81	35.110,58
8	Kubu Babussalam	68,11	2.592,48	177,11	19.752,57	33.718,28
9	Pasir Limau Kapas			293,20	11.936,17	49.887,85
10	Pekaitan		3,65	3.789,13	11.681,81	25.895,34
11	Pujud		5.113,71	3.952,88	34.822,87	52.092,34
12	Rantau Kopar		601,54	607,75	1.682,04	12.129,93
13	Rimba Melintang		4.385,78	2.031,31	7.733,88	22.299,88
14	Simpang Kanan		58,01	325,83	622,34	32.358,57
15	Sinaboi	668,75	13.267,45	767,49	11.044,61	9.767,63
16	Tanah Putih		897,13	3.097,90	23.030,85	99.841,22
17	Tanah Putih Tanjung Melawan		45,06	2.284,21	15.136,10	19.475,66
18	Tanjung Medan		121,54	711,38	37.216,56	16.456,67
Total		9.299,89	52.814,06	26.891,02	217.825,77	599.120,91
Total Luas						905.951,66

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

k. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Luas lahan dari Jasa Lingkungan untuk pengaturan tata aliran air dan banjir dengan kelas sangat tinggi dan tinggi adalah sebesar 32.086,57 ha atau sebesar 3,54 % dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan tersebar pada lahan dengan satuan ekoregion dataran fluvio marin. Untuk lahan dengan kelas jasa lingkungan rendah untuk pengaturan tata aliran air dan banjir yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah 440.201,44 ha atau sebesar 48,59 %, dan merupakan kelas jasa yang paling dominan di Kabupaten Rokan Hilir. Faktor penutup lahan yang sangat mempengaruhi kelas Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir masuk kelas sangat tinggi dan tinggi adalah lahan dengan tutupan berupa Hutan Lahan Rendah Sekunder. Distribusi luas kelas Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel II.16 Sebaran Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir

Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045

II-29

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah		4,31	12,74	15.519,69	
2	Bagan Sinembah Raya		32,65	1.054,26	18.802,65	7.289,22
3	Balai Jaya		16,09	402,70	56.324,72	7.086,36
4	Bangko		9.305,07	14.026,17	15.644,23	17.745,09
5	Bangko Pusako	24,64	3.146,19	1.738,06	36.257,80	46.152,93
6	Batu Hampar		1.108,72	11.682,61	3.580,91	6.204,76
7	Kubu		107,13	1.419,36	7.542,19	29.275,84
8	Kubu Babussalam	17,90	2.285,43	4.753,32	23.508,32	25.743,59
9	Pasir Limau Kapas		25,16	352,96	10.411,45	51.327,67

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
10	Pekaitan		3.736,38	4.068,28	13.153,85	20.411,41
11	Pujud	2,58	5.123,43	13.094,81	56.360,33	21.400,66
12	Rantau Kopar		758,79	915,83	7.546,02	5.800,62
13	Rimba Melintang	2,79	2.045,82	4.560,47	16.724,30	13.117,48
14	Simpang Kanan		397,70	235,04	31.508,96	1.223,05
15	Sinaboi		451,58	13.764,62	8.908,83	12.390,91
16	Tanah Putih	0,04	2.132,78	5.814,68	54.040,49	64.879,11
17	Tanah Putih Tanjung Melawan		1.031,27	776,14	18.511,92	16.621,70
18	Tanjung Medan		330,14	1.480,29	45.854,80	6.840,92
Total		47,95	32.038,62	80.152,33	440.201,44	353.511,32
Total Luas		905.951,66				

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

1. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

Jasa Lingkungan ini pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh lahan dengan kelas jasa lingkungan sedang rendah yaitu sebesar 54,47 % atau 493.486,26 Ha. Sedangkan kelas dengan kategori tinggi dan sangat tinggi apabila dikombinasi total mencapai 7,33 % atau sebesar 66.411,46 Ha. artinya adalah Lahan di Kabupaten Rokan Hilir dengan pendekatan satuan ekoregion, penutup lahan dan vegetasi alami diindikasikan belum mampu untuk memberikan perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana alam. Hal ini dikarenakan karena Kabupaten Rokan Hilir dari aspek bentang lahan atau ekoregion lebih didominasi oleh lahan dengan ekosistem gambut dan dataran fluvial yang memiliki potensi bencana yang tinggi baik bencana banjir, efek gas rumah kaca maupun kebakaran lahan/hutan. Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang tergenang air sehingga materi- materi tanaman tidak bisa membusuk sepenuhnya. Hal ini membuat produksi bahan organik menjadi lebih banyak dari proses pembusukan yang terjadi sehingga terjadi akumulasi bahan gambut. Rincian distribusi luas lahan serta kelas Jasa Lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

II-30

Tabel II.17 Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah		4,31	68,95	15.463,48	
2	Bagan Sinembah Raya		32,65	899,54	18.913,79	7.332,80
3	Balai Jaya		15,81	343,80	56.315,21	7.155,04
4	Bangko	8.563,04	15.693,14	4.046,41	13.008,75	15.409,23
5	Bangko Pusako		14,35	3.440,90	38.764,45	45.099,93
6	Batu Hampar		11.442,54	143,16	4.641,11	6.350,19
7	Kubu		488,90	220,17	13.020,99	24.614,46
8	Kubu Babussalam	68,11	3.810,19	3.472,97	22.675,23	26.282,05
9	Pasir Limau Kapas		2.363,25	3.309,48	18.611,07	37.833,43
10	Pekaitan		3.812,36	1.267,45	16.210,92	20.079,20
11	Pujud		12,08	10.782,96	64.098,67	21.088,10
12	Rantau Kopar			1.155,69	8.535,41	5.330,15
13	Rimba Melintang		3.921,43	233,28	19.573,89	12.722,25
14	Simpang Kanan		71,86	557,87	31.511,98	1.223,05
15	Sinaboi	405,79	15.657,19	1.584,96	9.979,60	7.888,39
16	Tanah Putih		34,43	8.020,56	62.343,81	56.468,30
17	Tanah Putih Tanjung Melawan			87,03	27.832,61	9.021,39
18	Tanjung Medan		0,03	2.482,25	51.985,29	38,58
Total		9.036,94	57.374,52	42.117,41	493.486,26	303.936,54
Total Luas						905.951,66

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

m. Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah

Luas lahan yang paling dominan terkait dengan kemampuan ekosistem/lingkungan dalam mengatur kapasitas lokasi untuk menetralsir, mengurai dan menyerap bahan pencemar di Kabupaten Rokan Hilir adalah kelas jasa sedang dengan total luas 357.272,16 ha atau 39,44 % dan kelas jasa sangat rendah dengan total luas lahan sebesar 352.717,07 ha atau 38,93%. Sebaran kelas tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah untuk Jasa Lingkungan Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Rokan Hilir tersebar diseluruh wilayah Kecamatan, khusus kelas Sangat Tinggi, hanya tersebar di Kecamatan Bangko dengan total luas 4,04 Ha.

II-31

Tabel II.18 Sebaran Jasa Lingkungan Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah		4,31	257,96	15.274,47	
2	Bagan Sinembah Raya		32,65	7.213,81	11.134,85	8.797,47
3	Balai Jaya		16,09	29.680,99	26.976,99	7.155,81
4	Bangko	4,04	11.485,95	17.625,35	13.626,32	13.978,90
5	Bangko Pusako		3.352,04	35.223,04	84,50	48.660,04
6	Batu Hampar		1.112,87	5.125,09	11.444,56	4.894,47
7	Kubu		603,83	6.193,62	2,58	31.544,48
8	Kubu Babussalam		4.056,08	15.093,40	5,35	37.153,72
9	Pasir Limau Kapas		2.579,43	7.760,45	117,52	51.659,83
10	Pekaitan		7.629,96	13.469,13		20.270,84
11	Pujud		8.959,61	48.413,54	19.009,61	19.599,05
12	Rantau Kopar		1.208,96	9.652,81		4.159,49
13	Rimba Melintang		2.417,30	16.584,11	8.617,33	8.832,11
14	Simpang Kanan		397,70	19.176,77	12.339,04	1.451,25
15	Sinaboi		2.761,52	6.983,40	13.452,92	12.318,09
16	Tanah Putih		3.629,07	61.629,97	32,31	61.575,75
17	Tanah Putih Tanjung Melawan		1.038,56	15.236,70		20.665,76
18	Tanjung Medan		845,96	41.952,03	11.708,16	
Tota 1		4,04	52.131,89	357.272,16	143.826,51	352.717,07
Total Luas						905.951,66

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

n. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah non vegetasi di Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 dengan daerah non vegetasi. Total 57,25 % atau 518.629,38 ha kelas jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Rokan Hilir masuk pada kelas rendah dan kelas sedang dengan luas lahan 27,24 % atau 246.766,01 ha. Terendah untuk jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara adalah kelas tinggi yaitu sebesar 51.680,96 ha atau 5,70 %. Secara rinci distribusi luas dari kelas jasa ini disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel II.19 Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah			13.747,92	1.788,82	
2	Bagan Sinembah Raya			15.781,09	9.530,88	1.866,82
3	Balai Jaya			51.637,40	11.767,37	425,09
4	Bangko		22.191,74	2.444,01	21.427,66	10.657,15
5	Bangko Pusako			22.620,33	55.336,84	9.362,45
6	Batu Hampar		11.442,54	3.029,64	7.532,34	572,47
7	Kubu			1.597,55	31.225,98	5.520,98
8	Kubu Babussalam		68,11	6.549,44	33.969,95	15.721,05
9	Pasir Limau Kapas			3.534,13	53.443,97	5.139,14
10	Pekaitan			3.949,77	31.311,20	6.108,96
11	Pujud			34.106,63	50.905,09	10.970,08
12	Rantau Kopar			865,17	12.535,60	1.620,49
13	Rimba Melintang		3.913,62	7.085,19	22.913,98	2.538,06
14	Simpang Kanan			30.754,38	2.344,59	265,79
15	Sinaboi		14.064,95	2.058,09	15.842,12	3.550,77
16	Tanah Putih			26.080,09	90.806,23	9.980,78
17	Tanah Putih Tanjung Melawan			4.234,24	29.863,30	2.843,49
18	Tanjung Medan			16.690,95	36.083,45	1.731,75
Total		51.680,96	246.766,01	518.629,38	88.875,31	
Total Luas		905.951,66				

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

o. Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Sebaran luas lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir untuk Jasa Lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup masuk pada kelas Jasa Lingkungan sangat rendah yaitu dengan luas 435.192,40 ha atau sebesar 48,04 %, di beberapa lokasi dapat dijumpai kelas jasa Sangat Tinggi (ST) dengan luas 4.321,66 ha atau 0,48 % dan kelas tinggi dengan prosentase sebesar 1,30 % atau 11.776,22 ha. Berdasarkan wilayah administrasi di Kabupaten Rokan Hilir, jasa lingkungan untuk tempat tinggal dan ruang hidup tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas lahan yang bervariasi.

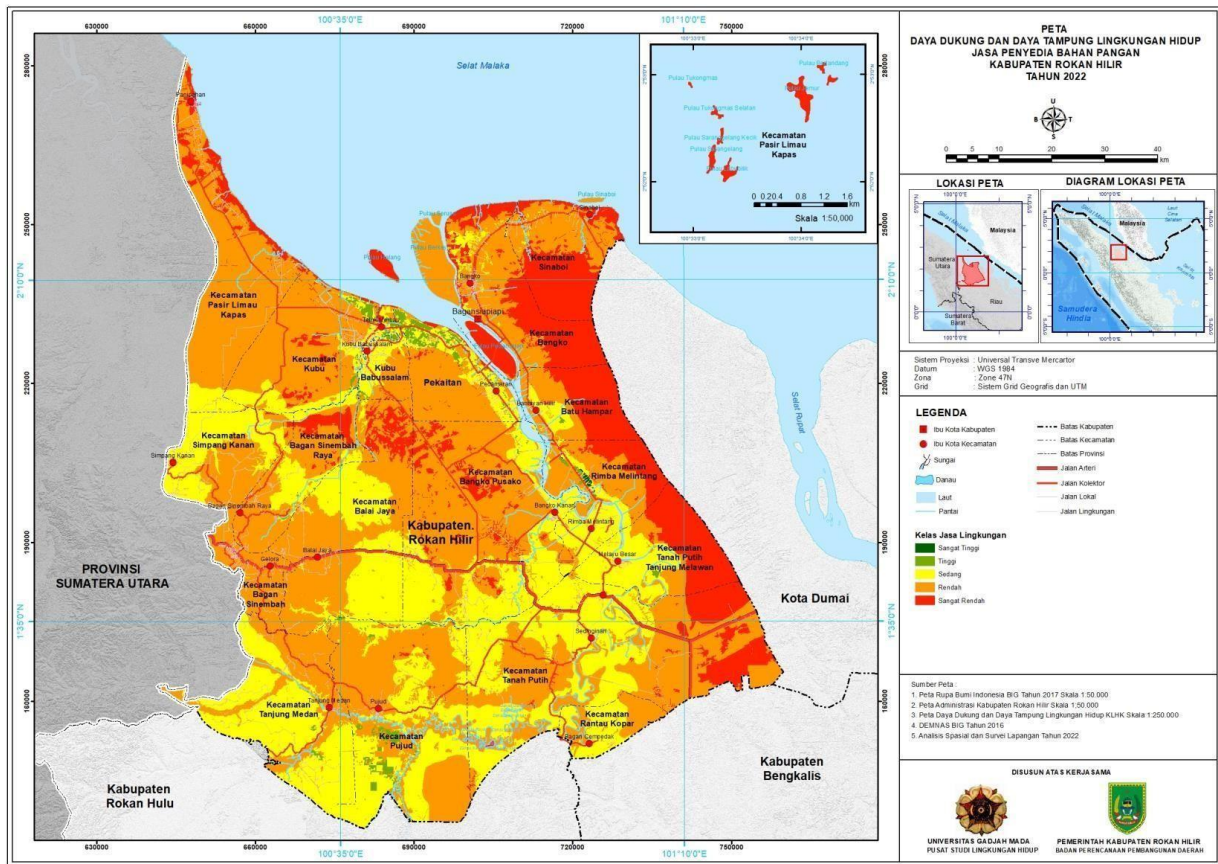
II-33

Tabel II.20 Luas Lahan Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Lingkungan (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1	Bagan Sinembah	1,10	1.706,67	326,11	13.481,28	21,57
2	Bagan Sinembah Raya	26,98	544,52	6.353,49	11.445,64	8.808,16
3	Balai Jaya	51,16	1.206,71	29.000,91	26.349,39	7.221,70
4	Bangko		1.406,51	2.748,86	10.831,00	41.734,19
5	Bangko Pusako	399,32	1.053,47	32.208,53	3.954,30	49.704,00
6	Batu Hampar	83,06	296,62	3.260,09	1.471,15	17.466,06
7	Kubu	239,34	121,02	5.013,35	1.186,81	31.784,00
8	Kubu Babussalam	407,76		10.438,67	6.253,76	39.208,37
9	Pasir Limau Kapas	70,25	6,11	4.844,45	2.537,96	54.658,46
10	Pekaitan	741,41	364,13	9.753,21	2.309,54	28.201,64
11	Pujud	153,02	895,18	39.336,12	33.921,69	21.675,78
12	Rantau Kopar	152,46	19,46	8.346,67	1.997,14	4.505,53
13	Rimba Melintang	462,46	721,54	11.012,57	9.274,00	14.980,28
14	Simpang Kanan	16,22	766,16	16.767,96	14.358,04	1.456,38
15	Sinaboi		205,16	395,70	5.734,84	29.180,23
16	Tanah Putih	855,87	1.147,36	54.532,22	8.087,50	62.244,15
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	2,67	815,69	13.569,66	844,58	21.708,42
18	Tanjung Medan	658,57	499,91	39.804,50	12.909,68	633,47
Total		4.321,66	11.776,22	287.713,07	166.948,32	435.192,40
Total Luas		905.951,66				

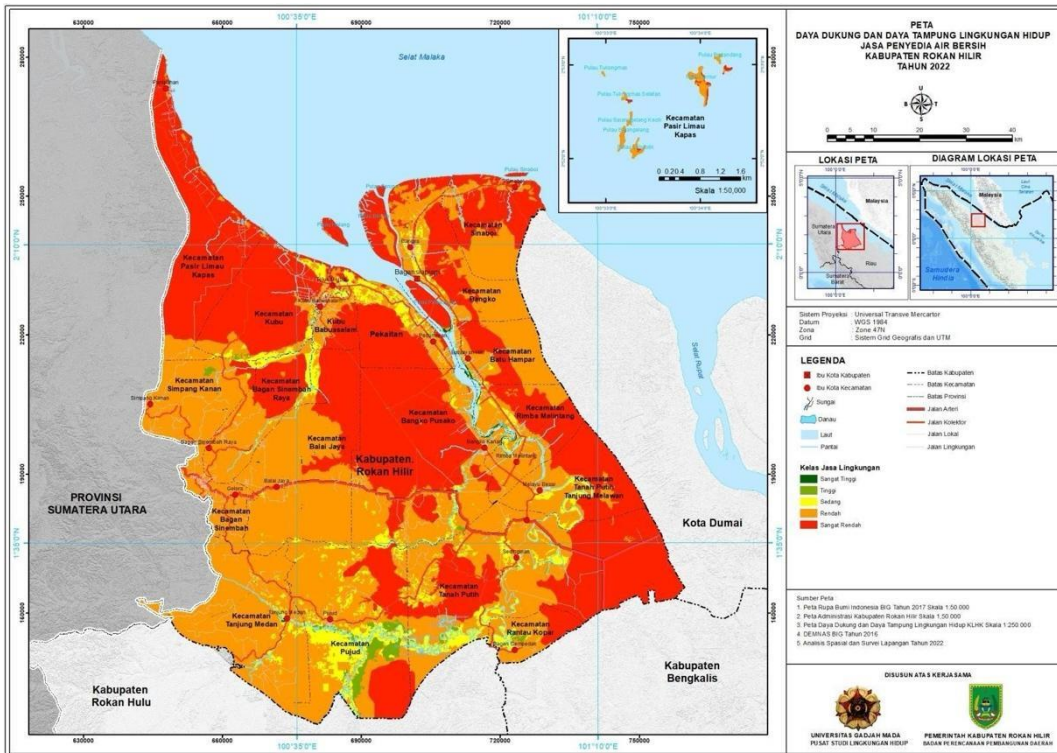
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.9 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan



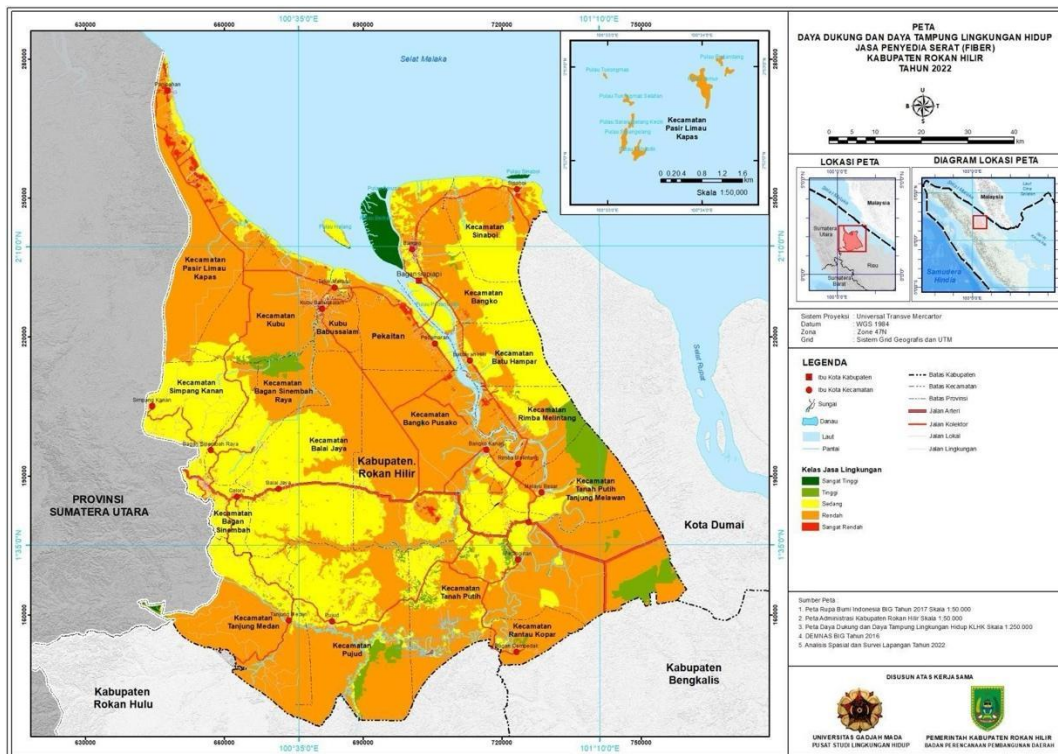
Sumber: DDDLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.10 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air



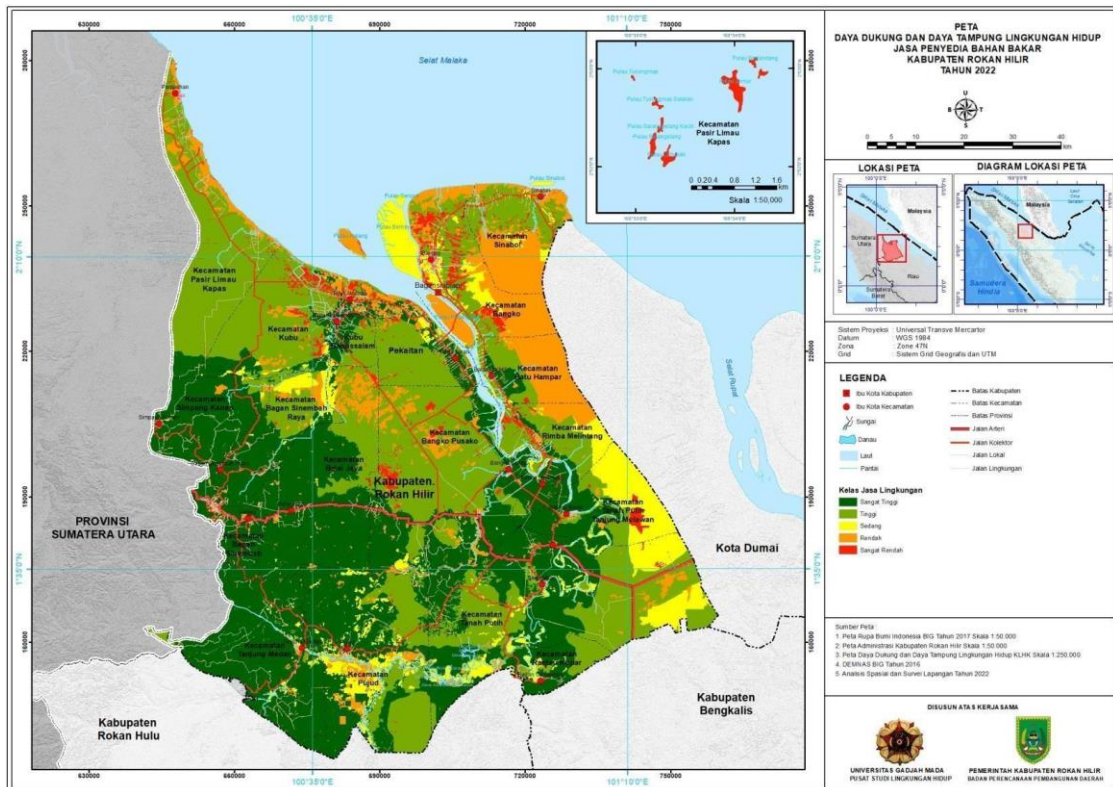
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.11 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat



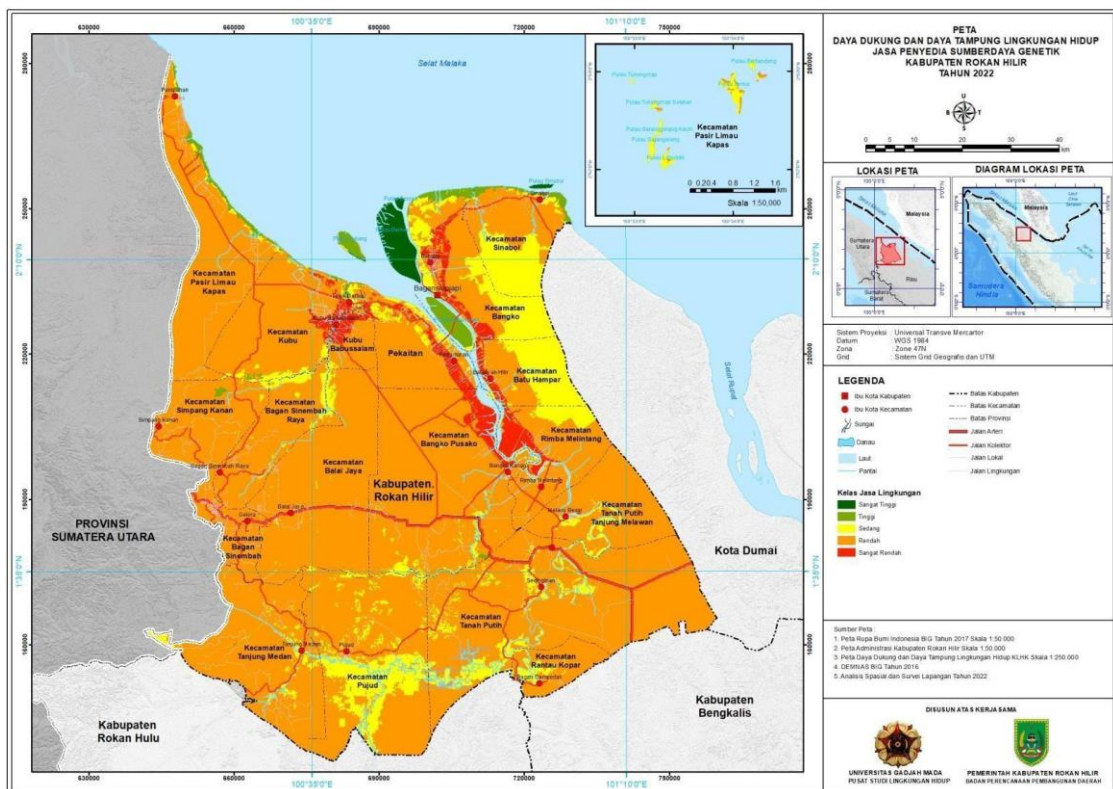
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.12 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar



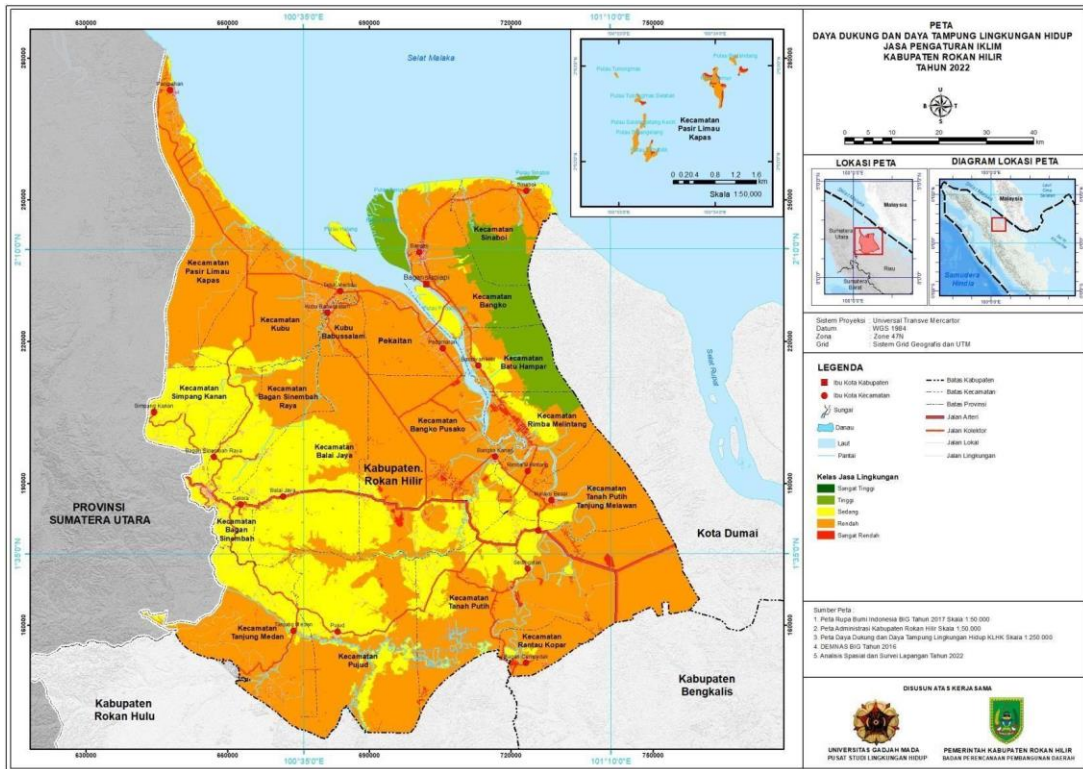
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.13 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik



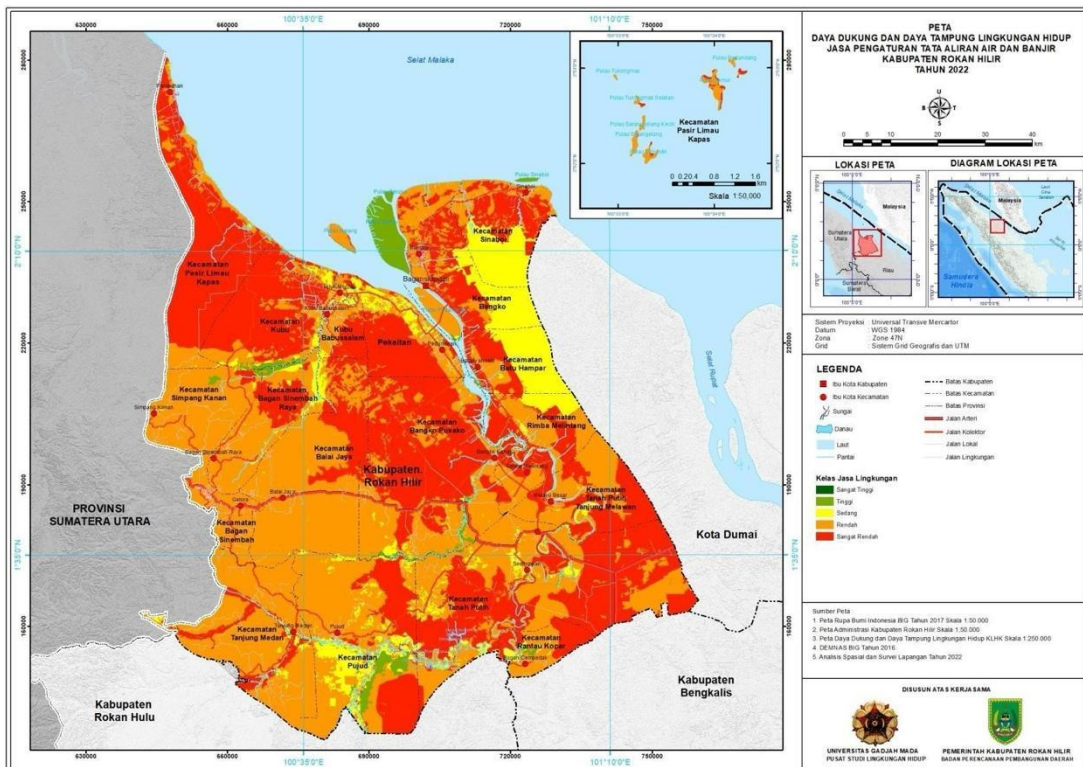
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.14 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim



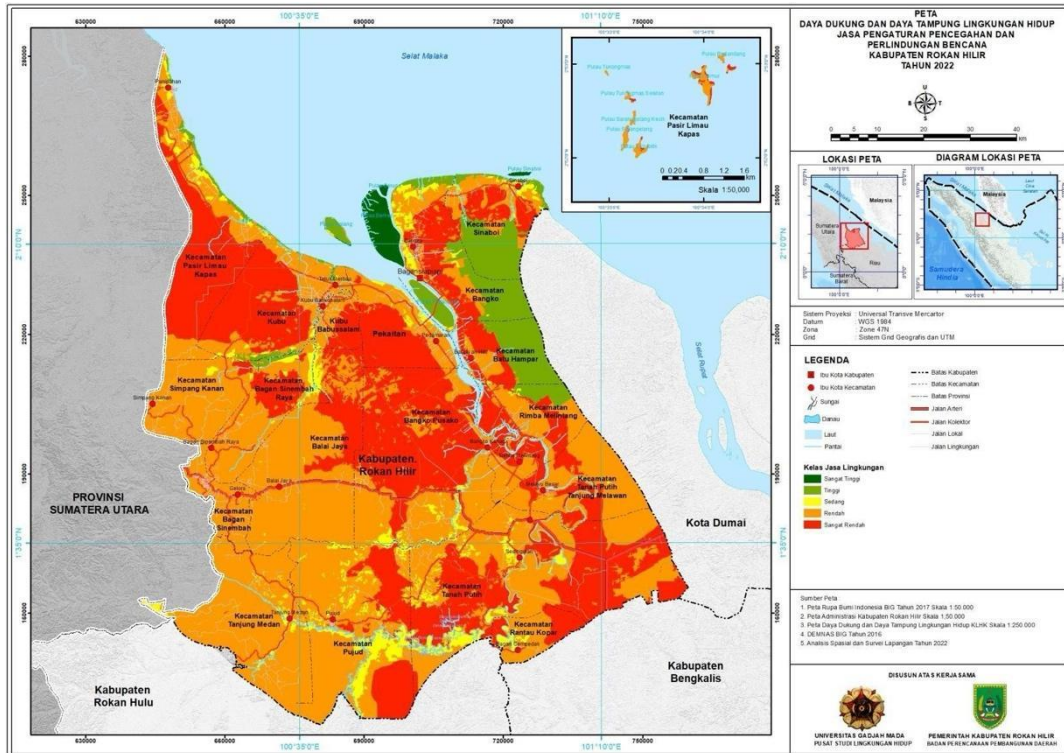
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.15 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



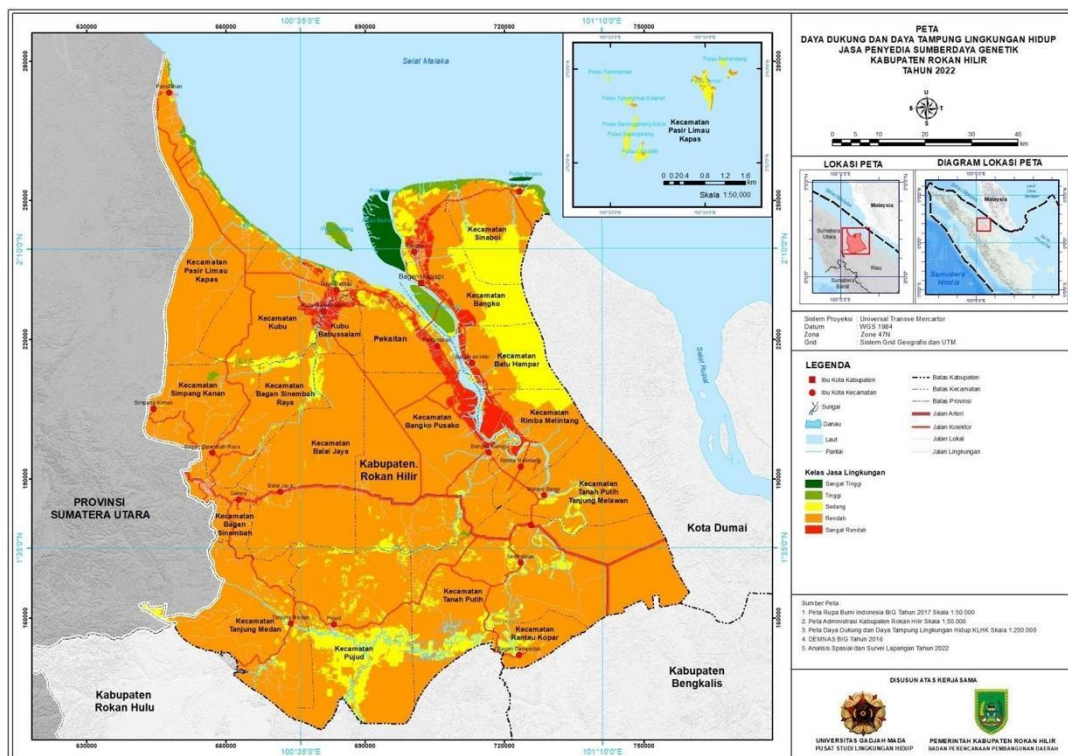
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.16 **Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana**



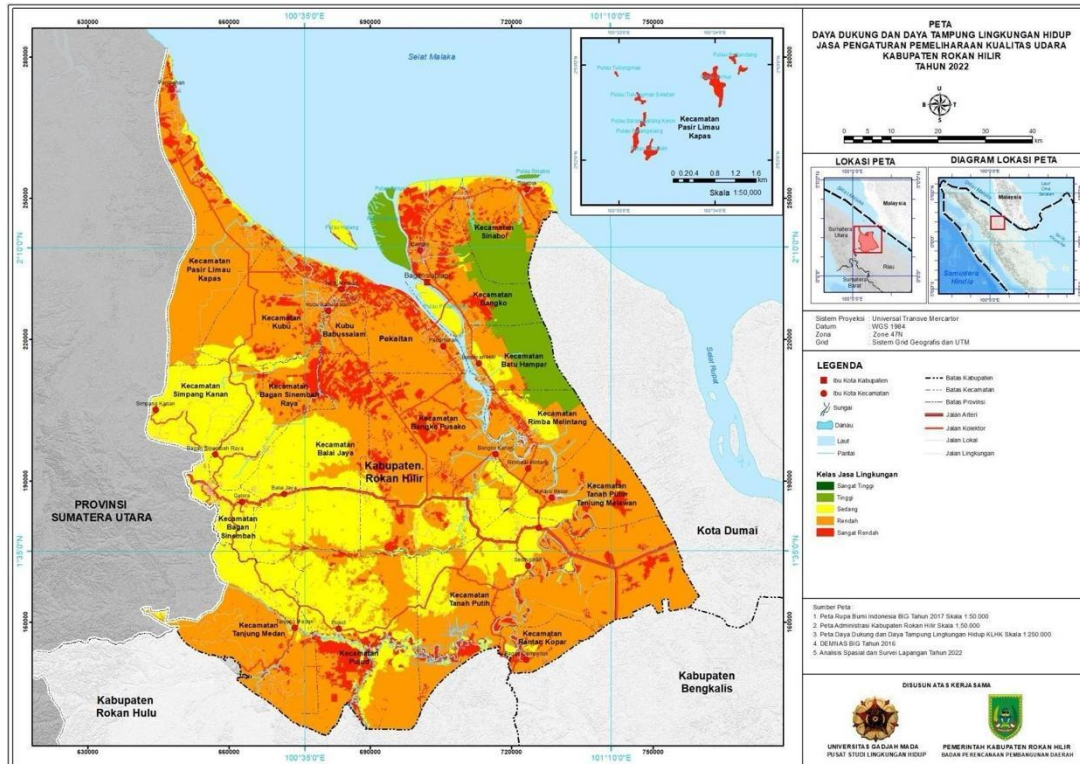
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.17 **Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah**



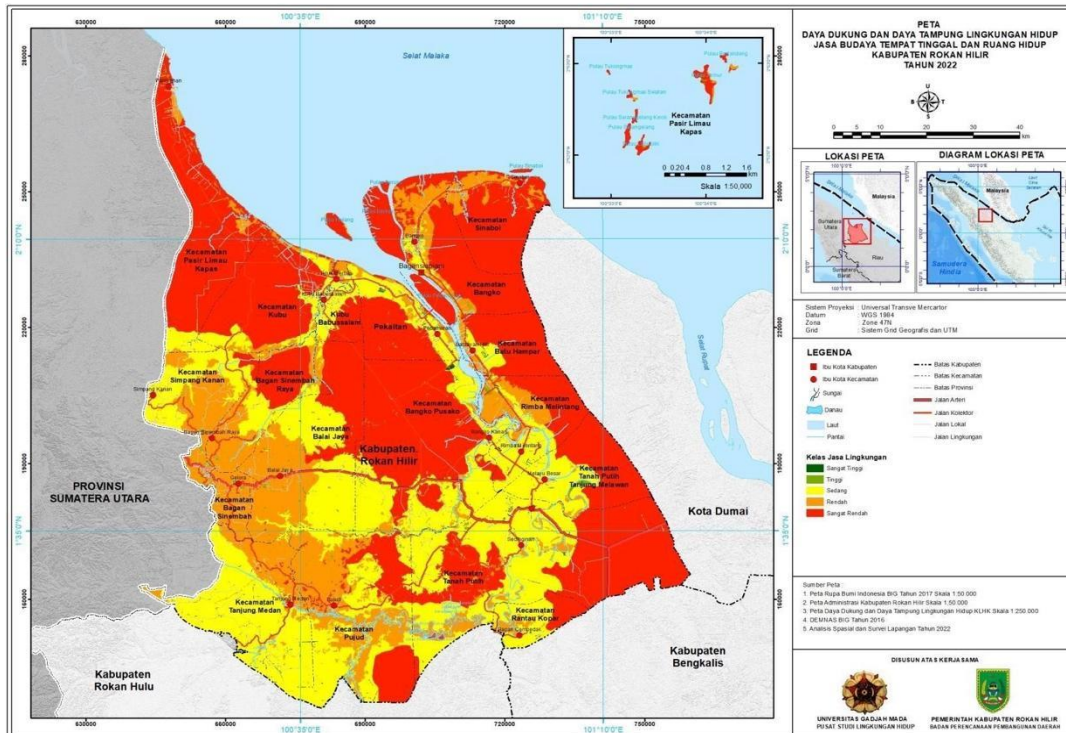
Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.18
Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.19
Peta Jasa Lingkungan Untuk Tempat Tinggal dan Ruang Hidup



Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

II-40

p. Status Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Rokan Hilir

Status daya dukung air diperoleh dengan cara membandingkan antara nilai kebutuhan air total dengan ketersediaan air yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kebutuhan air total merupakan jumlah dari nilai kebutuhan air untuk keperluan domestik dengan kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan. Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap selisih antara angka kebutuhan air dengan angka ketersediaan air di Kabupaten Rokan Hilir, diperoleh bahwa terdapat 5 Kecamatan yang masuk kategori status daya dukung airnya terlampaui atau deficit dengan nilai yang bervariasi, kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Bagan Sinambeh Raya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Simpang Kanan. Secara rinci, distribusi status daya dukung air dirinci menurut wilayah Kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.21 Distribusi Status Daya Dukung Air Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

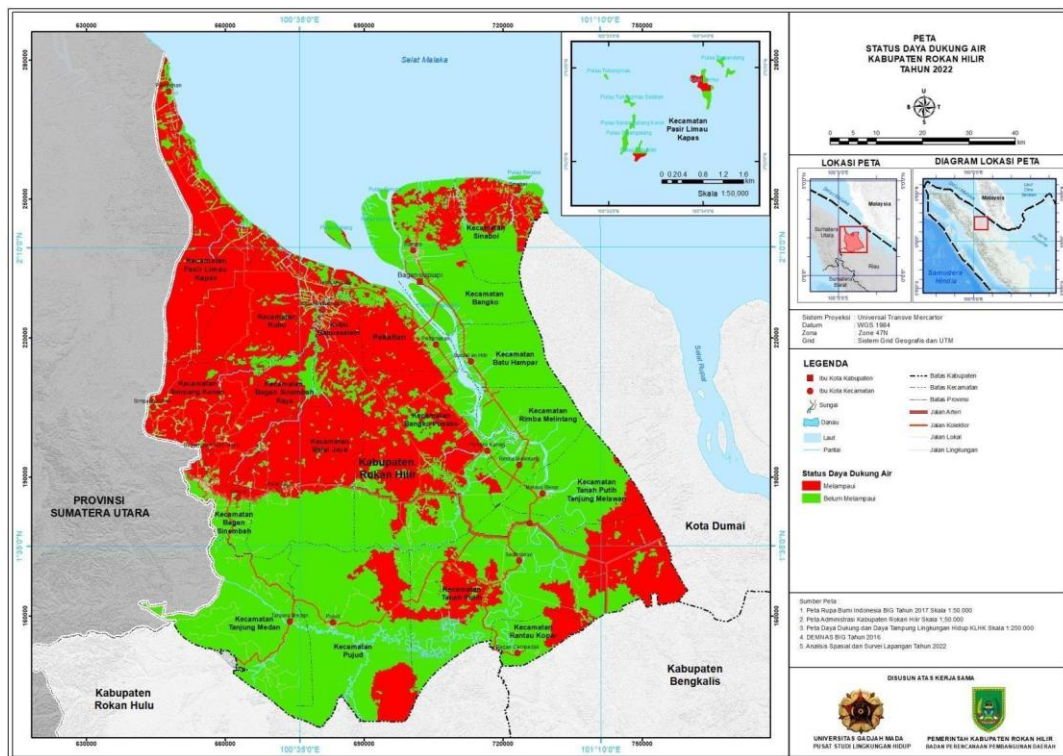
No	Kecamatan	Kebutuhan Air Total (M ³)	Ketersediaan Air (M ³)	Surplus/Defisit (M ³)	Status Daya Dukung Air
1	Bagan Sinembah	154234522,1	273904875,5	119670353,4	Belum Melampaui
2	Balai Jaya	718133872,8	858094099,3	139960226,6	Belum Melampaui
3	Bangko	282934153,8	887643404,3	604709250,5	Belum Melampaui
4	Bangko Pusako	871944204,3	1471453911	599509706,7	Belum Melampaui
5	Batu Hampar	104494671,3	546819745,9	442325074,5	Belum Melampaui
6	Pekaitan	339215536,7	640105900	300890363,3	Belum Melampaui
7	Pujud	906537386,4	2117932370	1211394983	Belum Melampaui
8	Rantau Kopar	149585984,6	326286654,5	176700670,2	Belum Melampaui
9	Rimba Melintang	298541014,7	829625032	531084017,4	Belum Melampaui
10	Sinaboi	197582096,3	417138046,2	219555949,9	Belum Melampaui
11	Tanah Putih	1280334441	2249792045	969457603,8	Belum Melampaui
12	Tanah Putih Tanjung Melawai	361440021,6	765408814,7	403968793,1	Belum Melampaui
13	Tanjung Medan	568369097,3	1267136615	698767518	Belum Melampaui

II-41

14	Bagan Sinembah Raya	292236295,7	179369100,8	-112867194,8	Terlampau
15	Kubu	390617961,2	197394521,1	-193223440,2	Terlampau
16	Kubu Babussalam	484303073,2	336507813,2	-147795260,1	Terlampau
17	Pasir Limau Kapas	638746169,6	328284309	-310461860,3	Terlampau
18	Simpang Kanan	360767062,9	259238029,2	-101529033,8	Terlampau

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.20 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045
q. Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Rokan Hilir

II-42

Status daya dukung pangan diperoleh dengan cara membandingkan antara nilai kebutuhan pangan total dengan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap selisih antara angka kebutuhan pangan dengan angka ketersediaan pangan serta luas lahan pada distribusi masing- masing grid di Kabupaten Rokan Hilir, diperoleh hasil luas lahan daya dukung pangan yang belum terlampaui sebesar 93 % atau 840.699,49 ha, sedangkan lahan dengan status terlampaui di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7 % atau seluas 65.252,17 ha. Distribusi status daya dukung pangan baik yang belum terlampaui dan telah terlampaui di Kabupaten Rokan Hilir tersebar diseluruh wilayah

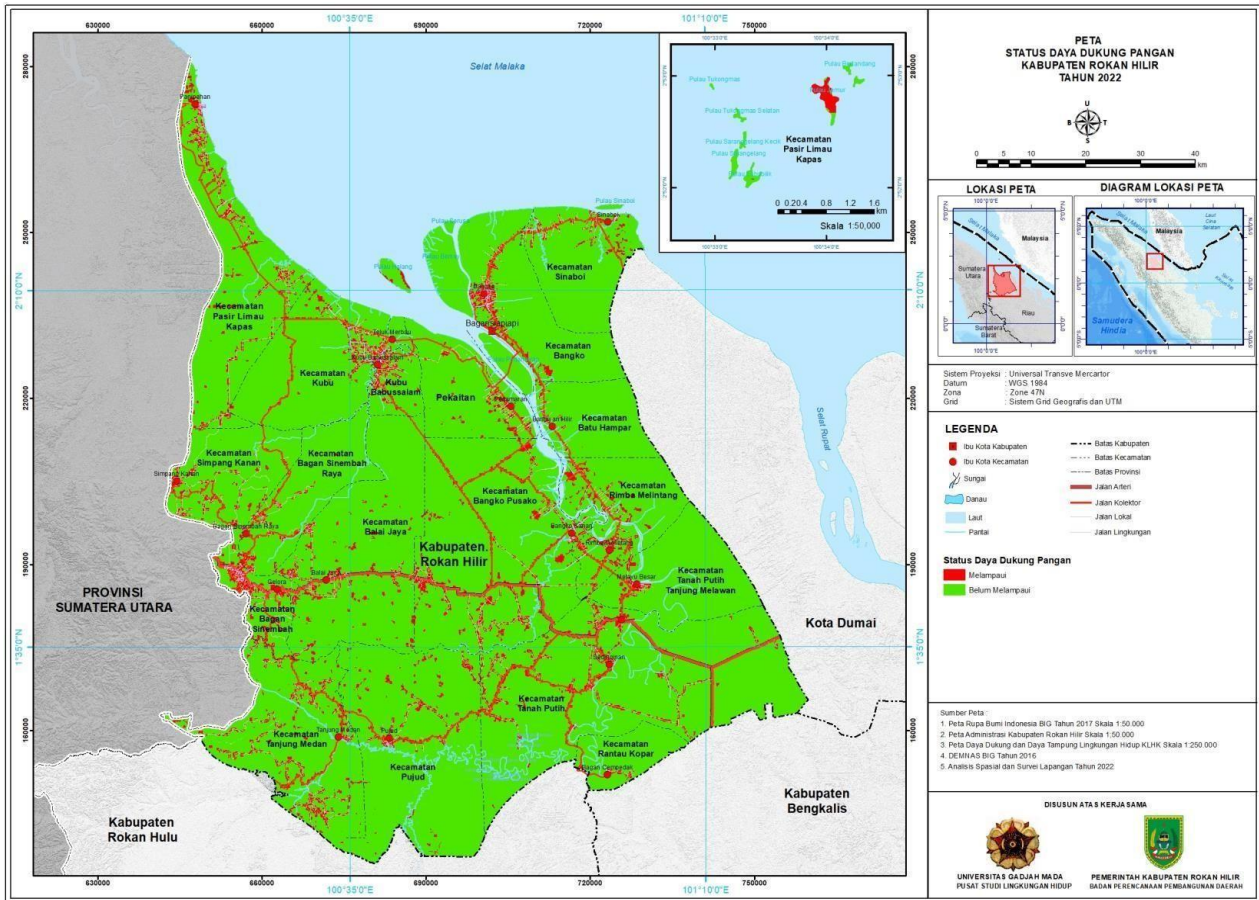
kecamatan. Kecamatan Tanah Putih merupakan wilayah dengan status daya dukung pangan belum terlampaui (surplus) yang terbesar yaitu mencapai 13,07 % dari total luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir atau sebesar 118.420,54 ha. Secara rinci terkait distribusi luas lahan status daya dukung pangan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel II.22 Luas Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bagan Sinembah	11.995,65	3.951,06	15.946,71
2	Bagan Sinembah Raya	25.946,06	1.755,31	27.701,37
3	Balai Jaya	59.290,48	4.485,41	63.775,89
4	Bangko	53.060,32	4.053,38	57.113,70
5	Bangko Pusako	80.144,62	7.890,71	88.035,33
6	Batu Hampar	22.231,19	430,04	22.661,23
7	Kubu	35.641,37	3.341,54	38.982,91
8	Kubu Babussalam	53.297,38	2.595,71	55.893,09
9	Pasir Limau Kapas	56.681,84	5.129,60	61.811,44
10	Pekaitan	38.218,02	2.369,46	40.587,48
11	Pujud	92.039,82	4.250,35	96.290,17
12	Rantau Kopar	14.876,48	368,88	15.245,36
13	Rimba Melintang	32.010,15	4.115,83	36.125,98
14	Simpang Kanan	30.302,12	2.644,16	32.946,28
15	Sinaboi	33.280,98	1.952,40	35.233,38
16	Tanah Putih	118.420,54	9.003,85	127.424,39
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	35.163,55	1.151,55	36.315,10
18	Tanjung Medan	48.098,92	5.762,93	53.861,85
Total Luas		840.699,49	65.252,17	905.951,66

Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

Gambar II.21
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: DDDTLH Rokan Hilir, 2022

9. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang kawasan hutan provinsi Riau, bahwa luas kawasan hutan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Rokan Hilir kurang lebih seluas 11.610 Ha. Status Kawasan Areal Penggunaan lain di Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas lebih besar daripada luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 dengan luasan 341.001Ha. Selain kawasan berupa areal penggunaan lain, kawasan yang terluas adalah Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan 151.582 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Gambar II.18 dan Tabel berikut.

Tabel II.23 Kawasan Hutan Berdasarkan Kecamatan

NO.	KECAMATAN	KAWASAN HUTAN							LUAS (HA)
		AREA PENGGUNAAN LAINNYA (APL)	CAGAR ALAM (CA)	HUTAN LINDUNG (HL)	HUTAN PRODUKSI (HP)	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK)	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	BADAN AIR	
1	Bagan Sinembah Raya	9.655				10.418	16.499		36.572
2	Bagansinembah	15.128			33	1.868			17.029
3	Balai Jaya	52.409			1.859	4.521	2.317	5	61.111
4	Bangko	23.019	7.468		15.526	6.200	4.094	966	57.273
5	Bangko Pusako	35.286		65	55.991	4.312	206	1.208	97.068
6	Batu Hampar	10.243			11.232		142	951	22.568
7	Kubu	11.462				8.986	18.673	101	39.222
8	Kubu Babussalam	11.986			21.092	1.965	13.743	111	48.897
9	Pasir Limau Kapas	13.033		25		11.283	34.200	11	58.552
10	Pekaitan	31.690			82	4.681	936	4.038	41.427
11	Pujud	41.571		5	29.588	13.801	3.199	750	88.914
12	Rantau Kopar	1.166			292	4.533	8.813	210	15.014
13	Rimba Melintang	20.710		71	10.478	1.962		1.689	34.910
14	Simpang Kanan	7.557				16.114	6.839		30.510
15	Sinaboi	6.345			18.297	2.241	8.805	31	35.719
16	Tanah Putih	22.630		3.260	43.877	33.195	23.864	1.598	128.424
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	5.107		90	23.972	8.678		1.293	39.140
18	Tanjung Medan	22.002		8.095	1.859	13.252	9.253	52	54.513
JUMLAH		341.001	7.468	11.610	234.177	148.010	151.582	13.014	906.863

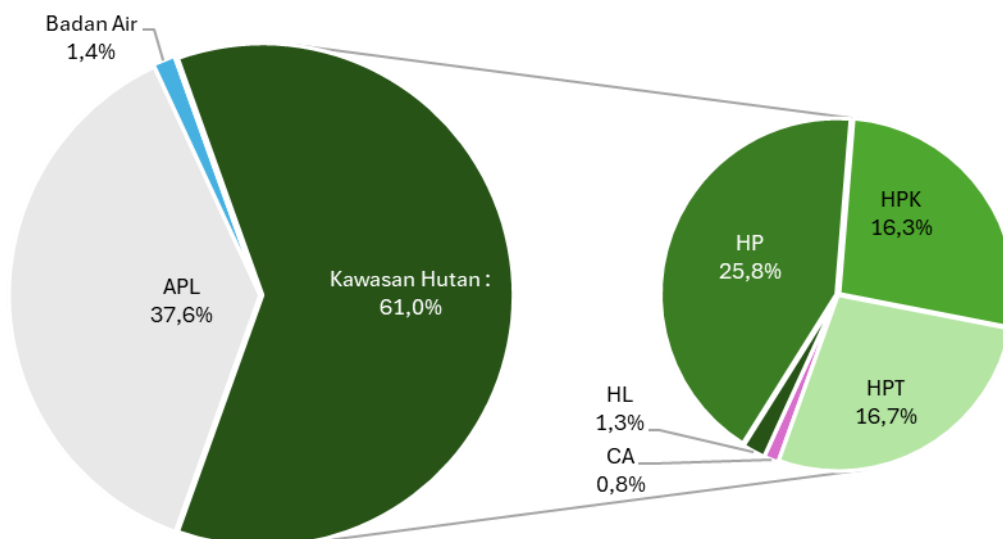
Sumber : BPKHTL XIX, 2024

Dari tabel diatas dapat dibuat rekapitulasi Kawasan Non Hutan dan Kawasan Hutannya sebagai berikut :

Tabel II.24 Rekapitulasi Kawasan Non Hutan dan Kawasan Hutannya

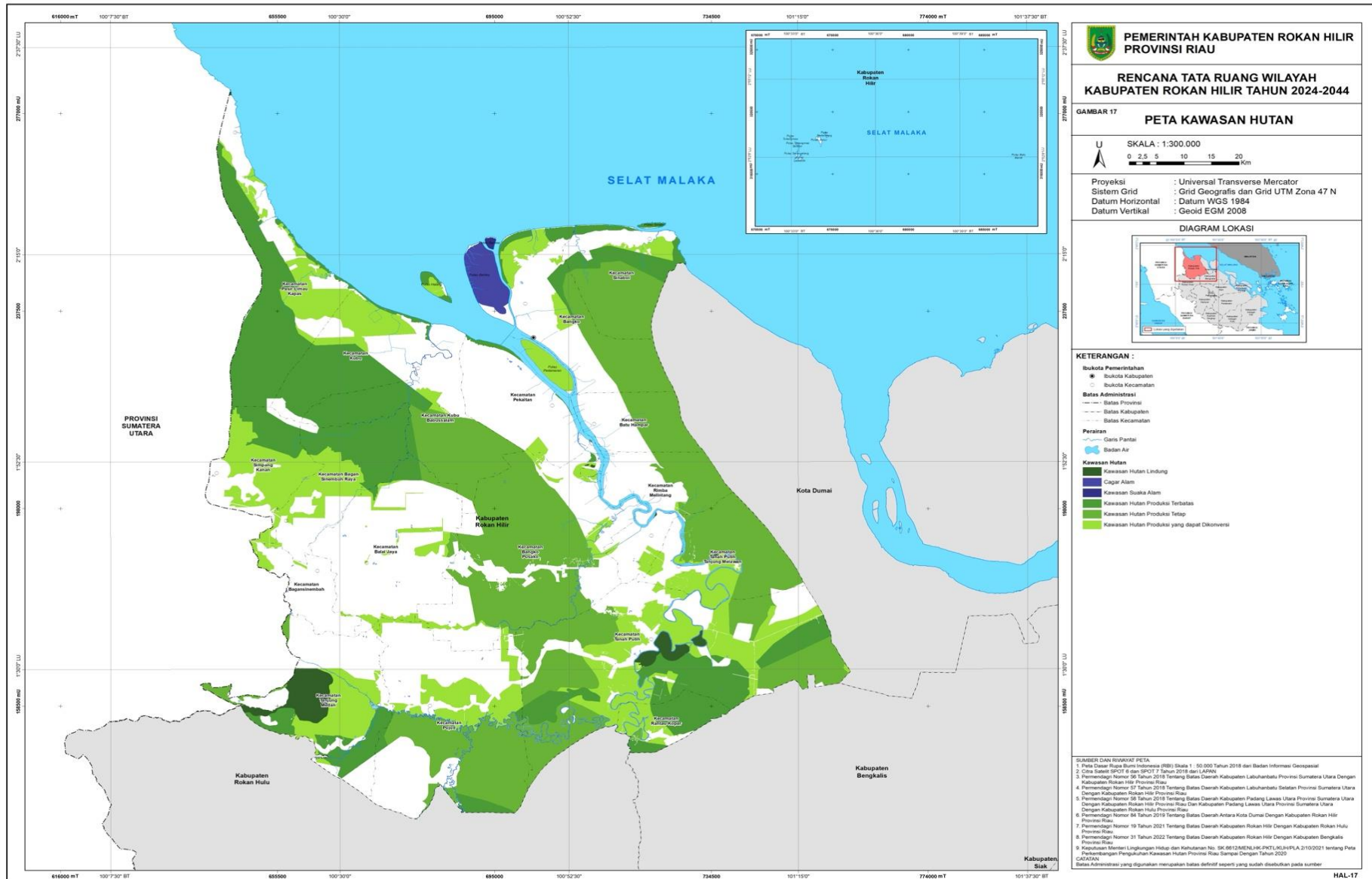
FUNGSI	LUAS (HA)	PERSENTASE
KAWASAN NON HUTAN	354.015	39,0%
APL	341.001	37,6%
Badan Air	13.014	1,4%
KAWASAN HUTAN	552.847	61,0%
CA	7.468	0,8%
HL	11.610	1,3%
HP	234.177	25,8%
HPK	148.010	16,3%
HPT	151.582	16,7%

Gambar II.22 Grafik Persentase Kawasan Hutan Dan Non Hutan



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat, bahwa luas kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir ada 61% atau 552.847 Ha dari luas Kabupaten Rokan Hilir.

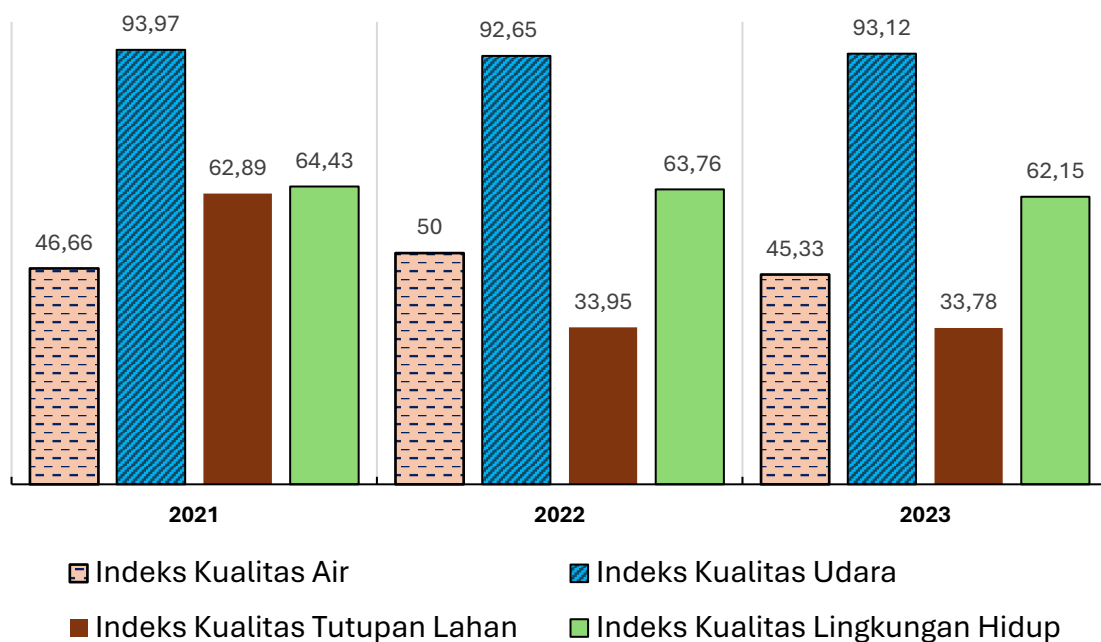
Gambar II.23 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir



10. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah. IKLH umumnya mencakup beberapa komponen utama seperti kualitas air, udara, dan tutupan lahan (hutan atau vegetasi). Nilai IKLH memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut, dan sebaliknya. Pemerintah dan instansi terkait biasanya menggunakan IKLH sebagai acuan dalam perumusan kebijakan untuk memperbaiki dan menjaga kondisi lingkungan hidup. Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan nilai IKLH dari 63,76 pada tahun 2022 menjadi 62,15 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Gambar II.24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2021-2023



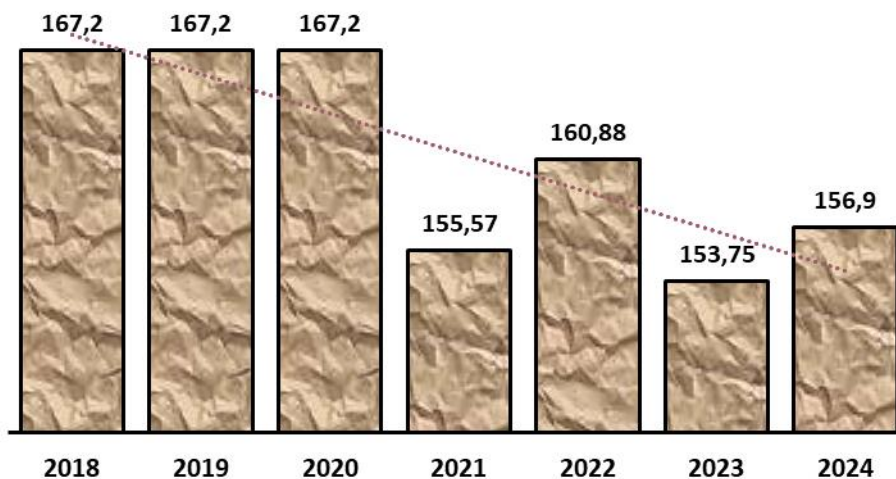
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, 2020-2023

11. Kerawanan Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Berikut data Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2024.

Gambar II.25 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024



Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Tahun 2024, Kabupaten Rokan Hilir memiliki indeks risiko 156,9 (tinggi).

1. Banjir

Di Kabupaten Rokan Hilir, yang termasuk dalam kawasan rawan bencana adalah kawasan rawan bencana banjir, dimana pada kawasan ini potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadi banjir berulang kali. Pada kawasan ini merupakan kawasan dataran dengan fungsi budidaya. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Rokan Hilir pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kerawannya. 1. Tingkat kerawanan rendah, 2. Tingkat Kerawanan Sedang, 3. Tingkat kerawanan tinggi. Adapun untuk Kecamatan dengan kondisi tingkat kerawanan tinggi berada di Kecamatan Bangko Pusako, Tanah Putih, Bagan Sinembah, Tanjung

Medan, Pujud, Bangko, Rimba Melintang, Kubu Babusalam dan Batu Hampar.

Tabel II.25 Matrik Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	TINGKAT KERAWANAN			
		TIDAK TERGENANG	RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Bangko Pusako				
2	Tanah Putih				
3	Pasir Limau Kapas				
4	Pekaitan				
5	Sinaboi				
6	Simpang Kanan				
7	Bagan Sinembah				
8	Tanjung Medan				
9	Pujud				
10	Bangko				
11	Rimba Melintang				
12	Rantau Kopar				
13	Kubu Babusalam				
14	Batu Hampar				

Sumber: Hasil olahan data Peta Rawan Bencana Banjir,2021

2. Abrasi

Menurut BPDAS (2006), DAS Rokan merupakan kawasan DAS kritis, rawan bencana banjir, erosi, abrasi dan pendangkalan, serta terjadi berbagai macam pencemaran. Perubahan ekosistem pada DAS Rokan diindikasikan dengan kejadian banjir akibat meluapnya Sungai Rokan dan anak-anak sungainya. Perubahan ekosistem tersebut disebabkan oleh wilayah dalam DAS Rokan merupakan daerah yang potensial berkembang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di sepanjang aliran Sungai Rokan terutama di Kecamatan Rimba Melintang dan ke arah hilirnya yaitu kecamatan Bangko mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi sehingga dampak dari abrasi yang terjadi sangat terlihat khususnya Kecamatan Bangko yang merupakan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

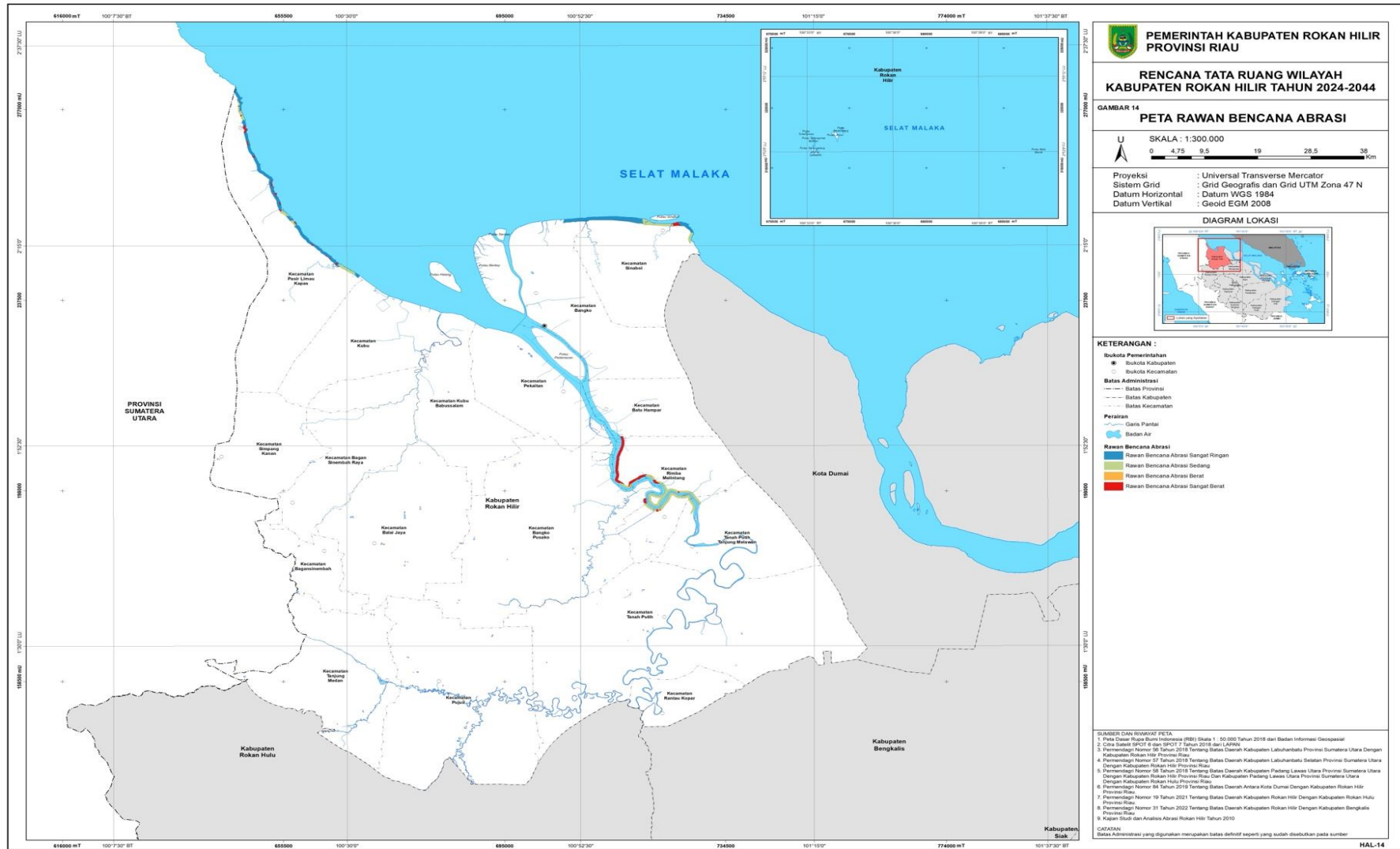
Berdasarkan dokumen Pemetaan Kawasan Cluster Abrasi dan Perencanaan Program Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 3 Kecamatan yang mengalami potensi abrasi diantaranya adalah Kecamatan Rimba Melintang, Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Sinaboi. Untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Sinaboi

merupakan abrasi pantai yang juga perlu penanganan baik itu dengan sistem reboisasi maupun konstruksi pengaman pantai lainnya. Selain Kecamatan-kecamatan yang berada pada jalur DAS Rokan serta kecamatan di wilayah pesisir, Kecamatan Pujud Juga memiliki resiko abrasi dikarenakan Ibukota Kecamatannya dilintasi oleh sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.21

3. Kebakaran Lahan Gambut

Selain potensi bencana akibat dari aktivitas alam, perlu juga diwaspadai terjadinya bencana akibat dari terjadinya kebakaran lahan gambut. Hal ini sangat wajar sekali. Mengingat kabupaten Rokan Hilir merupakan kawasan yang berada di sekitar Sungai Rokan dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesisir Selat Malaka. Sehingga jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir memiliki kecenderungan berupa rawa dan bergambut yang berasal dari tumpukan-tumpukan material dari sisa-sisa tumbuhan-tumbuhan yang terpendam ratusan tahun lamanya. Ketika memasuki musim kemarau. Antara Januari s/d Agustus musim panas lahan-lahan rawa maupun gambut cenderung mengalami kekeringan pada musim kemarau. Status siaga perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas membakar lahan, akibatnya yang sering terjadi yaitu sangat gampang sekali terjadi kebakaran lahan gambut pada musim kemarau tersebut. mengingat sifat gambut yang terbakar akan sangat dihentikan mengingat api-api kecil yang umumnya berada didalam gambut dalam sangat sukar untuk dipastikan keberadaannya. Sehingga wajar saja para petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten dan Provinsi serta dari Manggala Agni Dinas Kehutanan serta personil Tentara yang diterjunkan untuk memadamkan lokasi kebakaran gambut dibuat sangat kesulitan.

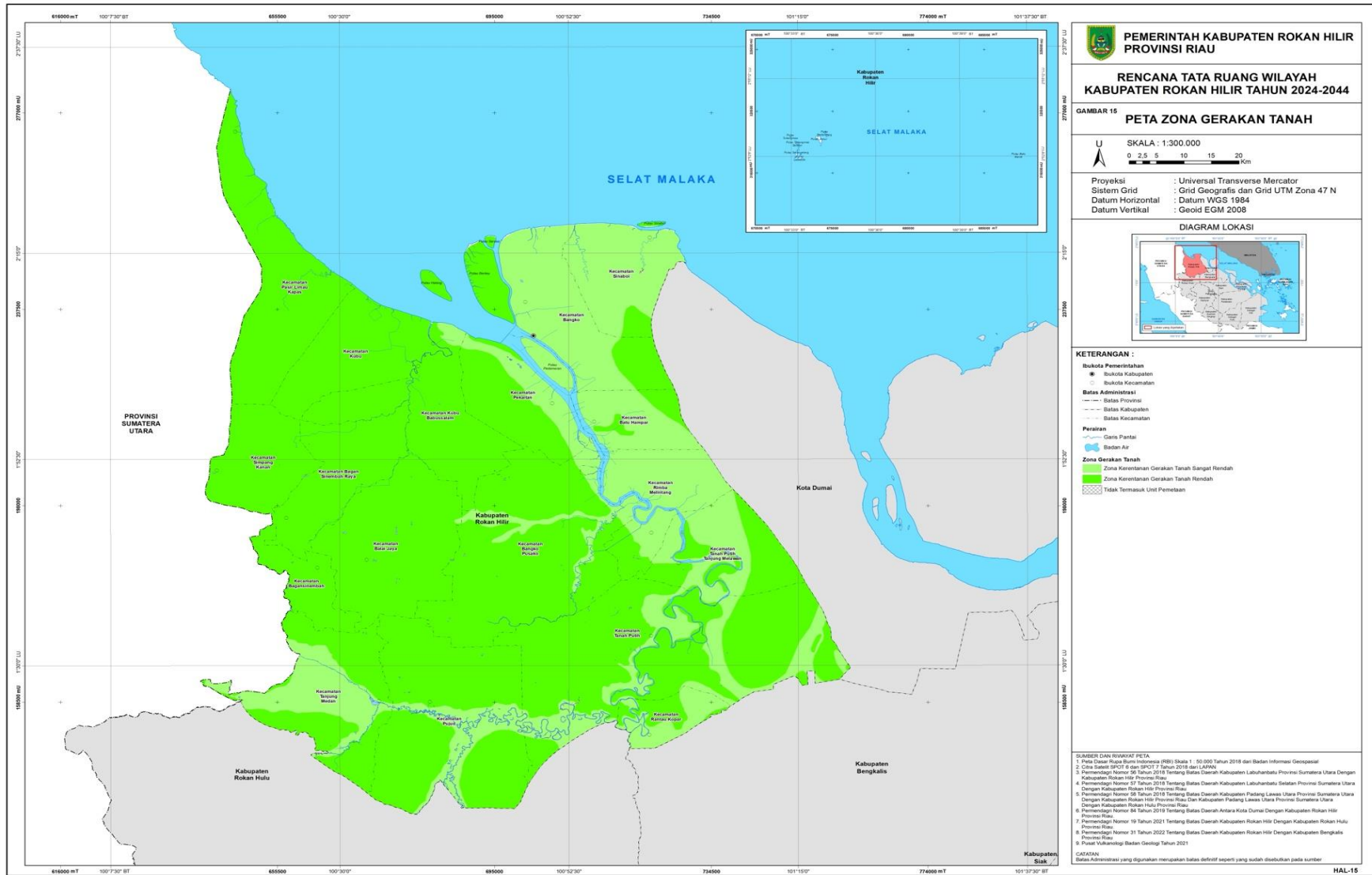
Gambar II.26 Peta Kebencanaan Abrasi



4. Gerakan Tanah

Dalam kebencanaan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai resiko kebencanaan gerakan tanah, Adapun Kawasan Rawan bencana terbagi menjadi 2 yaitu Rendah dan sangat rendah menurut data GIS Tahun 2021. Adapun kawasan yang memiliki resiko kebencanaan sangat rendah yaitu Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melawan, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rantai Kopar, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanjung Medan serta Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu di dominasi dengan resiko kebencanaan Rendah. Lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilihat pada Gambar II.22

Gambar II.27 Peta Peta Kebencanaan Gerakan Tanah



12. Daerah Aliran Sungai

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dilalui oleh 4 (empat) aliran sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Kubu, Sungai Bangko dan Sungai Sinaboi, serta topografi wilayah yang datar dengan rata-rata ketinggian 5 mdpl. Kondisi ini juga mengakibatkan Kabupaten Rokan Hilir selalu menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, di mana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK.

Sungai Rokan merupakan sungai terbesar di Provinsi Riau yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Pegunungan Bukit Barisan, Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu, sampai bermuara di Selat Malaka. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki sungai-sungai lainnya yakni Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Berdasarkan data RTRW Provinsi Riau tahun 2018 luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan adalah sebesar 2.009.768 Ha, dan melewati sekitar 72% Wilayah Provinsi Riau.

Berkaitan dengan kondisi DAS Rokan berdasarkan hasil *Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS Rokan* (BP DAS, 2018) adalah sebagai berikut :

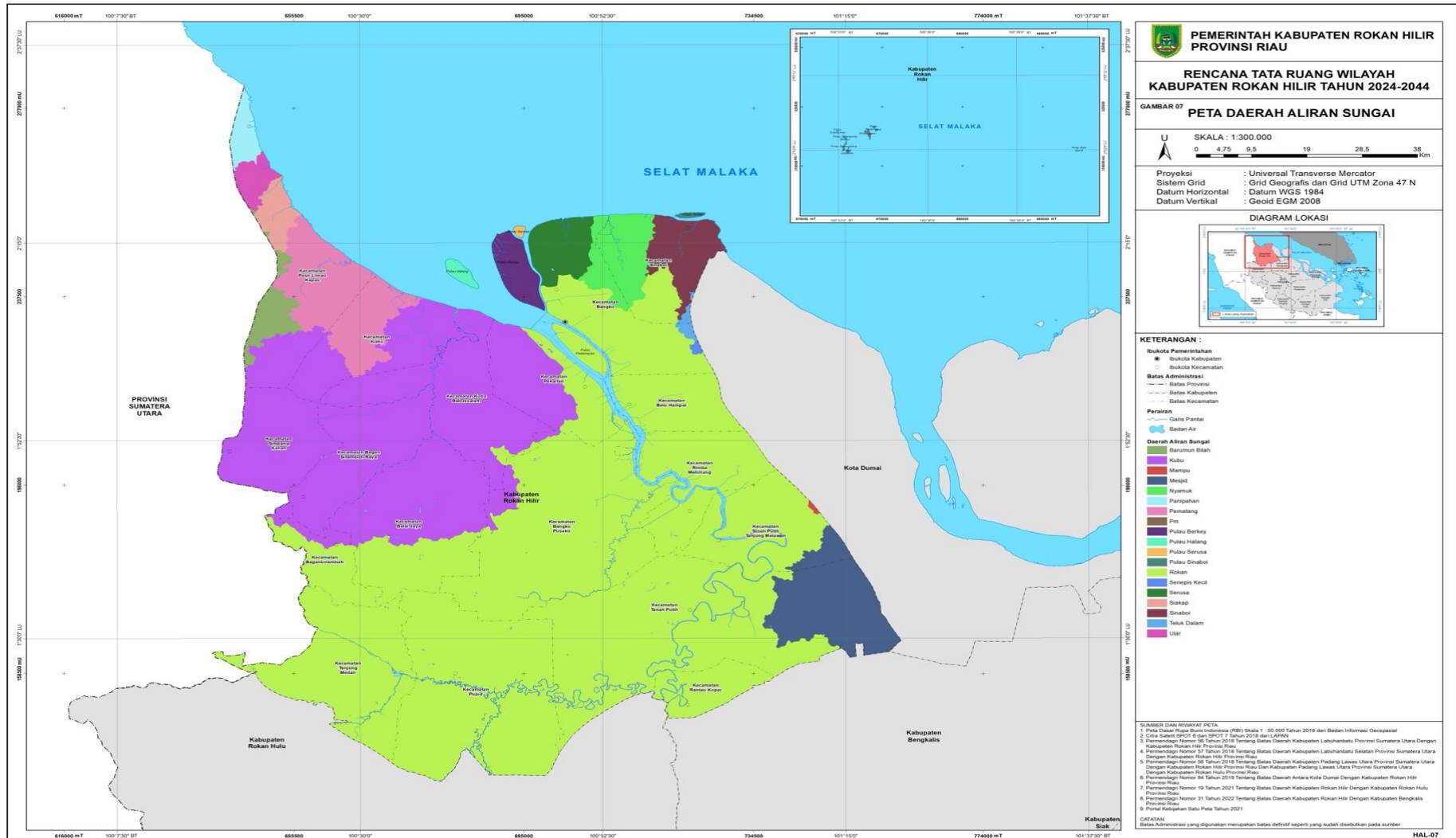
- Tingkat kekritisian lahan sangat tinggi (Persentase lahan kritis 23.59%).
- Penutupan vegetasi permanen dalam kondisi baik (71.89%)
- Indeks kekritisian berada pada kelas sangat tinggi.
- Muatan sedimen berada pada kelas sangat tinggi.
- Tingkat kerawanan terhadap banjir tinggi.
- Kondisi kawasan lindung buruk.
- Kondisi daya dukung DAS Rokan buruk.

Tabel II.26 Kondisi Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Rokan Hilir

NO	KECAMATAN	DAERAH ALIRAN SUNGAI									
		BARUMUH BILAH	KUBU	MAMPU	MESJID	NYAMUK	PANIPAHAN	PEMATANG	PM	PULAU BERKEY	PULAU HALANG
1	Tanah Putih				30.466,68						
2	Pujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tanah Putih Tanjung Melawan			233,44	4.313,05						
4	Rantau Kopar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tanjung Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bagan Sinembah		3.552,39								
7	Simpang Kanan		30.510,61								
8	Bagan Sinembah Raya		36.571,68								
9	Balai Jaya		40.009,06								
10	Kubu		23.116,38					16.105,81			
11	Pasir Limau Kapas	8.590,41	10.457,90				5.338,06	22.104,73	29,28		
12	Kubu Babusalam		45.947,10					24,28			1.734,14
13	Bangko					5.309,12				8.277,53	
14	Sinaboi					12.716,76					
15	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pekaitan		21.083,04								
17	Rimba Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Bangko Pusako		4.536,89								
JUMLAH		8.590,41	215.785,04	233,44	34.779,73	18.025,88	5.338,06	38.234,82	29,28	8.277,53	1.734,14

NO	KECAMATAN	DAERAH ALIRAN SUNGAI									LUAS (HA)
		PULAU SERUSA	PULAU SINABOI	ROKAN	SENEPIS KECIL	SERUSA	SIAKAP	SINABOI	TELUK DALAM	ULAR	
1	Tanah Putih			97.957,55							128.424,23
2	Pujud			88.912,45							88.912,45
3	Tanah Putih Tanjung Melawan			34.594,10							39.140,58
4	Rantau Kopar			15.014,27							15.014,27
5	Tanjung Medan			54.513,21							54.513,21
6	Bagan Sinembah			13.476,26							17.028,65
7	Simpang Kanan										30.510,61
8	Bagan Sinembah Raya			0,97							36.572,64
9	Balai Jaya			21.101,09							61.110,14
10	Kubu										39.222,19
11	Pasir Limau Kapas						6.760,48			5.271,52	58.552,38
12	Kubu Babusalam			1.191,52							48.897,03
13	Bangko	379,98		29.533,01	407,73	12.565,18			801,20		57.273,74
14	Sinaboi		448,55	6.877,68				15.099,65	576,43		35.719,07
15	Batu Hampar			22.567,40							22.567,40
16	Pekaitan			20.343,64							41.426,69
17	Rimba Melintang			34.938,75							34.938,75
18	Bangko Pusako			92.501,71							97.038,60
JUMLAH		379,98	448,55	533.523,59	407,73	12.565,18	6.760,48	15.099,65	1.377,63	5.271,52	906.862,63

Gambar II.28 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Hilir



Tabel II.27 Jumlah Hotspot di Kabupaten Rokan Hilir 2016-2023

Kecamatan/Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Bagan Sinembah	14	11	196	362	68	121	88	58
Kecamatan Bangko	52	5	70	320	85	82	46	64
Kecamatan Bangko Pusako	10	-	6	-	-	-	-	-
Kecamatan Batu Hampar	5	-	3	-	-	-	-	-
Kecamatan Kubu	39	3	55	2	-	-	-	-
Kecamatan Pasir Limau Kapas	21	3	23	1	-	-	-	-
Kecamatan Pujud	83	3	1	-	-	-	-	-
Kecamatan Rimba Melintang	6	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Rantau Kopar	-	-	2	-	-	-	-	-
Kecamatan Simpang Kanan	13	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sinaboi	6	1	1	-	-	-	-	-
Kecamatan Tanah Putih	64	28	119	138	98	84	53	39
Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	1	4	38	-	-	-	-	-
Grand Total	314	58	514	823	251	287	187	161

Sumber: *Satelit Lapan 2020 (Lapan.go.id)*

Data jumlah hotspot di Kabupaten Rohil tahun 2016-2020 yang disajikan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 jumlah hotspot 314, terjadi penurunan tahun 2017 dengan jumlah hotspot 58, pada tahun 2018 jumlah hotspot Kembali meningkat dengan jumlah hotspot 514, kemudian pada tahun 2019 jumlah hotspot terjadi kenaikan yakni 823 hotspot, dan pada 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni sebanyak 251 hotspot. Namun, tahun 2019 jumlah hotspot di Kabupaten Rokan Hilir naik secara signifikan. Upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan tampaknya membuahkan hasil yang cukup baik pada tahun 2020 hingga terjadi penurunan jumlah hotspot, namun di tahun 2021 masih perlu perhatian khusus untuk menurunkan jumlah hotspot, walaupun kecenderungan jumlah hotspot tergantung dari cuaca yang dialami.

Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di wilayah ini. Beberapa upaya dan kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

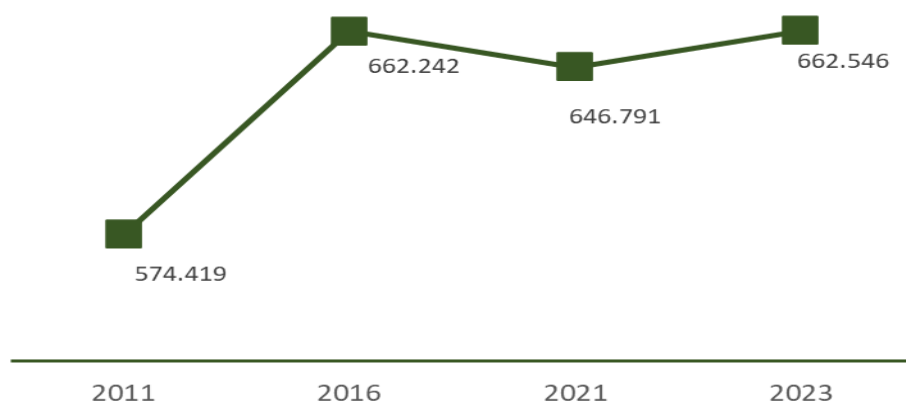
2.1.2 Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hilir mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Ini melibatkan pemantauan pertumbuhan penduduk, distribusi usia, dan struktur demografis lainnya. Pengetahuan tentang demografi penduduk membantu pemerintah setempat dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, pemahaman tentang demografi dapat memberikan wawasan terkait dengan tenaga kerja, potensi ekonomi, serta tantangan dan peluang pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Analisis demografi yang komprehensif menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan dinamika populasi setempat.

1. Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi kependudukan Kabupaten Rokan Hilir dapat dianalisis dengan melihat pada grafik di bawah ini.

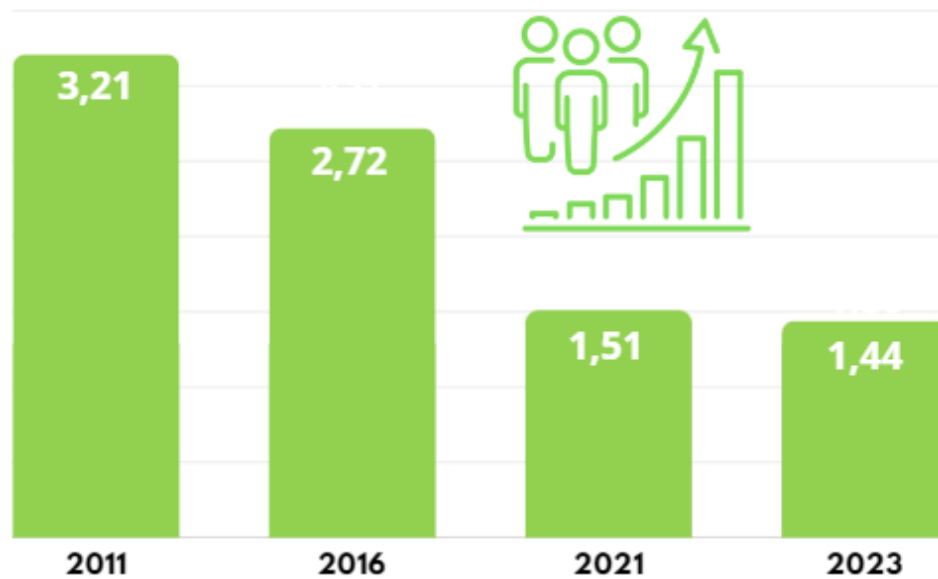
Gambar II.29 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2011-2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir memiliki tren yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2023. Di mana pada tahun 2011 jumlah penduduk sebesar 574.419 jiwa. Kemudian meningkat jumlah penduduk sebesar 662.242 jiwa pada tahun 2016, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 yaitu sebesar 646.791 jiwa. Kemudian pada tahun 2023 di akhir periode meningkat hingga 662.546 jiwa.

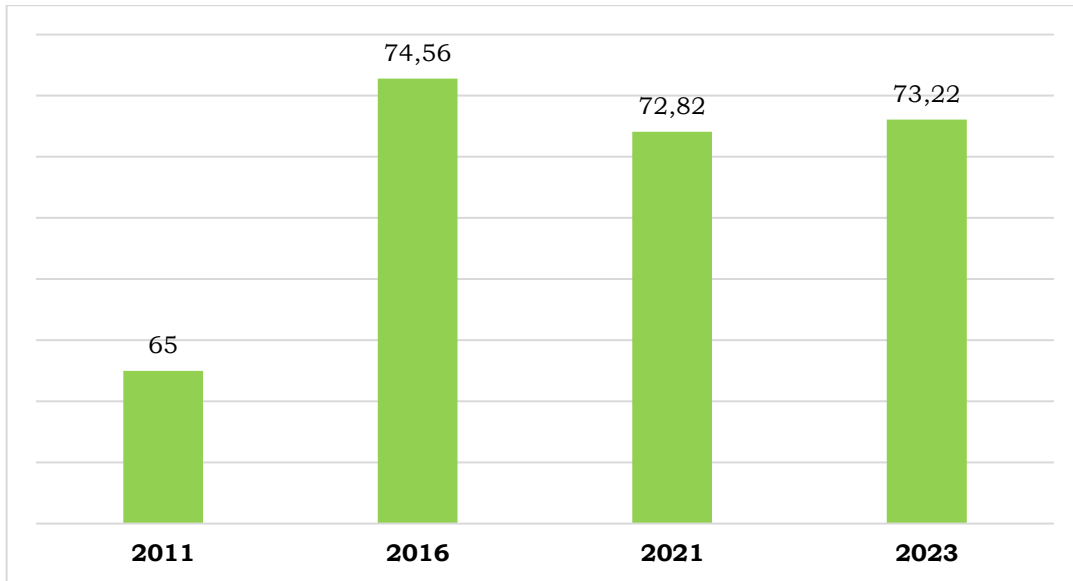
Gambar II.30 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Rokan Hilir, 2011-2023

Grafik laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir di atas menunjukkan bahwa pergerakan laju pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan selama masa periode dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Pada tahun 2011 berada di angka 3,21 persen, lalu mengalami perlambatan di tahun 2016 yaitu berada di angka 2,72 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami perlambatan hingga 1,51 persen dan pada tahun 2023 berada pada angka 1,44 persen.

Gambar II.31 Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2019-2024

Kepadatan penduduk per kilometer di Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan kenaikan drastis antara tahun 2011 dan 2016, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 73,22 pada tahun 2023. Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah populasi dan ketersediaan infrastruktur. Kecamatan Bangko mencatatkan kepadatan penduduk tertinggi, sementara Kecamatan Rantau Kopar memiliki kepadatan penduduk terendah. Hal ini dapat dipahami mengingat secara geografis, Kecamatan Rantau Kopar terletak cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, yang mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas di daerah tersebut.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur maka jumlah penduduk Kabupaten Rokan hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 (Jiwa)

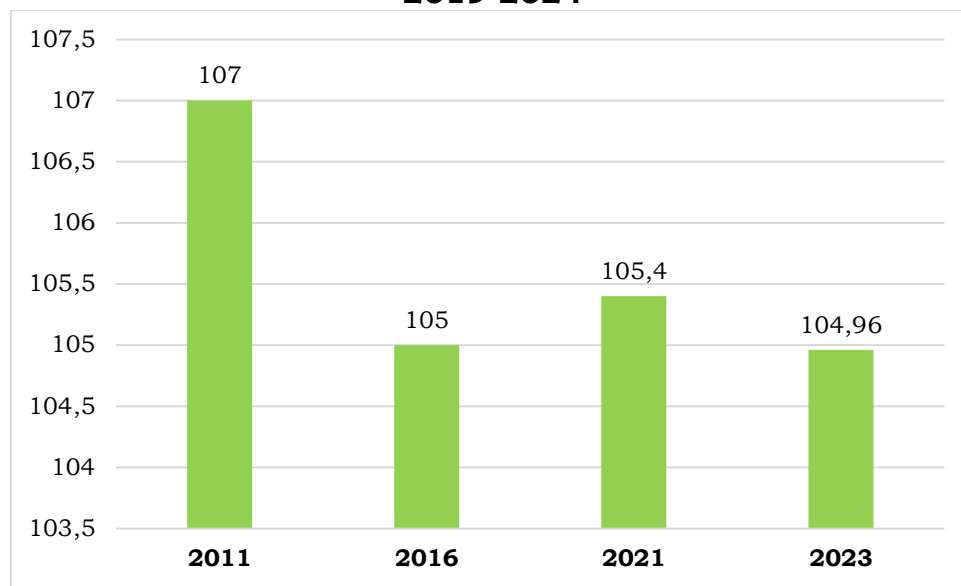
Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	22.208	21.080	43.288
5-9	35.476	33.064	68.540
10-14	38.275	35.790	74.065
15-19	27.125	26.404	53.529
20-24	31.322	30.130	61.452
25-29	27.468	25.904	53.372
30-34	25.981	25.620	51.601

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
35-39	25.504	25.451	50.955
40-44	26.350	25.819	52.169
45-49	21.475	20.542	42.017
50-54	18.591	17.122	35.713
55-59	14.076	13.311	27.387
60-64	10.351	9.836	20.187
65-69	7.064	6.477	13.541
70-74	3.979	3.693	7.672
75+	3.637	3.421	7.058
Jumlah	338.882	323.664	662.546

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2024

Sebanyak 456.802 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Rokan Hilir, sebagian besar dihuni oleh penduduk berusia 0-39 tahun. Penduduk rentang usia tersebut mendominasi sekitar 456.802 ribu jiwa. Jika mengacu pada klasifikasi generasi menurut Badan Pusat Statistik yang terdiri dari Generasi *Baby Boomers* (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau *millennials* (Kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi *Alpha* (Kelahiran 2013-2025) ditemukan bahwa generasi di Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh Generasi Y atau *millennials*, Gen Z, dan Gen *Alpha*. Selain itu, persentase penduduk produktif (15-64 tahun) juga mendominasi sebesar 448.382 ribu jiwa dari total penduduk. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang tinggi. Kondisi ini merupakan peluang bagi Kabupaten Rokan Hilir untuk memanfaatkan penduduk usia produktif untuk guna mengakselerasi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar II.32 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2024

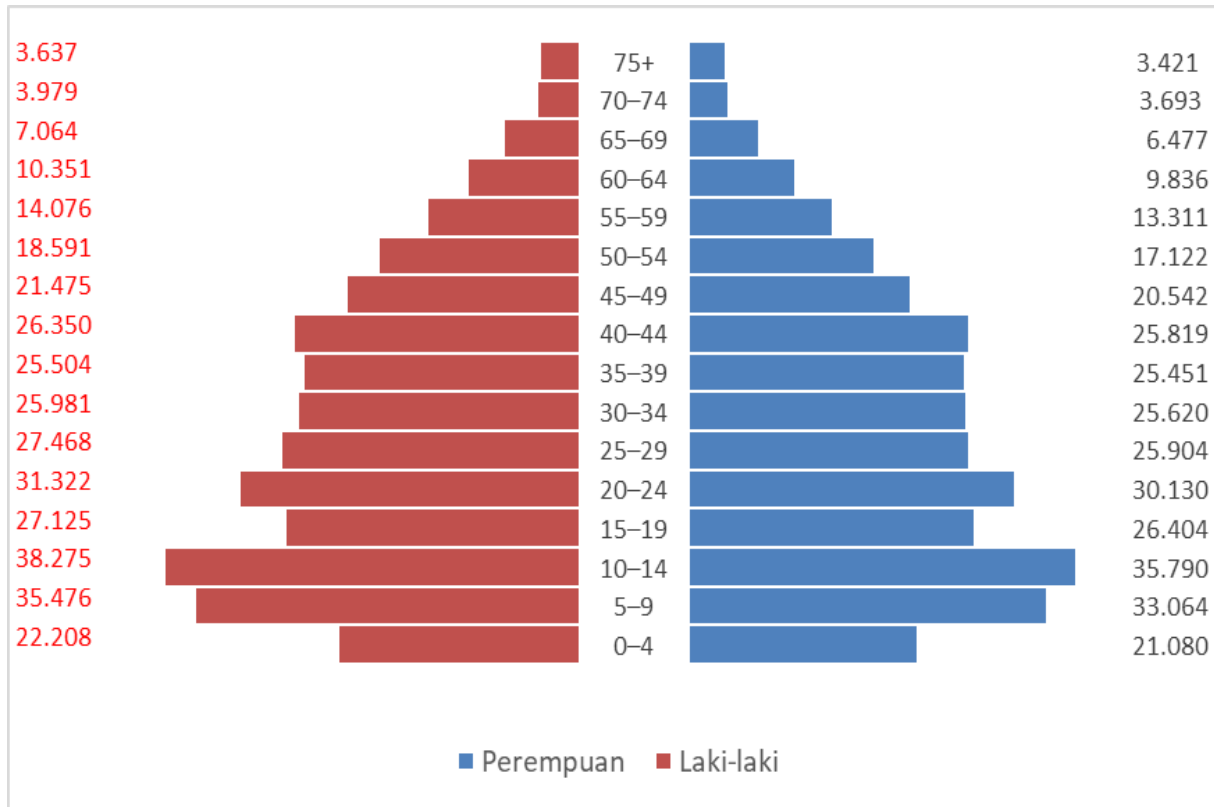


Sumber: BPS Provinsi Riau, 2019-2024

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Rokan Hilir, yang menunjukkan jumlah laki-laki per 100 perempuan, mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2023. Pada tahun 2011, rasio ini tercatat sebesar 107 dan menurun menjadi 105 pada tahun 2016. Selanjutnya, terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 105,4 sebelum kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 104,96. Meskipun mengalami penurunan secara bertahap, data ini tetap menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yang mencerminkan dominasi penduduk laki-laki di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Gambar II.33 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2024

Dari piramida penduduk Kabupaten Rokan Hilir didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir memiliki cukup banyak penduduk usia muda dan sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun penduduk usia tua juga meningkat di jumlah penduduk usia 75 tahun ke atas meskipun secara proporsi sangat kecil. Sedangkan kelompok umur paling banyak penduduknya yakni pada kelompok umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun di mana masih menempuh jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata dalam rangka mewujudkan SDM Rokan Hilir yang unggul.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan dinamis. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi perekonomian daerah, sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. Gambaran Perekonomian daerah di Kabupaten Rokan Hilir memberikan pemahaman yang berkaitan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, PDRB Per Kapita, laju inflasi, dan tingkat kemiskinan.

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

Lebih jelasnya, perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar dan juga ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Sehingga dalam perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDRB ADHK.

Gambar II.34 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2012-2024

Grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir mengalami tren yang positif walaupun di awal tahun pembangunan yaitu tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi memiliki realisasi -0,01 persen. Kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 1,97 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 1,63 persen dan melanjutkan tren positifnya hingga mencapai angka 2,83 persen pada tahun 2023.

Tabel II.29 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha atau Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023 (%)

No	Kategori	2011	2016	2021	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,79	2,36	3,26	2,78
2	Pertambangan dan Penggalan	-7,24	-0,99	-3,82	2,01
3	Industri Pengolahan	7,99	7,28	4,45	2,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,66	12,93	5,91	7,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	-0,24	3,5	5,63
6	Konstruksi	9,43	1,56	2,62	8,67
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,64	3,54	8,02	6,20
8	Transportasi dan Pergudangan	3,57	2,6	5,18	5,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	2,93	4,7	4,23
10	Informasi dan Komunikasi	10,39	2,45	6,14	7,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	65,87	2,52	4,99	3,37
12	Real Estate	5,51	0,85	2,88	3,69
13	Jasa Perusahaan	7,47	1,64	2,16	6,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,98	0,35	-0,81	6,73
15	Jasa Pendidikan	3,73	0,45	2,67	2,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,03	2,45	6,74	6,84

No	Kategori	2011	2016	2021	2023
17	Jasa lainnya	6,87	3,32	4,02	7,12
Produk Domestik Regional Bruto		-0,01	1,97	1,63	2,83

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2011-2023

2. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menjadi suatu paradigma di mana memposisikan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari upaya pembangunan daerah. Pembangunan manusia sendiri ditujukan guna mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi, serta meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan hidup yang panjang dan sehat.

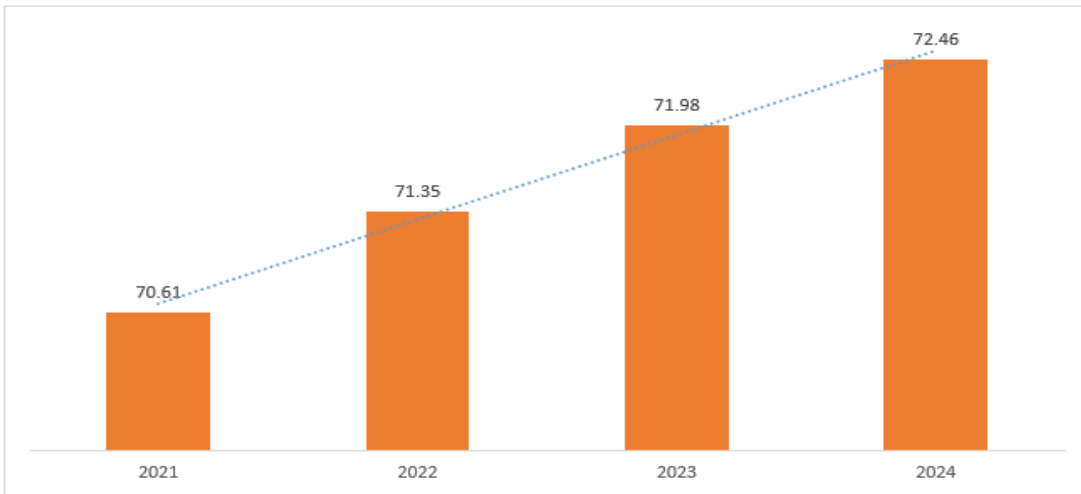
Tabel II.30 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	8,26	8,28	8,52	8,53
Harapan Lama Sekolah	12,76	12,83	12,88	12,89
Angka Harapan Hidup	70,39	70,69	70,99	71,11
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	9.417,00	9,906,00	10.097,00	10,447,00

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025

Belum optimalnya rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Rokan Hilir serta penduduk dengan klaster menengah ke bawah yang belum optimal melanjutkan pendidikan mempengaruhi terhadap capaian IPM di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut capaian IPM di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2021-2024.

Gambar II.35 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rokan Hilir 2021-2024



Sumber: BPS dalam angka 2025

Berdasarkan grafik di atas, IPM Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2024. Indikator komposit IPM dari sektor pendidikan, diukur dengan capaian rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan, merupakan isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya pembangunan manusia dari sisi pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

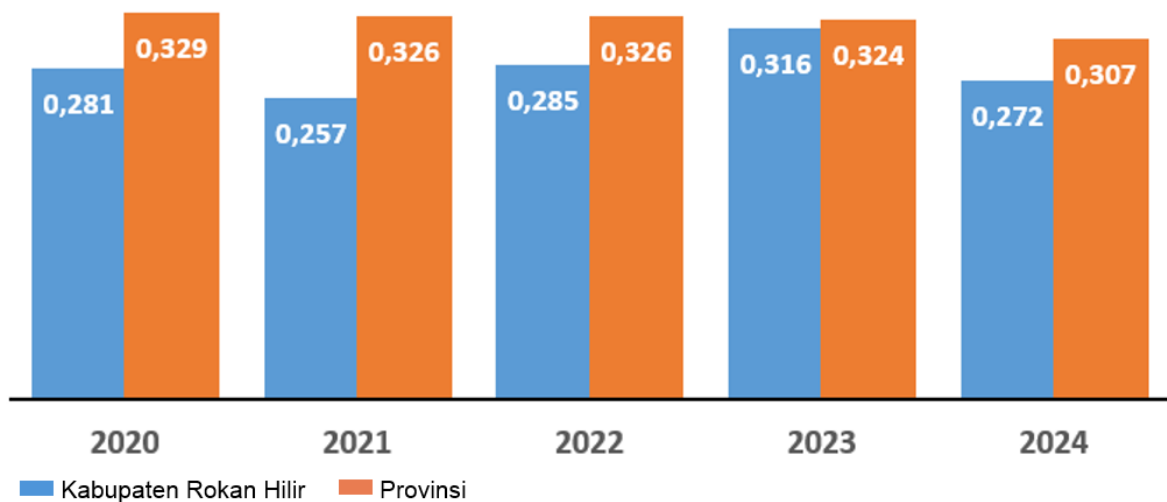
5. Indeks Gini

Pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah mampu mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Kesenjangan ini dapat diukur menggunakan indeks gini atau tingkat ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila indeks gini bernilai 0 mengartikan bahwa pemerataan suatu daerah terjadi secara sempurna, sebaliknya apabila indeks gini mendekati angka 1 maka ketimpangan telah terjadi. Indeks gini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan *policy makers* dalam menentukan kebijakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pola pencapaian indeks gini Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Di mana pada awal tahun 2020 berada di angka 0,281 yang kemudian terjadi penurunan di tahun 2021 hingga berada di angka 0,257. Pada tahun 2022, capaian indeks gini naik kembali hingga berada di angka 0,285 dan terus mengalami kenaikan pada

Tahun 2023 menjadi 0,316. Pada Tahun 2024 Indeks Gini mengalami penurunan menjadi 0,272. Beberapa indikasi pada penurunan indeks gini ini seperti lebih banyak penduduk mendapatkan akses yang lebih merata terhadap kesempatan ekonomi dan pendapatan; lebih banyak individu dan keluarga dapat mengatasi kemiskinan atau kehidupan di bawah garis kemiskinan; hingga ketimpangan yang lebih rendah sehingga cenderung mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan stabilitas dalam masyarakat.

Gambar II.36
Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu dapat diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan menjadi permasalahan kompleks yang multidimensional karena berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir untuk senantiasa berupaya menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan layak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan persentase penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuasi kecil selama periode tahun 2020-2024. Meskipun ada variasi tahun demi tahun, namun tingkat kemiskinan cenderung tetap relatif stabil dalam kisaran 6.72% hingga 7.18%.

Gambar II.37 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Kondisi penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat meskipun secara absolut penurunannya cukup kecil. Hal ini dapat mencerminkan berbagai faktor positif seperti peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, dan berbagai program bantuan sosial yang efektif di mana tergambar pada masing-masing indikator capaian pembangunan. Kemiskinan yang menurun sering kali juga berarti bahwa lebih banyak individu dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan dalam suatu masyarakat.

**Tabel II.31 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2021-2024**

Indikator	2021	2022	2023	2024
a. Garis Kemiskinan (Rupiah)	437.938	465.614	511.610	545.799
b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	51,97	49,59	53,04	53,49
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,79	1,34	1,22	0,85
d. Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,18	0,36	0,29	0,19

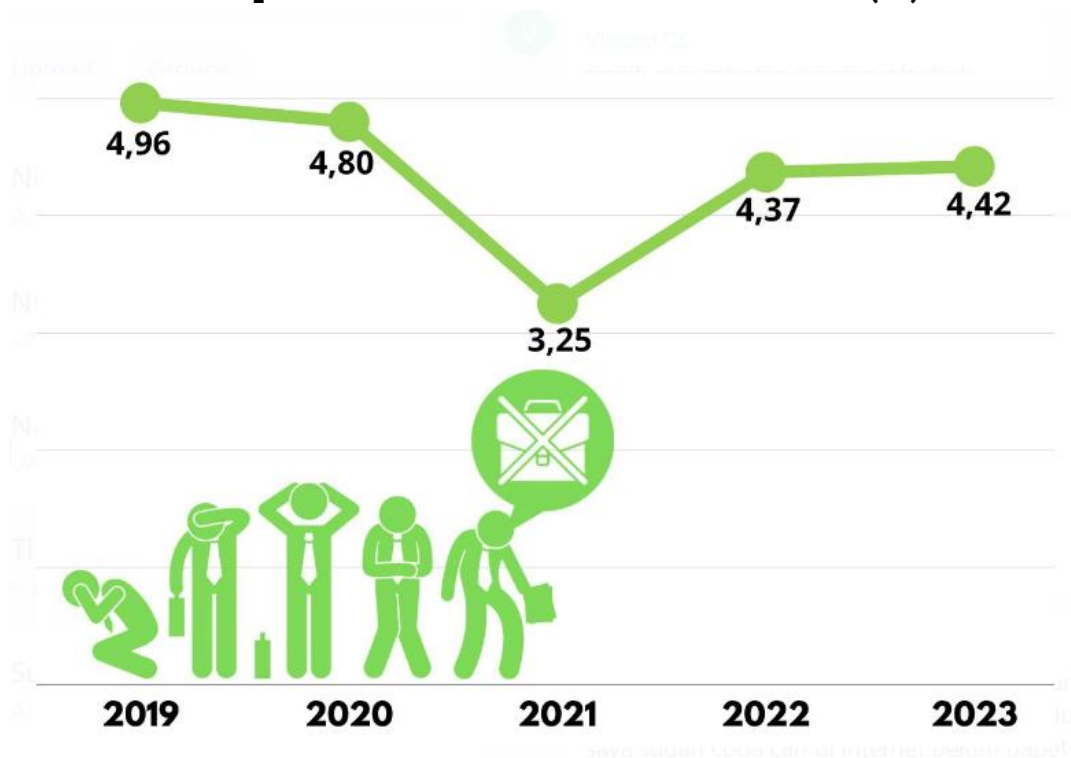
Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2025

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditujukan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Angka pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, namun sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun 2019. Pada tahun 2023, terdapat 4,42 persen penduduk berusia 15 tahun yang berstatus angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Kenaikan angka pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi pasar tenaga kerja seperti tingginya pekerja keluarga/tak dibayar di Rokan Hilir maupun tingginya pekerja yang pendidikannya cukup minim sehingga kurang kompetitif di pasar kerja.

Gambar II.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2020-2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender sebagai diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan, kemudian ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah menjadi strategi dan isu lintas bidang

dalam pembangunan. Oleh karena itu pelaksanaan strategi PUG telah menjadi keharusan untuk dilaksanakan di setiap Kementerian dan lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Saat ini telah keluar Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Sedangkan untuk di daerah telah pula di perteras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah dengan fokus kepada Perencanaan dan Penganggaran yang *responsive gender* (PPRG).

Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan Kebijakan Tentang Pengarusutamaan Gender Nomor 18 Tahun 2019. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam suatu wilayah. IPG menggambarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rokan Hilir sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 dan meningkat kembali hingga tahun 2023 mencapai 85,73.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat tingkat pemberdayaan perempuan yang dirancang untuk memberikan gambaran holistik tentang sejauh mana perempuan memiliki akses, kontrol, dan partisipasi dalam keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Adapun IDG di Kabupaten Rokan Hilir masih belum optimal di mana pada tahun 2023 menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya hingga capaian 59,18. Adapun indikator Indeks Ketimpangan Gender yang melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, maka terlihat bahwa ketimpangan gender Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan namun masih pada angka yang cukup tinggi dengan capaian 0,53 pada tahun 2023.

Tabel II.32 Perkembangan Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023

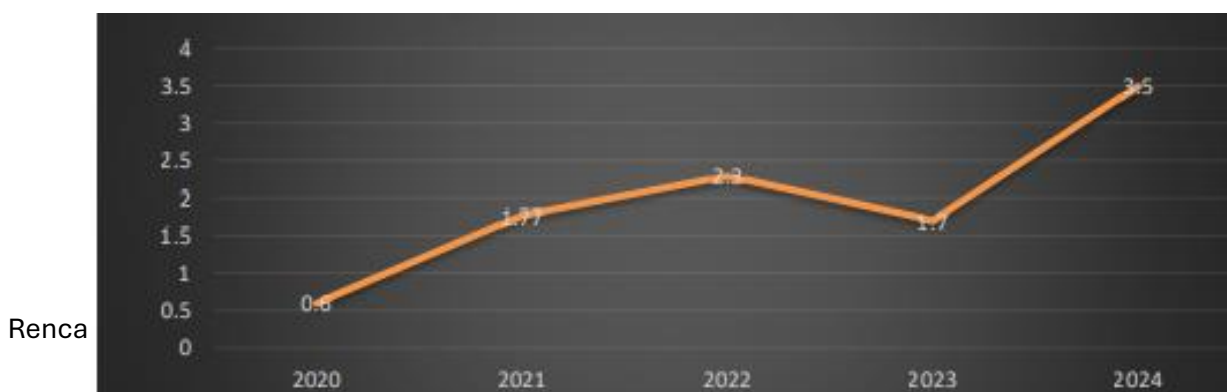
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	85,22	85,08	84,87	85,42	85,73
Indeks Pemberdayaan Gender	62,23	62,59	61,94	59,51	59,18
Indeks Ketimpangan Gender	0,58	0,57	0,55	0,52	0,53

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2020-2023

2. Angka Kematian Bayi

Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survey karena sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan data kematian di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Riau cenderung menurun dari tahun 1997 - 2018, walaupun dibandingkan dengan angka nasional masih lebih besar. Karena Angka Kematian Bayi merupakan indikator akhir yang perlu diketahui perkembangan setiap tahunnya, untuk melihat pencapaian kinerja program Ibu dan Anak, maka dibawah ini akan digambarkan data kematian bayi berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan

Gambar Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 s.d 2024.

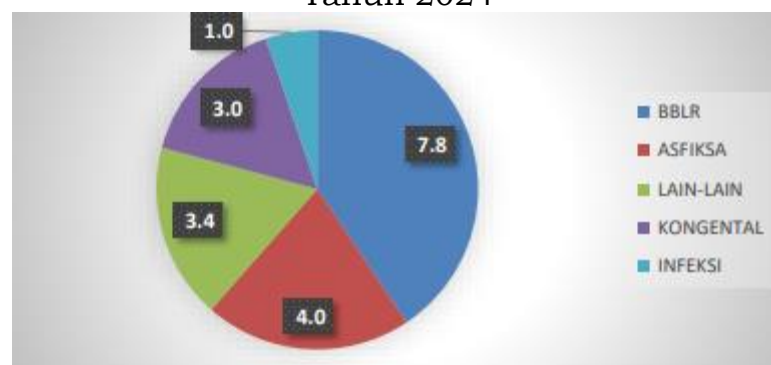


tahun 2020 s/d 2024, pada tahun 2020 (0,2 per 1000 kelahiran hidup), pada tahun 2021 mengalami penurunan (1,75 per 1000 kelahiran hidup). Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (2,3 per 1000 kelahiran hidup), pada tahun 2023 sebesar (1,7 Per 1000 kelahiran hidup) dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar (3,5 per 1000 kelahiran hidup). Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka survey, namun angka ini belum bisa dikatakan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir karena angka ini dihitung berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan di fasilitas kesehatan bukan berdasarkan hasil survey (masih ada kemungkinan belum semua kematian terlapor/under reported).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis terampil serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penurunan angka kematian bayi dan balita adalah melalui penerapan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Autopsi Verbal kematian balita. Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama melalui pembahasan kasus.

Proporsi kasus perinatal yang terbesar tahun 2024 yang terbesar di Kabupaten Rokan Hilir yaitu kematian akibat BBLR (7,8%), Lain-lain (3,4%) akibat Asfiksia (4,0%), Kelainan Kongental (3,0%) dan Infeksi (1,0%).

Gambar Persentase Penyebab Kematian Perinatal Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

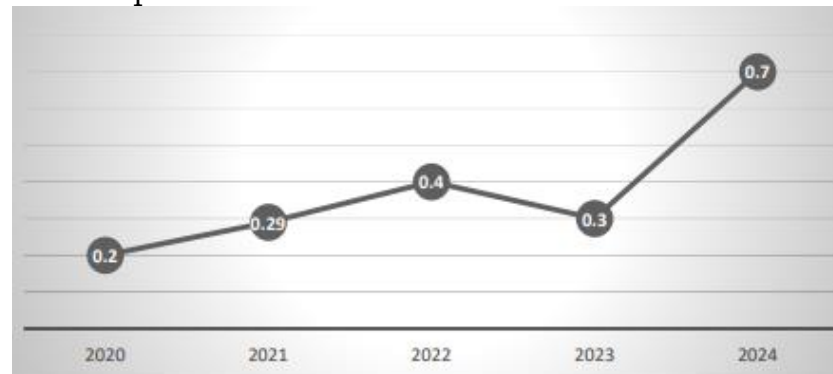


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

3. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor- faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Gambar Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

Dari gambar diatas menggambarkan bahwa berdasarkan laporan rutin fasilitas kesehatan angka kematian balita dari tahun 2020 s.d 2024 fluktuatif turun, pada tahun pada tahun 2020 (0,2 per 1000 kelahiran hidup), pada tahun 2021 (0,29 per kelahiran hidup), pada tahun 2022 (0.4 per 1000 kelahiran hidup), pada tahun 2023 (0,3 per 1000 kelahiran hidup) dan pada tahun 2024 (0,7 per 1000 kelahiran hidup).

Pelayanan kesehatan anak hendaknya tidak terlepas dari konsep *continuum of care* (pelayanan kesehatan yang berkesinambungan) sehingga tidak mengakibatkan *miss opportunity* (hilangnya kesempatan). Harus terdapat integrasi antara beberapa program terkait seperti program ibu, imunisasi, gizi dan lain- lain. Jika semua dilakukan dengan baik besar peluang percepatan penurunan angka kematian bayi dan balita tercapai setiap tahunnya.

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insentif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 s.d 2024

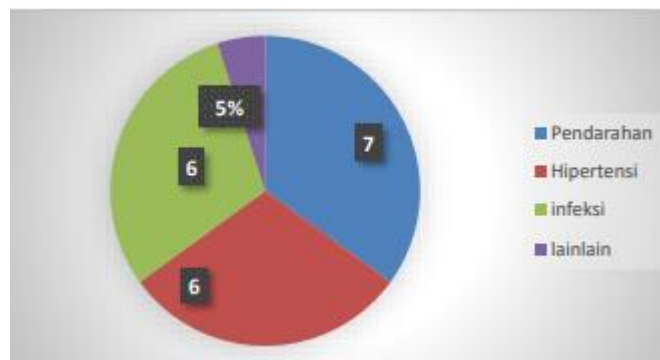


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

Berdasarkan dari gambar di atas angka kematian ibu di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Pada pada tahun 2020 (13 per 100.000 kelahiran hidup), pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar (18 per 100.000 kelahiran hidup), pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (11 per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2023 turun sebesar (9 per 100.000 kelahiran hidup) dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar (20 per 100.000 kelahiran hidup).

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 adalah perdarahan sebesar 7 , hipertensi dalam kehamilan (pre/eklamsi) sebanyak 6, infeksi sebanyak 6, dan lain lain sebanyak 1.

Gambar Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024



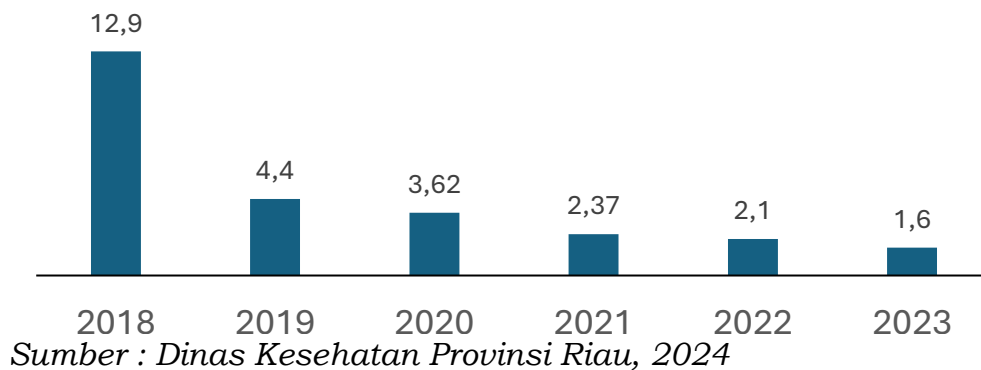
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

5. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, maka anak-anak akan mengalami masalah gizi buruk. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Riau selama tahun 2018-2023

menunjukkan tren yang semakin menurun dari 12,9 persen pada Tahun 2018 menurun menjadi 1,6 persen pada Tahun 2023. Prevalensi gizi kurang di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2023



Menurunnya prevalensi gizi kurang ini tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status kurang gizi pada anak seperti penambahan gizi dalam asupan makanan. Namun demikian, besaran angka kasus balita gizi kurang masih cukup signifikan dan memerlukan penanganan khusus ke depannya.

6. Prevalensi Stunting Balita

Stunting mengacu pada kondisi anak yang terlalu pendek untuk anak seusianya. Kondisi ini menggambarkan kekurangan gizi kronis yang terjadi karena buruknya kualitas nutrisi sejak di dalam kandungan, di masa anak-anak, dan/atau disebabkan infeksi atau penyakit. Stunting begitu menjadi perhatian karena efek jangka panjangnya yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai kapasitas penuh dari pertumbuhan, cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, serta lebih rawan terserang penyakit (UNICEF, 2020). Di masa depan, hal tersebut akan mempengaruhi produktivitas kerja dan kemampuan bekerja, yang dapat berakibat pada rendahnya pendapatan rumah tangga secara mikro dan perkembangan ekonomi nasional secara makro, yang nantinya akan mempengaruhi Indonesia Emas 2045.

Penanganan stunting telah menjadi target prioritas baik secara global dan di Indonesia termasuk di Kabupate Rokan Hilir. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, penurunan prevalensi stunting pada balita telah menjadi salah satu program prioritas dengan target sebesar 14 persen di tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras oleh Pemerintah dan berbagai pihak. Hasil Survey Kesehatan Indonesia tahun 2024 menunjukkan adanya

kenaikan prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 24,5 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengevaluasi peningkatan prevalensi stunting.

Dalam rangka mencapai target stunting 2024, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa percepatan penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi antar pihak.

**Tabel Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2018 - 2024**

No	Kabupaten	Tahu					
		2018	2019	2021	2022	2023	2024
1	Rokan Hilir	38,1	28,87	29,7	14,7	16,6	24,5

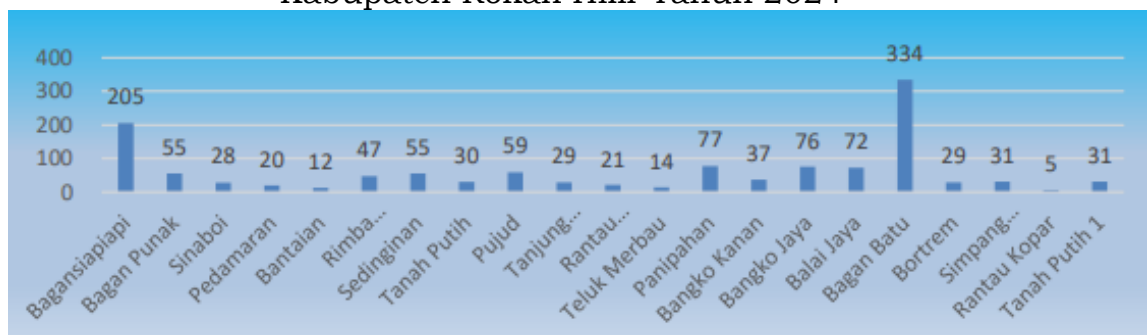
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

7. Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA (+)

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB Bersama dengan Malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA (+) yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah suspek TB di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Pencapaian CDR di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 sebesar 55,7% masih jauh dibawah target (70%).

Gambar Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA (+)
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian CDR tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Bagan Batu sebesar 334.

8. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)

Evaluasi pengobatan pada penderita TB paru BTA (+) dilakukan melalui pemeriksaan dahak mikroskopis pada akhir fase intensif satu bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan dengan hasil pemeriksaan negatif. Dinyatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan dahak pada akhir pengobatan ditambah minimal satu kali pemeriksaan sebelumnya (sesudah fase awal atau satu bulan sebelum akhir pengobatan) hasilnya negatif.

Bila pemeriksaan follow-up tidak dilakukan, namun pasien telah menyelesaikan pengobatan, maka evaluasi pengobatan pasien dinyatakan sebagai pengobatan lengkap. Evaluasi jumlah pasien dinyatakan sembuh dan pasien pengobatan lengkap dibandingkan jumlah pasien BTA (+) yang diobati disebut keberhasilan pengobatan (Success Rate). Angka kesembuhan (Cure Rate) TB paru di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebesar 9,1 %, angka pengobatan lengkap (Complete Rate) sebesar 85,1% dan angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) sebesar 91,1%. Angka kematian selama pengobatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebesar 4,7 per 100.000 penduduk.

9. Cakupan Jaminan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai upaya kesehatan, salah satunya adalah dengan mengembangkan suatu upaya kesehatan melalui program jaminan kesehatan. Di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari PBI sebanyak 658,999 Non PBI sebanyak 11,693 orang.

Gambar Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 2025

2.3 ASPEK DAYA SAING

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban, serta kualitas tenaga kerja.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi. Lebih jelasnya, perhitungan PDRB atas Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun juga sebagai sarana untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB.

Tabel II.33 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah)

No	Kategori	2011	2016	2021	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.159.293,84	21.656.350,25	29.407.062,26	35.267.211,7
2	Pertambangan dan Penggalian	26.864.409,24	34.936.161,01	27.804.385,97	33.154.222,9
3	Industri Pengolahan	6.662.135,57	11.868.195,17	16.948.209,74	18.985.598,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.065,50	15.508,87	22.170,06	27.440,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.107,69	3.008,13	3.280,91	3.689,4

No	Kategori	2011	2016	2021	2023
6	Konstruksi	372.772,75	625.979,96	803.545,33	1.049.711,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.687.801,58	2.526.436,13	3.187.931,84	3.999.902,4
8	Transportasi dan Pergudangan	48.787,77	84.340,19	97.582,13	130.043,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65.268,12	184.115,56	192.334,83	229.465,7
10	Informasi dan Komunikasi	95.898,25	169.534,43	215.590,22	247.654,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	107.864,56	218.394,80	275.392,38	327.743,6
12	Real Estate	144.859,93	231.404,53	274.713,44	314.401,8
13	Jasa Perusahaan	84,59	146,89	149,90	195,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	334.081,30	422.118,61	467.179,28	543.957,4
15	Jasa Pendidikan	106.040,94	166.666,51	209.051,89	224.693,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.044,63	45.380,41	67.815,68	77.417,9
17	Jasa lainnya	74.716,05	114.286,33	126.233,71	156.888,8
Produk Domestik Regional Bruto		49.757.232,31	73.268.027,78	80.102.629,6	94.740.239,6

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2011-2024

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Rokan Hilir memiliki pola peningkatan. PDRB ADHB pada awal masa pembangunan sebesar Rp 49.757.232,31 juta pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan menjadi Rp 73.268.027,78 juta. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan di menjadi Rp 80.102.629,6 juta yang terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi Rp 94.740.239,6 juta.

Tabel II.34 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023 (%)

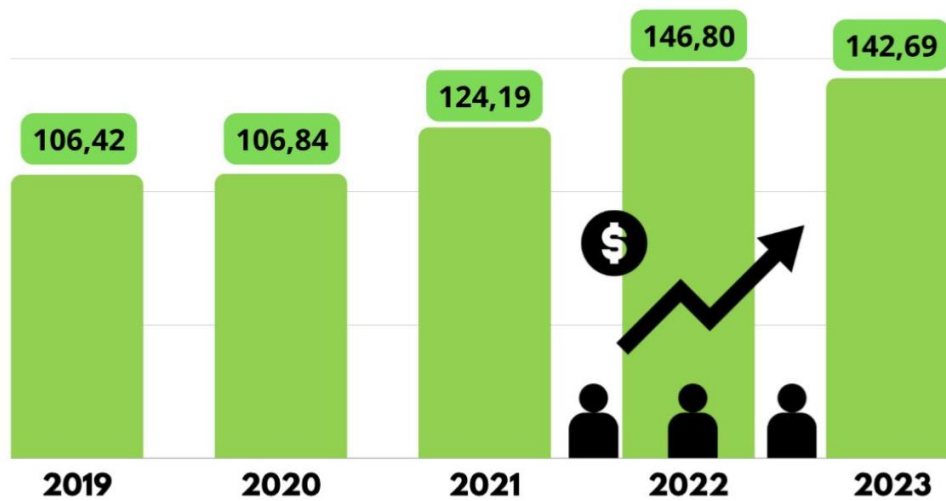
No	Kategori	2011	2016	2021	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,45	29,65	36,71	37,23
2	Pertambangan dan Penggalian	53,99	47,62	34,71	34,99
3	Industri Pengolahan	13,39	16,18	21,16	20,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	0,75	0,85	1,00	1,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,39	3,44	3,98	4,22
8	Transportasi dan Pergudangan	0,10	0,11	0,12	0,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,25	0,24	0,24
10	Informasi dan Komunikasi	0,19	0,23	0,27	0,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,30	0,34	0,35
12	Real Estate	0,29	0,32	0,34	0,33
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,67	0,58	0,58	0,57
15	Jasa Pendidikan	0,21	0,23	0,26	0,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,05	0,06	0,08	0,08
17	Jasa lainnya	0,15	0,15	0,16	0,17
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2011-2024

Struktur ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari distribusi PDRB atas dasar berlaku yang dikategorikan menjadi 17 lapangan usaha. Selama pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Rokan Hilir, kategori lapangan usaha yang memiliki dominasi dalam perekonomian daerah dalam pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Adapun pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang terlihat kategori pertambangan dan penggalian mendominasi hingga lebih dari separuh perekonomian Rokan Hilir yang kemudian mengalami penurunan hingga memiliki kontribusi sebesar 34,99 persen pada struktur ekonomi daerah. Adapun saat ini, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang memiliki kontribusi terbesar pada struktur ekonomi daerah dengan kontribusi PDRB sektoral mencapai 37,23 persen. Diharapkan ke depan, kategori pembangunan unggulan daerah mampu bersaing dan lebih pemeratakan kesejahteraan melalui pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Gambar II.39 PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah/Kapita)



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2020-2024

Secara umum dalam lima tahun terakhir, PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2023 sebesar 142,69 juta rupiah/kapita jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2019 yang memiliki nilai 106,42 juta rupiah/kapita. PDRB per kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan dalam pendapatan rata-rata yang diperoleh setiap individu di Kabupaten Rokan Hilir. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa peningkatan PDRB per kapita tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di seluruh masyarakat. Ada kemungkinan bahwa hanya sebagian kecil populasi yang mengalami peningkatan pendapatan, sementara sebagian besar masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi. Nilai PDRB juga bisa keluar dari daerah sebagai bagian dari keuntungan investor dari luar Rokan Hilir. Oleh karena itu, untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang mendorong inklusivitas ekonomi dan memperbaiki kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. Berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompentensi unggul.

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah di mana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Terlihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terlihat rata-rata lama sekolah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 8,52 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas baru mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama kelas 3. Adapun harapan lama sekolah yang mencapai 12,88 tahun juga mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang baru lahir di tahun 2023 memiliki kesempatan mengenyam pendidikan hingga 12,88 tahun atau setara dengan lulus sekolah menengah atas. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah di mana capaian pada tahun 2023 mencapai 0,642. Kondisi ini tentu saja masih jauh dari harapan sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganan layanan pendidikan.

Tabel II.35 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2023

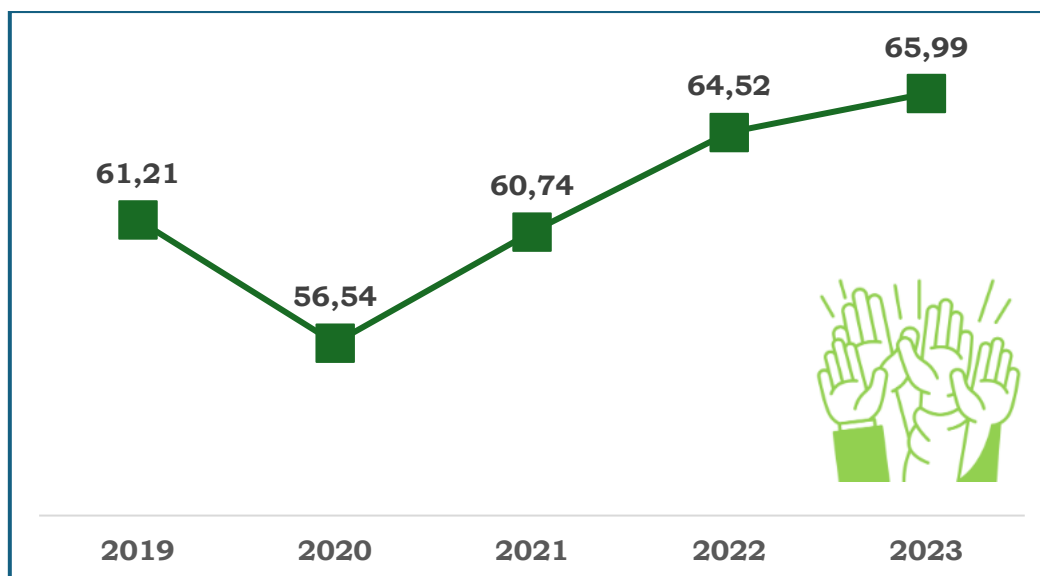
No	Indikator	2011	2016	2021	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,30	7,88	8,26	8,52
2	Harapan Lama Sekolah	10,94	12,06	12,76	12,88
3	Indeks Pendidikan	0,547	0,598	0,630	0,642
4	Angka Harapan Hidup	69,07	69,57	70,39	70,99
5	Indeks Kesehatan	0,755	0,763	0,775	0,784

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2011-2023

Selain itu bidang kesehatan juga menjadi komponen pembentuk IPM adalah indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 70,99 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 70-71 tahun. Adapun indikator di atas digunakan untuk merumuskan indeks kesehatan di mana pada tahun 2023, indeks kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir juga mengalami peningkatan hingga mencapai 0,748.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hilir memiliki tren yang cukup baik walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Selama lima tahun terakhir dimulai pada tahun 2019 sebesar 61,21 kemudian menurun menjadi 56,54 pada tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 60,74 pada tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 64,52. Dan pada tahun 2023 menjadi 65,99 Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik walaupun demikian tetap perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat ke depannya.

**Gambar II.40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2020-2024

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir menyajikan data tentang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

1. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2021-2023 terus ditingkatkan kualitasnya baik sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik maupun kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dari sisi penguatan kualitas SDM.

Tabel II.36 Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2023

Indikator	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah	454	455	456	209	212	209	126	127	124
Jumlah Guru	5.686	5.311	6.152	2.969	2.780	3.286	2.302	2.383	2.422
Jumlah Murid	91.078	87.659	91.218	37.471	37.016	37.166	33.229	32.778	32.726

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2022-2024

2. Infrastruktur Kesehatan

Berbeda dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan cenderung bersifat stabil selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 jumlah rumah sakit sebanyak 5 serta puskesmas sebanyak 20. Adapun fluktuasi terjadi pada jumlah tenaga kesehatan yang aktif melayani masyarakat Rokan Hilir di mana pada tahun 2023 terdapat 1.186 bidan dan 976 perawat.

Tabel II.37 Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	6	5	4	4	6
	Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	21
2	Jumlah Tenaga Kesehatan					
	Jumlah Dokter	168	195	193	196	197
	Jumlah Bidan	802	858	830	834	1.186
	Jumlah Perawat	769	806	896	891	952

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2019-2024 (Diolah).

3. Sarana Prasarana Dasar

A. Jalan

Berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Rokan Hilir. Panjang jalan yang statusnya Jalan Kabupaten adalah 1.747,45 Km. Sedangkan, tahun sebelumnya panjang jalan hanya 1.961,53 km. Pengurangan tersebut, dikarenakan adanya pemisahan jalan yang statusnya Jalan Kabupaten dengan jalan yang statusnya Jalan Desa.

Data berikut ini merupakan data Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan menurut kondisi jalan yang statusnya Jalan Kabupaten sesuai SK Bupati Rokan Hilir Nomor 344 Tahun 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II.38 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir (km) Tahun 2018-2024

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal	555,05	563,51	410,85	351,312	391,392	719,835	554,68
Kerikil	370,24	518,12	531,71	537,537	552,841	562,076	573,22
Tanah	616,83	430,06	456,74	617,768	661,428	414,514	337,82

Lainnya (Beton)	419,41	449,83	562,22	454,909	355,865	265,101	281,53
Jumlah	1961,53	1961,53	1961,53	1961,53	1961,53	1961,53	1747,45

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2018-2024

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa jalan dalam kondisi baik cenderung menurun, dari 438,94 km pada 2018 menjadi 335,43 km pada 2021, sebelum sedikit meningkat menjadi 373,45 km pada 2022. Sebaliknya, panjang jalan rusak berat mencapai puncak tertinggi pada 2020 dengan 725,57 km, namun menurun drastis menjadi 61,04 km pada 2021, lalu kembali meningkat pada 2022. Tren ini menunjukkan adanya dinamika perbaikan dan kerusakan jalan yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan.

Tabel II.39 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir (km) Tahun 2018-2023

Kondisi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	438,94	437,98	443,076	335,433	373,447	433,344	453,04
Sedang	528,86	597,98	599,405	715,683	684,896	639,338	205,06
Rusak Ringan	589,92	534,70	193,474	849,37	468,354	465,087	661,55
Rusak Berat	403,82	390,86	725,571	61,04	434,829	423,757	427,78
Jumlah	1961,53	1961,53	1.961,53	1.961,53	1.961,53	1.961,53	1.747,45

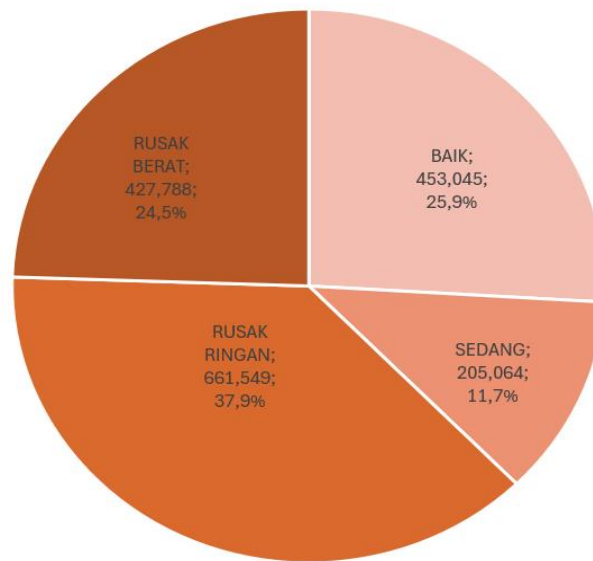
Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, Dinas PUPR Rokan Hilir 2019-2024

Tabel II.40 Persentasi Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2024

TAHUN	KONDISI JALAN (KM)			
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
2024	453,045	205,064	661,549	427,788
	25,9%	11,7%	37,9%	24,5%

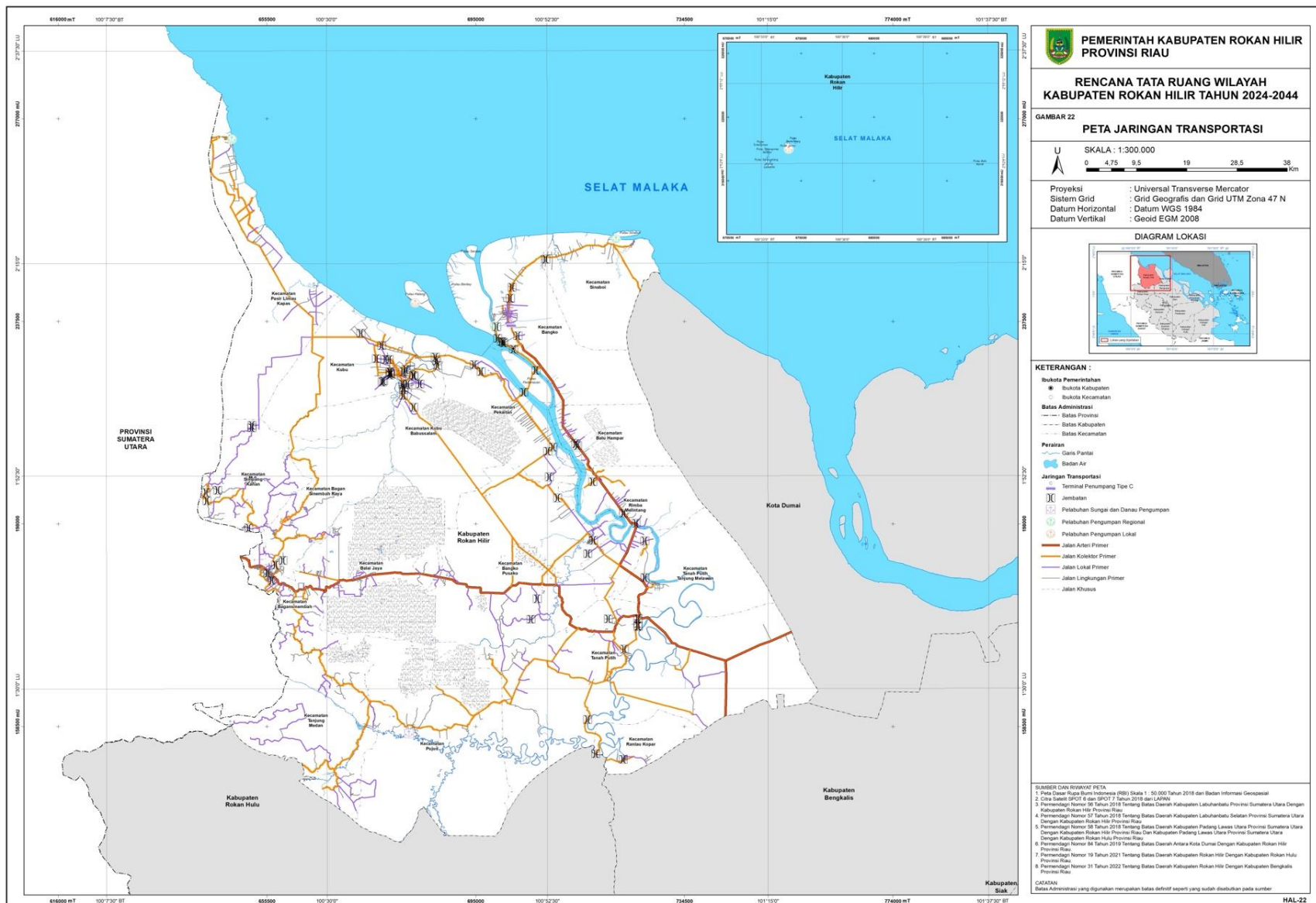
Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir, 2024

Gambar II.41 Grafik Kondisi Jalan Tahun 2024



Gambar berikut menampilkan Peta Jaringan Transportasi di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar II.42 Peta Jaringan Transportasi Di Kabupaten Rokan Hilir



B. Konektivitas Wilayah

Konektivitas Wilayah merujuk pada hubungan dan keterhubungan antara berbagai daerah atau wilayah, yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. Konektivitas ini penting untuk memperlancar mobilitas, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Konektivitas antar wilayah merupakan kunci penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan konektivitas, berbagai wilayah dapat terhubung, potensi ekonomi dapat tergali, kesenjangan dapat berkurang, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

Tabel II.41 menyajikan jumlah kebutuhan dan kondisi trayek angkutan jalan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023, sedangkan menyajikan tabel jumlah trayek yang dilayani angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) tahun 2023.

Tabel II.41 Jumlah Kebutuhan dan Kondisi Trayek Angkutan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

No	Kebutuhan Trayek Dalam Kabupaten	Trayek yang Dilayani Dalam Kabupaten
1	Bagan Siapiapi – Batu Hampar – Rimba Melintang – Tanah Putih – Balai Jaya – Bagan Batu	Bagan Siapiapi – Batu Hampar – Rimba Melintang – Tanah Putih – Balai Jaya – Bagan Batu
2	Bagan Siapiapi – Ujung Tanjung	Bagan Siapiapi – Ujung Tanjung
3	Ujung Tanjung – Rantau Kopar	
4	Ujung Tanjung – Pujud	
5	Ujung Tanjung – Bangko Pusako – Kubu – Kubu Babussalam – Pasir Limau Kapas	
6	Ujung Tanjung – Tanah Putih Tanjung Melawan	
7	Bagan Batu – Simpang Kanan	
8	Bagan Batu – Bagan Sinembah Raya	

Sumber : LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir , 2023

Tabel II.42 Jumlah Trayek Yang Dilayani Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan (SDP) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

No	Kebutuhan Angkutan SDP Dalam Kabupaten	Angkutan SDP Dilayani Dalam Kabupaten
1	Bagan Siapiapi – Panipahan	Bagan Siapiapi – Panipahan
2	Bagan Siapiapi – Pulau Alang	Bagan Siapiapi – Pulau Alang
3	Bagan Siapiapi – Kubu	Bagan Siapiapi – Kubu
4	Bagan Siapiapi – Pulau Jemur	

Sumber : LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir , 2023

Berdasarkan data dari tabel-tabel diatas dapat dikalkulasi Rasio Konektivitas. Rasio konektivitas wilayah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterhubungan antara berbagai wilayah atau daerah, terutama dalam hal aksesibilitas transportasi. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, yang berdampak pada mobilitas orang, barang, dan jasa, serta efektivitas pelayanan publik.

Rumus Rasio konektivitas Kabupaten adalah :

(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Dimana :

IK1 = ((Jumlah trayek yang dilayani kab/kota) x bobot trayek) / Jumlah kebutuhan trayek

IK2 = ((Jumlah Trayek yang Dilayani Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan x Bobot Angkutan SDP) / Jumlah kebutuhan trayek

Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam LKjIP 2023, didapatkan hasil perhitungan Rasio Konektivitas Tahun 2023 sebagai berikut :

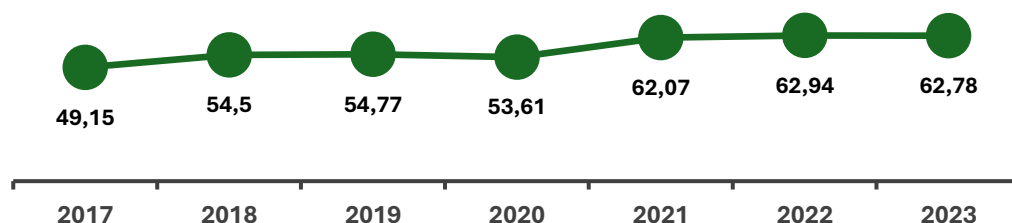
- Jumlah trayek yang dilayani dalam Kabupaten	2
- Jumlah kebutuhan trayek dalam Kabupaten	8
- Bobot trayek	1
IK1 :	$\frac{\text{jumlah trayek yg dilayani x bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan trayek}} = \frac{2 \times 1}{8} = 0,25$
- Jumlah lintas penyeberangan yang dilayani dalam Kabupaten:	3
- Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan dalam Kabupaten	: 4
- Bobot lintas	1
IK2 :	$\frac{\text{jmlh lintas penyeberangan yg dilayani x bobot lintas}}{\text{jmlh kebutuhan lintas penyeberangan}} = \frac{3 \times 1}{4} = 0,75$
Rasio Konektivitas Kabupaten	
=	(IK1 x Bobot Angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan SDP)
=	(0,25 x 70) + (0,75 x 30)
=	17,5 + 22,5
=	40% = 0,4

Sumber : LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir , 2023

Rasio Konektivitas Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2023 adalah sebesar 0,4, hal ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan wilayah Kabupaten Rokan Hilir, hanya 40% aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum.

C. Perumahan dan Permukiman

Gambar II.43 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2017-2023

Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2017 hingga 2023, yang berfungsi untuk memantau peningkatan aksesibilitas hunian bagi masyarakat. Data menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 49,15% pada 2017 menjadi 62,78% pada 2023. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2020 dan 2021, dari 53,61% menjadi 62,07%. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan keterjangkauan hunian bagi masyarakat, meskipun masih diperlukan usaha untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

D. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir

1) Kondisi SPAM Perkotaan

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari sumber air baku, sistem transmisi, pengolahan lengkap (konvensional-disinfeksi) dan distribusi yang sebagian sudah dibuat dengan sistem zona pada pelayanannya. Bentuk organisasi pengelola SPAM di Kabupaten Rokan Hilir adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPT SPAM) berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 118 Tahun

2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

Saat ini, UPTD SPAM Kabupaten Rokan Hilir mengelola 8 (delapan) unit SPAM IKK (Ibukota Kecamatan) termasuk 3 (tiga) unit offtake penerima air curah dari SPAM Regional Durolis, dengan total kapasitas terpasang untuk 5 unit IKK 100 l/dt, dan total kapasitas terpasang untuk Offtake dari SPAM Durolis 100 l/dt, yang statusnya belum berfungsi. Peta sebaran infrastruktur SPAM di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Gambar II.45. Rekapitulasi SPAM IKK di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.43 SPAM IKK di Kabupaten Rokan Hilir

No.	SPAM IKK	Sumber Air Baku	Kapasitas (l/dt)				SR	Status
			Terpasang	Produksi	Distribusi	Idle Capacity		
1	IKK Bagan Siapiapi	Galian/Long Storage	40,00	-	-	40,00	-	Tidak Berfungsi
2	IKK Sedingin	Sungai Rokan	5,00	-	-	5,00	-	Tidak Berfungsi
3	IKK Ujung Tanjung	Sungai Rokan	40,00	-	-	40,00	765	Belum Berfungsi
4	IKK Bagan Sinembah	Sungai Buaya	10,00	-	-	10,00	-	Tidak Berfungsi
5	SPAM IPDN Tanah Putih	Waduk	5,00	-	-	5,00	-	Belum Berfungsi
6	IKK Tanah Putih Tanjung Melawan (Offtake Durolis)	Sungai Rokan (Air Curah UPT SPAM Provinsi)	30,00	-	-	30,00	800	Belum Berfungsi
7	IKK Bangko Pusako (Offtake Durolis)	Sungai Rokan (Air Curah UPT SPAM Provinsi)	30,00	-	-	30,00	1.827	Belum Berfungsi
8	IKK Rimba Melintang (Offtake Durolis)	Sungai Rokan (Air Curah UPT SPAM Provinsi)	40,00	-	-	40,00	1.763	Belum Berfungsi
		Total	200	-	0	200	5.155	

Sumber: UPTD SPAM Kab. Rokan Hilir dan Buku Profil SPAM BPPW Riau, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SPAM Perkotaan (SPAM IKK) di Kabupaten Rokan Hilir belum berfungsi atau memiliki idle capacity 200 l/detik.

2) Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Akses terhadap air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, namun masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan SPAM untuk masyarakat. Kondisi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak.

Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding dan (sumur bor/sumur pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat ≥ 10 m. Adapun yang dimaksud dengan Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll. yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

Tabel II.44 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2024

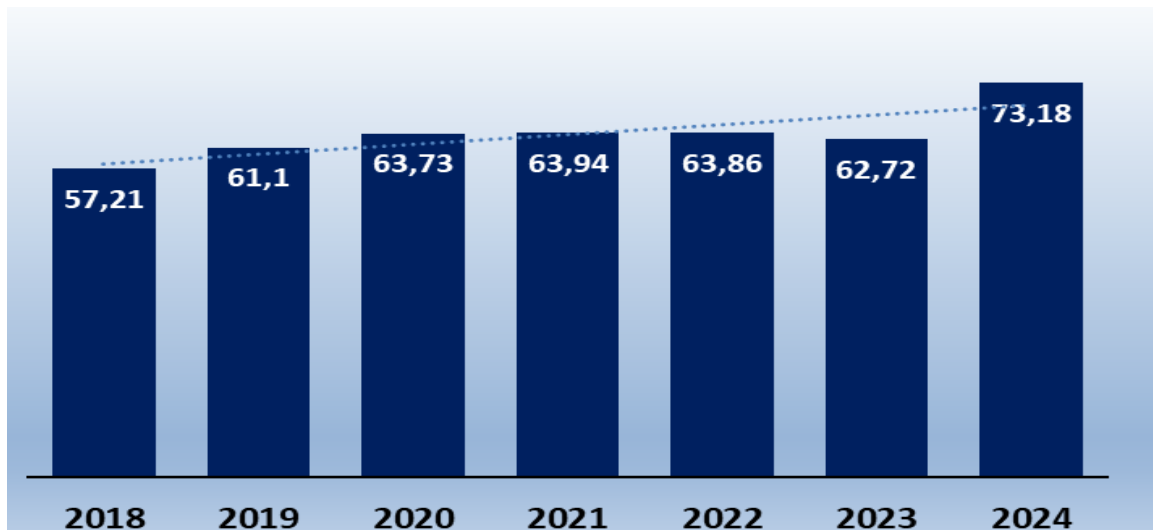
Tahun	Akses Air	Sumber Air Minum Bersih (%)	Akses Air Minum Layak (%)
2018		57,21	73,87
2019		61,1	83,91
2020		63,73	81,13
2021		63,94	87,52
2022		63,86	86,38
2023		62,72	86,56
2024		73,18	86,82

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan tabel diatas, persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih pada tahun 2018 sebesar 57,21% dan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak sebesar 73,87 %,

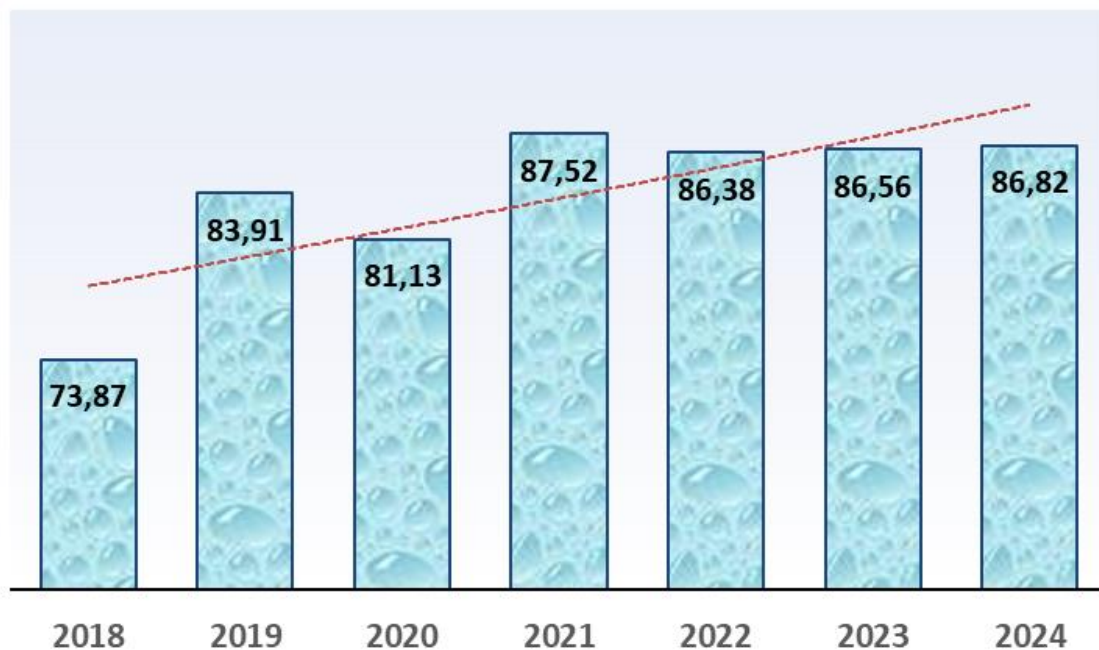
meningkat pada tahun 2019 menjadi 83,91 %, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 81,13 %. Pada tahun 2021, angka ini kembali naik menjadi 87,52 %, dan pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 86,82 % dibandingkan tahun 2021.

Gambar II.44 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Kabupaten Rokan Hilir, 2018–2024



Sumber: BPS Provinsi Riau (Diolah), 2024

Gambar II.45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Rokan Hilir, 2018–2024



Sumber: BPS Provinsi Riau (Diolah), 2024

Gambar II.46 Peta Sebaran Infrastruktur SPAM di Kabupaten Rokan Hilir



E. Fasilitas Sanitasi Aman

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Pasal 6 Point 5 huruf a : pelayanan akses sanitasi aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan: 1) tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau 2) sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.

Saat ini wilayah perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki IPLT. Pada tahun 2016, telah dilakukan kajian DED IPLT yang berlokasi di Kecamatan Bangko. Namun, karena tingginya biaya (hasil estimasi) yang diperlukan untuk pembangunan IPLT (karena berada di areal gambut), akhirnya pemerintah pusat belum mengakomodir usulan pembangunan IPLT tersebut hingga saat ini.

Adapun data persentase rumah tangga menurut pembuangan air tinja untuk tahun 2023-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel II.45 Persentase Rumah Tangga¹ menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2023-2024

Tahun	Tangki Septik/IPAL	Lainnya ²
2023	76,82	23,18
2024	76,08	23,92

¹Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan sendiri atau bersama.

²Lainnya termasuk kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah,pantai/tanah lapang/kebun atau lainnya.

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir, 2023-2024

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari SPALD-T (SPALD Terpusat) dan SPALD-S (SPALD Setempat). Gambar berikut menampilkan peta sebaran SPALD-T dan SPALD-S yang telah dibangun.

Gambar II.47 Peta Sebaran Infrastruktur SPALD di Kabupaten Rokan Hilir



F. Ketersediaan Listrik

Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik.

Daya yang terpasang pada pembangkit listrik diesel yang dimiliki PT. PLN (Persero) UPP Bagansiapiapi untuk tahun 2018 sebesar 90,26 persen, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 99,87 persen. Adapun listrik non PLN pada tahun 2018 sebesar 6,56 persen, turun hingga tahun 2022 menjadi 0 persen. Sedangkan rumah tangga dengan sumber penerangan bukan listrik pada tahun 2018 sebesar 3,18 persen, turun hingga tahun 2022 menjadi 0,13 persen. Berikut disajikan tabel persentase rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir menurut sumber penerangan utama periode 2018-2022, yaitu:

Tabel II.46 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Listrik PLN	90,26	91,27	93,92	92,11	99,87
Listrik Non PLN	6,56	6,64	4,41	6,09	0,00
Bukan Listrik	3,18	2,09	1,68	1,80	0,13

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

Rasio elektrifikasi merupakan ukuran tingkat akses masyarakat terhadap listrik di suatu wilayah. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio elektrifikasi berada di angka 89,53 mengalami peningkatan menjadi 99,45 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 89,85 dan terus menurun menjadi 86,95 pada tahun 2023. Dengan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2022 sebesar 493,63 Kwh meningkat menjadi 530,93 Kwh.

Tabel II.47 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Elektrifikasi	89,53	89,53	99,45	89,85	86,95

Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, 2019-2023

Daya saing infrastruktur lainnya berupa ketersediaan listrik dapat dilihat dari rasio desa berlistrik. Rasio desa berlistrik merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan akses listrik di tingkat desa. Pada tahun 2019 rasio desa berlistrik berada di angka 90,26 mengalami peningkatan menjadi 91,27 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 93,92 namun terjadi penurunan pada tahun 92,11. Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 99,87, peningkatan tersebut disebabkan oleh Kembali meningkatnya perekonomian yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

**Tabel II.48 Rasio Desa Berlistrik di Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Desa Berlistrik	90,26	91,27	93,92	92,11	99,87

Sumber: BPS Rokan Hilir

Adapun terdapat potensi energi terbarukan yaitu indikator yang berfungsi untuk menilai ketersediaan dan kelayakan sumber energi terbarukan di suatu wilayah, seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Terjadi tren peningkatan dalam rentang tahun 2019-2023, pada tahun 2019 sebesar 0,17 dan meningkat menjadi 0,20. Pada tahun 2023 potensi energi terbarukan sebesar 0,27.

G. Penginapan/Hotel

Sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, kabupaten Rokan Hilir terus melakukan pengembangan dari sektor pariwisata. Obyek wisata yang menarik di Rokan Hilir seperti Gugusan Pulau Jemur dengan pantai pasir putihnya, danau Napangga serta objek wisata lainnya. Untuk menunjang sektor pariwisata pembangunan sarana dan prasarana wisata harus terus ditingkatkan seperti hotel, akomodasi, obyek wisata maupun prasarana pendukungnya. Tahun 2022 terdapat sekitar 3 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 253 kamar dan tempat tidur sebanyak 443 unit. Berikut adalah perkembangan jumlah akomodasi di Kabupaten Rokan Hilir periode 2018-2022, yaitu:

Tabel II.49 Jumlah Akomodasi di Kabupaten Rokan Hilir, 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Akomodasi	2	2	2	2	3
Kamar	100	168	168	160	253
Tempat Tidur	314	314	314	320	443

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

H. Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Di sektor komunikasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagian besar penduduk Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan telepon seluler dan memiliki akses terhadap internet. Kategori masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yang menggunakan maupun memiliki telepon seluler didominasi oleh masyarakat yang mempunyai pendidikan SMP ke atas, sedangkan pada penduduk SD ke bawah masih kurang dalam mengakses sarana prasarana telekomunikasi khususnya telepon seluler maupun internet, bahkan cenderung mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Berikut tabel persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler, 2022-2023.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2023, jumlah jiwa yang berumur diatas 5 tahun adalah 619.258 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 154.073 rumah tangga.

Tabel II.50 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler, 2022-2023

Penggunaan Akses Telekomunikasi	Tahun (%)	
	2022	2023
Menggunakan Telepon Seluler	72,32	91,35
Mengakses Internet	57,75	72,24

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Rokan Hilir 2022-2023

I. Lokasi Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Blank spot adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah. Adanya blank spot tentu akan sangat merugikan berbagai pihak. Bukan hanya kerugian materi saja, tetapi juga bisa saja kehilangan data-data penting. Terdapat 118 titik Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

**Tabel II.51 Data Lokasi Blankspot
di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kepenghuluan	Longitude	Latitude
1	Kubu Babussalam	Teluk Nilap	100.628416	2.016233
2	Kubu Babussalam	Teluk Nilap Jaya	100.70623	1.80275
3	Kubu Babussalam	Sungai Panji Panji	100.680816	2.060383
4	Pekaitan	Pedamaran	100.84739	1.976483
5	Pekaitan	Teluk Bano II	100.882835	1.928838
6	Pekaitan	Suak Air Hitam	100.819848	2.01414
7	Pujud	Pujud Utara	100.594970	1.515265
8	Pasir Limau Kapas	Pasir Limau Kapas	100.385886	2.300762
9	Simpang Kanan	Kota Parit	100.398930	1.865624
10	Simpang Kanan	Bukit Mas	100.36202	1.78639
11	Simpang Kanan	Bukit Selamat	100.384377	1.964966
12	Rantau Kopar	Rantau Kopar	101.03848	1.36745
13	Rantau Kopar	Sungai Rangau	101.0506	1.36659
14	Rantau Kopar	Sekapas	100.962684	1.384553
15	Rantau Kopar	Bagan Cempedak	101.00353	1.37251
16	Sinaboi	Sinaboi	101.027861	2.266843
17	Sinaboi	Sinaboi	101.007686	2.277943
18	Sinaboi	Sungai Bakau	100.985130	2.242936
19	Sinaboi	Sei Nyamuk	100.883307	2.238378
20	Sinaboi	Darusalam	101.007185	2.2505555
21	Rimba Melintang	Jumrah	101.03597	1.81222
22	Rimba Melintang	Jumrah	101.042527	1.79527
23	Rimba Melintang	Jumrah	101.082577	1.80472
24	Rimba Melintang	Teluk Pulau Hulu	101.059165	1.85508
25	Rimba Melintang	Pematang Botam	100.98302	1.69509
26	Rimba Melintang	Pematang Sikek	101.008829	1.82722
27	Rimba Melintang	Lenggadai Hulu	100.96348	1.87222
28	Rimba Melintang	Lenggadai Hulu	100.94578	1.82712
29	Rimba Melintang	Lenggadai Hulu	100.976720	1.851547
30	Rimba Melintang	Mukti Jaya	100.973333	1.8525
31	Rimba Melintang	Mukti Jaya	100.964722	1.865833
32	Rimba Melintang	Mukti Jaya	100.946944	1.860555
33	Rimba Melintang	Mukti Jaya	100.946666	1.8625
34	Rimba Melintang	Mukti Jaya	100.949166	1.864444
35	Rimba Melintang	Pematang Botam	100.8486	1.59722
36	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Utara	100.477437	1.882315

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kepenghuluhan	Longitude	Latitude
37	Bagan Sinembah Raya	Harapan Makmur	100.424023	1.727942
38	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah	100.44955	1.7702
39	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Kota	100.409	1.7246
40	Bagan Sinembah Raya	Harapan Makmur Selatan	100.426141	1.707215
41	Bagan Sinembah Raya	Makmur Jaya	100.419722	1.764722
42	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Jaya	100.4306	1.8030
43	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Timur	100.4925	1.8325
44	Balai Jaya	Pasir Putih	100.528555	1.666722
45	Balai Jaya	Pasir Putih	100.495083	1.662527
46	Balai Jaya	Pasir Putih	100.514972	1.628194
47	Balai Jaya	Lubuk Jawi	100.519298	1.771845
48	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.682431	1.776917
49	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.683703	1.791808
50	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.641852	1.816936
51	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.607622	1.820328
52	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.648554	1.753016
53	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.583595	1.802494
54	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.618354	1.807039
55	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.607716	1.820325
56	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.564211	1.848279
57	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.653305	1.653616
58	Balai Jaya	Balam Sempurna	100.618354	1.807039
59	Balai Jaya	Balai Jaya	100.655577	1.624453
60	Balai Jaya	Balam Jaya	100.554761	1.627106
61	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	100.563537	1.705064
62	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	100.556944	1.700833
63	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	100.618397	1.842369
64	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	100.557736	1.753644
65	Balai Jaya	Balam Sempurna Kota	100.665915	1.714484
66	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar Kota	101,042448	1,6704
67	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	101,042363	1,7329
68	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	101,03999	1,7109
69	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	101,03728	1,6894
70	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	101,049097	1,6902
71	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	101,011808	1,7428
72	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Tengah	101,057906	1,6753

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kepenghuluhan	Longitude	Latitude
73	Tanah Putih Tanjung Melawan	Batu Hampar	101,0622263	1,6852
74	Tanah Putih Tanjung Melawan	Mesah	101,059912	1,6823
75	Tanah Putih Tanjung Melawan	Labuhan Papan	101,071127	1,6843
76	Tanjung Medan	Sungai Tapah	100,51885	1,3103
77	Tanah Putih	Sekeladi Hilir	100,938725	1,4753
78	Bangko Pusako	Bangko Makmur	100.926485	1.726475
79	Bangko Pusako	Bangko Mas Raya	100.689733	1.587072
80	Rantau Kopar	Rantau Kopar	101,03	1,3760
81	Rantau Kopar	Rantau Kopar	101,009	1,3750
82	Rantau Kopar	Sungai Rangau	101,046	1,3740
83	Rantau Kopar	Bagan Cimpedak	101,003	1,3720
84	Rantau Kopar	Sekapas	100,958	1,3860
85	Rantau Kopar	Rantau Kopar	101,012	1,3760
86	Rantau Kopar	Rantau Kopar	101,013	1,3780
87	Rantau Kopar	Rantau Kopar	101,01	1,3780
88	Rantau Kopar	Sungai Rangau	101,007	1,3820
89	Rantau Kopar	Sungai Rangau	101,008	1,3750
90	Tanah Putih	Rantau Bais	101,177	1,5450
91	Sinaboi	Darusalam	101,033	2,2240
92	Sinaboi	Darusalam	101,027	2,2340
93	Sinaboi	Darusalam	101,029	2,2300
94	Kubu	Teluk Merbau	100,653	2,0850
95	Kubu	Teluk Piyai Pesisir	100,549	2,1370
96	Kubu	Sungai Segajah Jaya	100,605	2,0850
97	Kubu	Teluk Merbau	100,385	2,5100
98	Kubu	Teluk Merbau	100,651	2,0860
99	Kubu	Teluk Merbau	100,645	2,0700
100	Kubu	Tanjung Leban	100,481	1,9950
101	Kubu	Sungai Segajah Jaya	100,585	2,0680
102	Balai Jaya	Balai Jaya	100,543	1,6900
103	Balai Jaya	Pasir Putih	100,505	1,6800
104	Balai Jaya	Pasir Putih Barat	100,461	1,7070
105	Balai Jaya	Pasir Putih Barat	100,493	1,7320
106	Balai Jaya	Balai Jaya	100,552	1,6900
107	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	100,557	1,7530
108	Balai Jaya	Balam Sempurna	100,684	1,7920
109	Balai Jaya	Balam Jaya	100,69	1,7160
110	Balai Jaya	Balam Jaya	100,606	1,6190

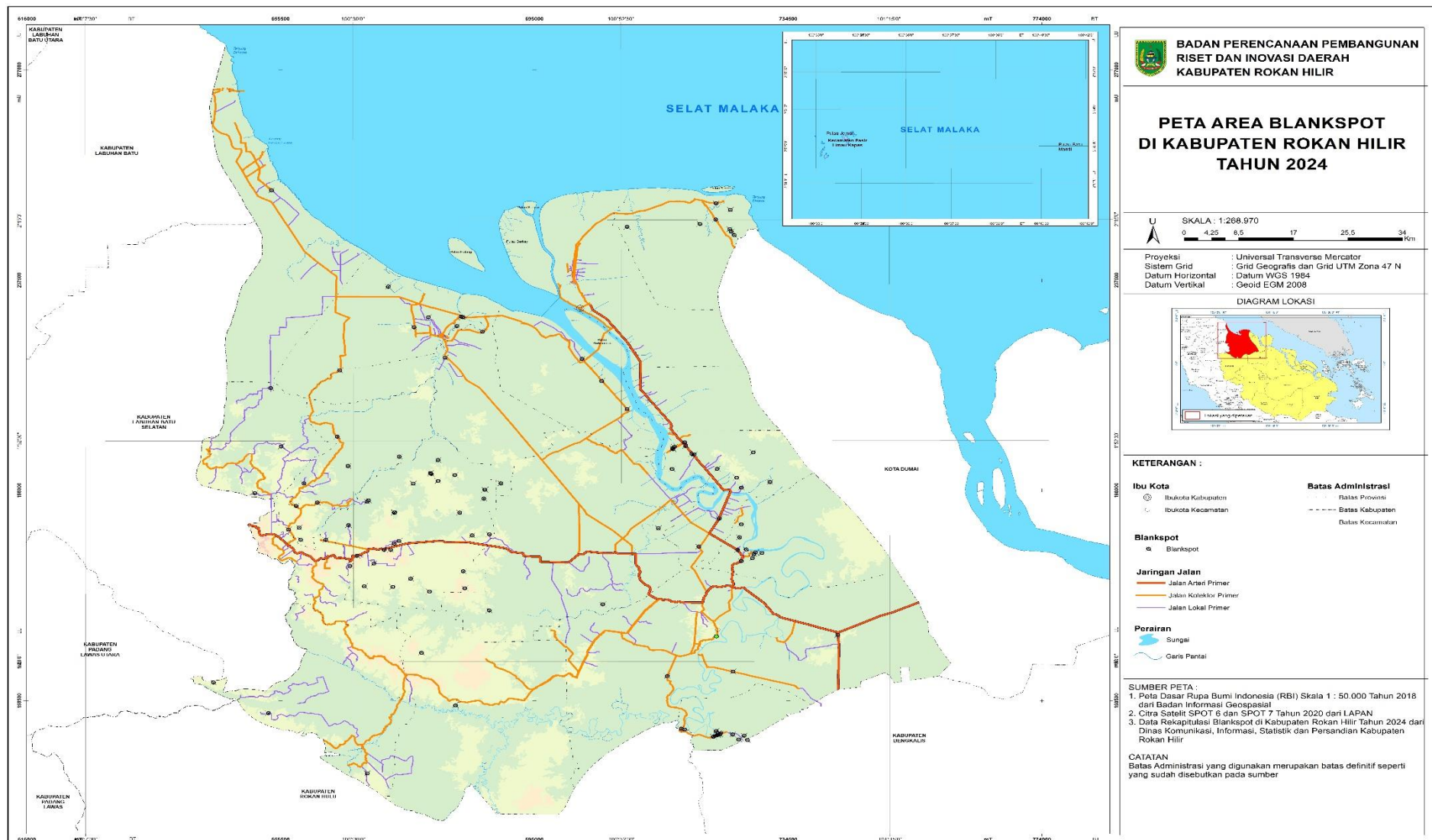
No	Kecamatan	Kelurahan/ Kepenghuluan	Longitude	Latitude
111	Balai Jaya	Balam Sempurna	100,609	1,8190
112	Balai Jaya	Balam Jaya	100,543	1,6900
113	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	100,304	1,4650
114	Balai Jaya	Balai Jaya	100,58	1,6410
115	Balai Jaya	Lubuk Jawi	100,521	1,7740
116	Tanah Putih	Sintong Pusaka	101,0305	1,4829
117	Pujud	Pujud Selatan	100,6423	1,4258
118	Tanjung Medan	Akar Belingkar	100,3809	1,4127

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir 2024

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurangi Blank spot adalah dengan membangun menara Telekomunikasi (tower) dan penguatan sinyal di perbatasan dengan cara kerja sama dan mendampingi Provider turun langsung ke titik Blank spot, serta aktif melakukan koordinasi yang masif dengan kementerian Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan tower.

Selain permasalahan Blankspot Kabupaten Rokan Hilir juga mengalami serangan *cyber* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai upaya untuk mencuri, mengekspos, mengubah, menonaktifkan, atau menghancurkan aset pemerintah melalui akses tidak sah ke sistem komputer. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, pada tahun 2023 terdapat 54 kasus serangan, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 11 kasus serangan *cyber*.

Gambar II.48 Peta Area Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024



2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi adalah komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang (Eduardus Tandelin, 2017). Dalam arti yang lain investasi dapat juga diartikan sebagai aktivitas penanaman modal oleh Investor asing dalam berbagai jenis bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Sementara itu investasi dalam pengertian konseptual merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat multi dimensional. Salah satu fungsi dari investasi jika di artikan sebagai penanaman modal / faktor ekonomi yang paling esensial, mudah di ukur secara kuantitatif.

Faktor yang mempengaruhi investasi antara lain faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi, dan dukungan dari pemerintah. Angka kriminalitas dan jenis kriminalitas menggambarkan kondisi keamanan suatu daerah. Berikut disajikan tabel rasio kriminalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 – 2022, yaitu :

**Tabel II.52 Tingkat Kriminalitas Menurut Jenis Kejahatan
Tahun 2018 - 2022**

Kasus	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	844	800	297	693	797
Persentase Penyelesaian Kejahatan	75,71	78,75	76,77	69,55	62,74
Jumlah Penduduk	697218	714497	637161	646791	658407
Rasio Kriminalitas Per 100.000 Penduduk	121,05	111,97	46,61	107,14	121,05

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2023

Perkembangan rasio kriminalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 sebanyak 121,05, turun hingga tahun 2020 menjadi 46,61 dan naik kembali hingga tahun 2022 menjadi 121,05. Rasio kriminalitas Kabupaten Rokan Hilir masih terkendali, akan tetap terjadi peningkatan pada tahun 2022. Untuk itu ke depan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan lebih serius menjaga kondusifitas daerah guna meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun realisasi nilai investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2018 sebesar Rp. 4,78 miliar, meningkat hingga tahun 2020 menjadi Rp. 300,90 miliar, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 269,54 miliar dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.969,82 miliar.

Gambar II.49 Nilai Investasi Asing dan Dalam Negeri di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2022 (Jutaan Rupiah)

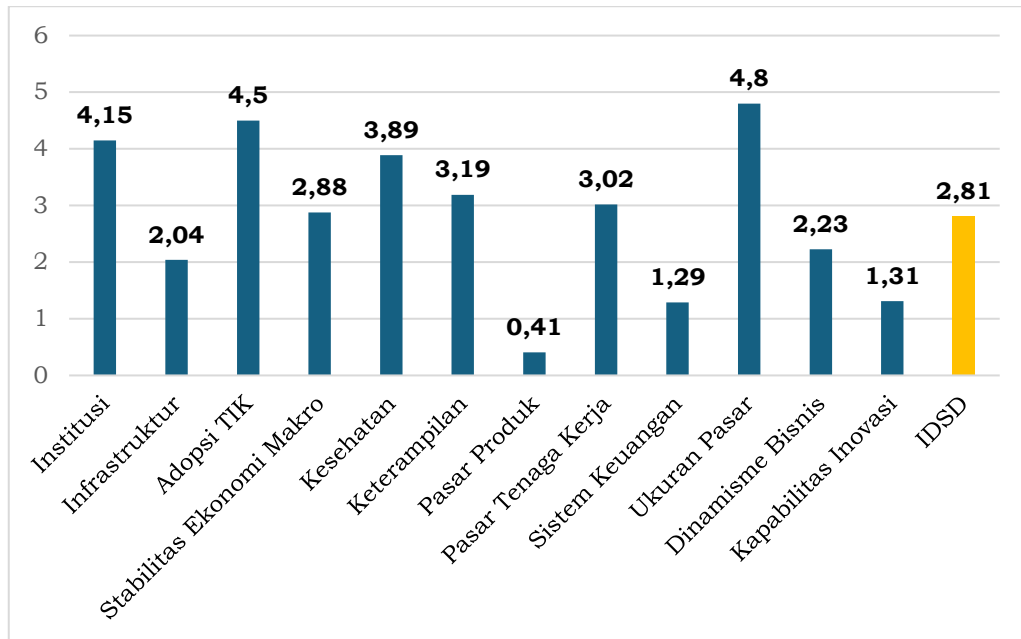


Sumber: DPMPSTP Kabupaten Rokan Hilir dan DPMPSTP Provinsi Riau, 2023

Iklim investasi Kabupaten Rokan Hilir dapat terlihat dari pencapaian Indeks Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat daya saing atau kemampuan suatu daerah dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada umumnya indeks ini menggambarkan kondisi ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya saing daerah tersebut.

Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rokan Hilir mencapai 2,81. Adapun pilar yang memiliki indeks tertinggi dalam kontribusi IDSD Rokan Hilir adalah pilar ukuran pasar yang mencapai indeks sebesar 4,80 dan pilar adopsi TIK yang memiliki indeks 4,50. Sedangkan pilar penyusun IDSD Rokan Hilir yang memiliki kontribusi terendah yakni pilar pasar produk dengan indeks sebesar 0,41; pilar sistem keuangan dengan indeks sebesar 1,29; dan pilar kapabilitas inovasi dengan indeks sebesar 1,31.

Gambar II.50 Indeks Daya Saing Daerah Menurut Pilar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023



Sumber: BRIN, 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, dari pelaksanaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, terlihat bahwa pencapaian reformasi birokrasi di Kabupaten Rokan masih dapat dioptimalkan di mana pada tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori CC.

Dari sisi pembangunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, nilai SAKIP Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 memiliki capaian sebesar 68,81 dengan kategori B di mana angka ini menurun tipis dibanding angka 2022 yang mencapai 68,82 dengan kategori yang sama. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ke depannya, diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat transparansi, menyusun sistem pengukuran kinerja yang jelas, meningkatkan kapasitas manajerial, memperkuat independensi, mengatasi praktik korupsi, dan menciptakan insentif yang sesuai untuk pencapaian kinerja yang baik.

Pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir terus diupayakan peningkatan kualitasnya. Hal ini terlihat dari pencapaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 sebesar 3,37 dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sebesar 85,10 (kategori tinggi). Meskipun begitu, dalam pengelolaan

pelayanan publik masih belum memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi untuk mempermudah layanan kepada masyarakat yang terlihat dari Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebesar 2,50 pada tahun 2023.

Dari sisi pengawasan internal pemerintahan, maka Kabupaten Rokan Hilir secara umum sudah berupaya untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh. Meskipun begitu, masih terdapat kendala-kendala pada beberapa poin SPIP sehingga pada tahun 2023 masih memiliki capaian 3,072. Rekomendasi yang penting untuk diimplementasikan ke depan difokuskan pada perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome* dan memenuhi kriteria SMART serta penerapan manajemen risiko di setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Tabel II.53 Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PAD (Jutaan Rupiah)	116.485,85	115.883,02	136.313,50	129.249,13	129.154,94
Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir, 2024

Secara umum, pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir masih belum cukup untuk memperlihatkan kemandirian Rokan Hilir dalam pelaksanaan pembangunan dari sisi keuangan daerah. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan pendapatan Rokan Hilir, di mana pada tahun 2023 perbandingan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah atau disebut dengan Derajat Otonomi Fiskal Daerah hanya sebesar 6,75 persen.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai. Tanggung Jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan Target Kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan Sasaran terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” selama periode 2019-2023

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2005-2025

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan evaluasi berkenaan dengan pembangunan jangka panjang sebagai upaya dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan ke depan yang maju dan berkelanjutan. Evaluasi ini dilaksanakan di seluruh periode pembangunan di mana pada tahap terakhir dilakukan evaluasi hingga tahun 2022. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Rokan Hilir memiliki visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 adalah,

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROKAN HILIR YANG SEJAHTERA, BERMARWAH DAN BERTAQWA DENGAN DUKUNGAN AGRIBISNIS YANG TANGGUH TAHUN 2025”

Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian sebagai berikut:

MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

MISI 2: Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya

MISI 3: Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal

MISI 4: Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang lestari

MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji dengan budaya Melayu sebagai ruhnya

MISI 6: Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa

Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Rokan Hilir masih bersifat kualitatif, sehingga untuk mengetahui kondisi ketercapaian pembangunan digunakan pendekatan kondisi indikator makro. Kondisi capaian kinerja indikator makro Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005 sebagai awal periode RPJPD, sampai dengan kondisi saat ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.54 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, 2005-2022

No.	Indikator Makro	Capaian Kinerja pada Awal Periode Perencanaan	Capaian Kinerja Tahun Berjalan	Pertambahan/ Penurunan (%)	Keterangan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,60 (2005)	70,10 (2022)	2,19	IPM Meningkat
2.	Angka Kemiskinan	10 (2005)	6,73 (2022)	-32,70	Angka Kemiskinan Menurun
3.	Angka Pengangguran	9,33 (2010)	3,25 (2021)	-65,17	Angka Pengangguran Menurun
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,72 (2006)	2,64 (2022)	-29,03	Pertumbuhan Ekonomi Menurun
5.	Pendapatan per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	34,67 (2005)	60,83 (2010)	75,45	Pendapatan Per Kapita Meningkat
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,323 (2010)	0,285 (2021)	-11,76	Ketimpangan Pendapatan Menurun
7.	PDRB Perkapita (ADHB Juta Rupiah)	37,93 (2005)	145,91 (2022)	284,68	Pendapatan Per Kapita Meningkat
8.	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)	8.281,22 (2010)	9.417,00 (2021)	13,72	Pengeluaran Per Kapita Meningkat

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025

Capaian IPM dari tahun 2005 hingga 2022, mengalami kenaikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan IPM semakin tinggi, diantaranya pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pengangguran yang rendah mengakibatkan perbaikan pada IPM. Hal tersebut dikarenakan

penduduk yang bekerja diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Faktor lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap IPM di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula IPM di suatu daerah.

Capaian angka kemiskinan dari tahun 2005 hingga 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, masyarakat miskin juga akan berkurang. Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi pula angka kemiskinan. Hal ini diakibatkan dari tidak adanya penghasilan masyarakat yang pada ujungnya mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2021 mengalami penurunan. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Permintaan atas tenaga kerja berasal dari swasta maupun pemerintah. Besaran permintaan tersebut dapat dilihat dari angka pengeluaran investasi oleh perusahaan serta angka pengeluaran pemerintah. Semakin tinggi nilai investasi, semakin tinggi pula kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Semakin banyak pengeluaran pemerintah, termasuk proyek padat karya, maka semakin besar tenaga kerja yang terserap.

Capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir Periode 2005-2022 berfluktuasi dan cenderung menurun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu: tingkat pendidikan, inflasi, tingkat investasi, konektivitas, serta efek spasial dari daerah sekitar. Tingkat pendidikan penduduk yang semakin tinggi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi di suatu daerah, semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Dikarenakan tidak tersedianya data inflasi pada kabupaten Rokan Hilir, terdapat dua indikator yang bisa menjadi acuan pergerakan harga di Rokan Hilir, yaitu GDP Deflator serta angka inflasi Provinsi Riau. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat investasi. Investasi sangat penting bagi suatu perekonomian dikarenakan dengan adanya investasi, suatu daerah dapat meningkatkan nilai produksinya, bertambahnya lapangan kerja, serta investasi pada bidang IT akan meningkatkan produktivitas. Konektivitas antar daerah juga berpengaruh positif akan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari

hasil produksi yang memiliki perputaran yang lebih cepat sehingga berdampak pada peningkatan nilai produksi pada suatu daerah. Dapat dicontohkan dari usaha travel yang awalnya membutuhkan 7-8 jam menuju Pekanbaru, namun dengan adanya jalan tol akan memangkas waktu tempuh sehingga interval keberangkatan travel dari dan menuju Pekanbaru semakin singkat. Selain itu, dengan konektivitas yang baik antar daerah juga akan meningkatkan efek spasial dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Rokan Hilir. Pertukaran barang maupun tenaga kerja semakin baik dengan adanya konektivitas yang baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi, baik di Duri, Dumai, Pekanbaru, bahkan Sumatera Utara serta Rokan Hulu akan memiliki dampak bagi perekonomian di Rokan Hilir. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tinggal di daerah Tanah Putih maupun Rantau Kopar cenderung untuk bekerja di daerah Duri maupun Dumai. Begitu juga dengan yang tinggal di Bagan Batu yang banyak bekerja di Sumatera Utara.

Capaian pendapatan per kapita Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pendapatan, di antaranya pengeluaran, nilai inflasi harapan, serta tingkat inflasi. Tingkat pengeluaran yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan pada pengeluaran. Selain faktor pendapatan, *expected inflation* juga berpengaruh pada peningkatan pengeluaran sesaat, seperti harga BBM yang akan naik mengakibatkan *panic buying* pada setiap SPBU. Selain itu, inflasi juga berpengaruh pada besaran pengeluaran yang harus dikeluarkan

Capaian Gini Rasio di Rokan Hilir beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan pada pemerataan pendapatan masyarakat. Gini Rasio yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengangguran, kemiskinan, serta UMK. Tingginya tingkat pengangguran akan mengakibatkan ketimpangan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan mengakibatkan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Upah minimum berguna untuk melindungi hak atas pendapatan yang layak bagi buruh, yang juga akan meningkatkan pendapatan pada pekerja level bawah. Sehingga ketimpangan pada pekerja level bawah dan level atas dapat di minimalisir.

Capaian indikator PDRB Per kapita selama periode 2005-2022 cenderung fluktuatif namun masih dengan tren yang meningkat. Perkembangan ini mencerminkan seberapa tinggi tingkat (level) kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk kabupaten/kota pada periode tersebut. Perkembangan PDRB per kapita dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata tingkat kemakmuran masyarakatnya mengalami peningkatan atau sebaliknya. PDRB per kapita tahun 2005 adalah Rp 37,931 juta/orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 109,656 juta.

Peningkatan PDRB per kapita pada tahun 2015 dipicu oleh sensus penduduk pada tahun 2010 sehingga terjadi pengurangan jumlah penduduk mempengaruhi nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, kondisi ini diperkirakan atas dasar bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tendensi semakin membaik, akibat adanya upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil pada tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas dan mengurangi ekonomi biaya tinggi serta untuk mendongkrak kemampuan perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 hingga 2022 semakin membaik. Terlihat PDRB per kapita tahun 2015 mencapai Rp 109,656 juta. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2022 sebesar Rp 145,907 juta/orang. PDRB per kapita yang dialami Kabupaten Rokan Hilir cenderung fluktuasi dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2005-2022. Beberapa penyebab utamanya adalah melemahnya produksi minyak di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan harga minyak dunia yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir berimbas pada menurunnya pendapatan daerah, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa secara umum. Covid-19 menjadi penyebab utama penurunan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hilir. Penyebab utama lainnya disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat sementara pertumbuhan PDRB cenderung menurun di Kabupaten Rokan Hilir. Penurunan PDRB per kapita yang terjadi pada periode tersebut otomatis menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun.

Sementara itu, PDRB per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir kembali naik dari tahun 2020 ke tahun 2021 setelah kondisi pandemi terkendali seiring ditemukannya vaksin serta dilaksanakannya program vaksinasi Covid-19 cukup masif pada tahun 2021. Di tahun 2022 PDRB per kapita tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 mencapai Rp 145,907 juta/orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan performa pembangunan ekonomi daerah ke arah yang lebih baik.

Capaian indikator pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan selama periode 2010-2021. Pengeluaran Per kapita masyarakat Kabupaten Rokan Hilir diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khusus pada kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan besaran pengeluaran tahun 2022 ini sebesar 9.417.000, diperkirakan pengeluaran

per kapita Kabupaten Rokan Hilir dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, hal ini sejalan dengan perluasan lapangan pekerjaan yang terjadi pada Kabupaten Rokan Hilir yang kita harapkan berdampak pada pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2006-2011, tahap kedua pada periode 2011-2016, dan tahap ketiga pada periode 2016-2021. Kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.

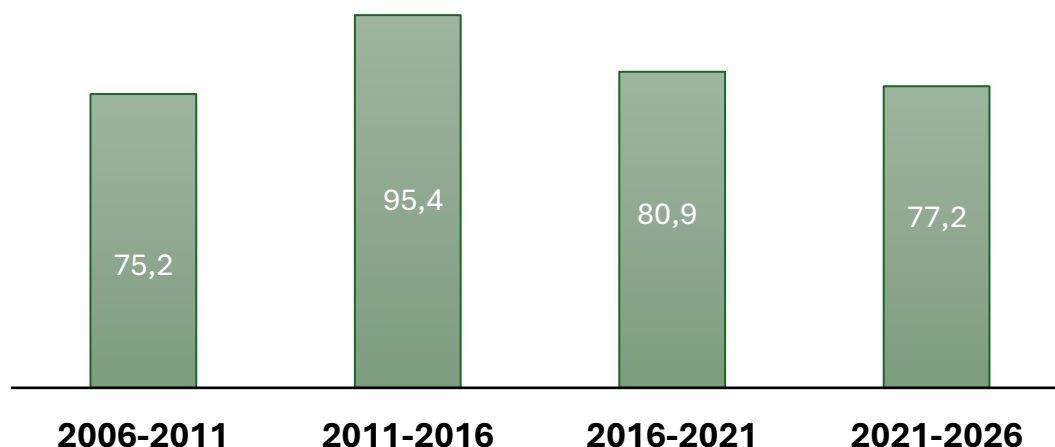
Tabel II.55 Kriteria Penilaian Kinerja

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil dari tingkat capaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD terhadap sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan mayoritas indikator memiliki predikat penilaian "TINGGI". Indikator dengan predikat ini berada pada kisaran 82,2% dari total keseluruhan indikator di tiap periode RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar II.51 Grafik Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir, 2005-2025

Jika dirata-rata, tingkat capaian kinerja RPJMD akan menghasilkan persentase sebagai berikut. Untuk periode I, rata-rata capaian kinerja indikator berada pada angka 75,2% di mana masuk predikat TINGGI. Lalu meningkat pada capaian kinerja RPJMD periode II, rata-rata capaian kinerja indikator berada pada angka 95,4% di mana masuk predikat SANGAT TINGGI. Kemudian terjadi penurunan pada capaian kinerja RPJMD periode III berada pada angka 80,9% dengan predikat TINGGI. Dan terus menurun hingga periode IV yaitu sebesar 77,2% dengan predikat TINGGI.

Sebagaimana hasil rata-rata capaian kinerja tiap periode, adapun faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tiap periode tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Keterbatasan sarana pendidikan dan angka putus sekolah yang masih tinggi;
- Keterbatasan akses transportasi umum ke sekolah;

- Budaya masyarakat, anak membantu orang tua mencari nafkah sehingga tidak melanjutkan sekolah;
- Pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai 2022;

- Anggaran kesehatan untuk pembangunan puskesmas masih belum mencukupi;
- Krisis ekonomi dan pemulihannya yang lambat;
- Pertumbuhan angkatan kerja besar; kompetensi tenaga kerja masih rendah; kemajuan teknologi menggantikan manusia dengan mesin; kualitas pendidikan belum memadai untuk dunia kerja;
- Investasi dan lapangan kerja belum signifikan untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan
- Ketidakmampuan warga miskin menyekolahkan anaknya;
- Peluang pekerjaan sulit bagi warga miskin
- Infrastruktur belum memadai;
- 60% wilayah Kabupaten Rokan Hilir masuk Kawasan Hutan;
- UMKM kurang akses permodalan;
- Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pelayanan satu atap;
- Keterbatasan Kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah;
- Daya dukung tanah dasar yang rendah karena rawa dan gambut;
- Tonase kendaraan/alat angkut hasil perkebunan yang melebihi kelas jalan atau kendaraan yang masuk dalam kategori *Over Load Over Dimension* (ODOL);
- Anggaran pembangunan infrastruktur terbatas; kualitas pengerjaan infrastruktur rendah;
- Belum ada tindak lanjut dari studi kelayakan bandara; belum masuk dalam jaringan hierarki bandara nasional;
- Lokasi pemukiman yang berjauhan dan jauh dari akses jalan utama; tidak menguntungkan bagi PLN;
- Adanya beberapa kali perubahan dalam peraturan tentang pedoman penyusunan RTRW serta Basis Data RTRW, adanya perubahan peraturan tentang kawasan hutan, belum tercapainya kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir mengenai muatan RTRW Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini disusun.
- Nilai-nilai di dalam tunjuk ajar yang bersifat abstrak susah untuk diukur; minimnya pencatatan pemajuan kebudayaan Melayu; minimnya anggaran untuk pemajuan kebudayaan Melayu;
- Kejahatan narkoba yang mendominasi dan jumlahnya terus meningkat;

2. Faktor Pendorong:

- Pendapatan per kapita yang masih tinggi dari kontribusi migas dan berkembangnya perkebunan kelapa sawit;
- Kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada tingkat SD sudah baik;
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- Koordinasi baik antara Dinkes dan Kemenkes untuk DAK bidang kesehatan;
- Kabupaten Rokan Hilir merupakan lokasi prioritas pembangunan daerah perbatasan;
- Masih adanya potensi SDA migas guna menopang ekonomi masyarakat;
- Luasnya wilayah potensi pertanian, perikanan dan perkebunan;
- Berkembangnya sektor perkebunan dan pertambangan migas;
- Pelayanan satu pintu merupakan mandatory dari pemerintah pusat;
- Sistem penilaian SAKIP dan RB (reformasi birokrasi) sudah terstandar;
- Komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur;
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
- RTRW merupakan perencanaan mandatory dan strategis;
- Tingginya semangat masyarakat untuk menerapkan budaya Melayu;
- Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah nasional untuk memajukan kebudayaan daerah;
- Toleransi kehidupan beragama yang semakin baik;

Dari hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD, maka beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
2. Pemerataan pendidikan pada setiap daerah, baik sarana prasarana, dan tenaga pengajar;
3. Pemberian beasiswa pendidikan bagi warga tidak mampu;
4. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
5. Perbaikan sanitasi dan lingkungan, pemberantasan penyakit, dan peningkatan gizi;
6. Pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan ke semua daerah;
7. Pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja;
8. Pengelolaan akses pasar kerja melalui Sistem Informasi Pasar Kerja terintegrasi;
9. Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja;

10. Melanjutkan program pengentasan kemiskinan; peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; pemberdayaan masyarakat dan perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial;
11. Mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah;
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
13. Pengaturan angkutan ODOL;
14. Peningkatan teknologi perkuatan tanah gambut; peningkatan kualitas pengerjaan infrastruktur; peningkatan pemeliharaan infrastruktur;
15. Kajian lebih lanjut tentang bandara;
16. Fasilitasi peningkatan akses listrik (rasio elektrifikasi);
17. Percepatan penyelesaian RTRW dan pengawasan di dalam penerapannya;
18. Melanjutkan upaya pemajuan kebudayaan Melayu melalui upaya perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan budaya Melayu;
19. Peningkatan kualitas kehidupan umat beragama;
20. Pemberantasan tindak kejahatan narkoba;
21. Pembinaan masyarakat terhadap bahaya narkoba;

Dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan maupun capaian hasil pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian indikator sasaran pokok daerah Kabupaten Rokan Hilir pada periode ke-4 (2021-2026) menunjukkan bahwa total rata-rata capaian kinerja 77,2% (tinggi) atau 5 indikator telah terealisasi $\geq 100\%$ (tercapai);
2. Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir terhadap capaian kinerja awal Periode Perencanaan (2005) terhadap Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2022) yang terdiri 8 (delapan) indikator yang ada, menunjukkan bahwa 87,5% atau 7 (tujuh) indikator menunjukkan hasil yang baik/positif, sedangkan 12,5% lainnya atau 1 (satu) indikator menunjukkan hasil yang kurang baik (negatif)

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Dalam demografi terdapat aspek kependudukan yang statis dan dinamis sifatnya. Aspek statis ditunjukkan oleh komposisi penduduk misalnya. Komposisi penduduk merupakan gambaran kondisi penduduk pada suatu titik tertentu, yaitu pada saat dilaksanakan sensus atau survei. Sesudah tanggal atau hari tersebut, komposisi penduduk akan berubah. Perubahan komposisi ini terjadi karena perubahan kelahiran, kematian dan migrasi. Jadi dalam demografi juga dipelajari aspek statis dan aspek dinamis, yang keduanya saling mempengaruhi.

Demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan sarana (infrastruktur) suatu wilayah atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan sarana pembangunan baik transportasi, perumahan hingga air minum. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana pembangunan menjadi salah satu domain utama perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya, pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan memengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam

menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat memengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.

Demografi memengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memerhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh sektor ekonomi industri pengolahan, sektor ini memiliki cukup banyak serapan tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan aspek kependudukan, khususnya bagaimana peningkatan kompetensi angkatan kerja yang mampu diserap oleh lapangan usaha berdasarkan skill/keterampilan yang tersedia.

Tabel II.56 Proyeksi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Rokan Hilir, diolah*

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir diproyeksikan mencapai 845,68 ribu jiwa pada tahun 2045, Angka ini meningkat kisaran 181,72 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini, Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya, Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga

aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam menyejahterakan kehidupannya.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Pada tahun 2025, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 348,90 dan terus meningkat hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 422,72 sehingga kondisi dominasi jenis kelamin penduduk berubah di tahun 2045 walaupun hanya terpaut sedikit. Angka ini mengindikasikan bahwa di antara 422,96 penduduk perempuan, terdapat 422,72 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah proyeksi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2045.

Tabel II.57 Proyeksi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	340,01	348,90	370,18	389,88	407,52	422,72
Perempuan	323,94	333,72	357,78	380,94	402,80	422,96
Sex Ratio	104,96	104,55	103,47	102,35	101,17	99,94

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Rokan Hilir, diolah

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi.

Salah satu fenomena yang terlihat pada proyeksi penduduk di Kabupaten Rokan Hilir adalah peningkatan penduduk usia tua yang pada momen tertentu akan menjadi *aging population*. Fenomena ini terlihat dari semakin melebarnya struktur umur pada piramida bagian atas yang mengindikasikan usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Adapun penduduk usia muda juga semakin mengalami peningkatan meskipun secara komposisi mengalami penurunan.

Tabel II.58 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Rokan Hilir

PARAMETER	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	662.546	682.623	727,961	770,820	810,300	845,673
Komposisi Umur (Ribuan Jiwa)						

PARAMETER	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	182,8	181,25	178,03	182,92	192,28	200,66
15-64	453,05	468,46	502,95	525,42	552,34	576,44
65+	28,12	32,91	46,98	62,48	65,70	68,59
<i>Dependency Ratio</i> (Ribu Jiwa)	46,56	45,72	44,74	46,71	46,71	46,71

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Rokan Hilir, diolah*

Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Rokan Hilir, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 46,56 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 46-47 penduduk usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir berada pada jendela kesempatan bonus demografi. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi jangka panjang. Adapun jendela bonus demografi di Kabupaten Rokan Hilir akan terus terlaksana hingga periode ketiga dan pada periode keempat, bonus demografi sudah tidak terjadi karena angka ketergantungan yang sudah lebih dari 50.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan

aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya, memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri.

Tabel II.59 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68
Jumlah Rumah	NA	136.524	145.592	154.164	162.064	169.136
Proyek Kebutuhan Listrik (Juta VA)	NA	593,72	633,16	670,43	704,79	735,54

Kebutuhan listrik untuk masyarakat Rokan Hilir diproyeksikan pada tahun 2025 sebesar 593,72 juta VA; 2030 sebesar 633,16 juta VA; 2035 sebesar 670,43 juta VA; 2040 sebesar 704,79 juta VA dan di tahun 2045 sebesar 735,54 juta VA.

2. Air Minum

Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap pasokan air minum adalah hak

dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Tabel II.60 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Juta Liter)	NA	29.898,76	31.884,65	33.761,92	35.492,02	37.040,78

Kebutuhan air minum berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 yaitu air minum minimum berada di angka 120 Liter per jiwa per hari untuk setiap unit rumah tangga. Dan pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan air minum sebesar 29.898,76 juta liter; 2030 sebesar 31.884,65 juta liter; 2035 sebesar 33.761,92 juta liter; 2040 sebesar 35.492,02 juta liter dan di tahun 2045 sebesar 37.040,78 juta liter.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan.

Tabel II.61 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	NA	136.524	145.592	154.164	162.064	169.136

Jumlah penghuni rumah rata-rata di tiap rumah yaitu lima jiwa per rumah. Dan pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan sebesar 136.524 unit; 2030 sebesar 145.592 unit; 2035 sebesar 154.164 unit; 2040 sebesar 162.064 unit dan di tahun 2045 sebesar 169.136 unit. Dalam penyediaan unit perumahan, juga perlu dilihat kualitasnya apakah memenuhi standar kelayakan atau tidak sehingga perlu adanya perhatian pada

aspek perumahan dan permukiman ini, khususnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas dasar.

4. Fasilitas Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Adapun infrastruktur pendidikan TK pada tahun 2045 akan diproyeksikan sebesar 677 unit, infrastruktur SD/MI sebesar 529 unit; infrastruktur SMP/MTs sebesar 218 unit; dan infrastruktur SMA/MA/SMK sebesar 176 unit.

Tabel II.62 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
•TK	483	546	582	617	648	677
•SD/MI	456	456	456	482	506	529
•SMP/MTs	209	209	211	214	216	218
•SMA/MA/SMK	124	142	152	161	169	176

5. Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat.

Berdasarkan standar WHO, idealnya 1 unit rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Tahun 2023 jumlah penduduk Rokan Hilir adalah 662.546 jiwa dengan jumlah rumah sakit sebanyak 6 unit. Maka, untuk kebutuhan rumah sakit di tahun 2045, diproyeksikan sebanyak 8 unit.

Berdasarkan standar SNI 03-1733-1989, jumlah puskesmas ideal untuk kabupaten masih di bawah kondisi eksisting. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Rokan Hilir, maka di tahun 2045 perlu diproyeksikan kebutuhan puskesmas menjadi 23 unit. Adapun kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya pada tahun 2045 sebanyak 28 klinik bersalin, 169 praktek dokter, dan 132 apotek/rumah obat.

**Tabel II.63 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir**

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
▪ Rumah Sakit	6	6	7	7	8	8
▪ Puskesmas	21	21	21	22	22	23
▪ Klinik	20	23	24	26	27	28
▪ Praktek Dokter	70	137	146	154	162	169
▪ Apotek/Rumah Obat	67	72	87	102	117	132

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah dan sampah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel II.64 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	662,55	682,62	727,96	770,82	810,32	845,68
Proyeksi Timbulan Sampah (Juta Liter)	NA	622,89	664,26	703,37	739,42	771,68

Jika tidak pernah dilakukan sampling, maka menggunakan SNI 3242-2008 untuk memperkirakan volume timbulan sampah, untuk kota besar 3 liter/orang/hari dan kota kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah direntang 200-300 kg/m³ (0,2 – 0,3 kg/liter). Dari rumusan tersebut, tahun 2025 akan diproyeksikan memiliki timbulan sampah sebanyak 622,89 juta liter; tahun 2030 sebesar 664,26 juta liter; tahun 2035 sebesar 703,37 juta liter; tahun 2040 sebesar 739,42 juta liter dan di tahun terakhir 2045 yaitu sebesar 771,68 juta liter.

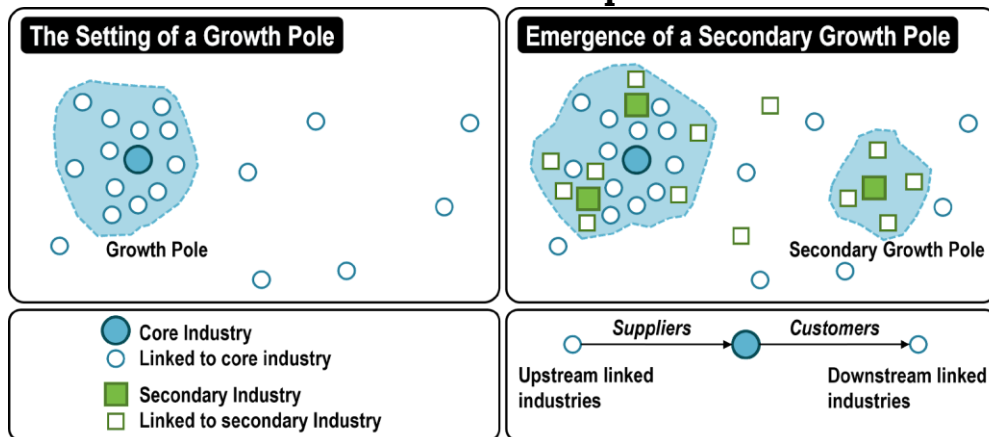
2.7 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Sebuah daerah tertentu sering memiliki potensi untuk pengembangan yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu potensi utama adalah keberlimpahan sumber daya alam, seperti tanah yang subur dan kekayaan alam lainnya.

Pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya alam ini dapat merangsang sektor pertanian dan kehutanan, membuka peluang bagi industri pengolahan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, potensi ini juga mencakup keanekaragaman hayati, yang dapat menjadi dasar bagi industri pariwisata berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi pengembangan wilayah secara optimal akan menciptakan pusat pertumbuhan untuk suatu daerah. Pusat pertumbuhan atau konsep *growth pole* menjadi kunci untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Teori *Growth Pole*, bertujuan untuk menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Gambar II.52 Ilustrasi Konsep Pusat Pertumbuhan



Growth Pole menyatakan bahwa di suatu daerah atau wilayah, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan di sekitarnya, mungkin karena investasi, inovasi, atau sektor ekonomi yang berkembang pesat. Pusat pertumbuhan menjadi fokus pengembangan ekonomi, mengakomodasi sektor-sektor kunci seperti industri, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur yang baik, termasuk jaringan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, mendukung pertumbuhan pusat tersebut dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Dalam hal ini, pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dapat ditinjau dengan melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki ciri – ciri empiris sebagai pusat pertumbuhan. Hal lainnya yang dapat dilakukan sejalan dengan telaah pusat pertumbuhan wilayah adalah dengan mempertimbangkan struktur penataan ruang dan identifikasi kawasan strategis baik tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Kedua aspek ini menjadi landasan hukum guna menjalankan fungsi wilayah kabupaten sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Berkaitan dengan peran Kabupaten Rokan Hilir di ranah Provinsi Riau, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 bahwa Kabupaten Rokan Hilir berperan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang terletak di Kecamatan Bangko. PKL dalam konteks RTRW memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Selain kedudukan Kabupaten Rokan Hilir di lingkup Provinsi Riau secara umum, pusat pertumbuhan kabupaten juga didasarkan pada hierarki sistem pusat perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir serta kawasan strategis yang ada baik berupa kawasan agropolitan, minapolitan, kawasan pengembangan agroindustry maupun kawasan bisnis berbasis pada sektor agribisnis. Berdasarkan ketentuan normatif dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 - 2044, pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terletak di Kecamatan Bangko yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa wilayah Kabupaten/kota.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di:
 - a. Kawasan Perkotaan Bagan Batu berada di Kecamatan Bagansinembah;
 - b. Kawasan Perkotaan Panipahan berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 - c. Kawasan Perkotaan Ujung Tanjung berada di Kecamatan Tanah Putih; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Sinaboi berada di Kecamatan Sinaboi.Pusat kegiatan ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa wilayah kecamatan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di:
 - a. Kawasan Perkotaan Kubu Babusalam berada di Kecamatan Kubu Babussalam;
 - b. Kawasan Perkotaan Simpang Kanan berada di Kecamatan Simpang Kanan;
 - c. Kawasan Perkotaan Pujud berada di Kecamatan Pujud;
 - d. Kawasan Perkotaan Tanah Putih Tanjung Melawan berada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 - e. Kawasan Perkotaan Rantau Kopar berada di Kecamatan Rantau Kopar;
 - f. Kawasan Perkotaan Balai Jaya berada di Kecamatan Balai Jaya;

- g. Kawasan Perkotaan Tanjung Medan berada di Kecamatan Tanjung Medan;
- h. Kawasan Perkotaan Rimba Melintang berada di Kecamatan Rimba Melintang; dan
- i. Kawasan Perkotaan Bangko Pusako berada di Kecamatan Bangko Pusako.

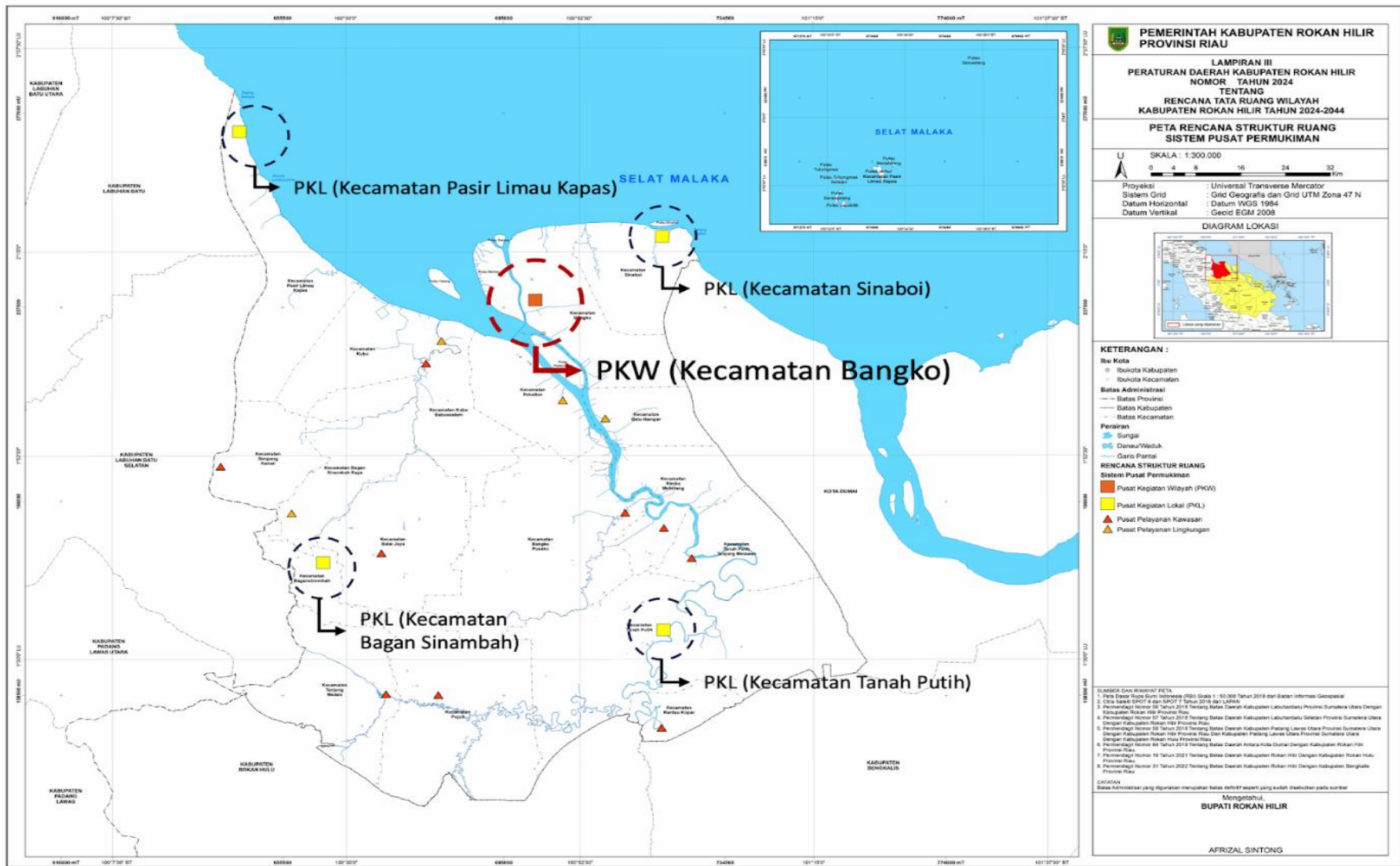
Pusat kegiatan ini berfungsi melayani satu wilayah kecamatan atau beberapa desa.

- 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terletak di:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kubu berada di Kecamatan Kubu;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pekaitan berada di Kecamatan Pekaitan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bagan Sinembah Raya berada di Kecamatan Bagan Sinembah Raya; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Hampar berada di Kecamatan Batu Hampar.

Pusat kegiatan ini berfungsi melayani beberapa desa terdekat di sekitarnya.

Gambar dibawah ini menampilkan rancangan Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Gambar II.53 Peta Hierarki Struktur Ruang Kabupaten Rokan Hilir



Selain berfokus pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas di mana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Rokan Hilir, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Rokan Hilir.

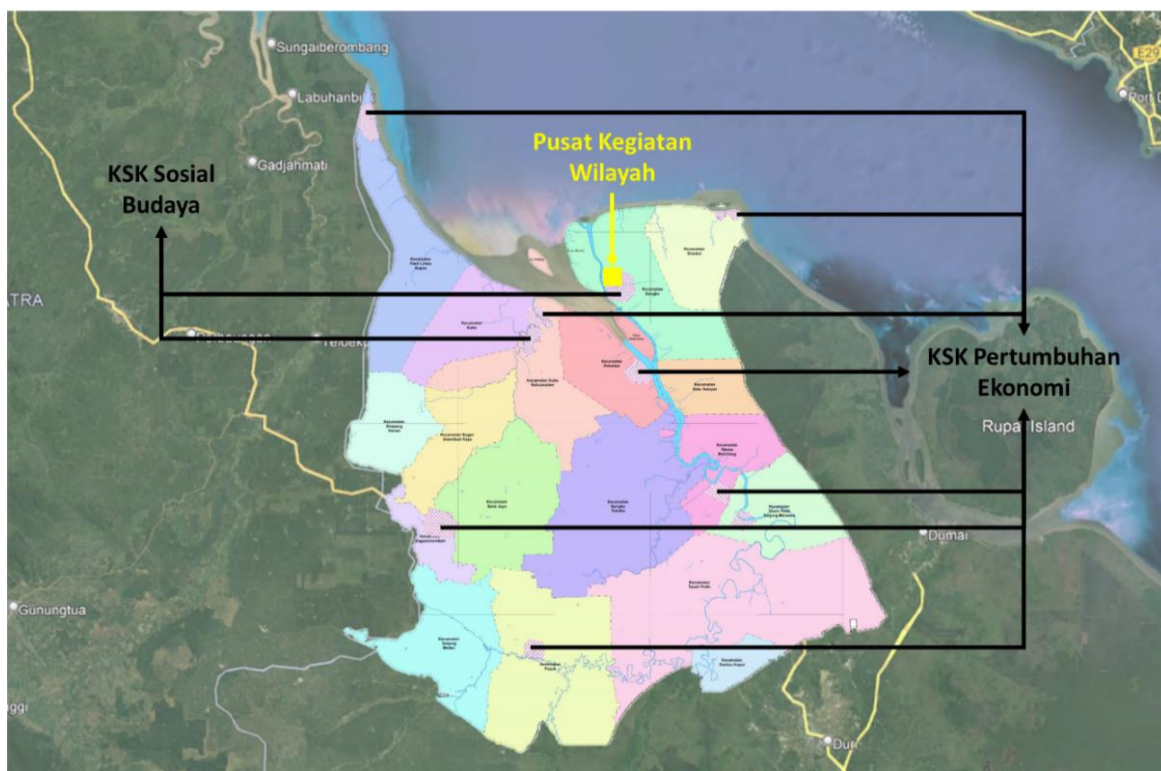
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
 - . kawasan ekowisata di Kecamatan Pasir Limau Kapas
 - . kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Bagansinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, dan Kecamatan Balai Jaya
 - . kawasan perikanan di Kecamatan Sinaboi, dan Kecamatan Pasir Limau Kapas
 - . Kawasan agropolitan di Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Pujud, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.
2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
 - . kawasan wisata budaya Ratib Koambai di Kecamatan Kubu Babussalam dan bangko
 - . kawasan wisata budaya Candi Sintong di Kecamatan Tanah Putih.

Berikut merupakan peta potensi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 - 2044.

Gambar II.55 Peta Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Rokan Hilir



Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi pengembangan Kabupaten Rokan Hilir jika dilihat dari aspek penataan ruang termasuk struktur ruang dan identifikasi kawasan strategis, secara umum bertumpu pada pengembangan sektor pertanian Agropolitan dan Minapolitan, Agroindustri, Agribisnis, perdagangan dan jasa, yang didukung pula oleh sektor pariwisata. Dari segi geografis, pusat pertumbuhan wilayah terfokus pada kawasan pusat kegiatan wilayah yang berlokasi di Kecamatan Bangko.

Berdasarkan analisis terhadap pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, perencanaan pembangunan daerah harus memperhitungkan potensi pusat pengembangan wilayah yang ada. Dari segi geografi-ekonomi, pengaturan ruang di Kabupaten Rokan Hilir perlu memaksimalkan potensi wilayah, terutama di sektor perikanan, agropolitan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kesenjangan yang mencolok antara proyeksi pembangunan wilayah hingga tahun 2044 dengan

dokumen perencanaan RPJPD yang berlaku hingga tahun 2045. Sebaliknya, prinsip pusat pertumbuhan dalam RTRW yang fokus pada pengembangan wilayah dengan tema tertentu dapat dimasukkan ke dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan secara dinamis dan berkelanjutan, sehingga menyebabkan kemunculan beragam permasalahan, isu, dan tantangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat capaian-capaian pembangunan yang belum optimal atau belum sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Berdasarkan sifat dasarnya, timbulnya permasalahan dan tantangan ini harus dihadapi dan diselesaikan secara tepat. Dengan demikian, suatu pemahaman yang komprehensif perlu didapatkan untuk dijadikan sebagai fondasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang efektif.

Secara teoritis, permasalahan pembangunan daerah didasarkan kepada kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan pada saat ini dengan harapan yang ingin dicapai sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, agar dapat mencapai kinerja secara optimal, diperlukan upaya perumusan dan analisis permasalahan guna mengidentifikasi jenis hambatan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Setelah itu, berdasarkan perumusan analisis masalah yang tepat, tawaran untuk mengatasi ketidaksesuaian dapat dilakukan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hilir, terutama dalam proses perumusan masalah dan isu strategis harus menelaah dan mengombinasikan sudut pandang dari seluruh pemangku kebijakan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu, isu strategis yang dimunculkan adalah hasil dari pertimbangan kondisi daerah yang berpotensi terdampak oleh dinamika nasional dan global. Melalui skema yang kolaboratif dan holistik ini, arah pembangunan akan dapat tersusun secara komprehensif dan bersifat antisipatif terhadap perubahan dan juga tantangan di masa yang akan datang.

Agar dapat mewujudkan capaian pembangunan yang optimal, penting untuk memaksimalkan seluruh peluang yang ada sebagai akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selaras dengan itu, segala tantangan yang muncul harus dipandang sebagai peringatan terhadap

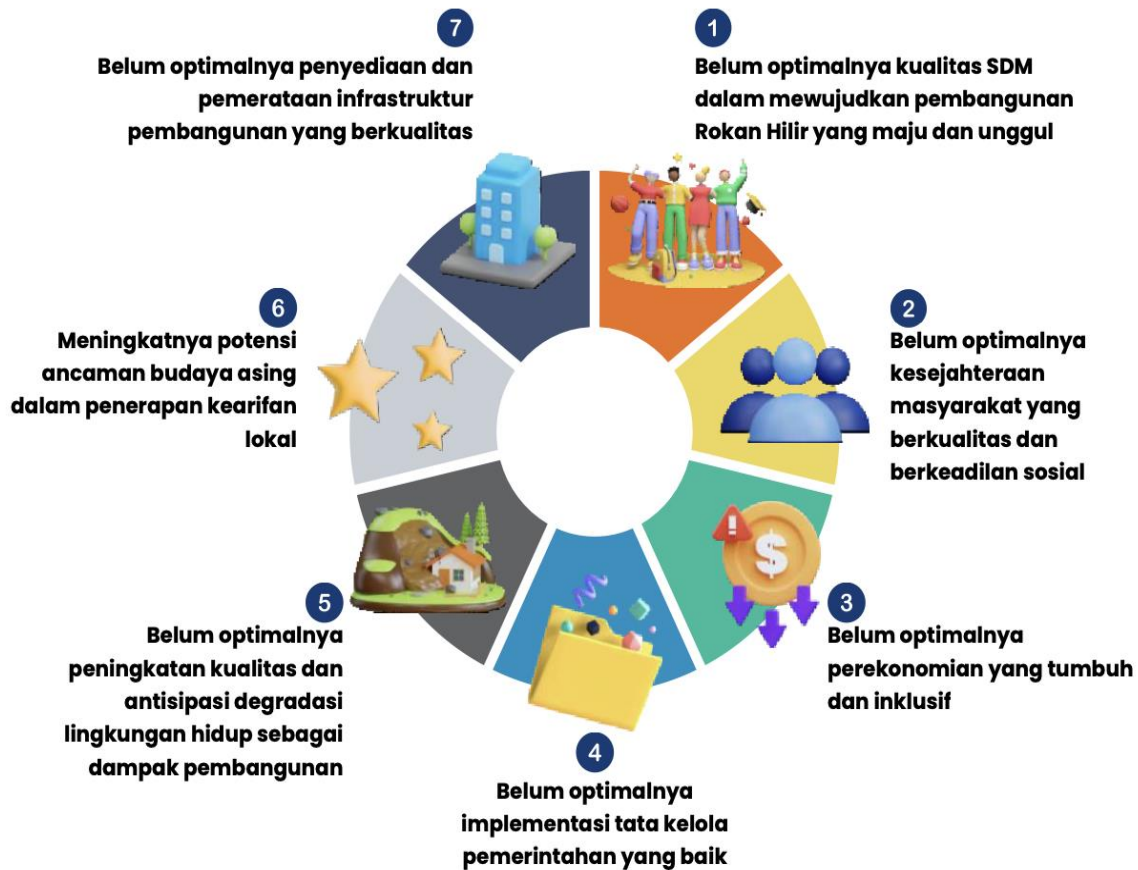
potensi hambatan yang perlu diantisipasi dengan cermat. Selanjutnya, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dapat dijadikan dasar konseptual dalam merumuskan tujuan dan target pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Pendekatan ini secara konsisten akan membentuk dasar bagi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya untuk merumuskan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk menginvestigasi dan memahami kendala, hambatan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dalam periode sebelumnya. Proses identifikasi dalam hal ini akan difokuskan pada evaluasi kemampuan tata kelola pemerintahan dalam mengoptimalkan pemberdayaan wewenang yang dimilikinya. Dalam kerangka makro, analisis permasalahan pembangunan jangka panjang daerah dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel kunci yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, sebagaimana terdokumentasi dalam Bab sebelumnya, akan dijadikan sebagai landasan penetapan masalah-masalah dalam konteks pembangunan daerah. Proses ini melibatkan tinjauan yang cermat terhadap kondisi obyektif daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip analitis dan prediktif, sekaligus mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dari kondisi eksisting dan dampaknya ke masa depan. Pendekatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat serta persoalan yang melibatkan seluruh bidang urusan. Selanjutnya, hasil pertimbangan tersebut akan dibandingkan dengan kondisi obyektif daerah, yang pada akhirnya menghasilkan gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir secara komprehensif. Berikut ini adalah gambar mengenai permasalahan-permasalahan di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar III.1 Permasalahan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045



Untuk mendapatkan penjabaran yang lebih komprehensif, berikut ini adalah penjelasan mengenai permasalahan Kabupaten Rokan Hilir secara lebih detail.

1. Belum optimalnya kualitas SDM dalam mewujudkan pembangunan Rokan Hilir yang maju dan unggul

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan di daerah tersebut. Dengan adanya relasi yang ketat seperti ini, dibutuhkan pembangunan SDM yang merata, berkualitas, dan berdaya saing sebagai fondasi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. SDM yang merata menciptakan inklusivitas dan mengurangi kesenjangan sosial, sementara kualitas SDM yang tinggi menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif. Ketika SDM memiliki

daya saing, suatu daerah dapat menarik investasi, mempercepat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan SDM yang holistik tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang dinamis dan berkelanjutan untuk seluruh komunitas kota.

Belum optimalnya kualitas SDM di Kabupaten Rokan Hilir menjadi suatu tantangan, terutama dalam menghadirkan sumber daya manusia yang mumpuni. Kondisi ini berpotensi membuat Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat secara optimal menciptakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang kuat. Secara mendasar, perbaikan mendalam untuk kualitas pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan adalah suatu keharusan agar dapat menghasilkan SDM yang mampu bersaing secara global dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut adalah cuplikan dari progres capaian IPM Kabupaten Rokan Hilir,

Tabel III.1
IPM Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan wilayah sekitar
di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	70.60	71.09	71.67
Indragiri Hulu	70.01	70.46	71.04
Indragiri Hilir	66.63	67.37	67.98
Pelalawan	72.08	72.93	73.59
Siak	73.98	74.50	74.98
Kampar	73.02	73.84	74.24
Rokan Hulu	69.67	70.31	71.02
Bengkalis	73.58	74.38	74.97
Rokan Hilir	69.34	70.10	70.78
Kepulauan Meranti	65.70	66.52	67.28
Pekanbaru	81.58	82.06	82.38
Dumai	74.75	75.26	75.66
RIAU	72.94	73.52	74.04

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Melalui analisis data yang dapat dilihat dalam tabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan posisi yang lebih rendah jika dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.. Pencapaian IPM Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 berada di angka 70,78 yang berarti di bawah pencapaian IPM Kota Pekanbaru (82,38), Kota Dumai (75,66), Kabupaten Siak (74,98), Kabupaten Bengkalis (74,97), Kabupaten Kampar (74,24) dan daerah-daerah lainnya kecuali Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir. Kondisi ini menunjukkan tantangan bagi Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan seluruh komponen yang membangun IPM untuk 20 tahun ke depan.

Salah satu faktor penentu dari kualitas pembangunan manusia adalah kualitas pendidikan yang dimulai dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang memperlihatkan daya serap masyarakat terhadap pendidikan. APS juga bisa mengindikasikan kualitas masyarakat terkait dengan potensi keahlian yang ada di tengah masyarakat. Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Tabel III.2 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun								
	Menurut Kabupaten/Kota								
	7-12			13-15			16-18		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	99.49	99.47	99.87	91.60	91.12	98.51	76.96	76.87	76.75
Indragiri Hulu	99.03	99.54	99.96	94.49	95.07	97.82	73.16	73.84	63.93
Indragiri Hilir	99.75	99.77	99.99	92.13	92.27	85.57	64.70	65.85	71.89
Pelalawan	99.37	99.40	99.60	98.23	98.13	98.28	72.35	72.65	79.62
Siak	99.98	99.81	99.96	93.07	94.44	90.38	85.15	85.17	83.33
Kampar	99.82	99.76	99.64	96.95	97.22	98.95	74.50	75.61	76.16
Rokan Hulu	99.61	99.68	99.60	96.58	96.94	97.97	72.13	73.63	68.56
Bengkalis	98.97	99.20	98.97	95.03	94.91	94.84	79.18	81.58	81.74
Rokan Hilir	99.55	99.58	99.91	94.01	93.65	96.98	81.80	81.72	80.91

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota								
	7-12			13-15			16-18		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kepulauan Meranti	98.62	99.14	97.68	97.31	97.19	89.88	88.15	88.85	80.31
Pekanbaru	99.54	99.99	99.59	97.81	97.95	98.44	84.01	84.68	87.20
Dumai	99.61	99.53	98.86	97.15	97.26	93.99	76.68	76.00	69.58
RIAU	99.53	99.65	99.61	95.51	95.64	95.72	77.13	73.71	77.32

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Rokan Hilir pada kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2022 berada di angka 99,91 persen berada di bawah Kabupaten Indragiri Hilir (99,99), Kabupaten Bengkalis (99,97), Kabupaten Siak (99,96), Kabupaten Indragiri Hulu (99,96). Sementara itu, pada kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2021 capaian APS Kabupaten Rokan Hilir berada di angka 96.98 di bawah capaian Kabupaten Kampar (98,95), Kabupaten Kuantan Singingi (98,51), Kota Pekanbaru (98,44), kabupaten Pelalawan (98,28), dan beberapa daerah lainnya. Sedangkan pada APS Kabupaten Rokan Hilir di kelompok umur 16-18 berada di angka 80,31, berada di bawah Kota Pekanbaru (87,20), Kabupaten Siak (83,33), dan Bengkalis (81,74).

Kondisi yang ditunjukkan dari capaian APS sebagaimana yang dijelaskan di atas, menunjukkan adanya penurunan pada kelompok umur yang lebih tinggi dalam pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan di tengah masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor-faktor ketersediaan sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penghambat beriringan dengan factor finansial masyarakat. Perbandingan yang ditunjukkan membutuhkan evaluasi atas strategi bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan menengah bersifat kritis karena berkaitan dengan kualitas angkatan kerja yang akan dihasilkan.

Persoalan pembangunan manusia yang dapat dilihat salah satunya dari angka partisipasi sekolah, juga berkaitan langsung dengan naiknya tingkat pengangguran terbuka. Kondisi eksisting dari tingkat pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.3 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahunan) Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	2.06	2.66	2.49
Indragiri Hulu	3.32	2.53	2.47
Indragiri Hilir	2.66	1.50	1.71
Pelalawan	2.34	2.73	2.26
Siak	4.34	6.11	5.82
Kampar	4.27	3.62	3.38
Rokan Hulu	2.25	3.62	3.45
Bengkalis	6.63	7.18	7.09
Rokan Hilir	3.25	4.55	4.42
Kepulauan Meranti	4.43	5.50	5.17
Pekanbaru	8.29	6.40	6.20
Dumai	6.29	5.38	5.15
RIAU	4.42	4.37	4.23

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan data Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021-2023 di atas, terlihat bahwa Kabupaten Rokan Hilir memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Selisih TPT antara Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 4,42 cukup mencolok jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Indragiri Hilir (1,71), Kabupaten Pelalawan (2,26), Kabupaten Indragiri Hulu (2,42), dan Kuantan Singingi (2,49), begitu dengan Rokan Hulu (3,45), serta Kampar (3,38). Fenomena ini menunjukkan adanya kondisi yang bervariasi terkait dengan kondisi lapangan pekerjaan dan dukungan perekonomian antar wilayah. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong tingkat pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir, serta potensi dampak dari kebijakan pemerintah dan perbedaan struktural ekonomi. Pengetahuan tentang penyebab terjadinya peningkatan TPT akan memperlihatkan tantangan yang lebih komprehensif untuk kemudian dijadikan sebagai tanda pengingat bagi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan sosial

Persoalan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diselesaikan dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang sejahtera dapat disimpulkan dari kondisi kemiskinan yang rendah. Dalam menangani permasalahan kemiskinan, penting untuk memahami bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga berdampak signifikan kondisi-kondisi sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk merancang kebijakan yang efektif dan inklusif guna mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data yang menunjukkan kondisi eksisting persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar.

Tabel III.4 Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	8.97	8.24	8.07
Indragiri Hulu	6.18	6.14	6.06
Indragiri Hilir	6.18	5.98	5.64
Pelalawan	9.63	8.97	8.15
Siak	5.18	5.07	5.23
Kampar	7.82	7.12	7.04
Rokan Hulu	10.40	9.95	9.72
Bengkalis	6.64	6.32	6.31
Rokan Hilir	7.18	6.73	7.07
Kepulauan Meranti	25.68	23.84	22.98
Pekanbaru	2.83	3.06	3.16
Dumai	3.42	3.20	3.21
RIAU	7.12	6.78	6.68

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir memiliki persentase penduduk miskin yang berada di atas sebagian besar Kabupaten/Kota di wilayah tersebut pada rentang tahun 2021-2023. Pada tahun 2023 terlihat adanya kenaikan dari angka 6,73, menjadi 7,07 dari tahun sebelumnya. Angka ini juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Pekanbaru (3,16%), Kota Dumai (3,21%), Kabupaten Siak (5,23%), Kabupaten Indragiri Hilir (5,64%), dan Indragiri Hulu (6,06%), serta beberapa daerah lain di Riau. Perbedaan ini menyoroti tantangan yang signifikan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani tingkat kemiskinan dan memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti struktur ekonomi lokal, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Diperlukan pendekatan yang holistik dalam perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan adanya persoalan kemiskinan yang masih cukup tinggi, potensi terjadinya ketimpangan juga menjadi besar. Berikut ini adalah data yang menunjukkan kondisi eksisting dari kedalaman kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitar.

Tabel III.5 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	1.14	1.18	1.17
Indragiri Hulu	0.81	1.01	1.14
Indragiri Hilir	0.90	0.73	0.68
Pelalawan	1.45	1.23	1.05
Siak	0.61	0.77	0.66
Kampar	0.99	1.10	0.72
Rokan Hulu	1.51	1.51	1.54
Bengkalis	0.73	0.81	1.03
Rokan Hilir	0.79	1.34	1.22
Kepulauan Meranti	4.46	3.54	3.86
Pekanbaru	0.19	0.33	0.38
Dumai	0.40	0.36	0.36

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
RIAU	1.06	1.10	1.00

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Indeks kedalaman kemiskinan dapat digunakan untuk melihat seberapa tinggi ketimpangan di antara penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk mengukur target sasaran bantuan dan program pembangunan daerah. Berdasarkan tabel di atas, Indeks P1 Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 berada di angka 1,22 dan lebih tinggi dari beberapa daerah seperti Kota Dumai (0,36), Kota Pekanbaru (0,38), Kabupaten Siak (0,66), Kabupaten Indragiri Hilir (0,68), Kabupaten Kampar (0,72), Kabupaten Bengkalis (1,03), Kabupaten Pelalawan (1,05), Kabupaten Indragiri Hulu (1,14), dan Kabupaten Kuantan Singingi (1,17).

Menurunkan indeks P1 menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan menghadirkan solusi yang tepat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk memastikan adanya jaringan keamanan sosial yang kuat, termasuk program bantuan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan. Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memperkuat program-program ini dapat memberikan perlindungan ekonomi kepada mereka yang membutuhkan.

3. Belum optimalnya perekonomian yang tumbuh dan inklusif

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan yang berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi perekonomian suatu negara yang menuju keadaan lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari adanya peningkatan produksi barang dan jasa, tetapi perubahan positif secara menyeluruh dalam berbagai aspek ekonomi. Dengan kata lain, perekonomian yang dapat tumbuh dengan baik merupakan kunci untuk kestabilan jangka panjang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir masih memerlukan berbagai upaya yang produktif agar bisa ditingkatkan. Untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kabupaten Rokan

Hilir, berikut akan disajikan data perbandingan LPE daerah-daerah di Provinsi Riau.

Tabel III.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	1.01	3.75	4.71
Indragiri Hulu	-0.12	4.26	4.63
Indragiri Hilir	0.43	4.46	5.31
Pelalawan	2.25	4.07	4.39
Siak	-0.10	2.31	3.78
Kampar	-0.90	3.45	4.83
Rokan Hulu	1.52	4.98	5.02
Bengkalis	-3.30	0.51	2.22
Rokan Hilir	-0.99	1.63	2.64
Kepulauan Meranti	0.43	2.56	3.17
Pekanbaru	-4.41	5.24	6.78
Dumai	-1.04	5.98	6.36
RIAU	-1.13	3.36	4.55

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel di atas, meskipun Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahunnya sejak 2020, namun capaian yang tercatat masih berada di bawah hampir seluruh kabupaten dan kota sekitarnya di Provinsi Riau, kecuali Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir sebesar 2,65%, jauh di bawah Kota Pekanbaru sebesar 6,78%, Kota Dumai sebesar 6,36%, dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,02%. Begitu pula capaian LPE Kabupaten Rokan Hilir masih terpaut jauh dari capaian Provinsi Riau yaitu di angka 4,55%. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Rokan Hilir dengan beberapa hampir seluruh kabupaten/kota di sekitarnya.

Kondisi kesenjangan antara Kabupaten Rokan Hilir dengan daerah-daerah lain di sekitarnya menunjukkan bahwa pertumbuhan nyata ekonomi di Rokan Hilir masih belum optimal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat secara individual juga belum optimal. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal ini, berikut adalah tabel yang berisi perbandingan PDRB Per kapita di daerah-daerah sekitar Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.7 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	-3.00	1.93	2.91
Indragiri Hulu	-2.20	1.79	2.19
Indragiri Hilir	10.04	4.00	4.88
Pelalawan	25.29	1.06	1.41
Siak	5.36	-0.05	1.42
Kampar	1.11	1.00	2.39
Rokan Hulu	23.37	2.83	2.91
Bengkalis	-3.75	-1.16	0.56
Rokan Hilir	9.25	-0.20	0.83
Kepulauan Meranti	-8.58	0.57	1.21
Pekanbaru	9.23	3.86	5.40
Dumai	-4.98	3.26	3.67
RIAU	6.03	1.44	2.64

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Tabel di atas menunjukkan kondisi yang juga problematik pada capaian Kabupaten Rokan Hilir. Capaian PDRB ADHK Per kapita Kabupaten Rokan Hilir berada di kondisi kedua terbawah di Provinsi Riau. Pada tahun 2022, capaian di Kabupaten Rokan Hilir berada pada angka 0,83, yang jauh di bawah capaian Kota Pekanbaru sebesar 5,40, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,88, Kota Dumai sebesar 3,67, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,91, dan Kabupaten Kuantan Singingi dan daerah lain, kecuali Kabupaten Bengkalis. Capaian PDRB per kapita yang rendah menunjukkan kurangnya

pekerjaan dan rendahnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian basis pemungutan pajak juga cukup kecil sehingga akan menjadi halangan pada upaya penyesuaian rakyat secara inklusif.

Selain persoalan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan PDRB Per kapita, perlu untuk memperhatikan bagaimana upaya diversifikasi ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2022

Kategori PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Provinsi (Persen)	
	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,140	2.82
B. Pertambangan dan Penggalian	(-3,12)	1.36
C. Industri Pengolahan	4.08	4.73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.08	14.34
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.95	4.49
F. Konstruksi	2.74	4.76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.95	11.90
H. Transportasi dan Pergudangan	4.49	18.58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.44	10.89
J. Informasi dan Komunikasi	7.28	6.83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.15	4.96
L. Real Estat	3.11	5.48
M,N. Jasa Perusahaan	1.50	12.80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.79	5.98
P. Jasa Pendidikan	3.33	3.92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.54	2.48
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4.31	12.93
PDRB	3.36	4.55

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan di dalam tabel, terlihat bahwa sektor jasa masih mendominasi kontribusi PDRB di Kabupaten Rokan Hilir. Lapangan usaha seperti pergudangan, akomodasi, makan minum, dan jasa perusahaan menunjukkan bahwa pola ekonomi masyarakat di Rokan Hilir masih bergantung pada sektor tertentu. Laju tertinggi PDRB berdasarkan lapangan usaha di tahun 2022 berada pada sektor transportasi dan pergudangan di angka 18,58. Sementara itu laju pertumbuhan terendah berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan angka sebesar 1,36. Terjadinya perbedaan yang sangat jauh antara sektor tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi masih belum optimal di Kabupaten Rokan Hilir.

Masalah-masalah yang telah dibahas di atas menunjukkan kepentingan yang cukup besar di Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertimbangkan upaya diversifikasi ekonomi, dan juga upaya untuk menciptakan perekonomian yang inklusif. Hal-hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat harus diupayakan dengan maksimal.

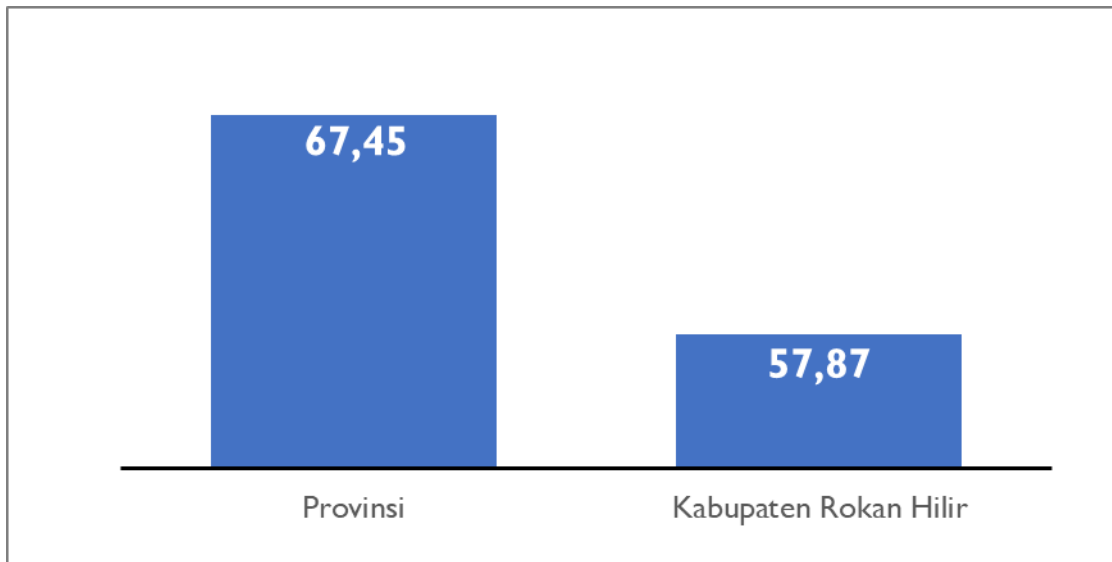
4. Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan suatu paradigma dalam manajemen publik yang menekankan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Dalam konteks kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengukuran efektivitas tata kelola pemerintahan sering kali mencakup indikator-indikator seperti tingkat korupsi, tingkat partisipasi masyarakat, dan kejelasan proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan kualitas birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir, suatu tindakan asesmen perlu dilakukan untuk dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan birokrasi yang profesional. Upaya ini juga melibatkan pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan kinerja birokrasi. Berikut ini adalah

kondisi eksisting dari Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir yang disandingkan dengan IRB Provinsi Riau, Berikut ini adalah kondisi eksisting kualitas reformasi birokrasi Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan Provinsi Riau.

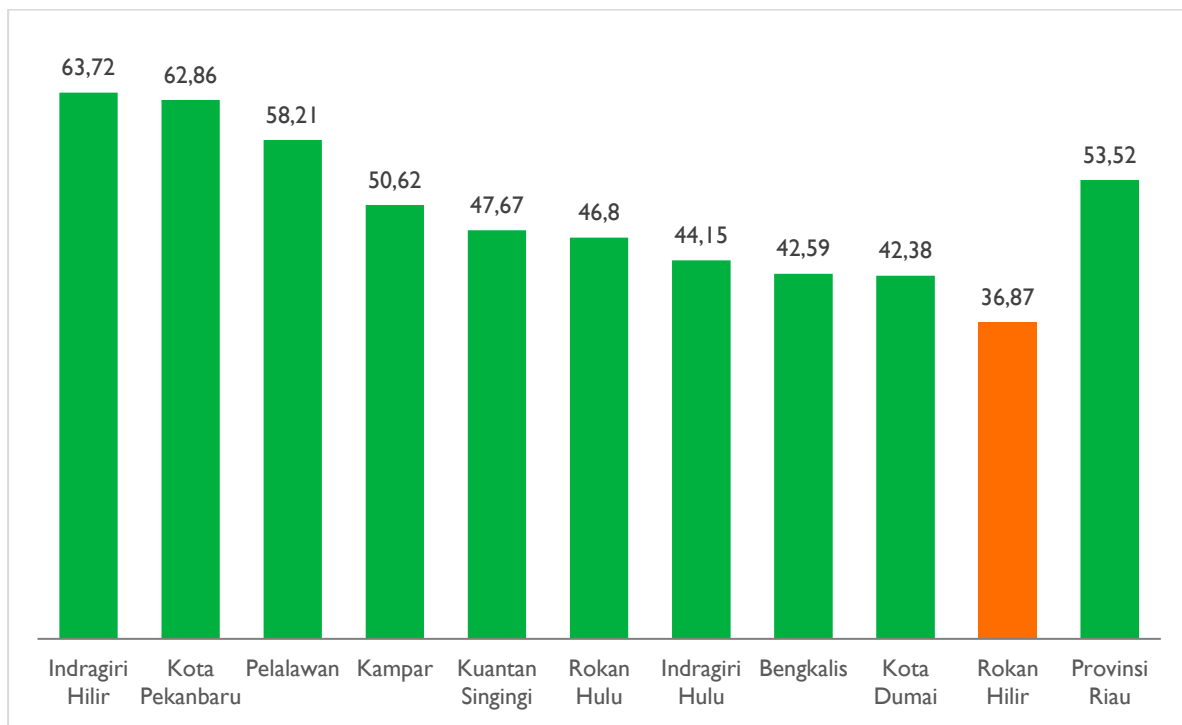
Gambar III.2 Indeks Reformasi Birokrasi Rokan Hilir tahun 2022



Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir, 2024

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Rokan Hilir, dibandingkan dengan Provinsi Riau, menunjukkan tingkat yang masih cukup rendah. Pada tahun 2022, IRB Kabupaten Rokan Hilir berada di angka 57,87, sedangkan IRB Provinsi Riau mencapai 67,45. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan di komponen penilaian Indeks RB harus ditingkatkan, baik pada aspek pemenuhan ekspektasi, kebijakan, tata organisasi, tata laksana, manajemen, dan akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Gambar III.3 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar di atas, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada angka 36,87 dengan predikat inovatif, akan tetap masih cukup rendah jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 63,72 dan Kota Pekanbaru sebesar 62,3 yang mendapat predikat sangat inovatif. Pada kelas predikat yang sama, Kabupaten Rokan Hilir juga masih tertinggal dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang lain dengan capaian di atas angka 40.

Capaian IRB dan IID Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan kondisi yang masih harus ditingkatkan dan juga dapat dijadikan sebagai indikasi adanya potensi permasalahan dalam reformasi birokrasi seperti manajemen sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan efektivitas kebijakan administratif di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, peningkatan efektivitas pelayanan publik dan peningkatan integritas aparatur pemerintahan perlu dilakukan.

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan antisipasi degradasi lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan

Adanya isu tingginya alih fungsi hutan dan lahan serta lemahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan hal-hal hasil rekomendasi sebagai berikut :

Memperketat regulasi dan pengawasan alih fungsi hutan dan lahan;

1. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati untuk peningkatan ekonomi lokal;
2. Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan dan program terkait alih fungsi hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjabaran isu dari KLHS RPJPD berdasarkan capaian TPB dimana terdapat rendahnya kualitas air danau dan air sungai, Insentif penghematan air pertanian/perkebunan, dan pengelolaan jaringan aliran sungai.

Tabel III.9 IKD Kabupaten/Kota di provinsi Riau Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Nilai IKD
Kuantan Singingi	0,25
Indragiri Hulu	0,3
Indragiri Hilir	0,3
Pelalawan	0,2
Siak	0,45
Kampar	0,34
Rokan Hulu	0,25
Bengkalis	0,31
Rokan Hilir	0,2
Kepulauan Meranti	0,24
Pekanbaru	0,24
Dumai	0,2

Sumber: KRB Provinsi Riau, 2022-2026

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian untuk mengetahui kapasitas suatu daerah dalam hal kebencanaan. IKD memberikan pengaruh kepada IRBI, yaitu semakin tinggi nilai IKD suatu daerah, maka skor IRBI akan ditekan. Berdasarkan tabel di atas, IKD Kabupaten Rokan Hilir dengan angka sebesar 0,2 sebagaimana Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan. Tiga daerah ini berada pada capaian paling bawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau. Jika dilihat IKD daerah lain, seperti Kabupaten Siak (0,45), Kabupaten Kampar (0,34), Kabupaten Bengkalis (0,31), Kabupaten Indragiri Hulu (0,3), Kabupaten Indragiri Hilir (0,3), dan kabupaten/kota lain berada pada capaian yang lebih tinggi. Dengan kondisi yang seperti ini, bisa dikatakan bahwa peningkatan ketahanan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir harus segera dilakukan meskipun secara keseluruhan angka yang didapatkan masih tergolong sedang.

6. Meningkatnya potensi ancaman budaya asing dalam penerapan kearifan lokal

Pembangunan di daerah sering kali dihadapkan pada tantangan mempertahankan identitas budaya lokal di tengah gempuran budaya asing. Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, arus masuk budaya asing menjadi semakin tak terbendung. Hal ini mengancam keberlangsungan kearifan lokal yang telah menjadi warisan turun-temurun. Pengaruh budaya asing ini terlihat dari perubahan gaya hidup, pola konsumsi, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, yang semakin menjauh dari tradisi asli mereka.

Ancaman terhadap kearifan lokal juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Budaya asing yang masuk membawa serta produk-produk konsumsi yang sering kali lebih menarik bagi masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini menyebabkan produk-produk lokal kurang diminati dan berujung pada menurunnya pendapatan bagi para pelaku usaha lokal. Selain itu, nilai-nilai sosial yang dibawa oleh budaya asing sering kali bertentangan dengan norma dan adat istiadat setempat, menyebabkan konflik nilai dan disorientasi identitas di kalangan masyarakat. Masih kurang optimalnya kerja yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya adalah salah satu pemicu.

7. Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

a. Masih Rendahnya Kondisi Jalan Mantap

Berdasarkan tabel II.39 dan Gambar II.40, persentase kondisi jalan yang digolongkan jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 adalah 37,7%, sedangkan jalan yang tidak mantap sebesar 62,3%. Jalan yang tidak mantap menghambat mobilitas barang dan jasa, meningkatkan biaya transportasi, serta memperlambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Selain itu, buruknya kualitas jalan juga menurunkan daya saing wilayah, terutama dalam menarik investasi dan mendorong sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Masih belum optimalnya tingkat kemantapan jalan disebabkan oleh rusaknya jalan akibat banyaknya kendaraan yang melebihi muatan atau *Over Dimension Over Load* (ODOL).

b. Masih Rendahnya Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio konektivitas Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 adalah 40%. Hal ini menunjukkan bahwa 60% wilayah Rokan Hilir masih belum memiliki akses ke infrastruktur konektivitas yang memadai. Transportasi dan infrastruktur transportasi memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan memainkan peran penting dalam memperlancar pergerakan barang dan penumpang. Hal ini memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien, yang pada gilirannya mengurangi biaya logistik.

c. Masih Rendahnya Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Aman

Hingga tahun 2024, capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dikalkulasi, mengingat Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki IPLT/SPALD-T. Disamping itu, masih adanya kebiasaan masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai atau pesisir laut, untuk cenderung buang air besar langsung ke badan air.

d. Belum adanya rumah tangga yang mendapatkan akses Terhadap Air Minum Aman

- Infrastruktur SPAM IKK yang belum berfungsi (lihat Tabel II.41);
- keterbatasan sumber air baku hal ini dapat dilihat dari hasil kajian DDTLH (Tabel II.11) yang menyatakan bahwa sekitar Kabupaten Rokan

Hilir masuk dalam kelas rendah (49%) dan kelas sangat rendah (43%) dalam penyediaan air bersih,

- regulasi (peraturan bupati) mengenai tarif air minum belum ditetapkan, yang merupakan turunan dari Perda No. 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- kondisi fisik lahan di beberapa kecamatan berada di wilayah gambut (lihat Peta Satuan Ekoregion).

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merujuk pada persoalan-persoalan krusial yang menjadi fokus pembicaraan di tingkat internasional, nasional, atau regional, karena dampak signifikannya terhadap pembangunan daerah pada masa kini dan masa depan. Identifikasi isu-isu strategis melibatkan pengenalan permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh strategis dari berbagai sektor, serta perumusan solusi untuk menangani dan mengantisipasi dampaknya terhadap rencana pembangunan jangka panjang. Pemahaman mendalam terhadap isu-isu ini memungkinkan penyusunan program kegiatan yang terstruktur, tepat, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Penanganan terhadap isu strategis akan membuka peluang dan menghilangkan hambatan. Dengan demikian potensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan menjadi lebih besar jika pemahaman terhadap isu strategis didapatkan. Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai isu strategis akan membawa efektivitas langkah perencanaan dan kemudahan dalam melakukan evaluasi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang tidak dikenali dan dilakukan antisipasi dengan baik akan membuka peluang munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Oleh karena itu, perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah harus didasarkan kepada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah dari seluruh bidang yang berpengaruh pada agenda pembangunan daerah. Secara umum, perumusan isu strategis akan ditelaah dari isu internasional, isu nasional, dan isu-isu daerah atau regional.

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Perkembangan dan perubahan yang terjadi secara global merupakan sebuah tantangan yang harus disikapi dengan bijak dari perspektif

Pembangunan daerah. Berdasarkan struktur logis penyusunan rencana jangka panjang nasional, dalam RPJPN Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa terdapat isu dan tantangan global yang tertuang dalam istilah “Megatren” yang merupakan proyeksi perubahan dari sisi demografi, perdagangan, keuangan, pelaku usaha, sumber daya, perubahan iklim, teknologi dan geopolitik. Secara umum isu strategis global ini dapat dirangkum ke dalam gambar berikut ini,

Gambar III.4 Megatren Dunia 2025



Sumber: RPJPN 2025-2045, diolah

Berdasarkan arahan ini, tantangan megatren akan dijadikan sebagai dasar perumusan isu strategis internasional terhadap pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai isu strategis internasional berdasarkan Megatren yang berkaitan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir.

1. Perubahan demografi global

Perubahan demografi global, yang menggambarkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dunia hingga mencapai 9,45 miliar individu pada tahun 2045, menunjukkan kenaikan sebesar 2,1 miliar individu dibandingkan dengan tahun 2015. Fenomena ini memiliki potensi dampak yang signifikan pada pola migrasi dan struktur usia populasi. Dengan 55 persen dari total penduduk dunia berada di kawasan Asia, hal ini mencerminkan dominasi demografi yang akan terjadi di wilayah tersebut.

Kabupaten Rokan Hilir yang juga berpotensi mendapatkan bonus secara lokal, akan mendapatkan pengaruh dari perkembangan demografi global dalam persoalan kebutuhan daerah. Secara substansial, pertumbuhan jumlah penduduk global dapat memicu peningkatan aktivitas migrasi, baik masuk maupun keluar Kabupaten Rokan Hilir. Terlebih lagi, proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang juga signifikan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2045 akan menciptakan tantangan baru dalam hal infrastruktur, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi posisi Kabupaten Rokan Hilir yang berada di jalur transportasi dari Riau atau wilayah bagian pesisir timur Sumatera menuju Sumatera Utara.

Proyeksi peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di seluruh dunia akan turut menciptakan tuntutan tambahan kebutuhan terhadap layanan kesehatan dan fasilitas pendukung lansia, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, penekanan pada perencanaan yang cermat dalam menyediakan fasilitas kesehatan, transportasi, dan rekreasi yang dapat memenuhi kebutuhan populasi usia lanjut perlu diberikan. Para pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hilir perlu juga mempertimbangkan dampak perubahan demografi global dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengembangan kota. Pertimbangan ini harus mencakupi kesiapan dalam infrastruktur yang mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan khusus kelompok usia tertentu. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat di tengah dinamika perubahan demografi global.

2. Perdagangan internasional

Perubahan dalam konstelasi perdagangan global mencerminkan dinamika perdagangan antarnegara yang melibatkan pertukaran barang dan jasa di tingkat global. Proyeksi tahun 2045 menunjukkan bahwa negara berkembang akan menjadi poros ekonomi dengan pertumbuhan sekitar 6

persen per tahun, mengakibatkan perubahan struktural dalam perekonomian global. Terutama di kawasan Asia, perubahan ini akan menghasilkan peningkatan perdagangan intra-Asia.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai bagian dari negara berkembang di Asia, akan mengalami pertumbuhan volume perdagangan dan investasi secara positif. Peningkatan ini berpotensi merangsang investasi domestik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan sektor industri, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meski demikian, ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir pada sektor jasa mengharuskan adanya penyesuaian, termasuk dalam hal regulasi perdagangan, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Transformasi perdagangan global juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Perubahan ini mendorong penyesuaian pada model pengelolaan pasar tradisional, terutama dalam hal infrastruktur dan strategi promosi yang dapat diadopsi untuk terlibat dalam perdagangan global.

Seiring dengan dinamika perdagangan global, usaha mikro di Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan pencarian terhadap peluang baru sembari mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memperbarui strategi bisnis mereka agar tetap relevan dan berdaya saing. Adaptasi terhadap perubahan ini dapat membuka peluang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi lokal, sambil memastikan bahwa usaha mikro dapat tetap berperan aktif dalam dinamika perdagangan yang terus berkembang.

3. Pertumbuhan masyarakat pendapatan kelas menengah dan potensi *emerging economic*

Pada tahun 2045, proyeksi pertumbuhan jumlah individu kelas menengah mencapai total sekitar 8,1 miliar, setara dengan 84 persen dari keseluruhan populasi global. Fenomena ini mencerminkan perubahan substansial dalam struktur sosial dan ekonomi secara global, terutama diperkuat oleh peningkatan jumlah penduduk di wilayah Asia dan Amerika Latin. Perubahan ini menandai pergeseran pusat pertumbuhan baik dalam dimensi strata ekonomi maupun geografis.

Pertumbuhan masyarakat dengan tingkat pendapatan kelas menengah di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan bagian dari perubahan demografi

global, menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan respons dan adaptasi yang hati-hati. Pertumbuhan kelas menengah diharapkan memicu peningkatan kebutuhan konsumen dan permintaan atas berbagai barang dan jasa. Oleh karena itu, Kabupaten Rokan Hilir perlu memastikan bahwa infrastruktur dan layanan publik dapat merespons perubahan ini secara efektif, guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam konteks lingkungan, konsumsi yang signifikan dari masyarakat kelas menengah di Kabupaten Rokan Hilir akan memberikan dampak substansial pada kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan manajemen yang bijak untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Seiring dengan dinamika tersebut, penting untuk mempertimbangkan pula tren ekonomi yang baru atau transformasi ekonomi global dalam konteks kelas pendapatan.

Dalam beberapa penelitian, kondisi ini dikenal dengan istilah Emerging Market Economy (EME). Perkembangan ini dapat diartikan sebagai kondisi di mana negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang berada dalam rentang dari rendah mengalami transformasi menuju ke level menengah. Negara-negara yang termasuk dalam kategori EME mencakup 80% dari populasi dunia dan diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap perekonomian global. Perubahan ini mencerminkan dinamika yang signifikan dalam struktur ekonomi global, di mana negara-negara tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru dan memiliki dampak yang substansial dalam aktivitas ekonomi dunia.

4. Persaingan sumber daya alam

Pada tahun 2045, keterbatasan jumlah sumber daya alam memiliki potensi untuk menimbulkan tekanan tambahan terhadap lingkungan. Eksploitasi berlebihan dan persaingan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem dan meningkatkan risiko konflik antara negara yang bersaing terkait kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi potensial ini akan terutama dirasakan oleh negara-negara yang memiliki keragaman sumber daya alam.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia dan Afrika, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2045, berpotensi memicu intensifikasi persaingan terkait sumber daya alam. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan sumber daya alam

seperti energi, air, dan mineral juga akan meningkat. Hal ini menimbulkan tantangan serius terkait pengelolaan dan akses terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas secara global. Dampak yang mungkin timbul termasuk persaingan yang lebih ketat antara negara dan perusahaan untuk mengamankan sumber daya alam yang kritis. Negara-negara di Asia dan Afrika, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, mungkin bersaing untuk mengakses sumber daya alam yang terbatas di wilayah mereka sendiri atau melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain yang kaya akan sumber daya.

Kabupaten Rokan Hilir, dengan sektor unggulan yang relatif beragam, memiliki potensi untuk secara langsung merasakan dampak dari persaingan sumber daya alam yang dijelaskan. Pertumbuhan kebutuhan yang signifikan dapat mengakibatkan kesulitan akses terhadap sumber daya alam, menciptakan peningkatan biaya produksi yang berpotensi mempengaruhi daya saing industri lokal. Oleh karena itu, Kabupaten Rokan Hilir mungkin dihadapkan pada tantangan dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Langkah-langkah kunci untuk mengatasi dampak negatif persaingan sumber daya alam global pada tahun 2045 melibatkan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, diversifikasi ekonomi, dan memperkuat kerja sama regional.

5. Perubahan Iklim

Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah yang bergantung kepada alam, baik pada signifikansi yang menjadi kelebihan daerah maupun yang berkaitan dengan tantangan bagi pembangunan daerah. Terlebih mengingat bahwa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai tiga sektor yang dekat dengan Kabupaten Rokan Hilir memunculkan kerentanan terhadap gangguan yang bersifat ekologi. Perubahan iklim dunia dapat memengaruhi produktivitas sektor ini, sehingga akan menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber daya alam. Selain itu, ketidakpastian dalam siklus air akibat perubahan iklim dapat pula menambah ancaman ketersediaan air layak di Kabupaten Rokan Hilir. Dampaknya akan terasa pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan tentu saja kegiatan industri, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keberlanjutan wilayah.

Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca menjadi ancaman serius dengan dampak global yang signifikan. Dengan proyeksi suhu dunia meningkat sekitar 3 hingga 3,5 derajat Celsius pada

akhir abad ini, tantangan yang dihadapi oleh seluruh dunia, termasuk Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu dampak yang nyata dan signifikan bagi Kabupaten Rokan Hilir adalah kenaikan permukaan laut. Sebagai kota pesisir, Kabupaten Rokan Hilir rentan terhadap ancaman kenaikan air laut yang dapat merusak infrastruktur dan pemukiman penduduk sepanjang garis pantai. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan badai, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada kemampuan kota dalam mengatasi dampak tersebut.

Risiko terkait kesehatan juga dapat meningkat, karena perubahan suhu dan pola hujan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit. Hal ini menuntut strategi penguatan sistem kesehatan dan upaya pencegahan yang lebih proaktif. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, Kabupaten Rokan Hilir perlu mengambil tindakan serius dalam mengimplementasikan kebijakan dan proyek-proyek yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya ini diperlukan untuk melindungi masyarakat, infrastruktur, dan sumber daya alam serta memastikan keberlanjutan Kabupaten Rokan Hilir di tengah perubahan iklim global yang tidak terhindarkan, termasuk dalam pengelolaan limbah dan sampah.

6. Teknologi informasi

Pada tahun 2045, kemajuan teknologi informasi mencapai tingkat perkembangan yang sangat pesat, meresapi hampir setiap aspek kehidupan manusia dan membentuk suatu era di mana teknologi menjadi pilar utama yang mendominasi aktivitas sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya mencakup evolusi dalam perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga melibatkan ranah bioteknologi, rekayasa genetik, kesehatan, dan pengobatan. Progres signifikan dalam bidang ini membuka pintu bagi inovasi medis yang luar biasa, termasuk pengembangan terapi genetik untuk menyembuhkan penyakit genetik dan perubahan paradigma dalam pengobatan.

Energi terbarukan menjadi fokus utama dalam perubahan pola konsumsi energi pada tahun 2045, didorong oleh teknologi canggih yang memungkinkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air secara lebih efisien, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Perangkat atau gawai yang dapat digunakan di tangan menjadi bagian integral dari kehidupan

sehari-hari, sementara robotika dan kecerdasan buatan (AI) juga membentuk bagian tak terpisahkan dari kehidupan di tahun tersebut.

Sebagai kota yang terkait erat dengan sektor perindustrian, Kabupaten Rokan Hilir akan sangat dipengaruhi oleh kondisi global ini. Dalam menghadapi dinamika ini, penyesuaian diperlukan, termasuk peningkatan ketersediaan lapangan usaha yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi para tenaga kerja yang menjadi kebutuhan krusial dan memerlukan perencanaan yang cermat. Kabupaten Rokan Hilir juga harus bersiap untuk menghadapi tantangan daya saing yang didasarkan pada pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi adaptasi yang cerdas dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing Kabupaten Rokan Hilir di era teknologi informasi yang terus berkembang.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional yang dijabarkan sebagai berikut.

Isu-isu strategis nasional merupakan permasalahan yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan nasional yang memerlukan langkah-langkah antisipatif yang khusus untuk mengatasi dampaknya. Adanya isu-isu strategis nasional yang masih belum terselesaikan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dengan upaya yang lebih intensif. Kendati demikian, kompleksitas muncul ketika isu-isu strategis nasional yang belum teratasi menghadapi kemunculan isu strategis baru, yang tentunya membutuhkan perlakuan khusus dalam proses antisipasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan formulasi isu-isu strategis daerah diperlukan juga untuk mempertimbangkan isu-isu strategis nasional sebagaimana yang terangkum dalam kilasan narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berikut ini.

Secara esensial, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan inisiatif untuk mengimplementasikan visi dan misi pembangunan jangka panjang negara. Dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai komitmen yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta didasarkan pada evaluasi dan analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas, termasuk dalam konteks penyesuaian dengan target-target utama pembangunan jangka panjang dalam RPJPN, adalah bertujuan untuk memajukan negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan di atas dan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi dan Misi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

Gambar III.5 Visi Indonesia Emas 2045



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Visi yang disampaikan dalam gambar di atas mengindikasikan kebutuhan atas komitmen dan kejelasan terhadap seluruh “goals” dari visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

- 1) Pendapatan Per kapita setara negara maju
- 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia International meningkat
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat
- 5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Sementara itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 juga telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif

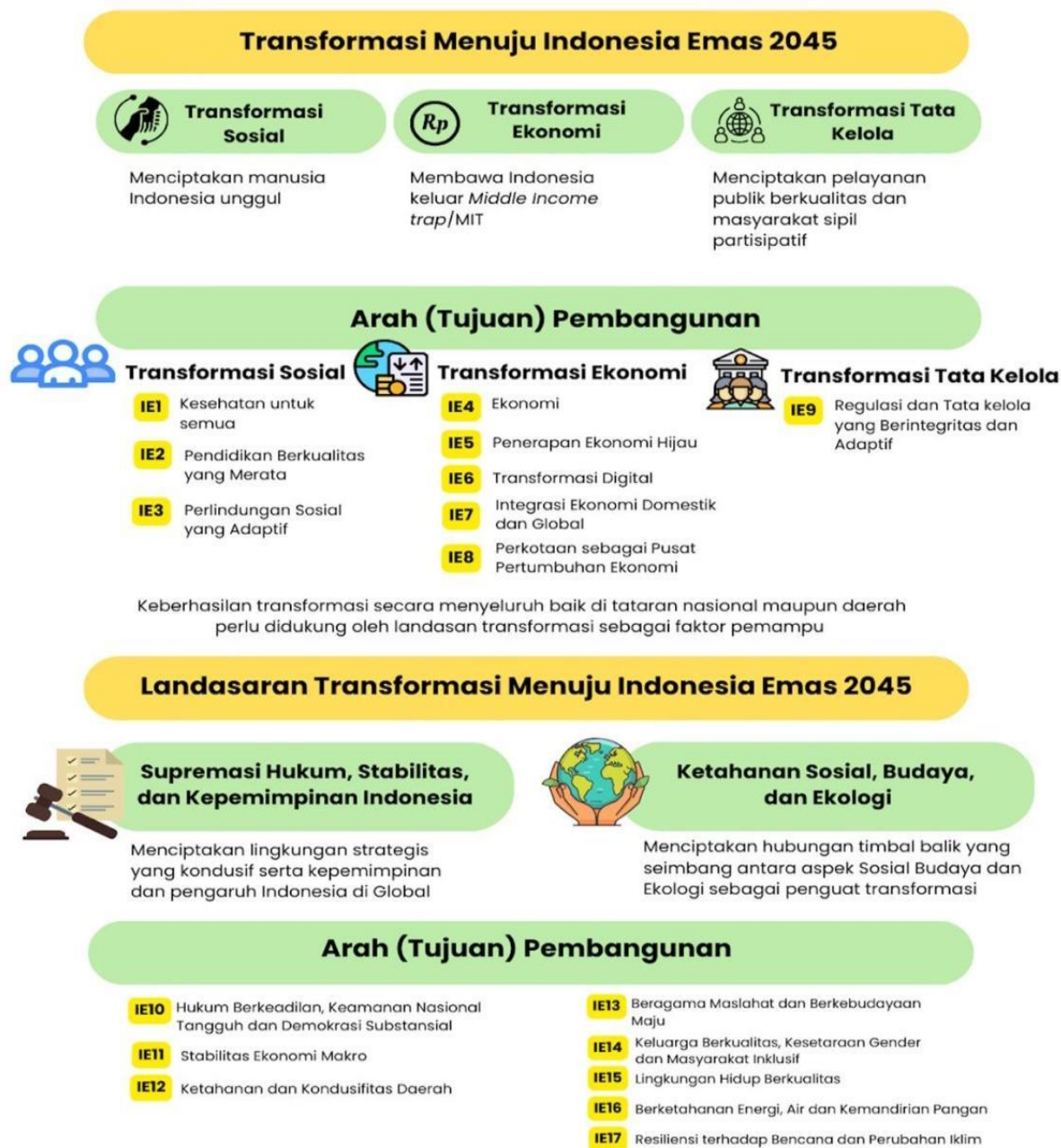
(termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan** melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
- 7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8) Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan sebagai berikut:

Gambar III.6 17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025 2045



Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir harus memedomani dan memperhatikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam RPJPN tahun 2025-2045. Dengan berdasarkan penjabaran visi, misi, sasaran utama dan arah pembangunan RPJPN di atas, dapat disimpulkan RPJPD Kabupaten

Rokan Hilir sudah memperhatikan kebijakan nasional. Secara umum, RPJPD Kabupaten Rokan Hilir sudah memiliki keterkaitan dengan misi RPJPN.

3.2.3. Isu Strategis Daerah

1. Telaah RPJPD dan Isu Strategis Provinsi Riau

Kualitas capaian pembangunan Provinsi Riau sangat ditentukan oleh kontribusi dari capaian Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah administratif Riau. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir harus memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau. Berikut ini adalah hasil telaah terhadap faktor-faktor krusial dalam RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045.

a. Dalam RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 Riau memiliki Visi **“Riau Maju dan Berkelanjutan dalam Lingkungan Budaya Melayu yang Agamis”**. Visi ini dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi sebagaimana berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera;
- 2) Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Mewujudkan keamanan daerah yang Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
- 5) Mewujudkan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi;
- 6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar kabupaten/kota;
- 7) Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan berkelanjutan;
- 8) Kestinambungan pembangunan untuk mewujudkan Riau Maju;

Dengan jabaran tahapan yang akan dibagi menjadi 4 tahap sesuai dengan gambar Tabel III-14 berikut ini

Tabel III.10 Tahapan Transformasi RPJPD Provinsi Riau 2025-2045

Tahap/ Transformasi	Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Prasarana Dasar
Tahap 1 2025-2029 Perkuatan Fondasi Transformasi	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Pertanian, Hilirisasi SDA, penguatan industri dan UMKM, serta produktivitas tenaga kerja	Kelembagaan tepat fungsi, penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI, penguatan kapasitas masyarakat sipil	Perencanaan dan pemenuhan pelayanan dasar air bersih, transportasi, prasarana pertanian, pengendali air dan pengelolaan sungai terpadu
Tahap 2 2030-2034 Akselerasi Transformasi	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan merata	Peningkatan produktifitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Kelembagaan kolaboratif; SDM ASN sejahtera, proporsional, dan berkompeten; simplifikasi regulasi berbasis TI; masyarakat sipil yang partisipatif	Percepatan pembangunan prasarana dasar berkualitas dan merata
Tahap 3 2035-2039 Ekspansi	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Riau sebagai pembangkit perekonomian yang terintegrasi dalam jaringan domestik, regional, dan global dengan	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, lembaga tunggal regulasi masyarakat sipil mandiri	Pemantapan kualitas prasarana dasar dan keberlanjutan pelayanannya

Tahap/ Transformasi	Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Prasarana Dasar
		ekspor yang stabil		
Tahap 4 2040-2045 Perwujudan Riau Maju	SDM Riau yang Maju	Provinsi berpendapatan sangat tinggi	Regulasi yang adaptif dan taat asas; serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif	Prasarana dasar yang handal

Sumber: Pokok-Pokok Rancangan Awal RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Dengan menggunakan *Logical Framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel III.11 Framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Prasarana Dasar	Transformasi Tata Kelola
Urusan Pendidikan	Urusan Pangan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Perpustakaan
Urusan Kesehatan	Urusan Lingkungan Hidup	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Kearsipan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Pertanahan	Urusan Transmigrasi
Urusan Sosial	Urusan Penanaman Modal	Urusan Perhubungan	Urusan Pendukung Urusan Kepegawaian

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Prasarana Dasar	Transformasi Tata Kelola
Urusan Tenaga Kerja	Urusan Pariwisata	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Pendukung Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Kelautan dan Perikanan	Urusan Statistik	Urusan Pendukung Urusan lain ain Sekretariat Daerah
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pertanian	Urusan Persandian	Urusan Pendukung Urusan Pengawasan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Kehutanan	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Urusan Pemerintahan Umum (KESBANGPOL)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Urusan Perdagangan		
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Perindustrian		
Urusan Kebudayaan	Urusan Keuangan		

Sumber: Pokok-Pokok Rancangan Awal RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

3.2.4. Telaahan KLHS RPJPD

Tujuan esensial pemerintah daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu dengan mengintegrasikan isu-isu prioritas ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Melalui KLHS RPJPD, pemerintah dapat mengidentifikasi dampak lingkungan dari kebijakan dan program pembangunan, memastikan bahwa strategi pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan di Rokan Hilir, Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Kabupaten Rokan Hilir akan dikembangkan berdasarkan isu yang berasal dari konsultasi publik, isu yang

berdasarkan analisis TPB, dan isu yang didasarkan kepada karakteristik wilayah.

Kesimpulan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2045 menyoroti berbagai aspek penting terkait pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dari total 220 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hanya 33% yang telah mencapai target, sementara 35% telah terlaksana namun belum memenuhi target, dan 28% belum terlaksana atau tidak ada data. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan dan pemantauan TPB di tingkat kabupaten agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih optimal.

Isu-isu pembangunan berkelanjutan diidentifikasi melalui beberapa sumber, yaitu konsultasi publik, karakteristik wilayah, dan capaian TPB. Dari analisis ini, didapatkan beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan yang memadai, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pentingnya isu-isu ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Setelah dilakukan analisis, didapatkan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan dan lemahnya pelayanan penduduk terhadap jaminan kesehatan dan sosial.
2. Rendahnya ketersediaan pangan dan meningkatnya ketidakcukupan konsumsi serta kerawanan pangan.
3. Lemahnya peningkatan layanan dan akses terhadap pendidikan berkualitas.
4. Belum terwujudnya pemerataan layanan dan akses air minum yang bersih, aman, layak, serta berkelanjutan bagi masyarakat.
5. Belum optimalnya sistem mitigasi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.
6. Tingginya alih fungsi hutan dan lahan serta lemahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun terdapat keselarasan antara Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Strategis KLHS RPJPD dengan isu strategis RPJPD Rokan Hilir 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel III.12 Penentuan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045

ISU PRIORITAS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KLHS	ISU RPJPD ROKAN HILIR 2025-2045
Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan dan lemahnya pelayanan penduduk terhadap jaminan kesehatan dan sosial.	Optimalisasi pengentasan kemiskinan berkeadilan sosial
Lemahnya peningkatan layanan dan akses terhadap pendidikan berkualitas.	Optimalisasi Bonus Demografi sebagai akselerator peningkatan kualitas SDM
	Dampak media sosial dalam mempengaruhi pemikiran generasi muda
	Perwujudan <i>good governance</i> menuju pelayanan publik yang berkualitas
Belum terwujudnya pemerataan layanan dan akses air minum yang bersih, aman, layak, serta berkelanjutan bagi masyarakat.	Penyediaan infrastruktur berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
Belum optimalnya sistem mitigasi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.	Penguatan ketahanan ekologi
Rendahnya ketersediaan pangan dan meningkatnya ketidakcukupan konsumsi serta kerawanan pangan.	
Tingginya alih fungsi hutan dan lahan serta lemahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif

Sumber: KLHS RPJPD Rokan Hilir 2025-2045, diolah

Lebih lanjut, beberapa isu strategis pembangunan yang diidentifikasi meliputi rendahnya akses terhadap air minum bersih, tingginya alih fungsi hutan, serta belum optimalnya manajemen energi terbarukan dan penciptaan lapangan kerja. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa masih ada banyak aspek yang memerlukan perhatian serius untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, lemahnya manajemen pengelolaan sampah dan limbah serta risiko bencana alam yang meningkat akibat perubahan iklim juga menjadi sorotan penting dalam kajian ini.

Salah satu isu kritis yang juga muncul dari KLHS adalah minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pengembangan infrastruktur teknologi yang inklusif dianggap sebagai langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan bagi penduduk miskin, juga masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan dan implementasi program pemberdayaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, hasil KLHS ini akan menjadi dasar integrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi, diharapkan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan yang ada, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

3.2.5. Telaahan RTRW Kabupaten Rokan Hilir

1. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Arah perencanaan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan dalam dokumen Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 2024-2044. Fungsinya adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan utama terkait pemanfaatan ruang. Dalam upaya menjalankan pembangunan daerah, dua pedoman utama yang digunakan adalah RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah, termasuk

RPJPD dan RPJMD. Secara geografis, wilayah perencanaan Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas 18 Kecamatan, dengan Lingkup wilayah Kabupaten meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, dengan luas kurang lebih 906.863 (Sembilan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar, yang terletak di antara koordinat 1° 13' 47,34" Lintang Utara - 2° 55' 16,15" Lintang Utara dan 100° 16' 18,64" Bujur Timur - 101° 20' 7,41" Bujur Timur.

Selanjutnya, evaluasi sinkronisasi dan harmonisasi antara RTRW dan RPJPD dalam perspektif jangka Panjang, 20 tahun mendatang, ditinjau dari pertimbangan terhadap tujuan penataan ruang wilayah. Dalam konteks RTRW Kabupaten Rokan Hilir, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir yang berbasis potensi daerah melalui pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan”

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Tujuan penataan ruang di atas, tidak secara spesifik menyebutkan orientasi sasaran, namun secara umum pada penataan ruang yang berbasis pada potensi daerah. Daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Beberapa potensi sumber daya Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

- a. **Pertanian:** Kabupaten Rokan Hilir memiliki lahan yang luas dan subur, cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan padi. Tanaman perkebunan seperti kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah ini, dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit yang tersebar di kabupaten ini.
- b. **Perkebunan:** Selain kelapa sawit, komoditas lain seperti karet, kelapa, dan cengkeh juga memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Rokan Hilir. Perkebunan-perkebunan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
- c. **Kehutanan:** Potensi hutan di Kabupaten Rokan Hilir juga cukup besar. Hutan-hutan ini memiliki beragam jenis kayu yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun, perlindungan dan pengelolaan hutan

yang baik juga perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini.

- d. **Perikanan:** Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi perikanan yang signifikan, terutama di sepanjang pantai dan sungai-sungainya. Perikanan tangkap maupun budidaya menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat pesisir di daerah ini.
- e. **Pariwisata:** Potensi pariwisata Kabupaten Rokan Hilir juga patut diperhatikan. Keindahan alamnya, seperti pantai-pantai yang masih alami dan keberagaman ekosistemnya, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Adapun Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kabupaten Rokan Hilir, sebagai kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dokumen rencana pembangunan (RPJPD) sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan produktifitas wilayah yang berbasis pertanian, dan perikanan dengan strategi:
 - 1) mengembangkan daerah produksi pada kawasan yang memiliki potensi unggulan pertanian dan perikanan;
 - 2) mengembangkan dan mempertahankan kawasan lumbung pangan dan mencegah alih fungsi; dan
 - 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan yang memiliki potensi ekonomi unggulan.
- b. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya dengan strategi:
 - 1) meningkatkan aksesibilitas, sarana prasarana, dan daya tarik objek wisata di kawasan pariwisata alam;
 - 2) meningkatkan sarana prasarana dan daya tarik objek wisata budaya tahunan dan musiman.
- c. Strategi pengembangan kawasan cepat tumbuh dan pusat-pusat pertumbuhan baru kawasan berdasarkan potensi dan kearifan lokal dengan strategi:
 - 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agrobisnis dan agroindustri;

- 2) meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agrobisnis dan agroindustri;
- 3) mengembangkan kawasan produksi perikanan berbasis minapolitan;
- 4) menetapkan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis, agroindustri, dan minapolitan; dan
- 5) peningkatan peran masyarakat lokal dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru kawasan yang sesuai dengan karakteristiknya dan kearifan lokal.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - 3) harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - 4) mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas:

- a. PKW Bagansiapiapi yang berada di Kecamatan Bangko
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, yaitu berada d
- b. PKL Sinaboi Kecamatan Sinaboi, PKL Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih, PKL Bagan Sinembah di Kecamatan Bagan Sinembah, dan PKL Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri dari :
 - a. PPK Balai Jaya di Kecamatan Balai Jaya
 - b. PPK Bangko Pusako di Kecamatan Bangko Pusako,
 - c. PPK Kubu Babussalam di Kecamatan Kubu Babussalam

- d. PPK Pujud di Kecamatan Pujud
- e. PPK Simpang Kanan di Kecamatan Simpang Kanan
- f. PPK Rantau Kopar di Kecamatan Rantau Kopar
- g. PPK Rimba Melintang di Kecamatan Rimba Melintang
- h. PPK Tanah Putih Tanjung Melawan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
- i. PPK Tanjung Medan di Kecamatan Tanjung Medan

PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- a) merupakan ibukota kecamatan;
 - b) proyeksi jumlah penduduk;
 - c) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
 - d) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
- a) proyeksi jumlah penduduk;
 - b) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
 - c) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
 - d) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Rancangan Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana gambar III.9.

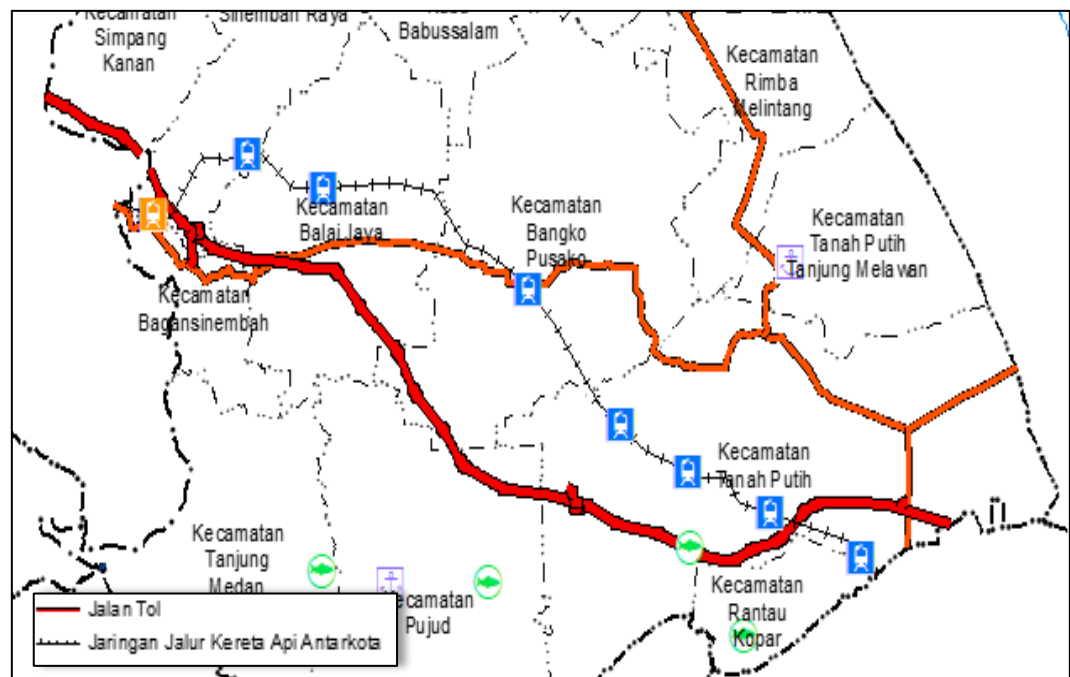
Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Rokan Hilir

Proyek strategis nasional di Kabupaten Rokan Hilir ada 2 (dua), yaitu :

1. Jalan Bebas Hambatan/Jalan Tol
Ruas Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat dengan panjang jalan ± 113 Km.
2. Jaringan Kereta Api

Pengembangan sistem jaringan kereta api di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berupa:

- 1) Pembangunan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten Jalur Rantau Prapat - Duri – Pekanbaru yang melintasi Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, dan Kecamatan Tanah Putih.
- 2) Pembangunan stasiun penumpang, yang meliputi:
 - a. Kecamatan Bagan Sinembah Raya terdapat stasiun Bagan Batu dan stasiun Buluh Cina;
 - b. Kecamatan Balai Jaya terdapat stasiun Sei Dua;
 - c. Kecamatan Tanah Putih terdapat stasiun Manggala, stasiun Pageran Itik, stasiun Simpang Puncak, dan stasiun Sintong; dan
 - d. Kecamatan Bangko Pusako terdapat stasiun Balam Sempurna
- 3) Pembangunan Stasiun Barang Bagan Sinembah di Kecamatan Bagan Sinembah Raya.



3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

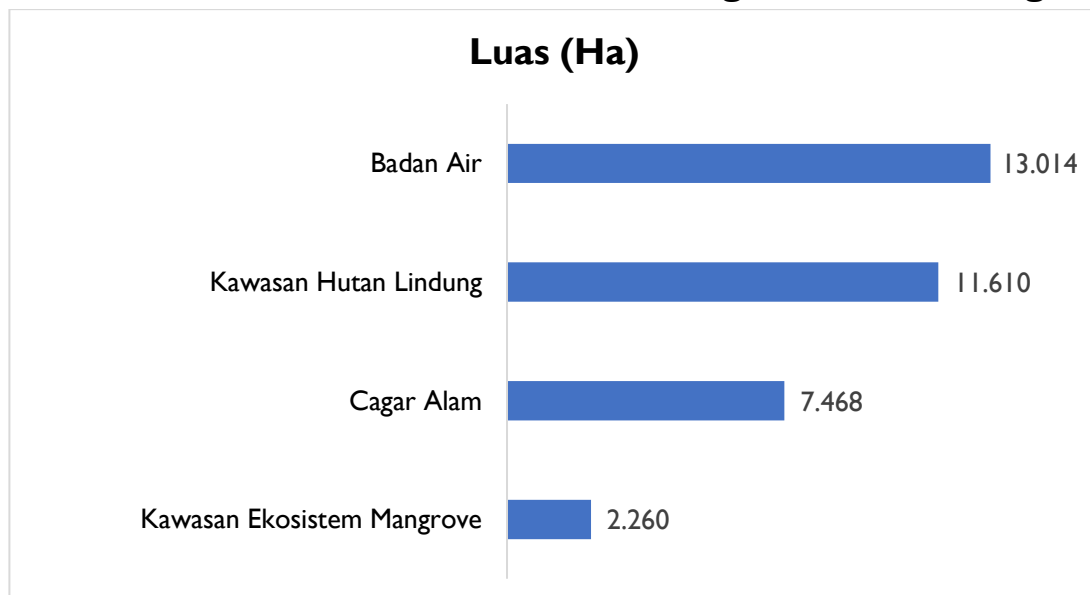
Rencana pola ruang kabupaten merupakan suatu kerangka konseptual yang mendefinisikan cara pengorganisasian dan pemanfaatan ruang wilayah di tingkat kabupaten. Teori rencana pola ruang ini berkaitan erat dengan konsep tata ruang dan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan struktur ruang yang terorganisir dan terpadu. Pada dasarnya, teori ini menekankan pada penetapan kebijakan-kebijakan terkait tata guna lahan, perkembangan sektor-sektor utama, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu kabupaten. Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.13 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

NO	RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	%
	Kawasan Lindung	34.352	3,8%
1	Badan Air	13.014	1,4%
2	Kawasan Hutan Lindung	11.610	1,3%
3	Cagar Alam	7.468	0,8%
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	2.260	0,3%

Sumber : Rancangan Perda RTRW Kabupaten Rokan Hilir

Gambar III.8 Grafik Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung



Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Rokan Hilir, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah

pada badan air yaitu seluas 13.014 Ha dan kemudian disusul oleh Kawasan Hutan Lindung seluas 11.610 hektar.

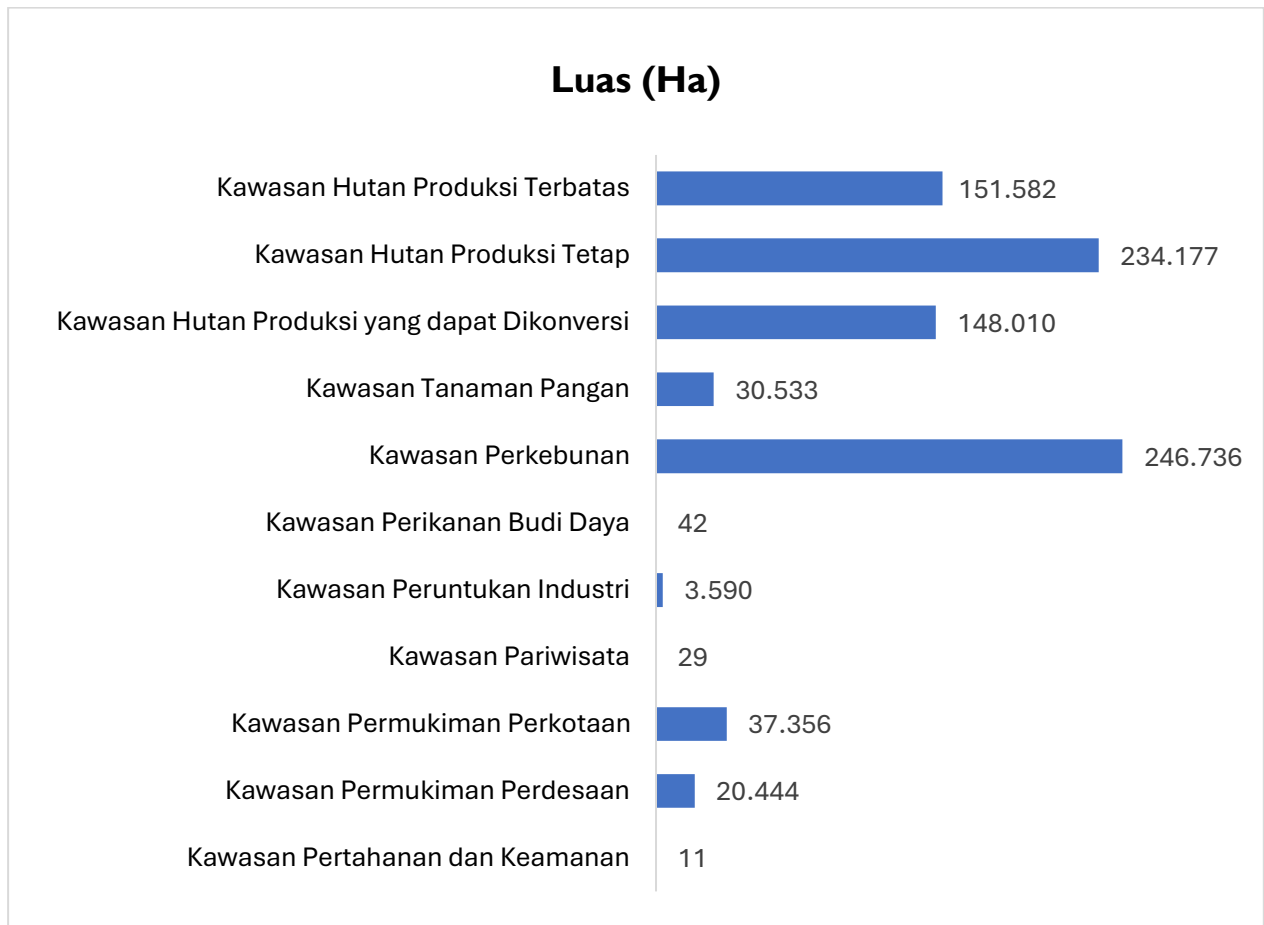
Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan arahan Rancangan Peraturan Daerah RTRW.

Tabel III.14 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

NO	RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	%
	Kawasan Budidaya	872.510	96,21%
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	151.582	16,72%
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	234.177	25,82%
3	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	148.010	16,32%
4	Kawasan Tanaman Pangan	30.533	3,37%
5	Kawasan Perkebunan	246.736	27,21%
6	Kawasan Perikanan Budi Daya	42	0,00%
7	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	3.590	0,40%
8	Kawasan Peruntukan Industri	29	0,00%
9	Kawasan Pariwisata	37.356	4,12%
10	Kawasan Permukiman Perkotaan	20.444	2,25%
11	Kawasan Permukiman Perdesaan	11	0,00%
12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	872.510	96,21%

Sumber : Rancangan Perda RTRW Kabupaten Rokan Hilir

Gambar III.9 Grafik Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya



Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

- pemanfaatan ruang bagi kawasan hutan produksi dengan luas 533.769 ha dengan kode zona (HPT, HP dan HPK).
- alokasi pola ruang bagi kawasan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) seluas 277.269 ha.
- Kemudian kawasan permukiman seluas 57.800 Ha.

Berikut ini merupakan rancangan Peta Pola Ruang Kabupaten Rokan Hilir, baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya.

Dari analisis di atas, berdasarkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024-2044, adalah pengembangan kawasan ekonomi strategis yang terdiri atas pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan dengan kerangka Agroindustri dan Agrobisnis. Pengembangan ini akan diperkuat oleh penentuan alokasi lahan di kawasan pertanian dan perikanan, serta didukung oleh pengembangan KSK Sosial Budaya dengan penekanan pada sektor pariwisata. Selain itu, penetapan kawasan untuk kepentingan industri juga menjadi tanda upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengarahkan perkembangan wilayahnya.

3.2.6. Isu Strategis Kabupaten Rokan Hilir

Isu strategis memberikan gambaran tentang fokus dan prioritas penanganan yang menjadi perhatian pemerintah. Keberadaan isu strategis dianggap krusial karena memiliki dampak yang besar, meluas, dan signifikan terhadap upaya perbaikan kondisi masyarakat dalam rangka pembangunan di masa mendatang. Melalui identifikasi berbagai isu, baik yang berskala internasional, nasional, maupun daerah, dapat ditetapkan isu-isu strategis untuk Kabupaten Rokan Hilir yang akan menjadi fokus penanganan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Rincian isu-isu tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Bonus Demografi sebagai akselerator peningkatan kualitas SDM

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015, dengan puncak periode diperkirakan terjadi antara tahun 2020-2035. Fenomena ini dicirikan oleh penurunan tingkat kelahiran, yang berkontribusi pada penurunan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan. Bonus demografi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa pemerintah mampu merancang kebijakan yang tepat dalam mendukung perkembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan lapangan kerja. Pemanfaatan bonus demografi dapat menjadi langkah yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghadapi tantangan transformasi demografis dengan strategi yang terencana secara matang.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan tulang punggung dari pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rokan Hilir. Pendekatan

komprehensif dalam menghadapi isu pembangunan dalam hal SDM sangat diperlukan untuk mencapai Visi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat meningkatkan demografi secara global akan menyebabkan munculnya persoalan-persoalan dalam lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan.

Kondisi SDM di Kabupaten Rokan Hilir akan sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan dan pendidikan untuk mendorong naiknya kesejahteraan rakyat. Beberapa poin kunci yang muncul sebagai tantangan mencakup peningkatan keterampilan dan kualifikasi guru, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan global dan teknologi, dan penyediaan sarana belajar yang modern dan memadai adalah langkah-langkah taktis yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan ke depan. Begitu pula penyesuaian dan upaya integratif terhadap kesiapan teknologi yang menjadi krusial, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan masing-masing secara relevan dengan era digital. Sebagai aspek pendukung, kualitas pendidikan nonformal juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan yang bersifat praksis untuk para angkatan kerja yang akan atau baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya.

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan juga memiliki tantangan tertentu khususnya pada pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kualitas pelayanan medis. Meskipun telah melewati masa pandemi, upaya penyebaran vaksinasi yang dibutuhkan masyarakat masih sangat perlu dipersiapkan. Upaya-upaya ini perlu didukung dengan penyiapan sumber daya manusia dan edukasi masyarakat secara umum. Selain persiapan SDM, infrastruktur dan sarana yang memadai juga harus dijadikan sebagai sasaran yang tepat. Tujuannya adalah kebijakan yang dibuat akan dapat langsung diarahkan secara efektif pada tahap-tahap yang terstruktur di Kabupaten Rokan Hilir.

Peningkatan SDM di Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan secara holistik dan direncanakan secara komprehensif. Stabilitas pembangunan manusia harus dipastikan sehingga tidak terjadi kesenjangan pada komponen pengungkit kesejahteraan masyarakat. Evaluasi menjadi faktor utama yang dapat disinkronkan dengan penahapan yang akan disusun dengan tertib dan terukur selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

2. Optimalisasi pengentasan kemiskinan berkeadilan sosial

Keadilan sosial adalah dasar falsafah pembangunan nasional, yang dimaksudkan bahwa seluruh pihak harus mendapatkan kualitas pembangunan secara adil. Asumsinya adalah pembangunan tidak akan

berhasil dengan baik jika rasa keadilan tidak didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan di dalam pembangunan daerah harus ditekan seminimal mungkin.

Kabupaten Rokan Hilir masih memiliki masalah kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Riau, begitu pula kedalaman kemiskinan masih terpantau tinggi. Dengan kondisi ini, tantangan yang akan dihadapi adalah terkait perumusan kebijakan untuk jaring perlindungan sosial yang lebih efektif. Selain itu sistem yang adaptif juga akan diperlukan mengingat dinamika ekonomi nasional yang terkadang tidak bisa ditebak secara pasti. Rokan Hilir harus menyiapkan suatu sistem pengaman sosial yang efektif, adaptif, dan dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi.

Sebagai daerah yang mengandalkan sektor jasa, transportasi, perkebunan, dan juga pariwisata, Rokan Hilir harus memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dengan masih adanya kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses IT dengan baik, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus mengupayakan hal-hal yang terkait dengan simpul informasi. Dengan demikian langkah untuk menyiapkan perangkat-perangkat dan proses mitigasi yang mencapai terkait informasi ini harus ada di setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan inklusif yang dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir.

3. Transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif

Transformasi ekonomi yang menggunakan perspektif inklusif dan dilaksanakan secara inovatif adalah suatu isu yang sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Rokan Hilir. Tujuannya bukan hanya perihal pertumbuhan ekonomi yang, namun juga untuk mendorong tetapi juga menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui transformasi ekonomi, sektor-sektor potensial akan dapat secara optimal menghasilkan nilai tambah dan lapangan pekerjaan baru. Kabupaten Rokan Hilir dapat menggunakan semangat transformasi ini untuk mengembangkan fokus pada sektor-sektor yang memicu tumbuhnya ekonomi kerakyatan melalui UMKM.

Transformasi ekonomi juga akan bersinggungan dengan peningkatan produktivitas dan mendukung daya saing wilayah dalam tingkat nasional bahkan global. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara umum, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap distribusi pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan membentuk lingkungan

bisnis yang mendukung dan kondusif. Dengan pendekatan yang terintegrasi dengan baik, transformasi ekonomi dapat menjadi sebuah perjalanan yang sangat produktif melalui upaya pembentukan fondasi yang kuat untuk masa depan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan asumsi seperti ini, transformasi ekonomi akan berdampak dalam waktu yang lama dan akan menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan hingga masa depan.

Upaya strategis dalam menghadapi isu transformasi ekonomi tidak hanya memicu perubahan struktural, melainkan juga sebagai katalisator bagi perubahan positif yang mendalam dalam ekosistem bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan inovasi dan produktivitas dianggap sebagai faktor yang akan memiliki dampak langsung pada peningkatan daya saing daerah, bahkan potensial untuk mencapai tingkat daya saing yang diakui di tingkat internasional. Oleh karena itu, perhatian pada isu ini dapat diarahkan untuk merancang dan melaksanakan transformasi ekonomi yang berhasil, yang tercermin dalam peningkatan kualitas ketahanan ekonomi daerah. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya upaya terkoordinasi dan terintegrasi dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang dapat mencapai hasil positif dalam mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Isu strategis ini akan terkait erat dengan kebutuhan inovasi yang berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, dan pengelolaan berkelanjutan yang berpusat pada nilai-nilai futuristik. Secara praktis, transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif memerlukan dukungan yang berfungsi sebagai pendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pihak yang bertanggung jawab di bidang perekonomian dengan lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi imperatif. Pemikiran ini harus dirancang secara cermat dan bijak karena potensi untuk memunculkan tantangan baru, seperti konflik antar warga atau kelompok masyarakat. Demikian pula, perlu memperhitungkan kemungkinan dampak transformasi ekonomi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial lainnya untuk dapat mengantisipasi serta meredam konsekuensi yang mungkin timbul.

4. Perwujudan *good governance* menuju pelayanan publik yang berkualitas

Perwujudan *good governance* adalah hal yang krusial dan menjadi pelekot bagi seluruh aktivitas pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terlihat melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi beserta implikasi strategisnya bagi Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2045. Upaya ini akan melibatkan identifikasi hambatan

yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem birokrasi yang telah dijalankan.

Diperlukan upaya oleh Kabupaten Rokan Hilir untuk mengembangkan visi pembangunan jangka menengah dan rencana kerja yang terperinci terkait dengan peningkatan implementasi reformasi birokrasi. Langkah-langkah ini harus diambil guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang optimal dalam penyelenggaraan layanan publik. Aspek-aspek krusial seperti perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas pegawai, dan integrasi teknologi informasi perlu untuk diintervensi, sehingga pemahaman yang komprehensif dapat diperoleh mengenai sejauh mana proses perwujudan tata kelola dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Fokus pada reformasi birokrasi yang berintegritas tinggi untuk mewujudkan sistem pelayanan masyarakat yang bermutu adalah hal yang bersifat imperatif dalam pelaksanaan pemerintahan. Kreativitas tentu diperlukan dalam hal ini terutama berkaitan dengan peningkatan mutu dalam bentuk perencanaan yang baik, khususnya yang berhubungan dengan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, tata kelola yang baik perlu untuk disokong dengan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia melalui program pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai. Upaya pemberian kesempatan pendidikan ini harus dimulai dari level kepegawaian terbawah, dengan tujuan efektivitas proses internalisasi nilai pelayanan bagi semua lini. Dengan penyesuaian melalui isu tata kelola ini, maka perwujudan pelayanan publik yang berkualitas akan dapat dilaksanakan dengan tepat dan terstruktur.

5. Penguatan ketahanan ekologi

Dalam menjalankan pembangunan jangka panjang daerah, dibutuhkan pengetahuan dan perlengkapan yang berkaitan dengan ketahanan ekologi. Pada dasarnya ketahanan ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan dan pulih dari gangguan yang diakibatkan oleh keterbatasan lingkungan. Konsep ini mencakup interaksi kompleks antara elemen-elemen sosial kemanusiaan dan ekologi dalam suatu sistem, yang menciptakan daya tahan terhadap perubahan atau stres lingkungan. Ketahanan ini harus melibatkan masyarakat agar mampu untuk beradaptasi, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan ekosistem di tengah tantangan yang muncul.

Berdasarkan permasalahan lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hilir, potensi terjadinya bencana di wilayah Rokan Hilir memiliki predikat tinggi. Dengan demikian perlu untuk memastikan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan kesiapan daerah yang direpresentasikan dalam IKD yang optimal. Kondisi mengupayakan ketahanan daerah menjadi tinggi akan

berpengaruh pada penurunan IRBI sehingga evaluasi terhadap potensi bencana yang dimiliki Rokan Hilir dapat ditekan seminim mungkin.

Selain itu, pembangunan secara bertahap terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui kualitas air, udara, dan lingkungan perlu dilakukan secara konsisten. Begitu pula dengan upaya penurunan Indeks GRK dan memungkinkan untuk kemudian juga memperhitungkan penurunan emisi serta mencari sumber pendanaan berbasis penurunan karbon di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu, kerja sama antara pemerintah, pihak, swasta, perguruan tinggi, pers, dan masyarakat umum adalah suatu kemestian yang harus dijalani dan dimaksimalkan.

6. Dampak media sosial dalam mempengaruhi pemikiran generasi muda

Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda di Rokan Hilir. Penggunaan *platform* seperti Instagram, Facebook, dan TikTok mempengaruhi cara mereka berpikir, berinteraksi, dan memandang dunia. Di satu sisi, media sosial memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan membuka peluang untuk belajar hal-hal baru serta berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Namun, di sisi lain, arus informasi yang tidak terkendali sering kali membawa dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu, tekanan sosial, dan pergeseran nilai budaya lokal.

Pengaruh media sosial terhadap pemikiran generasi muda di Rokan Hilir terlihat dari perubahan gaya hidup dan pola pikir mereka. Generasi muda cenderung mengadopsi tren global yang dilihat di media sosial, yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Misalnya, gaya berpakaian, cara berbicara, dan perilaku yang ditampilkan di media sosial sering kali menjadi acuan, menggeser norma-norma budaya setempat. Selain itu, paparan terhadap konten yang tidak sehat atau tidak mendidik dapat mempengaruhi mental dan emosional mereka, menyebabkan masalah seperti rendahnya rasa percaya diri dan kecemasan sosial.

Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, pendidikan, dan keluarga menjadi pusat intervensi yang dapat dilakukan. Isu ini akan mengarahkan pemerintah daerah Rokan Hilir untuk terlibat dalam program-program edukasi digital yang mengajarkan literasi media sosial kepada generasi muda. Isu ini juga akan berpengaruh pada sekolah-sekolah dalam mengintegrasikan kurikulum yang membahas prosedur penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap budaya lokal. Kondisi ini perlu diperhatikan agar generasi muda di Rokan Hilir dapat menikmati manfaat media sosial tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

7. Penyediaan infrastruktur berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Penyediaan infrastruktur adalah komponen yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan di suatu daerah. Infrastruktur yang berkualitas, seperti jaringan transportasi yang baik, sumber daya energi yang dikelola dengan baik, dan akses yang mudah terhadap layanan publik, menjadi fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi. Dengan pertimbangan Rokan Hilir sebagai kawasan dengan sektor jasa dan perkebunan yang signifikan, infrastruktur yang ideal akan menjadi penentu utama keberhasilan aktivitas tersebut.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hilir untuk dua puluh tahun ke depan adalah investasi dalam pengembangan infrastruktur di Rokan Hilir. Tantangan ini bukan hanya menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Infrastruktur yang berkualitas, seperti transportasi yang efisien dan layanan publik yang mudah diakses, tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari penduduk.

Selain itu, aksesibilitas yang baik terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Isu pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar untuk memenuhi aspek teknis, melainkan suatu investasi dalam kesejahteraan masyarakat yang holistik dan akan dapat mencerminkan komitmen Rokan Hilir dalam untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi semua warga masyarakat di daerahnya.

Penyediaan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Rokan Hilir menghadapi tantangan signifikan terkait dengan konflik lahan, yang sering muncul akibat tumpang tindih kepemilikan tanah antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Konflik ini terutama disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat setempat yang sering tidak tercatat dalam sistem administrasi tanah. Ketidakjelasan ini menghambat proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang melibatkan dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta perlunya kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan tanah dan penegakan hukum yang tegas agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa

menimbulkan ketidakadilan sosial atau merugikan pihak-pihak yang terdampak.

Upaya untuk penyediaan infrastruktur ini dapat didukung dengan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan menuju daerah perbatasan Sumatera Utara di Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, aktivitas ekonomi antarwilayah dapat berjalan lebih lancar, terutama dalam mendukung distribusi hasil perkebunan dan jasa yang menjadi sektor unggulan Rokan Hilir. Selain itu, akses yang lebih baik ke daerah perbatasan juga membuka peluang investasi baru, memperluas pasar lokal, dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi disparitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi dan sosial, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan di seluruh Rokan Hilir.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional serta merupakan implementasi dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Rokan Hilir berupaya memanfaatkan lokalitas, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas yang mencerminkan identitas unik daerah guna mencapai tujuan pembangunan. Sebagai bagian dari upaya untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang menjadi aspirasi besar dalam implementasi pembangunan jangka panjang nasional dari tahun 2025 hingga 2045, Kabupaten Rokan Hilir turut menyusun Visi jangka panjang daerah. Dalam konteks perencanaan, visi RPJPD mencerminkan aspirasi dan harapan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Rokan Hilir pada akhir periode perencanaan dua puluh tahun nanti. Untuk merealisasikan visi tersebut, penetapan misi-misi dalam RPJPD menjadi suatu kebutuhan esensial. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan regulasi dan adanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan di tengah masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan jangka panjang yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Visi dan Misi jangka panjang daerah merupakan milik daerah atau masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan visi dan misi jangka panjang, perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif dengan menggunakan metode kuesioner. Metode yang digunakan dalam rancangan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 ini didasarkan pada pengolahan hasil kuesioner untuk membentuk visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir.

Visi dalam RJPD merupakan pencapaian yang diinginkan daerah pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Visi harus mampu memberikan gambaran masa depan yang diidamkan bagi masyarakat dan daerah, menjadi dasar bagi semua elemen atau pelaku pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Visi menggambarkan arah atau kondisi ideal di masa depan yang diinginkan, berdasarkan situasi dan kondisi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi sekarang dan masa depan yang diharapkan. Oleh karena itu, visi harus didasarkan pada realitas, fokus pada masa depan, dan bukan sekadar pemikiran spekulasi

semata. Visi pembangunan jangka panjang daerah, yang sudah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, menjadi panduan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visi pada periode lima tahun mendatang serta dalam pengembangan RPJMD.

Misi pembangunan adalah rumusan umum mengenai langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai visi yang ingin dicapai dan merinci upaya-upaya apa yang perlu dilakukan. Dalam pengembangan rumusan misi dalam dokumen perencanaan, perhatian diberikan pada faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi pembangunan daerah. Misi disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, pernyataan misi Kabupaten Rokan Hilir menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dan maksud yang ingin dijelaskan.

Proses perumusan visi dan misi jangka panjang memerlukan upaya yang besar dan harus mempertimbangkan visi nasional, visi provinsi Riau, serta merujuk pada dokumen RTRW dan KLHS-RPJPD. Selain itu, aspirasi dan harapan masyarakat juga menjadi elemen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan visi ini. Selanjutnya, proses ini akan dilaksanakan secara komprehensif dan konsisten dengan perencanaan pembangunan jangka menengah. Proses ini melibatkan sosialisasi dan penjangkauan aspirasi dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Keterwakilan dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat, dikenal sebagai pendekatan pentahelix, diharapkan dapat mencerminkan aspirasi publik secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar perencanaan jangka panjang dapat mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat untuk kemajuan daerah dalam dua puluh tahun ke depan.

4.1 VISI KABUPATEN ROKAN HILIR

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Rokan Hilir diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengusung Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Harapan dan cita-cita yang terkandung dalam visi ini adalah tercapainya kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi

dunia pada tahun 2045. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar dan memiliki peluang untuk mengendalikan berbagai aspek sosial, kebangsaan, dan kenegaraan secara berdaulat.

Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan akan bersinggungan dengan dinamika global dan nasional yang berpengaruh secara signifikan pada pembangunan daerah. Megatren global, seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi, dipandang sebagai pemicu utama untuk mengantisipasi perubahan ini. Respon yang cepat, terutama melalui mitigasi dan adaptasi, perlu dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki mengadopsi pendekatan transformasi dalam seluruh aspek pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir harus mengintegrasikan strategi transformasi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan ketangguhan Kabupaten Rokan Hilir di masa depan.

Dalam merumuskan Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hasil dari partisipasi masyarakat tersebut menghasilkan harapan masyarakat, yang akan menjadi landasan utama dalam pembentukan visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner partisipasi masyarakat yang mengekstraksi simpulan dari harapan masyarakat, dan dengan memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Riau, serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka dapat dilihat kerangka logis perumusan visi Kabupaten Rokan Hilir pada gambar berikut:

Gambar IV.1
Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045



Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar di atas, dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global, serta harapan masyarakat berdasarkan hasil penjarangan aspirasi dan tujuan RTRW, ditetapkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2045, yaitu:

“Negeri Seribu Kubah yang Maju dan Berkelanjutan”

Visi yang telah dirancang ini menuju kepada Kabupaten Rokan Hilir menjadi Kabupaten yang Maju dan Berkelanjutan terdiri dari dua pokok visi yaitu Maju dan berkelanjutan dalam kerangka Negeri Seribu Kubah. Keterkaitan antar pokok visi adalah sebagaimana yang digambarkan dalam diagram berikut ini:

Gambar IV.2
Keterkaitan Antar Pokok Visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045



Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir, berikut adalah penjelasan visi Kabupaten Rokan Hilir,

1. Negeri Seribu Kubah

Negeri Seribu Kubah adalah lokus pembangunan dan sekaligus arah bagi dua pokok visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir. Negeri Seribu Kubah merupakan julukan yang tepat untuk Kabupaten Rokan Hilir. Julukan ini menggambarkan keunikan dan karakteristik khas daerah tersebut, terutama dalam hal arsitektur bangunan yang banyak menggunakan atap kubah. Keunikan ini tidak hanya terbatas pada bangunan masjid, tetapi juga meliputi berbagai bangunan lain seperti kantor Bupati, kantor-kantor dinas, gedung sekolah, dan rumah pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Semua bangunan ini didesain dengan ornamen kubah, menciptakan pemandangan yang sangat khas dan menarik.

Penggunaan kubah sebagai elemen arsitektural tidak hanya memperindah tampilan fisik bangunan, tetapi juga mencerminkan identitas dan karakter budaya masyarakat Rokan Hilir. Kubah, yang secara tradisional sering

diasosiasikan dengan bangunan keagamaan, menunjukkan adanya nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menggambarkan bagaimana masyarakat Rokan Hilir menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, menjadikan spiritualitas sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam semangat pembangunan jangka panjang, tradisi penggunaan kubah ini dapat mengarahkan cita-cita kemajuan di Rokan Hilir. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek budaya dan religiusitas, seperti penggunaan kubah dalam arsitektur, tidak hanya memperkuat identitas lokal tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata daerah. Dengan demikian, Kabupaten Rokan Hilir dapat mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan religi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain itu, semangat pembangunan jangka panjang juga tercermin dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui arsitektur bangunan. Setiap kubah yang didirikan tidak hanya merupakan simbol keagamaan tetapi juga komitmen untuk menjaga identitas budaya bagi generasi mendatang. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pelestarian ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tradisi penggunaan kubah ini, Rokan Hilir tidak hanya menawarkan keindahan arsitektural tetapi juga memberikan cerminan mendalam mengenai karakter masyarakatnya yang religius dan memiliki spiritualitas yang tinggi. Setiap bangunan dengan kubah yang berdiri megah menjadi simbol dari harmoni antara estetika arsitektur dan nilai-nilai keagamaan yang terjalin erat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Melalui semangat pembangunan jangka panjang yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan keagamaan, Rokan Hilir dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri dan warisan budayanya.

2. Maju

Kabupaten Rokan Hilir memiliki semangat untuk maju secara ekonomi dan infrastruktur. Mampu mengoptimalkan perekonomian yang tumbuh dan inklusif melalui terciptanya transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif.

Kabupaten Rokan Hilir memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penggunaan teknologi dan layanan terbaru, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Melakukan pembangunan infrastruktur modern dan handal, serta mengelola pemerintahan secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua ini bertujuan agar semua anggota masyarakat dapat bergerak dengan mudah berkat ketersediaan infrastruktur konektivitas yang terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau.

Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen melakukan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta menyediakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, sebagai wujud optimalisasi penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan arah pembangunan dalam bidang IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global serta Stabilitas Ekonomi Makro.

3. Berkelanjutan

Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen dalam keberlanjutan lingkungan melalui transformasi ketahanan ekologi. Optimalisasi penguatan ketahanan ekologi dengan peningkatan kualitas danantisipasi degradasi lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan. Sehingga menjadi penting untuk menyelaraskan penciptaan produk, layanan, sarana dan prasarana bidang ekonomi, sosial, budaya yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi daerah yang maju dan modern namun tetap mendukung program-program ramah lingkungan.




Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen terhadap arah pembangunan dalam hal Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Rokan Hilir. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan daerah yang Maju dan Berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, Indeks Gini, Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi, PDRB Per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Indeks Daya Saing Daerah, dan Indeks Reformasi Birokrasi

adalah indikator sasaran visi MAJU. Sementara itu penurunan Intensitas Emisi GRK merupakan indikator sasaran visi BERKELANJUTAN

Melalui acuan dari permasalahan, isu strategis, serta harapan masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

Gambar IV.3
Keterkaitan Pokok Visi dengan Sasaran Visi Kabupaten Rokan Hilir

	Sasaran Visi	Indikator	Target	
			2025	2045
	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	152,35 -153,34	694,48 -871,73
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	41,52	91,13
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,08	28,69 – 28,84
 MAJU	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,7 - 7	0,04 - 0,79
		Indeks Gini	0,3 - 0,316	0,248 – 0,271
		Kontribusi PDRB Kabupaten ke Provinsi (%)	9,3	10,21 -10,25
		Pertumbuhan Ekonomi	2,52-2,9	2,73 – 3,67
 BERKELANJUTAN	Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,92	4,36
		Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
	Penurunan emisi GRK menuju net zero emisiion	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,7	79,0

Untuk memastikan terjadinya sinergitas antara visi pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional, maka diperlukan penyesuaian antara visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir, visi RPJPD Provinsi Riau, dan visi RPJMN sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini,

Gambar IV.4
Penyelarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Riau, dan Visi
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045

 <p align="center">RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045</p> <p align="center">VISI <i>NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</i> <i>YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN</i> <i>BERKELANJUTAN</i></p>	 <p align="center">RPJPD PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2045</p> <p align="center">VISI <i>"RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN</i> <i>DALAM LINGKUNGAN BUDAYA MELAYU</i> <i>YANG AGAMIS"</i></p>	 <p align="center">RPJPD KAB. ROKAN HILIR TAHUN 2025-2045</p> <p align="center">VISI <i>"NEGERI SERIBU KUBAH</i> <i>YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"</i></p>
---	--	--

Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta konsep arah pembangunan Provinsi Riau yaitu “Riau Maju dan Berkelanjutan dalam Lingkungan Budaya Melayu yang Agamis”, maka dalam perumusan visi serta sasaran visi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 dibuat persandingan antara sasaran serta indikator visi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024-2045 dengan sasaran visi nasional dan Provinsi Riau yaitu sebagai berikut

Tabel IV. 1
Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Riau 2025-2045				RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045						
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045			
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	168,71 – 169,37	706,31 - 883,56	Peningkatan Pendapatan per kapita	a	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	164,18 – 165,17	706,31,63 – 883,56	Peningkatan Pendapatan per kapita	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	152,35 - 153,34	694,48 - 871,73
		b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,87	298,06		b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	27,85	77,46		b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	41,52	91,13
		c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,05 – 27,15	36,20 – 36,35		c	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	27,59	36,20 – 36,35		c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,08	28,69 – 28,84
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a	Tingkat Kemiskinan (%)	4,69 - 5,19	0,08 - 0,33	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19 - 6,19	0,08 - 0,58	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,7 - 7	0,04 - 0,79
		b	Rasio Gini (Indeks)	0,318 - 0,324	0,256 - 0,279		b	Rasio Gini (Indeks)	0,318 - 0,324	0,256 – 0,279		b	Indeks Gini	0,3 - 0,316	0,248 – 0,271
		c	Kontribusi PDRB Provinsi %	4,96	4,00		c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,88	4,00		c	Kontribusi PDRB Kabupaten ke Provinsi (%)	9,3	10,21 - 10,25
							d	Pertumbuhan Ekonomi	3,90 – 4,23	4,31 – 5,31		d	Pertumbuhan Ekonomi	2,52-2,9	2,73 – 3,67
3	Meningkatnya Peran Kepemimpi -		Indeks Daya Saing Daerah	3,28	4,08	Meningkatnya Peran Kepemimpi -	a	Indeks Daya Saing Daerah	3,31*	4,86*	Meningkatnya Peran Kepemimpi -		Indeks Daya Saing Daerah	2,92	4,36

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Riau 2025-2045				RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045					
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045		
	nan Daerah untuk mencapai Visi Daerah				nan Daerah untuk mencapai Visi Daerah	b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,98 – 59,00*	72,12 - 72,70*	nan Daerah untuk mencapai Visi Daerah				
						c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,30 - 72,36*	79,22 - 79,92*					
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,56	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,5	79,31	
		b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,98 - 59	72,12- 72,70									
		c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,30 - 72,36	79,22- 79,92									
5	Penurunan emisii GRK menuju <i>net zero emission</i>		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	67,98	97,16	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	46,88	97,16	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emisiiion</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,7	79,0	

4.2 MISI KABUPATEN ROKAN HILIR

Misi adalah pernyataan umum yang merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang efektif membantu menguraikan dengan lebih jelas gambaran visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil.

Perwujudan cita-cita pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dua puluh tahun ke depan didasarkan pada delapan landasan transformasi sebagai kekuatan pembangunan daerah. Delapan landasan tersebut melibatkan Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum dan Stabilitas, Ketahanan sosial budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Kesinambungan Pembangunan. Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan langkah penyesuaian antara misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Riau dengan Misi RPJPD Rokan Hilir sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini,

Tabel IV.2
Penyesuaian 8 Misi Pembangunan RPJPN ke dalam
8 Misi Pembangunan RPJPD

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Riau 2025-2045	RPJPD Kabupaten 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas Melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif Dan Ekonomi Hijau	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berbasis pengelolaan Potensi Lokal
3		Transformasi tata kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Teknologi
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Riau 2025-2045	RPJPD Kabupaten 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar kabupaten/kota	Mewujudkan sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Riau Maju melalui Kesenambungan Pembangunan	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyusunan misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir telah diselaraskan dengan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Riau. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara pokok visi dan misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir yang menggambarkan transformasi yang akan dilaksanakan,

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Proses pencapaian visi dan misi pembangunan jangka Panjang daerah membutuhkan penentuan tema dan arah kebijakan sebagai petunjuk strategis untuk setiap tahapan yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sekali selama 20 (dua puluh) tahun. Tema yang telah ditentukan akan dijadikan sebagai landasan sekaligus arahan bagi calon kepada daerah di Kabupaten Rokan Hilir dalam merumuskan visi, misi, dan program politik yang ditawarkan. Tema dan arah kebijakan yang disusun akan dibagi dalam 4 (empat) tahapan setiap 5 (lima) tahun dan diterjemahkan ke dalam sasaran pokok beserta indikator yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai **Rokan Hilir 2045: Negeri Seribu Kubah yang Maju dan Berkelanjutan**. Hal ini diupayakan dengan mewujudkan perubahan ekonomi, sarana dan prasarana infrastruktur, tata kelola pemerintahan, sosial, dan ketahanan ekologi yang terangkum dalam sumber daya Industri sehingga memiliki kemampuan dalam menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, serta berdaya saing dan kreatif. Selain itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang berkelanjutan dengan target tercapainya keseimbangan sosial, ekonomi, tata hukum dan tata kelola serta lingkungan. Selanjutnya, kerangka perencanaan ini akan dilanjutkan dengan penahapan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Rokan Hilir disusun secara terukur dan konsisten untuk mewujudkan kota yang maju dan berkelanjutan. Secara umum proses penahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir akan dijabarkan sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Gambar V.1.

Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir



Untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat menyeluruh mengenai tema pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir, berikut adalah penjelasan untuk setiap tahap yang diakomodir oleh masing-masing tema.

A. Tema Pembangunan I (Tahun 2025-2029) : Pemenuhan Modal Dasar Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir pada periode pertama dimulai dengan pemenuhan modal dasar kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan modal dasar kesejahteraan ini meliputi seluruh aspek pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya pemenuhan ini juga dapat dimaknai dengan melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir.

Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan melalui kebijakan-kebijakan dalam cakupan pemenuhan transformasi ekonomi pada sektor produktif dan unggulan; pemenuhan aksesibilitas pembangunan, sarana dan prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik yang ramah lingkungan; pemantapan sistem merit ASN, kelembagaan efektif, dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, dan penegakan regulasi; peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan; pemenuhan perlindungan sosial yang berkualitas dan adaptif; dan pemerataan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana.

B. Tema Pembangunan II (Tahun 2030-2034) : Percepatan Pembangunan

Tahap selanjutnya adalah percepatan pembangunan yang dapat dimaknai dengan upaya akselerasi untuk meningkatkan pembangunan baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, dan juga kebudayaan. Percepatan pembangunan juga dapat disikapi sebagai upaya strategis agar hasil pembangunan dapat dinikmati dengan lebih cepat. Dengan adanya percepatan pembangunan, maka potensi meningkatnya kesenjangan diharapkan dapat turun dan sebaliknya kesejahteraan dapat meningkat secara lebih cepat. Upaya percepatan ini dapat diketahui dari model-model kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Meski ada semangat untuk melakukan akselerasi, perencanaan yang matang dan struktur tata kelola tetap harus menjadi perhatian utama.

Dalam melaksanakan pembangunan pada periode kedua ini, percepatan pembangunan akan dioptimalisasi melalui upaya-upaya akseleratif seperti penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pemantapan infrastruktur pembangunan yang berkeadilan dan kemudian dilanjutkan dengan mencapai kondisi dengan ASN profesional dan adaptif, kelembagaan suportif kemudahan layanan publik berbasis digitalisasi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya akan dilakukan percepatan pembangunan SDM yang produktif dan kompetitif dan melakukan percepatan pengentasan kemiskinan berlandaskan kehidupan layak dan berkecukupan. Kemudian didukung juga dengan percepatan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan, dan tanggap bencana.

C. Tema Pembangunan III (Tahun 2035-2039) : Ekspansi dan Pemantapan Pembangunan

Tahap ketiga pembangunan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya diberi tema Ekspansi dan pemantapan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan segala upaya untuk memperluas cakupan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta memantapkan komponen pendukung pembangunan daerah. Semangat yang terkandung di dalam tahapan pembangunan periode ketiga ini adalah pemastian untuk menggalakkan

pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan rakyat. Selain itu juga menunjukkan adanya upaya untuk memastikan keberlangsungan pembangunan secara linier.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir difokuskan pada arah kebijakan yang menuju pada ekspansi perekonomian dan industri berbasis sektor unggulan ekonomi kerakyatan; pemantapan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan; peningkatan ASN menjadi kompetitif, kelembagaan tangguh dan kuat, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi-birokrasi, serta masyarakat sipil mandiri; penguatan daya saing SDM yang kompetitif dan berorientasi pada pembangunan SDM unggul dan berbudaya; penguatan masyarakat untuk hidup layak dan berkecukupan; dan pemantapan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana.

D. Tema Pembangunan IV (Tahun 2040-2045) : Rokan Hilir Maju dan Berkelanjutan

Tahap akhir dari pembangunan jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir mengambil tema Rokan Hilir Maju dan Berkelanjutan. Tahap ini akan difokuskan pada perwujudan ekonomi sirkular Rokan Hilir; Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan yang prima; Perwujudan transformasi tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih didukung dengan masyarakat sipil yang partisipatif; SDM Rokan Hilir yang unggul; Perwujudan masyarakat yang Makmur, sejahtera, dan merata; dan perwujudan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana.

Tahap akhir pembangunan jangka panjang ini juga dijadikan sebagai arah pembangunan yang telah terkondisikan secara maksimal. Seluruh aspek pembangunan daerah telah berada pada kondisi penyempurnaan yang didapat dari evaluasi capaian kinerja pembangunan secara komprehensif. Pada tahap akhir ini pulalah, seluruh target yang ditetapkan telah dapat diwujudkan secara optimal dan berada pada kualitas terbaik sebagaimana yang telah dicanangkan pada saat RPJPD disusun.

5.1. ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2045

Arah kebijakan menjadi panduan strategis yang mengarahkan suatu rencana pembangunan dari visi dan misi yang telah ditentukan. Kabupaten Rokan Hilir memiliki visi pembangunan jangka panjang untuk menjadi **Rokan Hilir 2045 : Negeri Seribu Kubah yang Maju dan Berkelanjutan**. Arah kebijakan yang disusun berguna untuk menyelaraskan langkah pembangunan yang terbagi menjadi empat tahap periode pembangunan.

Arah kebijakan Kabupaten Rokan Hilir dirumuskan untuk mencapai misi-misi yang mengarah pada transformasi pembangunan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah pembangunan yang disesuaikan dengan misi Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mencapai visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2045 diperlukan upaya transformatif untuk mencapai arah pembangunan di masa yang akan datang. Keberhasilan transformasi secara menyeluruh memerlukan dukungan dalam bentuk landasan transformasi sebagai faktor penguat. Transformasi di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari transformasi ekonomi, Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum dan stabilitas, Kesenambungan pembangunan, Transformasi sosial, Ketahanan sosial budaya, Ketahanan ekologi.

Transformasi ekonomi berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan daerah, peningkatan kapasitas dan kualitas pertanian, meningkatnya hilirisasi, dan pertumbuhan investasi daerah. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan berfokus pada kualitas pelayanan infrastruktur pembangunan yang merata. Transformasi tata Kelola, supremasi hukum dan stabilitas, dan kesinambungan pembangunan berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang cerdas dan produktif dan menguatnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja. Terakhir ketahanan ekologi berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Kebijakan-kebijakan ini akan diarahkan untuk mendukung transformasi-transformasi sebagaimana yang dijelaskan di atas untuk mencapai visi Rokan Hilir 2045: Negeri Seribu Kubah yang Maju dan Berkelanjutan, yang dapat dijabarkan pada penjelasan berikut.

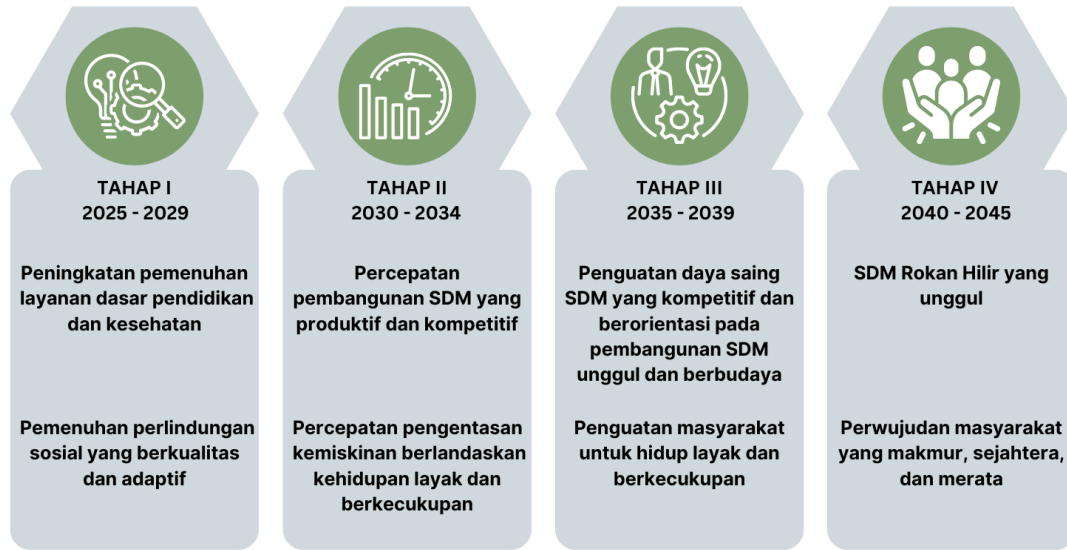
5.1.1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing

Mewujudkan Transformasi sosial yang inklusif dan berdaya saing berkesesuaian dengan upaya mewujudkan agenda ketahanan sosial budaya di Kabupaten Rokan Hilir dapat dimaknai dengan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan mampu mempertahankan kondisi sosial kebudayaan di sekitarnya. Sumber daya manusia yang berkualitas unggul pada arah kebijakan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya mencakup pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta kemiskinan dan perlindungan sosial. Transformasi sosial merupakan upaya suatu daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, sejahtera, dan kohesif. Dalam transformasi sosial, aspek yang diperhatikan adalah manusia sehingga diupayakan adanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan modal manusia dan sosial budaya.

Berdasarkan kepentingan misi keempat di atas, maka untuk dapat mewujudkan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Rokan Hilir disusunlah arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.2.

Arah Kebijakan Misi-1 Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045



Gambar di atas menunjukkan usaha untuk melaksanakan transformasi sosial dan transformasi ketahanan sosial budaya selama 20 (dua puluh) tahun disertai dengan arah kebijakan dan indikator pada masing-masingnya. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan transformasi sosial dan transformasi sosial budaya.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama misi keempat Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”** dan **“Pemenuhan perlindungan sosial yang berkualitas dan adaptif.”** Upaya pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Sementara itu, perlindungan sosial akan dilakukan dengan menekan angka kemiskinan melalui peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pilar utama dalam transformasi sosial dan transformasi ketahanan sosial budaya. Melalui pendekatan yang menyeluruh, Kabupaten Rokan Hilir akan memastikan bahwa setiap individu masyarakat memiliki akses yang setara dan berkualitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas dan kompetensi

tenaga kerja menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing secara nasional dan global.

Sementara itu, perlindungan sosial yang berkualitas dan adaptif menjadi landasan pendukung utama bagi kesejahteraan masyarakat. Strategi yang akan dilakukan adalah dengan menekan angka kemiskinan melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan. Upaya-upaya sejenis ini tidak hanya mampu meredam kemiskinan, tetapi juga dapat membentuk fondasi yang solid untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tahap pertama transformasi sosial ini menggambarkan bagaimana landasan dasar dari komitmen serius pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera ditentukan. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, Kabupaten Rokan Hilir menciptakan sistem layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang baik serta membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kemajuan sosial dan budaya.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua pada misi keempat Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Percepatan pembangunan SDM yang produktif dan kompetitif”** dan **“Percepatan pengentasan kemiskinan berlandaskan kehidupan layak dan berkecukupan”**. Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang berfokus pada akselerasi pembangunan SDM serta memastikan seluruh masyarakat terutama kelompok kurang beruntung memperoleh perlindungan sosial yang adaptif.

Pada tahap ini, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat mengambil langkah-langkah keren untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan kompetitif. Beberapa langkah praktis perlu dilakukan di tahap kedua ini seperti investasi dalam hal pendidikan dan pelatihan. Langkah ini diambil untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global.

Selain itu, tahap kedua ini juga menekankan pada percepatan pengentasan kemiskinan berlandaskan kehidupan layak dan berkecukupan.

Kabupaten Rokan Hilir harus merancang kebijakan yang turut berfokus pada pemberian jaminan kehidupan layak bagi setiap individu. Pemerintah membawa konsep kecukupan dan kesejahteraan ke pusat kebijakan, menciptakan landasan yang solid untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian data yang komprehensif melalui sensus terkait kenaikan atau peningkatan pendapatan masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung arah kebijakan ini di antaranya adalah pemberian perlindungan sosial yang adaptif, terutama bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memastikan bahwa seluruh masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan, dengan percepatan peningkatan kualitas perlindungan sosial sehingga juga memantik upaya adaptif sebagaimana perkembangan dinamika sosial. Selain itu, peningkatan kualitas dari upaya-upaya, program, dan penyusunan regulasi harus dilakukan semakin serius terutama dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan landasan sosial untuk masyarakat yang lebih kuat, berkecukupan, dan menciptakan SDM yang berdaya saing.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga misi keempat di Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Penguatan daya saing SDM yang kompetitif dan berorientasi pada pembangunan SDM unggul dan berbudaya”** dan **“Penguatan masyarakat untuk hidup layak dan berkecukupan”**. Tahap ini merupakan tahap ekspansi pembangunan pada transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya melalui penguatan daya saing SDM serta memastikan adanya pengembangan perlindungan sosial yang adaptif untuk dapat menjalani kehidupan yang layak dan berkecukupan bagi seluruh masyarakat. Penguatan daya saing SDM menjadi landasan untuk mewujudkan masyarakat yang berintegritas, berorientasi pada pembangunan, dan unggul dalam segala aspek.

Tahap ketiga ini juga menitikberatkan pada penguatan masyarakat untuk hidup layak dan berkecukupan yang dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat ekspansif. Kabupaten Rokan Hilir perlu menegaskan tekad untuk memberikan kehidupan layak bagi setiap warganya, mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan kecukupan untuk seluruh lapisan masyarakat. Pemantapan pembangunan dengan hal ini tidak dapat hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi lebih kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga dapat

memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat.

Tahap ketiga menjadi poin puncak penguatan pada transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Rokan Hilir sebelum menuju pada upaya perwujudan seluruh kebijakan pembangunan jangka panjang. Kabupaten Rokan Hilir juga harus memantapkan pemahaman masyarakat terkait penguatan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah dengan memperbanyak program terkait konservasi warisan budaya Rokan Hilir sehingga masyarakat memiliki identitas kebudayaan yang kuat dan dapat menciptakan daya saing yang optimal.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat dalam mewujudkan misi keempat di Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“SDM Rokan Hilir yang unggul”** dan **“Perwujudan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan merata”**. Arah kebijakan dalam tahap keempat ini adalah panduan strategis bagi pencapaian tujuan rencana jangka panjang melalui transformasi sosial dan transformasi sosial budaya di Kabupaten Rokan Hilir.

Fokus pertama dalam tahap terakhir pembangunan jangka panjang ini yaitu "SDM Rokan Hilir yang unggul" mencerminkan perwujudan terkait peran sumber daya manusia dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan daerah. Standar keunggulan SDM tidak hanya berkaitan dengan aspek keterampilan dan pengetahuan saja, namun keunggulan SDM juga berkaitan dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks ini, kebijakan untuk menciptakan landasan yang memadukan kemajuan teknologi dengan kearifan lokal akan menciptakan SDM yang tidak hanya tangguh di era modern tetapi juga tetap terhubung dengan akar budayanya sendiri.

Fokus kedua dalam tahap akhir ini yaitu "Perwujudan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan merata" adalah target kunci untuk menunjukkan peran aktif pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menciptakan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Capaian kinerja yang akan ditunjukkan akan terlihat pada ketepatan strategi dalam mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati hasil pembangunan.

Secara konseptual, misi keempat yang bersesuaian dengan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya dapat dipahami sebagai ukuran serta fondasi utama yang membentuk karakter seiring dengan identitas daerah. Selain sebagai arah pembentukan kebijakan, identitas budaya di Kabupaten Rokan Hilir juga bertujuan untuk mewujudkan visi pemerintah yang terhubung dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, Rokan Hilir perlu untuk dapat menginternalisasi ide mengenai nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas sembari mewujudkan kesejahteraan ekonomis.

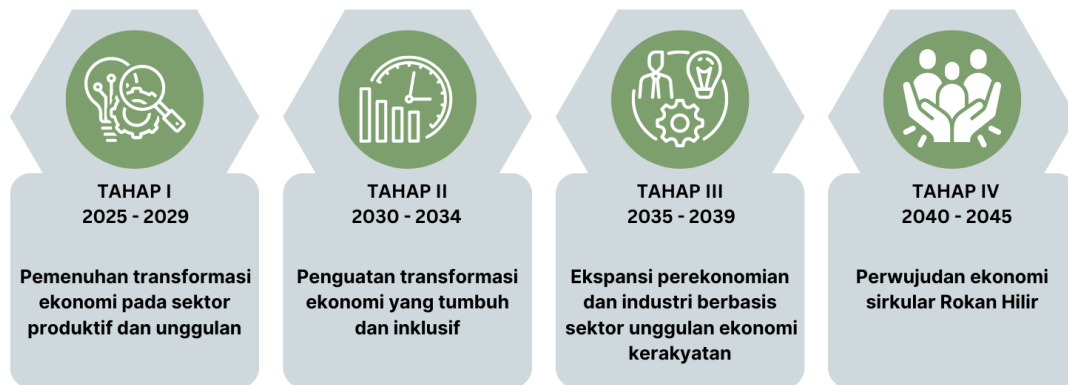
5.1.2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Pengelolaan Potensi Lokal

Transformasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai pertumbuhan pada bidang ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dapat memberikan perubahan yang fundamental dalam struktur perekonomian suatu daerah.

Dalam mewujudkan transformasi ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir, diperlukan pemastian bahwa proses perubahan struktural pada bidang ekonomi bergerak secara terus menerus. Transformasi ini dimulai dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas yang cenderung rendah menuju sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi. Dengan demikian, maka arah kebijakan untuk transformasi ekonomi adalah sebagaimana yang dituangkan dalam gambar berikut.

Gambar V.3.

Arah Kebijakan Misi-2 Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045



Berdasarkan gambar di atas, transformasi ekonomi yang akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan transformasi ekonomi.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama transformasi ekonomi Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Pemenuhan transformasi ekonomi pada sektor produktif dan unggulan”**. Arah kebijakan ini mengacu pada usaha pemerintah daerah untuk memajukan dan mengubah struktur ekonomi di Rokan Hilir dengan memberikan fokus pada sektor-sektor tertentu yang dianggap produktif dan unggulan. Arah pembangunan tahap pertama dari transformasi ekonomi ini dapat mencakup berbagai langkah strategis seperti peningkatan daya saing, produktivitas, dan inovasi dalam sektor-sektor yang dianggap kunci di Rokan Hilir.

Pada tahap pertama ini upaya-upaya strategis akan dimulai dari pembuatan regulasi yang jelas terkait investasi berbentuk penelitian dan pengembangan di bidang teknologi. Selain itu, pemastian bahwa infrastruktur yang akan berhubungan dengan transformasi ekonomi harus sudah disiapkan. Begitu pula untuk mendukung pelaksanaan regulasi dan efektivitas pengadaan infrastruktur, keterampilan tenaga kerja harus dipikirkan secara seksama. Dalam tataran praktisnya, tahap pertama dari transformasi ekonomi ini memerlukan upaya penjemputan antar UMKM di Rokan Hilir dengan jaringan yang bersifat global.

Meletakkan lokus permulaan pada sektor produktif dan unggulan bertujuan untuk menjadi inisiator yang pada kesempatan selanjutnya akan

dijadikan standar bagi pengembangan sektor non unggulan dan masih kurang produktif. Selain itu, memajukan desa melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Pemerintah dapat mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis lokal dengan memberikan akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan keterampilan, serta pendampingan manajemen usaha. Penguatan koperasi desa sebagai wadah ekonomi bersama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur desa juga perlu ditingkatkan untuk mendukung distribusi hasil produksi, baik melalui perbaikan jalan, penyediaan teknologi, maupun akses digital yang lebih luas. Dengan demikian sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan menjadi proyek-proyek awal yang dikembangkan dalam rentang waktu dari tahun 2025-2029.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua transformasi ekonomi Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Penguatan transformasi ekonomi yang tumbuh dan inklusif”**. Tahap kedua ini merupakan tahapan percepatan pembangunan untuk transformasi ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melakukan identifikasi atas perkembangan potensi-potensi unggulan di berbagai sektor ekonomi lokal pada tahap sebelumnya. Pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian, pariwisata berbasis komunitas, serta industri kreatif yang melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, perlu adanya dukungan dalam bentuk kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar produk desa. Melalui program-program intensif, pemerintah daerah dapat mendorong terjadinya inovasi dan peningkatan efisiensi dalam sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa aspek pendukung penting dalam arah kebijakan ini adalah penguatan infrastruktur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Membuka peluang baru bagi investasi dalam pengembangan fasilitas transportasi, energi, dan telekomunikasi menjadi prioritas perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus barang dan jasa serta mendukung konektivitas yang efektif di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Langkah-

langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi sektor-sektor ekonomi lokal yang potensial untuk berkembang dan bersaing secara lebih baik.

Untuk merangsang sumber pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan tenaga kerja harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Program pelatihan dan pendidikan disusun untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor yang diidentifikasi sebagai potensi pertumbuhan. Upaya peningkatan sumber daya manusia akan menunjang terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini juga akan mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk kelompok yang rentan secara ekonomi.

Melalui program-program inklusif, seperti pemberian kredit mikro untuk usaha kecil, pelatihan keterampilan bagi pekerja berpendapatan rendah, dukungan untuk sektor informal, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi naik pada rentang tahun 2030-2034. Penguatan ekonomi yang tumbuh dan inklusif bukan hanya tentang pertumbuhan nilai atau indikator dalam bentuk angka saja, akan tetapi juga mendorong terciptanya dampak sosial positif untuk pemerataan manfaat ekonomi dan menghadirkan fondasi ideal bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga transformasi ekonomi Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Ekspansi perekonomian dan industri berbasis sektor unggulan ekonomi kerakyatan”**. Tahap ketiga ini merupakan bentuk tahapan transformasi ekonomi untuk ekspansi dan pemantapan transformasi ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan istilahnya, ekspansi ekonomi adalah kondisi yang mencerminkan peningkatan kegiatan ekonomi dan ketersediaan barang serta jasa secara makro. Pada dasarnya, ekspansi ekonomi di daerah akan terlihat dari pertumbuhan nyata PDRB. Proses ekspansi ekonomi sering kali menyertai peningkatan produksi dan optimalisasi penggunaan sumber daya di suatu daerah. Bagi Rokan Hilir, pemulihan ekonomi dan upaya memakmurkan masyarakat dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang menjadi fase-fase

yang menggambarkan pemantapan ekonomi pada tingkat kegiatan yang lebih tinggi.

Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memantapkan pemahaman yang didasarkan kepada kebutuhan daerah. Pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan produksi dan pemanfaatan sumber daya dengan memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di sektor-sektor baru yang dianggap potensial dan sektor-sektor sebelumnya yang telah berhasil membuktikan diri. Upaya ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga memberikan dorongan kepada pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan bersaing dalam skala yang lebih besar.

Industri daerah di Kabupaten Rokan Hilir harus diberikan peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi kerakyatan kabupaten. Penguatan industri perlu dipastikan oleh pemerintah sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Keterlibatan industri dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan secara konsisten atas keterampilan tenaga kerja lokal akan menciptakan dampak positif. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan ini tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi juga menghubungkan dengan semangat berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang di Rokan Hilir.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat transformasi ekonomi Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Perwujudan ekonomi sirkular Rokan Hilir”**. Tahapan keempat pada transformasi ekonomi ini mendorong perwujudan visi untuk Rokan Hilir Maju dan Berkelanjutan pada tahun 2045. Arah kebijakan ini mengindikasikan adanya pencapaian atas sebuah sistem dengan tingkat efektivitas tinggi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Kebijakan ini dipandang sangat strategis karena dapat meminimalisir kerusakan sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi.

Perwujudan ekonomi sirkular di Rokan Hilir bermakna adanya pergeseran paradigma dalam ekonomi yaitu dengan penekanan kuat pada penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir perlu untuk menyeimbangkan antara tendensi eksploitatif dari ekonomi dengan semangat keberlanjutan di dalam lingkungan hidup.

Beberapa langkah penting dapat diadaptasi oleh Rokan Hilir, seperti pengubahan model linier dari ekonomi tradisional menjadi suatu sistem adaptif di mana produk dan material dapat diolah kembali dan digunakan kembali. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengefisiensikan sumber daya dan sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Harapannya, investasi yang diberikan pada infrastruktur dan teknologi berkontribusi secara jangka panjang, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin menyadari pentingnya keberlanjutan, perwujudan ekonomi sirkular tidak hanya menjadi inisiatif bisnis yang inovatif tetapi juga strategi ekonomi yang tepat. Kebijakan ini menimbulkan tantangan baru terkait transformasi ekonomi berupa perubahan model bisnis konvensional menjadi ekonomi sirkular. Perwujudan ekonomi sirkular di Rokan Hilir adalah target yang sangat cocok untuk menyukseskan transformasi ekonomi pada tahun 2045. Dengan perpaduan antara analisis ekonomi yang cermat dan kesadaran terhadap dampak lingkungan, perwujudan ekonomi sirkular menawarkan potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, dan menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Keberhasilan implementasi ekonomi sirkular akan menjadi cerminan dari komitmen kolektif untuk menuju jalan menuju masa depan Rokan Hilir yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan.

5.1.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Teknologi

Mewujudkan transformasi tata kelola, transformasi supremasi hukum, dan transformasi kesinambungan pembangunan memungkinkan adanya pengelolaan sektor pemerintahan dan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel yang didasarkan atas pertukaran informasi yang lebih terbuka dan transparan. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pelayanan terhadap publik yang lebih optimal dan munculnya regulasi yang adaptif.

Dalam mewujudkan misi ketiga ini yang berkesesuaian dengan transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir, disusunlah arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.4.

Arah Kebijakan Misi-3 Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045



Berdasarkan gambar di atas, transformasi tata kelola; mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas, dan mewujudkan kesinambungan pembangunan akan menjadi acuan utama dan sekaligus mencakup transformasi pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan tata kelola.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum dan stabilitas, dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Pemantapan sistem merit ASN, Kelembagaan efektif, dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, dan penegakan regulasi”**. Tahap pertama ini merupakan tahapan pembuatan fondasi transformasi tata kelola di Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahap ini pulalah dilakukan upaya untuk mengumpulkan persoalan-persoalan mendasar dan sekaligus mengatasinya sebagai hal yang mendasar.

Dalam tahap ini, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan berfokus pada implementasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan melakukan perbaikan struktural serta menginisiasi sistem kolaborasi yang efektif. Pemantapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama, yaitu dengan menciptakan landasan-landasan yang sehat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Selain itu, upaya dalam digitalisasi pelayanan publik menjadi tonggak menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Pada tahap pertama dalam mewujudkan kondusivitas wilayah yang demokratis di Kabupaten Rokan Hilir akan diarahkan pada **“Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis”**. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis memerlukan strategi holistik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, penegakan hukum yang adil dan efektif harus diperkuat untuk memastikan keamanan dan melindungi hak-hak warga, serta mengurangi potensi terjadinya konflik. Kedua, upaya untuk menciptakan dialog terbuka dan inklusif antara berbagai kelompok sosial dan politik dapat memperkuat rasa persatuan dan mencegah ketegangan. Ketiga, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Terakhir, mengedepankan pendidikan dan program-program komunitas yang mempromosikan toleransi dan pengertian bersama juga penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Dengan pendekatan yang terintegrasi, wilayah dapat menjadi tempat yang aman, damai, dan demokratis, mendukung kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Tahap pertama ini juga menjadi momentum penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menegatkan penegakan regulasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi persoalan mendasar di bidang tata kelola, hukum, dan regulasi pembangunan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan memastikan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya menjadi slogan saja. Tahap pertama ini merupakan upaya dari Rokan Hilir untuk membuka jalan menuju era baru yang dipandu oleh tata kelola pemerintahan yang kokoh dan inklusif.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“ASN Profesional dan adaptif, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik berbasis digitalisasi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan”**. Tahap kedua ini merupakan tahapan percepatan transformasi tata kelola di Kabupaten Rokan Hilir.

Pemantapan sistem merit ASN tidak hanya menjadi tujuan, melainkan landasan utama bagi tahap kedua ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melihat ASN sebagai kekuatan utama yang menggerakkan mesin pelayanan publik. Dengan meningkatkan profesionalisme dan adaptabilitas ASN, tahap ini menciptakan fondasi yang solid untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan kebijakan yang berdampak positif.

Kelembagaan yang suportif juga akan dijadikan fokus dalam tahap ini. Reformasi pada aspek kelembagaan tidak hanya sebatas restrukturisasi, tetapi juga melibatkan kolaborasi yang efektif antara berbagai sektor pemerintahan. Selanjutnya digitalisasi layanan publik menjadi dorongan bagi keterhubungan yang semakin erat antara pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan yang lain. Kemudahan layanan berbasis teknologi bukan hanya mengefisienkan proses administratif, tetapi juga membuka pintu partisipasi publik yang lebih besar. Dalam konteks ini, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi suatu realitas yang tercapai, seiring dengan transparansi yang semakin ditingkatkan. Secara teknis, tahap kedua ini bukan sekadar kelanjutan dari tahap sebelumnya, namun juga penyumbang bagi momentum baru dalam perjalanan Kabupaten Rokan Hilir menuju tata kelola pemerintahan yang mantap dan adaptif.

Pada tahap kedua dalam mewujudkan kondusivitas wilayah yang demokratis di Kabupaten Rokan Hilir akan diarahkan pada **“Percepatan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis”**. Percepatan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis dapat dicapai melalui serangkaian langkah strategis dan terkoordinasi. Pertama, penguatan penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak, serta peningkatan kapasitas aparat keamanan, akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan

masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kedua, promosi dialog dan rekonsiliasi antar kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk melalui forum-forum terbuka dan program mediasi, akan mengurangi ketegangan dan membangun kohesi sosial. Ketiga, perbaikan dan transparansi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum, pengawasan anggaran, dan partisipasi publik, akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Keempat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi politik dan sosial masyarakat, memperkuat pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Dengan langkah-langkah ini, wilayah dapat mencapai kondisi yang lebih stabil, harmonis, dan demokratis dengan lebih cepat.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“ASN kompetitif, kelembagaan tangguh dan kuat, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi-birokrasi, serta masyarakat sipil mandiri.”** Tahap ketiga ini merupakan tahap transformasi tata kelola, supremasi hukum, dan kesinambungan pembangunan dalam rangka mendukung ekspansi industri unggulan di Kabupaten Rokan Hilir, dan juga menekankan pada kemandirian masyarakat sipil.

Tahap ketiga menjadi simbol transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih kompleks. Menghadirkan ASN yang lebih kompetitif menjadi langkah kunci, menggugah semangat persaingan sehat di antara mereka untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kelembagaan yang tangguh dan kuat menjadi fondasi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah agar memiliki daya tahan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Tahap ini juga diarahkan untuk memberikan kepuasan layanan publik yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga menempatkan pengalaman masyarakat sebagai prioritas. Langkah-langkah inovatif dalam penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi kunci utama dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan. Selanjutnya tahap ketiga menitikberatkan pada kemandirian masyarakat sipil. Pemerintah tidak hanya menjadi penggerak utama, tetapi juga

memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk turut serta sebagai agen perubahan.

Pada tahap ketiga dalam mewujudkan kondusivitas wilayah yang demokratis di Kabupaten Rokan Hilir akan diarahkan pada **“Penguatan stabilitas ekonomi makro dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif”**. Penguatan stabilitas ekonomi makro adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan beberapa langkah strategis dapat diambil untuk mencapai tujuan ini. Pertama, pengelolaan fiskal yang adaptif dengan memastikan anggaran yang seimbang, mengendalikan utang, dan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah akan mengurangi risiko inflasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Kedua, penegakan kebijakan moneter yang stabil, termasuk pengendalian suku bunga dan inflasi yang konsisten, akan menciptakan lingkungan yang lebih prediktif dan aman bagi investasi. Ketiga, perbaikan dalam infrastruktur ekonomi seperti sistem transportasi, energi, dan komunikasi akan mendukung efisiensi bisnis dan mengurangi biaya operasional. Keempat, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berbisnis, akan mengurangi hambatan bagi investor dan meningkatkan daya tarik daerah. Terakhir, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja akan memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan langkah-langkah ini, stabilitas ekonomi makro dapat ditingkatkan, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tahap ketiga ini adalah tahap yang menentukan landasan bagi pengembangan tahap keempat pembangunan jangka panjang Rokan Hilir. Upaya mengolaborasi Dengan menggabungkan kompetensi ASN, kelembagaan yang kuat, pelayanan publik yang memuaskan, dan kemandirian masyarakat, Kabupaten Rokan Hilir siap memasuki era baru yang dipandu oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan adaptif Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih didukung**

dengan masyarakat sipil yang partisipatif". Tahap keempat transformasi tata kelola mendukung perwujudan visi Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2045.

Tahap keempat dalam mewujudkan seluruh transformasi yang berkesesuaian dengan misi ketiga ini merupakan puncak dari serangkaian upaya transformasi tata kelola pemerintahan. Pemantapan aspek kebersihan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi landasan utama, menciptakan lingkungan di mana supremasi hukum dan moralitas dijadikan sebagai landasan utama. Sementara itu akuntabilitas pemerintahan direncanakan berkolaborasi dengan masyarakat umum agar aspirasi yang diberikan langsung tereksekusi dengan baik.

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang dalam mewujudkan kondusivitas wilayah yang demokratis di Kabupaten Rokan Hilir akan diarahkan pada **"Perwujudan pembangunan yang demokratis, aman dan menjunjung tinggi hukum"**. Perwujudan pembangunan yang demokratis, aman, dan menjunjung tinggi hukum memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, implementasi prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus dijadikan landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum konsultasi dan mekanisme partisipasi yang efektif untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka terakomodasi.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Hal ini melibatkan penguatan lembaga peradilan dan penegak hukum, memastikan proses hukum yang tidak memihak, serta memerangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur dan kapasitas institusi yang mendukung keamanan dan stabilitas adalah penting. Ini termasuk investasi dalam sistem keamanan yang efektif, pemeliharaan infrastruktur publik yang memadai, dan peningkatan kapasitas aparat keamanan untuk mencegah dan menangani potensi ancaman. Dengan mengintegrasikan prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas institusi, pembangunan dapat diwujudkan dengan cara yang adil, aman, dan menghormati hukum, serta memastikan kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Dari segi tata kelola pemerintahan yang memiliki aspek pemastian atas keberlanjutan pembangunan, tahap keempat ini menjadi kunci untuk merancang dan mewujudkan masa depan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Kemakmuran bersama dan kesejahteraan umum secara berkeadilan adalah jalan utama yang harus ditempuh oleh Rokan Hilir. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan harus dimaknai oleh baiknya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya akan diukur dari aspek teknis, melainkan juga dari tingkat partisipatif dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat kepada pemerintah.

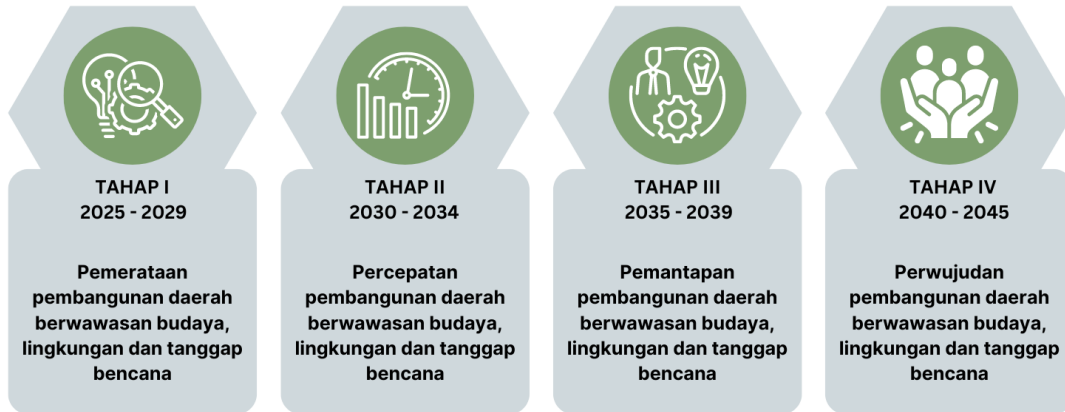
5.1.4 Mewujudkan Ketahanan Ekologi

Untuk dapat mewujudkan misi kelima, upaya-upaya mewujudkan ketahanan ekologi akan dijadikan sebagai poin sentral dalam pembentukan dinamika wilayah di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam perspektif ini, ketahanan ekologi mencerminkan kemampuan wilayah untuk bertahan dan berkembang menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan lingkungan, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah. Kabupaten Rokan Hilir memandang ketahanan ekologi sebagai elemen kunci yang memerlukan upaya kolektif dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian ekosistem.

Arah kebijakan yang dirancang mencerminkan kesadaran terhadap kompleksitas ketahanan ekologi. Fokusnya pada keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui kebijakan berbasis transformasi ketahanan ekologi ini, Kabupaten Rokan Hilir diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat dari ekosistem, sembari menjaga dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Berikut ini adalah kerangka dari transformasi ketahanan ekologi berkaitan dengan arah kebijakan dan indikator pada masing-masing tahapan.

Gambar V.5.

Arah Kebijakan Misi-4 Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045



Berdasarkan gambar di atas, misi kelima menjadi acuan utama dan sekaligus mencakup ketahanan ekologi selama 20 (dua puluh) tahun. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan ketahanan ekologi di Kabupaten Rokan Hilir.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama dalam mewujudkan misi kelima di Kabupaten Rokan Hilir akan diarahkan pada **“Pemerataan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana”**. Arah kebijakan pada tahap ini menunjukkan efektivitas interaksi antara lingkungan dan tanggap bencana. Upaya tahap awal yang harus dilakukan demi mencapai Indonesia Emas adalah memastikan telah terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh bagian daerah.

Arah kebijakan ini akan menciptakan kesadaran bahwa ketahanan ekologi tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kondisi lingkungan lokal. Oleh karena itu, langkah awal dalam mencapai Indonesia Emas adalah memastikan bahwa setiap masyarakat dan wilayah mendapatkan bagian yang adil dalam pembangunan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan keunikan dari kebudayaan setempat. Selain itu, arah kebijakan ini memerlukan kesiapan Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi tantangan pada potensi bencana. Dengan memasukkan aspek tanggap bencana ke dalam pemerataan pembangunan, Kabupaten Rokan Hilir mengakui pentingnya menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha meminimalkan ketidaksetaraan dalam dampak bencana

dengan memastikan seluruh wilayah memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menghadapi dan merespons situasi darurat.

Upaya tahap awal ini juga memberikan landasan bagi integrasi nilai-nilai budaya dan perlindungan lingkungan dalam kebijakan pembangunan pada tahap pembangunan jangka panjang selanjutnya. Pemahaman menyeluruh dalam tahap awal ini akan menunjukkan arah pembangunan yang mengakomodasi keanekaragaman budaya dan ketahanan terhadap risiko bencana. Harapan yang dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya adalah langkah pembangunan yang positif dalam bentuk pemerataan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua dalam mewujudkan misi kelima pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Percepatan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana”**. Tahap kedua yang berkesesuaian dengan arah kebijakan mewujudkan ketahanan ekologi adalah upaya percepatan atau akselerasi pembangunan berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana. Upaya-upaya yang diandaikan adalah masyarakat akan dapat melakukan promosi budaya melalui pengembangan pusat budaya sebagai destinasi wisata yang di dalamnya melibatkan partisipasi seluruh pihak.

Arah kebijakan tahap kedua ini mencerminkan strategi yang progresif dalam mencapai ketahanan ekologi. Fokus pada percepatan pembangunan dengan memperhatikan budaya dan lingkungan menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya melihat pertumbuhan fisik tetapi juga dampaknya terhadap aspek budaya dan khususnya lingkungan. Pengembangan pusat budaya sebagai sumber yang bernilai ekonomis dan berdaya saing seperti destinasi wisata menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan kekayaan budaya lokal, mempromosikannya kepada masyarakat luas, dan sekaligus menciptakan sinergi dengan pembangunan pada sektor lain.

Kebijakan pada tahap ini mencerminkan peran masyarakat berbasis kewilayahan untuk merangsang pembangunan berkelanjutan. Sudut pandang yang ditawarkan dalam hal ini adalah penciptaan peluang untuk mendiversifikasi ekonomi lokal melalui sektor pariwisata, sambil menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek

tanggap bencana, Rokan Hilir menekankan perlunya kesiapan dan respons cepat masyarakat dalam menghadapi bencana. Langkah penting dan strategis sekaligus memiliki tantangan dalam membangun kesadaran dan keterampilan tanggap bencana akan membutuhkan keterlibatan seluruh komunitas memperkuat ketahanan ekologi.

Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk menciptakan integrasi ketahanan ekologi dengan pembangunan berwawasan budaya dan tanggap bencana. Upaya percepatan pembangunan dalam konteks ini bukan hanya sekadar pertumbuhan kesejahteraan fisik yang cepat tetapi juga pembangunan yang seimbang kualitasnya terkait nilai-nilai budaya dan lingkungan secara lestari. Kualitas yang dimaksud adalah pengintegrasian cara pikir dan perspektif daerah dalam menghadapi kerentanan bencana dengan melibatkan peningkatan wawasan lingkungan.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga dalam mewujudkan Misi Kelima RPJPD Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Pemantapan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana.”** Arah kebijakan pada tahap III ini berkaitan dengan pemantapan konstruksi dari transformasi yang akan dilakukan yaitu melalui upaya-upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat yang terintegrasi dengan lingkungan untuk menghadapi kerentanan potensi bencana.

Perhatian pembangunan pada aspek-aspek yang bernilai abstrak, seperti nilai budaya dan keseimbangan ekologi adalah suatu upaya strategis dan tingkat tinggi dalam pembangunan. Langkah ini mencerminkan bahwa bagi Kabupaten Rokan Hilir dipahami bahwa ketahanan sosial budaya dan ekologi tidak dapat dicapai tanpa pemantapan struktural dan konseptual. Dengan demikian, pemantapan pembangunan perlu diarahkan untuk menciptakan ketangguhan masyarakat terhadap potensi bencana melalui konservasi lingkungan. Program-program yang akan dilaksanakan dimulai dari pembangunan ketangguhan masyarakat yang melibatkan edukasi, pelibatan, dan penguatan kapasitas untuk merespons dengan cepat dan efektif dalam menghadapi potensi bencana.

Dalam pandangan yang lebih luas, tahap ini mengkonfirmasi bahwa Kabupaten Rokan Hilir bukan hanya tentang menghasilkan perubahan cepat,

tetapi juga tentang memastikan bahwa perubahan tersebut memiliki keberlanjutan yang melibatkan seluruh masyarakat. Dengan pemantapan pembangunan ini, Kabupaten Rokan Hilir akan memastikan bahwa transformasi ekologis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya tidak hanya menjadi pencapaian singkat tetapi menjadi fondasi yang kokoh untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh komunitas secara berkelanjutan hingga tahun 2045.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat dalam mewujudkan misi kelima pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Perwujudan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana.”** Arah kebijakan dalam tahap keempat ini adalah panduan strategis bagi pencapaian tujuan rencana jangka panjang melalui ketahanan ekologi di Kabupaten Rokan Hilir.

Analisis tahap keempat ini menunjukkan bahwa kebijakan diarahkan untuk menjadi panduan strategis bagi pencapaian tujuan rencana jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan budaya dan lingkungan. Tujuan dari arah pembangunan ini adalah mewujudkan kondisi ketangguhan atau ketahanan daerah yang tinggi ini, dengan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan akan membawa Rokan Hilir lebih dekat kepada realisasi visi dan misi jangka panjang daerah dan juga menyokong capaian visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Selanjutnya, kebijakan ini diarahkan untuk menunjukkan pemahaman dan perspektif daerah dalam mengatasi persoalan budaya dan lingkungan dalam transformasi ekologi. Faktor-faktor seperti identitas daerah, keseimbangan komponen lingkungan hidup, dan penciptaan ketahanan daerah terhadap potensi bencana adalah seluruh rangkaian penting bagi ketahanan ekologi. Tingkat ketercapaian dari transformasi ini akan menunjukkan kualitas kepedulian Rokan Hilir dalam mencapai tujuan jangka panjang yang seimbang, sembari mempromosikan nilai-nilai budaya, dan meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap potensi bencana. Capaian pada transformasi ini juga akan menjadi dasar penyusunan perencanaan jangka panjang periode selanjutnya.

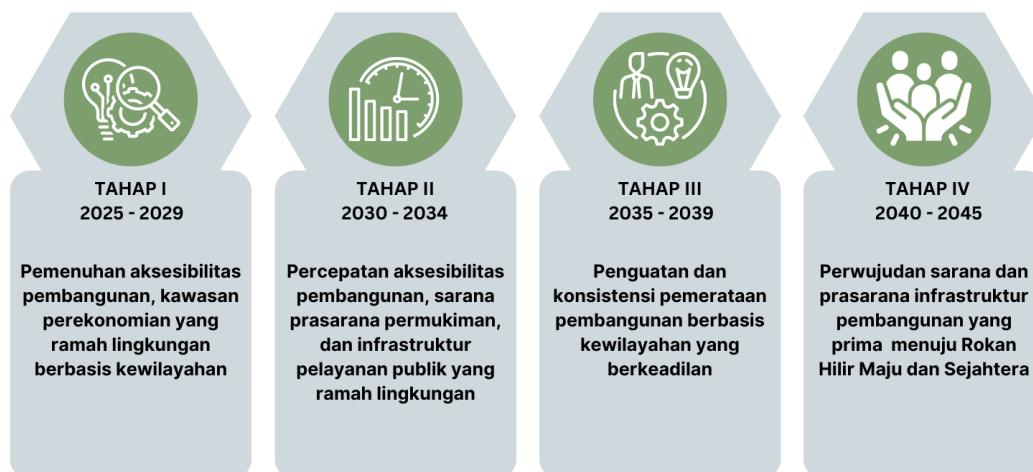
5.1.5 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Transformasi Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan Sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat umum dan sekaligus menekan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Transformasi ini akan diarahkan kepada perwujudan infrastruktur publik yang memiliki kualitas terbaik. Langkah ini juga akan diarahkan kepada pencapaian pembangunan fisik yang tetap mengedepankan semangat daur ulang dan menghindari penciptaan sampah baru di Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan transformasi di bidang sarana dan prasarana, akan difokuskan kepada kepuasan masyarakat yang menandakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka untuk dapat mewujudkan misi kedua yang berkesesuaian dengan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan transformasi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Rokan Hilir disusunlah arah kebijakan sebagai berikut.

Gambar V.6.

Arah Kebijakan Misi-5 Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045



Gambar di atas menunjukkan usaha untuk melaksanakan transformasi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan & transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan selama 20 (dua puluh) tahun disertai dengan arah kebijakan dan indikatornya. Berikut adalah rincian penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode untuk arah kebijakan transformasi ini.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama misi kedua di Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Pemenuhan aksesibilitas pembangunan, kawasan perekonomian yang ramah lingkungan berbasis kewilayahan”**. Arah kebijakan ini mencerminkan adanya upaya untuk memunculkan kesadaran akan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas. Dalam konteks ini, Kabupaten Rokan Hilir juga penekanan secara khusus keberlanjutan lingkungan sebagai komitmen terhadap pengembangan yang ramah lingkungan.

Kebijakan ini akan dilakukan dengan langkah-langkah kebijakan strategis mencakup peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di kawasan perekonomian. Selanjutnya memastikan bahwa lingkungan fisik dapat mendukung kegiatan ekonomi dengan optimal. Infrastruktur perhubungan dalam mendukung aksesibilitas terhadap kawasan perekonomian harus berorientasi pada pemerataan dan peningkatan konektivitas antarwilayah dengan memperbaiki jaringan transportasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, agar arus barang dan jasa lebih efisien serta dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan juga penting untuk mendukung mobilitas tenaga kerja serta mengurangi kemacetan di pusat-pusat ekonomi. Digitalisasi dalam sistem transportasi, seperti penggunaan teknologi cerdas untuk pengelolaan lalu lintas dan logistik, juga harus diterapkan guna meningkatkan efisiensi.

Infrastruktur pelayanan publik juga akan mendapatkan perhatian serupa untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pengembangan kawasan perekonomian dan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penguatan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi lokal dan memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua transformasi pembangunan kewilayahan dan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Percepatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, dan infrastruktur pelayanan**

publik yang ramah lingkungan”. Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan dan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur dan melengkapi apa yang telah dicanangkan pada tahap I. Asumsi dari kebijakan ini diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kesamaan hak untuk menikmati sarana publik. Tahap ini menargetkan transformasi lanjutan dalam pembangunan, mengarah pada visi menyeluruh yang mencakup kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan.

Kebijakan yang akan dijalankan ini dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan sosial melalui upaya pemerintah dalam mengatasi disparitas dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan. Kesetaraan akses terhadap sarana publik menjadi fondasi utama, menciptakan landasan yang adil dan inklusif untuk pertumbuhan bersama.

Langkah-langkah percepatan yang akan dilaksanakan diarahkan pada pemastian aksesibilitas pembangunan dasar, pembenahan sarana permukiman, pengembangan kawasan perekonomian, dan penyempurnaan infrastruktur pelayanan publik. Pada tahap kedua ini, Kabupaten Rokan Hilir menegaskan peran strategisnya dalam merangkul masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan infrastruktur perhubungan dalam mendukung percepatan pembangunan harus berfokus pada penguatan konektivitas dengan membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata agar akses ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik semakin mudah. Selain itu, modernisasi sistem transportasi dengan pemanfaatan teknologi cerdas serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan juga menjadi kunci untuk menciptakan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Penyediaan akses transportasi yang cepat dan terjangkau akan mempercepat arus barang, jasa, serta tenaga kerja, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Untuk menandai proses evaluasi yang menyeluruh, keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menegaskan terjadinya percepatan

transformasi dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana publik di Kabupaten Rokan Hilir.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan berkelanjutan dan transformasi sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Penguatan dan konsistensi pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan”**. Tahap ini merupakan tahap ekspansi dan pemantapan pada transformasi ini yang telah berhasil dilaksanakan pada tahap I dan II serta memastikan adanya pengembangan kepada lingkungan hidup.

Tahap ini tidak hanya berfokus pada pemantapan aspek teknis pembangunan pada segi kualitasnya, akan tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan standar kelayakan kualitas lingkungan hidup. Upaya pemastian ini secara sosial juga akan membuktikan keseriusan Rokan Hilir dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian alam. Seluruh *stakeholders* akan dilibatkan secara intens dalam upaya pemantapan ini. Penyeimbangan antara kebutuhan infrastruktur yang pada satu sisi akan menggerus kualitas alam, dengan konservasi lingkungan hidup di sisi lain yang menahan laju eksploitasi adalah langkah yang sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2045.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap keempat transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada **“Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan yang prima menuju Rokan Hilir Maju dan Sejahtera”**. Tahap ini merupakan tahapan akhir dari transformasi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2045. Oleh karena itu, tahapan ini memastikan terwujudnya rangkaian perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir.

Fokus utama tahap ini adalah memastikan bahwa setiap elemen infrastruktur tidak hanya memenuhi standar kualitas tertinggi, tetapi juga secara holistik telah mendapatkan seluruh fondasi pembangunan di Rokan Hilir. Pada tahap

ini, upaya pemerintah akan diarahkan pada perwujudan perencanaan jangka panjang yang menyokong visi Indonesia Emas 2045. Tahap keempat ini tidak hanya mencerminkan ketertiban teknis dalam pembangunan sarana prasarana, melainkan juga menjadi landasan untuk mengembangkan konsepsi pembangunan jangka panjang para periode berikutnya. Selain itu, pada tahap terakhir ini Kabupaten Rokan Hilir sudah dapat menyajikan data-data pencapaian untuk seluruh perencanaan jangka panjang yang ditandai dengan telah berhasilnya pembangunan fisik di Rokan Hilir.

Tabel V.1

Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045

VISI	MISI	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Rokan Hilir 2045: Negeri Seribu Kubah yang Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Percepatan pembangunan SDM yang produktif dan kompetitif	Penguatan daya saing SDM yang kompetitif dan berorientasi pada pembangunan SDM unggul dan berbudaya	SDM Rokan Hilir yang unggul
		Pemenuhan perlindungan sosial yang berkualitas dan adaptif	Percepatan pengentasan kemiskinan berlandaskan kehidupan layak dan berkecukupan	Penguatan masyarakat untuk hidup layak dan berkecukupan	Perwujudan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan merata
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Pengelolaan Potensi Lokal	Pemenuhan transformasi ekonomi pada sektor produktif dan unggulan	Penguatan transformasi ekonomi yang tumbuh dan inklusif	Ekspansi perekonomian dan industri berbasis sektor unggulan ekonomi kerakyatan	Perwujudan ekonomi sirkular Rokan Hilir
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Teknologi	Pemantapan sistem merit ASN, Kelembagaan efektif, dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, dan penegakan regulasi	ASN Profesional dan adaptif, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik berbasis digitalisasi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan	ASN kompetitif, kelembagaan tangguh dan kuat, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi-birokrasi, serta masyarakat sipil mandiri	Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih didukung dengan masyarakat sipil yang partisipatif
		Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Percepatan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Penguatan stabilitas ekonomi makro dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Perwujudan pembangunan yang demokratis, aman dan menjunjung tinggi hukum

VISI	MISI	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
	Mewujudkan Ketahanan Ekologi	Pemerataan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana	Percepatan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana	Pemantapan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana	Perwujudan pembangunan daerah berwawasan budaya, lingkungan dan tanggap bencana
	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pemenuhan aksesibilitas pembangunan, kawasan perekonomian yang ramah lingkungan berbasis kewilayahan	Percepatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, dan infrastruktur pelayanan publik yang ramah lingkungan	Penguatan dan konsistensi pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan	Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan yang prima menuju Rokan Hilir Maju dan Sejahtera

5.2. SASARAN POKOK KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2045

Sasaran pokok disusun untuk menggambarkan pencapaian misi pada akhir masa pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dari arah kebijakan memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai dalam empat periode per lima tahunan. Sasaran pokok dirumuskan berdasarkan kondisi awal pada tahun penyusunan dokumen jangka panjang dan menggambarkan target-target pada setiap akhir periode lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir dijabarkan seperti berikut ini.

5.2.1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing

Transformasi sosial yang inklusif dan berdaya saing menunjukkan sasaran pembangunan yang mengarah pada kualitas SDM, kualitas tenaga kerja, kondisi ketimpangan dan kondisi ekonomi masyarakat, serta kesejahteraan sosial. Sifat inklusif yang dijadikan sebagai penciri misi pembangunan ini menunjukkan bahwa perubahan yang akan dilakukan bukan menyasar kelompok atau wilayah tertentu saja di Kabupaten Rokan Hilir. Lingkup pembangunan yang akan dilaksanakan secara umum adalah mengarah kepada transformasi sosial dan transformasi ketahanan budaya. Sasaran pokok yang dapat disusun untuk mencapai transformasi sosial yang inklusif dan berdaya saing pada Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pembangunan SDM yang cerdas, produktif, dan kompetitif

Sumber Daya Manusia berhubungan langsung dengan tingkat intelektualitas dan produktivitas seseorang yang kemudian terakumulasi di dalam kelompok masyarakat. Peningkatan kualitas SDM dapat dilihat dari peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan keterampilan, dan bertambahnya wawasan atau pengetahuan. Penyediaan model pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan zaman akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Sasarannya ini akan tercapai jika cakupan pengembangan SDM di Kabupaten Rokan Hilir telah ditunjukkan dengan kontribusi positif dari masyarakat.

Kualitas SDM yang cerdas akan mencerminkan level kemampuan kognitif individu yang berkaitan dengan kecukupan literasi, kecakapan dasar, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan-keterampilan lain yang mendukung kecerdasan individu. Sasaran ini akan mengarahkan pencapaian dalam bentuk pemanfaatan pengetahuan yang ada. SDM Kabupaten Rokan Hilir diharapkan untuk bisa memiliki dan kemudian mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimilikinya secara produktif. Indikasi program pembangunan yang relevan dengan sasaran ini adalah seperti pelatihan pengembangan keterampilan teknis, pengembangan *entrepreneurship* dan mengarahkan kepada kemampuan di bidang industri pengolahan untuk kepentingan mendukung hilirisasi.

Dengan tersedianya SDM yang cerdas dan produktif, Kabupaten Rokan Hilir dapat menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat lokal maupun nasional. Seluruh proses ini perlu didekati dengan pemberian investasi yang diarahkan kepada pembangunan manusia yang unggul.

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memiliki kualitas hidup tinggi

Kondisi ekonomi masyarakat sangat berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang didapatkan. Kualitas kehidupan masyarakat juga berhubungan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi di sekitarnya. Dengan kata lain, tingginya pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berkorelasi positif dengan ketimpangan masyarakat. Oleh karena itu,

Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk memastikan ketercapaian kondisi ekonomi masyarakat yang berkualitas dengan melihat pada indikator ketimpangan kesejahteraan yang ada.

Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dapat menentukan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mencakup transportasi, energi, air bersih, serta akses pendidikan dan kesehatan perlu untuk didorong secara maksimal. Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada redistribusi sumber daya dan peluang ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, Kabupaten Rokan Hilir harus mempertimbangkan indikator ketimpangan kesejahteraan lain secara komprehensif, seperti pendidikan, kesehatan, akses layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Beberapa langkah-langkah yang dinilai strategis adalah investasi infrastruktur, penanganan ketimpangan, dan penggunaan indikator kesejahteraan yang komprehensif untuk mendukung visi terwujudnya kondisi ekonomi masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi.

5.2.2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Pengelolaan Potensi Lokal

Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasiskan potensi lokal menjadi poin kunci dalam perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hilir. Misi kesatu ini berkesesuaian dengan agenda transformasi ekonomi yang didasarkan pada potensi daerah (lokal) mengindikasikan adanya fokus strategis daerah untuk menggiring pertumbuhan ekonomi daerah ke arah yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan setiap langkah yang dibutuhkan, transformasi ekonomi harus mencerminkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga pembangunan ekonomi yang inklusif agar dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi. Pendekatan kreatif dalam transformasi ekonomi menonjolkan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan, memastikan keberlanjutan sektor ekonomi. Dengan demikian, narasi ini bukan sekadar pandangan ke depan, melainkan merupakan landasan strategis yang menggambarkan visi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk menciptakan ekonomi yang tidak hanya produktif dan berdaya saing namun juga berkelanjutan. Sasaran pokok yang dapat disusun untuk mencapai transformasi ekonomi berbasis potensi lokal pada Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan produktivitas ekonomi yang adaptif dan inklusif

Meningkatnya produktivitas ekonomi dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari sektor unggulan daerah. Produktivitas ekonomi menunjukkan bahwa antara pertumbuhan ekonomi secara umum perlu disasar melalui sektor unggulan di Rokan Hilir yang adaptif dan inklusif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai dengan terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, upaya peningkatan juga harus dilakukan pada PDRB per kapita untuk menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menjadikan sektor unggulan sebagai sasaran pokok pada misi transformasi ekonomi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilandasi dengan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Selain penjelasan di atas, indikator yang dapat digunakan adalah PDRB per kapita mengindikasikan keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus memiliki kesadaran bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita menjadi ukuran penting dalam menilai realitas kondisi ekonomi di tengah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Secara keseluruhan, sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilandaskan pada sektor unggulan melalui indikator peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan perhatian terhadap PDRB per kapita. Pemerintah Rokan Hilir perlu untuk secara konsisten menginternalisasi pemahaman yang bersifat dinamis ini. Harapannya di akhir pembangunan jangka panjang, Rokan Hilir dapat mengarahkan kebijakan ekonomi secara adaptif dan inklusif.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pembangunan yang merata

Infrastruktur pembangunan yang merata merupakan bagian dari pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Belanja infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan erat dengan percepatan dan pemastian terjadinya pelayanan publik dasar. Untuk dapat mengetahui kualitas *output* infrastruktur yang dibangun Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) akan dijadikan sebagai dasar. Semakin tinggi angka IKLI, maka dapat diartikan bahwa kualitas infrastruktur juga baik. Selain itu, indikator ini penting untuk menunjukkan harapan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan terkait infrastruktur pembangunan.

Transformasi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan akan diarahkan kepada pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang ditargetkan perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang prima. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mencapai kondisi paling optimal dalam persoalan infrastruktur dasar. Pembangunan yang mendukung misi sarana dan prasarana infrastruktur ini merujuk kepada

kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan berbasis kewilayahan dan mempertimbangkan pengembangan pembangunan perkotaan.

5.2.3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat. Tata kelola menjadi sektor yang harus diatur secara efektif, efisien, dan transparan sehingga akuntabilitas pemerintahan tercapai. Kabupaten Rokan Hilir mengupayakan tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan terhadap masyarakat dengan regulasi yang adaptif dan birokrasi yang bersih, khususnya dengan pemanfaatan teknologi. Sasaran pokok yang dapat disusun untuk mencapai transformasi tata kelola yang efektif dan efisien pada Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik melalui lembaga formal maupun informal. Dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Rokan Hilir, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan baiknya pengelolaan sumber daya secara efisien. Upaya untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan melalui tindakan dan regulasi yang independen dan adil, serta menjamin terjadinya interaksi antara para pemangku kepentingan dengan semangat transparansi, profesional, dan akuntabel.

Pembangunan yang direncanakan dalam lingkup transformasi Tata Kelola, transformasi supremasi hukum dan stabilitas, dan transformasi kesinambungan pembangunan akan diarahkan kepada penyusunan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif. Komponen yang mendukung kondisi ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan sistem merit ASN, efektivitas lembaga, pelayanan digital (SPBE), dan juga upaya penegakan regulasi. Selanjutnya kebijakan akan diakselerasi dengan target peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara signifikan. Arah pembangunan kemudian juga akan diamnatapkan dengan regulasi-regulasi yang diarahkan untuk mencapai kemandirian masyarakat sipil di Kabupaten

Rokan Hilir. Pada tahap akhir, transformasi tata kelola diharapkan telah terlaksana secara ideal dan didukung oleh kondisi masyarakat sipil yang partisipatif.

5.2.4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan ekologi merupakan model ekstensi dari ketahanan sosial budaya. Perbedaannya terletak pada upaya yang dilakukan yaitu bersifat lebih kepada pelestarian sumber daya alam dan mengurangi dampak buruk pembangunan fisik. Untuk dapat mewujudkan ketahanan ekologi, dibutuhkan kesepakatan dan keyakinan bahwa konservasi alam itu adalah yang paling utama untuk mendapatkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu sudut pandang bahwa keberlanjutan ekosistem, termasuk habitat flora dan fauna harus menjadi pendukung utama. Selain itu pengembangan sumber energi terbarukan dan alternatif juga akan menjadi perhatian dalam mewujudkan misi ini. Sasaran pokok untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pembangunan yang kondusif dan terjaga menuju masyarakat yang adil dan makmur

Terwujudnya pembangunan yang kondusif dan terjaga menuju masyarakat yang adil dan makmur memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, dengan fokus pada penciptaan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Pertama, penciptaan iklim investasi yang kondusif sangat penting, dengan memastikan stabilitas politik, keamanan hukum, dan kemudahan berbisnis. Ini melibatkan perbaikan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan penerapan kebijakan yang transparan serta adil.

Kedua, pemerataan manfaat pembangunan harus menjadi prioritas, dengan merancang kebijakan dan program yang secara aktif mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Hal ini mencakup pengalokasian sumber daya yang proporsional, dukungan untuk pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang tertinggal atau kurang berkembang. Ketiga, penegakan prinsip keadilan sosial dalam setiap tahap pembangunan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ini termasuk penerapan kebijakan yang melindungi hak-

hak pekerja, melawan diskriminasi, dan memastikan partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat terwujud secara kondusif, memastikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat diperhatikan secara adil, dan mendorong tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

5.2.5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Untuk dapat mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan, Kabupaten Rokan Hilir akan berfokus untuk mewujudkan transformasi sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan transformasi mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Upaya mewujudkan misi kedua ini, pembangunan akan dilaksanakan dengan menyasar peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur pembangunan secara merata. Sasaran pokok yang dapat disusun untuk mencapai sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan pada Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

Terwujudnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan dinamika sosial yang ada. Langkah pertama adalah pengintegrasian aspek sosial budaya dalam perencanaan pembangunan, dengan melakukan studi mendalam tentang karakteristik budaya, adat istiadat, dan struktur sosial masyarakat setempat. Ini memastikan bahwa proyek dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan ekonomi tetapi juga harmonis dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan sangat penting. Melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan khusus, dan memberikan masukan yang berharga, sehingga pembangunan menjadi lebih relevan dan diterima secara luas.

2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana

Kualitas lingkungan hidup ditentukan oleh bagaimana suatu daerah diarahkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan melakukan konservasi terhadap yang sudah mengalami kerusakan. Untuk mendukung ide pembangunan berkelanjutan, tawaran untuk menggunakan skema ekonomi hijau selalu menjadi prioritas. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup yang bersifat sangat rentan terhadap kerusakan membutuhkan konsistensi tinggi dan mitigasi yang tanggap. Ketahanan ekologi sebagai basis transformasi pembangunan kemudian memberikan pilihan-pilihan yang pada dasarnya membutuhkan langkah-langkah strategis yang sangat komprehensif untuk dicanangkan dan diimplementasikan.

Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan pengembangan ekonomi alternatif, disebabkan adanya perbedaan cara pikir yang cukup besar celahnya. Upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi satu-satunya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, menjaga ketahanan ekologi harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Rokan Hilir.

Beberapa pilihan yang dapat dihadirkan oleh tahapan ini memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi yang terkoordinasi untuk memastikan efektivitas dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Keterlibatan ide ketahanan energi, konservasi sumber air layak, dan juga kemandirian pangan adalah komponen pendukung yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya pemastian terjadinya kemandirian daerah dalam mengatur sumber-sumber energi dan ketersediaan pangan, maka kualitas lingkungan hidup yang dapat dirasakan menjadi jelas dan efektif.

Tabel V.2

Penyelarasan Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN	
				BASELINE 2025	TARGET 2045			
Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing	Kesehatan Untuk Semua	-Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan -Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal -Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan -Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,43	77,59	Meningkatnya pembangunan SDM yang cerdas, produktif, dan kompetitif		
			Kesehatan Ibu dan Anak:					
			Jumlah Kematian Ibu	15	1			
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5			
			Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	52	95			
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	91,5	98			

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		-Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan -Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan -Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan -Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan -Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting -Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat masyarakat -Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	(treatment success rate) (%)* c. Cakupan penemuan kasus HIV (treatment coverage) (%)* Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				
				60	95		
				98	99,5		
		-Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra	Hasil pembelajaran				

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) -Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah -Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi -Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah -Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				
· Literasi Membaca			27,75	54,55			
· Numerasi			24,04	63,84			
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			44,54	75,90			
· Literasi Membaca			60,35	84,15			
· Numerasi			24,55	74,55			
Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)			8,88	12,50			
Harapan Lama Sekolah (tahun)			13,19	15,34			
Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang			9,02	12,96			

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<ul style="list-style-type: none"> -Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) -Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik -Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan -Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan -Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan -Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 	Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*				

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> -Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan -Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat -Perluasan penyediaan bantuan sosial -Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat - Penguatan Rehabilitasi Sosial dalam rangka pelayanan dan pengembalian fungsi sosial khususnya kelompok lanjut usia dan disabilitas - Perluasan kesempatan kerja khususnya bagi 	Tingkat kemiskinan	6,7-7	0,04-0,79	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memiliki kualitas hidup tinggi	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,02	98		
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	29	60		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		penyandang disabilitas di sektor formal					
Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Pengelolaan Potensi Lokal	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. - Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi 	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,08	28,69-28,84	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang adaptif dan inklusif	
			Pengembangan Pariwisata:				
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,26	0,46		
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	0,45	13		
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,97	5,25		
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:				
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	12,66	14,7		
			b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan	2,15	3,65		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Menengah pada Level Kabupaten (%)				
			c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	9,6	11,5		
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,34	3,18		
			e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	4,47	5,91		
			Tingkat penguasaan IPTEK				
			Indeks Inovasi Daerah	39,94	88,82		
			Indeks kapabilitas inovasi	1,47	4,60		
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,53	1,93		
			b. Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	38,33	76,33		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,87	56,87		
	Penerapan Ekonomi Hijau	-Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan dan daya saing produk pertanian dan perikanan -Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	58,53	78,83		
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	-Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan -Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*	8,27	5,13		
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	11,44	18,67		
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	68,9	130,79		
	Transformasi Digital	-Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan internet	81,00	98,5		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<p>teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan, utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi,</p>					

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		serta kepemimpinan digital -Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan					
	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	-Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pembangunan yang merata	
		-Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi(%)	9,3	10,21-10,25		
		-Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,00	95		
		massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Persentase Desa Mandiri (%)	7,55	19,44		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETE RANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<p>-Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb)</p> <p>-Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</p> <p>-Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat,</p>					

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<p>guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyekproyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Percepatan pelaksanaan reforma agraria. '-Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim -Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah -Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten. -Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional '-Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance 					

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<p>-Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko</p> <p>-Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan</p> <p>--Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi</p>					

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan					
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Teknologi	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	<ul style="list-style-type: none"> -Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah -Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan -Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE serta peningkatan respon terhadap laporan masyarakat -Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah -Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan 	Indeks Reformasi Birokrasi			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	
			Indeks Reformasi Hukum*	60,00	90,00		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	4,20		
			Indeks Pelayanan Publik	3,42	4,35		
			Indeks Integritas Nasional	73,02	88,00		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<p>peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.</p> <p>-Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p>					
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial	<p>-Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat</p> <p>-Penguatan integritas partai politik</p> <p>-Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas</p>	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,8	82,18	Terwujudnya pembangunan yang kondusif dan terjaga menuju masyarakat yang adil dan makmur	
			Pembangunan Hukum				
			Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	43	95		
			Persentase capaian	65	83		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETE RANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
			pelaksanaan Aksi HAM				
	Stabilitas Ekonomi Makro	-Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. -Penguatan pengendalian inflasi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,13		
			Tingkat Inflasi (%)	2,3-2,5	2±1		
	Ketangguhan Kemitraan dan Daya Saing Daerah	-Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Indeks Daya Saing Daerah	2,92	4,36		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		-pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas -Perencanaan pembangunan yang inklusif					
Mewujudkan sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	-Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila -Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan -Penguatan Pusat Kebudayaan Melayu	Persentase Benda Cagar Budaya/ situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	35	100	Terwujudnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat	
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	-Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal -Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan	Indeks Ketimpangan Gender	0,48-0,47	0,27-0,07		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		<p>perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <p>-Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <p>-Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan</p> <p>-Penguatan SDM</p> <p>Perlindungan Masyarakat</p>					
	Lingkungan Hidup Berkualitas	-Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	<p>Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Indeks kualitas lingkungan hidup</p> <p>Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)</p>	69,7	79	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana	
				0,00	45,00		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		-Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami -Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy -Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	17,05 13,02	90,00 90,00		
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	-pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan -Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Ketahanan energi, air, dan pangan Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	 593,72 11,36 0,10	 610,00 0,35 1,00		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		-Peningkatan produktivitas pertanian dan peikanan untuk pemenuhan kebutuhan pangan terhadap produksi lokal -Peningkatan ketersediaan pangan strategis daerah	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	10,17	100,00		
	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	-Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	Indeks Risiko Bencana	103,7	87,77 - 74,65		

Tabel V.3

Matriks Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Pemenuhan modal dasar kesejahteraan masyarakat	Percepatan pembangunan	Ekspansi dan pemantapan pembangunan	Rokan Hilir Maju dan Sejahtera							
ARAH KEBIJAKAN												
ROKAN HILIR 2045: Negeri Seribu Kubah yang Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan)	Percepatan pembangunan SDM yang produktif dan kompetitif)	Penguatan daya saing SDM yang kompetitif dan berorientasi pada pembangunan SDM unggul yang berbudaya	SDM Rokan Hilir yang Unggul	Meningkatnya pembangunan SDM yang cerdas, produktif, dan kompetitif	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,43	72,66	74,20	75,74	77,59
							Kesehatan Ibu dan Anak:					
							Jumlah Kematian Ibu	15	9	5	3	1
							Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	11,80	9,67	7,55	5
							Penanganan Tuberkulosis:					
							a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	52	60,60	71,35	82,10	95
							b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	91,50	92,80	94,43	96,05	98
							c. Cakupan penemuan kasus HIV (treatment coverage) (%)*	60	67	76	85	95
							Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	98,30	98,68	99,05	99,5
							Hasil pembelajaran					
							Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
							· Literasi Membaca	27,75	34,45	41,15	47,85	54,55
							· Numerasi	24,04	33,99	43,94	53,89	63,84
							Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
· Literasi Membaca	60,35	66,30	72,25	78,20	84,15							
· Numerasi	24,55	37,05	45,55	62,05	74,55							
Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)	8,88	9,61	10,51	11,41	12,50							

VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Pemenuhan modal dasar kesejahteraan masyarakat	Percepatan pembangunan	Ekspansi dan pemertanian pembangunan	Rokan Hilir Maju dan Sejahtera							
		ARAH KEBIJAKAN										
						Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,19	13,62	14,16	14,69	15,34	
						Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,02	9,75	10,66	11,57	12,96	
		Pemenuhan perlindungan sosial yang berkualitas dan adaptif	Percepatan pengentasan kemiskinan berlandaskan kehidupan layak dan berkecukupan	Penguatan masyarakat untuk hidup layak dan berkecukupan	Perwujudan masyarakat yang makmur, sejahtera dan merata	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memiliki kualitas hidup tinggi	Tingkat kemiskinan	6,7 - 7,0	4,7-5,4	3,72-4,05	2,07-2,36	0,04-0,79
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,02	54,82	68,31	81,81	98	
						Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	29	35,2	42,95	50,7	60	
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Pengelolaan Potensi Lokal	Pemenuhan transformasi ekonomi pascasektor produktif dan unggulan	Penguatan transformasi ekonomi yang tumbuh dan inklusif	Ekspansi perekonomian dan industri berbasis sektor unggulan ekonomi kerakyatan	Perwujudan ekonomi sirkular Rokan Hilir	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang adaptif dan inklusif	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,08	22,42-22,47	24,39-24,46	26,34-26,45	28,69-28,84
						Pengembangan Pariwisata:						
						Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,26	0,30	0,35	0,40	0,46	
						Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	0,45	2,96	6,10	9,24	13	
						Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,97	1,83	2,90	3,97	5,25	
						Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
						a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	12,66	13,07	13,58	14,09	14,7	
						b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	2,15	2,45	2,83	3,20	3,65	
						c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	9,6	10	10,4	10,8	11,5	
						d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,34	0,91	1,62	2,33	3,18	
						e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	4,47	4,73	5,07	5,43	5,91	
						Tingkat penguasaan IPTEK						
						Indeks Inovasi Daerah	39,94	46,86	57,23	69,89	88,82	
						Indeks kapabilitas inovasi	1,47	1,84	2,45	3,26	4,60	
						Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,53	3,21	2,81	2,41	1,93	
						Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	38,33	45,93	55,43	64,93	76,33	

VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Pemenuhan modal dasar kesejahteraan masyarakat	Percepatan pembangunan	Eksansi dan pemantapan pembangunan	Rokan Hilir Maju dan Sejahtera							
		ARAH KEBIJAKAN										
		lingkungan dan tanggap bencana	lingkungan dan tanggap bencana	lingkungan dan tanggap bencana	lingkungan dan tanggap bencana	yang adil dan makmur	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	43	53,4	66,4	79,4	95
							Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	65	68,6	73,1	77,6	83
							Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,17	0,16	0,15	0,13
							Tingkat Inflasi (%)	2,3 - 2,5	2±1	2±1	2±1	2±1
							Indeks Daya Saing Daerah	2,85	3,17	3,50	3,87	4,36
	Mewujudkan sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pemenuhan aksesibilitas pembangunan, kawasan perekonomian yang ramah lingkungan berbasis kewilayahan	Percepatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, dan infrastruktur pelayanan publik yang ramah lingkungan	Penguatan dan konsistensi pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan	Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan yang prima menuju Rokan Hilir Maju dan Sejahtera	Terwujudnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat	Persentase Benda Cagar Budaya/ situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	35	50	75	90	100
							Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,48-0,47	0,44-0,39	0,39-0,29	0,33-0,19	0,27-0,07
						Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana	Kualitas Lingkungan Hidup					
							Indeks kualitas lingkungan hidup	69,7	70,38	71,23	72,08	73,10
							Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	0,00	4,00	10,00	20,00	45,00
							Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,05	31,64	49,88	68,12	90
							- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	13,02	28,42	47,66	66,91	90
							Ketahanan energi, air, dan pangan					
							Ketahanan Energi					
							- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	593,72	596,98	601,05	605,12	610,00
							Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	11,36	9,16	6,41	3,65	0,35
							Ketahanan Air					
							- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,1	0,4	0,6	0,8	1
							- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)	10,17	25	50	75	100
							Indeks Risiko Bencana (IRB)*	103,7	99,20	93,58	87,96	87,77 - 74,65

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 menjadi instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Riau dan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Riau sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD Kabupaten harus mengacu kepada RPJPN agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan menjamin keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan kebijakan RPJPN.

Dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon wakil Bupati periode tahun 2025 sampai dengan 2030 dalam merumuskan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan.

RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Kepala daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah.
2. Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat dipahami secara mendalam serta menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran

dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

4. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Riau, serta melakukan penyerasian ke dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
5. Dalam rangka mengimplementasikan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025- 2045, Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
6. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045.
7. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 melalui Bappeda Kabupaten Rokan Hilir. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Hal yang dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani.
8. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyusun Manajemen Resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian indikator visi maupun indikator utama pembangunan.
9. Agar pencapaian dan pemenuhan target indikator sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan Daerah dapat Optimal, sangat diperlukan adanya Intervensi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap pemerintah daerah.

Manajemen risiko dalam pembangunan jangka panjang merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons berbagai potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian, baik yang berasal dari faktor ekonomi, lingkungan, sosial, maupun politik, sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dengan menerapkan manajemen risiko secara proaktif, pengambil

kebijakan dan pelaksana pembangunan dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, investasi tetap aman, dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2045, perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan antar periode serta selaras dengan kerangka logis RPJPN Tahun 2025–2045, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk mencapai hal tersebut, percepatan pembangunan di berbagai sektor menjadi sangat penting, sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang terintegrasi guna mengantisipasi dan memitigasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian target pembangunan jangka panjang. Penyelenggaraan manajemen risiko ini juga harus memberikan kepastian hukum, agar proses integrasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan terukur. Adapun identifikasi risiko terhadap target yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Target indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2045 perlu disesuaikan secara realistis dengan memperhatikan kondisi aktual dan proyeksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang relevan dengan target pada tahun 2025 sebesar 2,83% dan target tahun 2045 sebesar 3,49%.
2. Target indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dalam RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2045 perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kapasitas infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan daerah dengan target sebesar 10,17% pada tahun 2025 dan 100% pada tahun 2045. Penyesuaian target akses air minum perpipaan perlu dilakukan secara realistis dan bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan penyediaan layanan dasar, penguatan kelembagaan, serta dukungan pendanaan dari berbagai sumber untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum di wilayah perkotaan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Target indikator Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2045, yaitu sebesar 58,53% pada tahun 2025 dan 78,83% pada tahun 2045.
4. Target indikator Indeks Risiko Bencana dalam RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2045 perlu ditetapkan secara proporsional dan selaras dengan kondisi daerah serta kebijakan nasional dalam pengurangan risiko bencana dengan target sebesar 92,25 pada tahun 2025 dan 87,77–74,65 pada tahun 2045 yang menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap berbagai potensi bencana.

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RKPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 298

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyusun RPJMD Teknokratik.

Tahun 2044 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hilir sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM